

PENDIDIKAN DI INDONESIA 1900-1940



BUKU II

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1977

370-198
PEN

hasia

PENDIDIKAN DI INDONESIA 1900 - 1940

*Kebijaksanaan Pendidikan
di Hindia Belanda
1900 ~ 1940*

PERPUSKANTARAN DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
NO. INDUK	505
TGL.	26 Mei 1978

BUKU II

Judul asli : "Het Onderwijsbeleid in Nederland-Indië, 1900-1940

Karya : Dr. S.L. van der Wal.

KATA PENGANTAR

Buku yang berisi laporan tentang kebijaksanaan pendidikan sebelum masa kemerdekaan sangat langka diperoleh di negara kita. Laporan seperti itu patut diteliti untuk dijadikan bahan pemikiran mengenai keadaan pendidikan kita baik masa kini maupun di masa yang akan datang.

Untuk tujuan itu pilihan jatuh kepada buku berjudul "Het Onderwijs-beleid In Nederlands-Indie, 1900-1940" (= Kebijakan Pendidikan di Hindia-Belanda 1900-1940) karya Dr. S.L.van der Wal, seorang guru besar sejarah Indonesia (khususnya sejak 1900 hingga kini) pada "Rijks-universiteit Utrecht" di negeri Belanda. Buku tersebut bukanlah sekedar buku bacaan, tetapi suatu publikasi sumber yang memuat dokumen-dokumen mengenai surat-menyurat antara tokoh-tokoh puncak di negeri Belanda dan Hindia-Belanda, semuanya dalam bidang kebijaksanaan pendidikan. Oleh karena itu sistimatikanya tidak menurut materi mengenai sesuatu pokok persoalan, tetapi disusun sesuai dengan urutan peristiwa secara kronologis. Karena terbatasnya waktu yang tersedia maka buku ini tidak diterjemahkan secara menyeluruh, tetapi disadur sedemikian rupa sehingga inti persoalan tidak terganggu dan pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai pemikiran, keputusan serta langkah-langkah yang ditempuh oleh tokoh-tokoh dan pejabat-pejabat Belanda dan Hindia-Belanda pada jamannya.

Sudah barang tentu saduran ini masih banyak terikat kepada tata-bahasa dan susunan kalimat bahasa aselinya, sehingga kadang-kadang terasa agak janggal bila dilihat dari kacamata bahasa Indonesia. Hal ini sulit dihindarkan karena dikhawatirkan bahwa saduran bebas akan dapat mengaburkan makna daripada isi yang sebenarnya.

Untuk memperoleh gambaran mengenai hierarchie dan urutan-urutan pertanggung-jawab dalam sistim ketata-negaraan dan pemerintahan di Hindia-Belanda serta sistim persekolahan pada jaman itu dilampirkan bagan dan penjelasan seperlunya agar pembaca dapat mengikuti saduran ini dengan saksama.

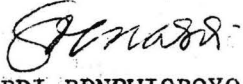
Saduran ini diterbitkan dalam dua buku. Buku I berisi dokumentasi surat-menyurat yang berlangsung antara tahun 1900 dan 1913/1914. Dokumentasi tersebut antara lain memuat materi mengenai pendidikan pertanian, teknik, sekolah-sekolah untuk anak-anak gadis Bumiputera, dan Cina. Diantaranya yang sangat menarik adalah bahwa orang sudah mulai mengadakan eksperimen dan penelitian mengenai kebutuhan yang mendesak akan sekolah dasar (desa) di Indonesia sejak 70-80 tahun yang lalu, yang hingga kini masih merupakan masalah yang hangat. Buku II meliputi dokumentasi antara tahun 1913/1914 hingga tahun 1940. Buku II ini antara lain membahas mengenai pendidikan tinggi, pendidikan guru, sekolah peralihan ("schakel-school"), perpustakaan rakyat dan bahkan mengenai organisasi pemuda yang diliputi oleh gagasan-gagasan kebangsaan yang sangat dikhawatirkan oleh Pemerintah Belanda pada waktu itu.

Dengan selesainya penyaduran buku tersebut di atas, sudah pada tempatnya kami menyampaikan rasa terima kasih kepada para penyadur yaitu Sdr. Sumarsono Mestoko dan Achmad Dasuki dari IKIP Bandung.

Mudah-mudahan buku yang diterbitkan untuk lingkungan terbatas ini dapat merupakan sumbangan yang berarti, khususnya bagi para "penyusun kebijaksanaan" dan "pengambil keputusan" dalam bidang pendidikan, guna menentukan langkah di masa depan. Selain itu, kami masih mengharapkan saran-saran untuk perbaikan penerbitan kami selanjutnya.

JAKARTA, DESEMBER 1977

Pjs. Kepala Pusat Pengolahan Data,
Statistik dan Konsepsi,


SOENARDI RDNOWISROYO

NIP. 130427530

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bentuk dan Susunan Ketatanegaraan dan Tata-Pemerintahan di Negeri Belanda dan Hindia-Belanda (1900-1940)	v
Organigram Ketatanegaraan dan Tata-Pemerintahan di Negeri Belanda dan Hindia-Belanda (1900-1940)	viii
Pendidikan Tinggi	1
Pendidikan Bagi Orang-orang Cina - Sekolah Pendidikan Guru Cina (HCK)	12
Pendidikan Bagi Gadis-gadis Bumiputera - Pendidikan Guru- guru Wanita Bumiputera	20
Sekolah Menengah Hindia Belanda (Indische Middelbare School)	33
Perluasan Pendidikan Rendah Bumiputera - Dan Pendidikan Rendah Bumiputera (HIS) - Desentralisasi Pendidikan Rendah Bumiputera	49
Mempersamakan Bantuan Keuangan kepada Sekolah Swasta dan Negeri	54
Sekolah Peralihan (Schakelschool)	60
Pengawasan (Supervisi) Pemerintah atas Sekolah Tidak Ber- bantuan (Tidak Bersubsidi)	61
Penghematan Dalam Bidang Pendidikan Dan Sarana Masyarakat Pengawasan (Supervisi) Pemerintah atas Sekolah Tidak Ber- bantuan (Tidak Bersubsidi)	70
Pendidikan Untuk Rakyat - Pendidikan Untuk Gadis-gadis Bu- miputera	76
Kepustakaan Rakyat (Volks Lectuur)	90
Penelitian Tentang Kebutuhan Masyarakat akan Pendidikan Dasar Dengan Bahasa Pengantar Belanda Untuk Orang Bumi- putera	95

Pendidikan Untuk Penduduk Cina - Bahasa Melayu dan Cina di HCK (Hollandsch Chineesche Kweekschool)	99
Pendidikan Tinggi - Fakultas Sastra	105
Nasionalisasi Pendidikan Bumiputera Belanda (Hollands-Inlands Onderwijs)	115
Sekolah dan Organisasi Pemuda Bumiputera	124
Pengawasan (Supervisi) Pemerintah terhadap Sekolah Swasta Ti- dak Berbantuan (Tidak Bersubsidi)	127
Bahasa Melayu di HIS (Hollands-Inlandse School)	132
Penataan Kembali Pendidikan Dasar - Desentralisasi - Pendidik- an Rakyat	147
Pengawasan (Supervisi) Pemerintah atas Sekolah Swasta Tidak Berbantuan (Tidak Bersubsidi)	160
Penghematan di Bidang Pendidikan dan Dewan Rakyat	190
Desentralisasi Pendidikan Rakyat	198
Ikhtisar mengenai kebijaksanaan Pendidikan Dalam Hubungannya Dengan Penduduk Bumiputera, 1929-1938	202
Pendidikan Tinggi - Fakultas Sastra	248
Dasar-dasar Kebijaksanaan Pendidikan	263
Perluasan Sekolah Bumiputera - Rencana Penerobosan (Doorbrekingsplan)	298

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Sistim Persekolahan Jaman Hindia-Belanda . . .	311
Lampiran II : Daftar Menteri Urusan Daerah Jajahan, 1900-1940	312
Daftar Gubernur Jenderal Hindia Belanda, 1900-1940	313
Daftar Ketua Dewan Hindia-Belanda, 1900-1940 .	313
Lampiran III: Daftar Direktur Pendidikan, Agama (dan Kejuruan) 1900-1940	314

BENTUK DAN SUSUNAN KETATANEGARAAN DAN TATA PEMERINTAHAN

DI NEGERI BELANDA DAN HINDIA BELANDA

(1900 - 1940)

I. Negeri Belanda

Karena Hindia-Belanda merupakan bagian dari Kerajaan Belanda, maka dengan sendirinya apabila kita hendak membicarakan Hindia-Belanda dalam kurun waktu antara 1900-1940 tidak boleh tidak negeri Belanda sebagai pusat pemerintahan harus disinggung juga.

Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan konstitusional (monarki konstitusional) artinya suatu negara yang dikepalai oleh seorang Raja atau Ratu yang kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi. Raja atau Ratu adalah kepala negara sedangkan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh para menteri yang berjumlah sepuluh orang dan diketuai oleh perdana menteri. Tiap menteri termasuk perdana menteri memimpin satu departemen, diantaranya ada departemen (urusan) daerah jajahan (departement van Koloniën).

Pemerintah dalam hal ini para menteri yang duduk dalam satu kabinet merupakan pencerminan dari suara terbanyak dalam Dewan Perwakilan Rakyat (Staten-Generaal). Dengan kata lain para anggota kabinet itu diangkat dan diberhentikan oleh Raja (Ratu) tetapi bertanggung jawab kepada DPR mengenai jalannya pemerintahan.

Lembaga DPR menggunakan sistem bikameral, artinya terdapat dua badan yaitu Eerste Kamer (majelis tinggi) yang bertugas meneliti dan mengawasi majelis rendah, disamping mempunyai kekuasaan perundang-undangan, dan Tweede Kamer (majelis rendah) yang mengontrol jalannya pemerintahan dan memegang kekuasaan utama dalam bidang perundang-undangan.

Daerah-daerah jajahan Belanda yaitu Hindia-Belanda, Suriname, dan Curaçao diatur dan diawasi oleh Menteri (urusan) Daerah Jajahan. Oleh karena itu Wali Negara dalam hal ini Gubernur Jenderal Hindia-Belanda bertanggung jawab kepada Raja (Ratu) melalui Menteri Jajahan

mengenai segala sesuatunya yang berhubungan dengan Hindia-Belanda. Seperti telah dikemukakan pertanggungjawaban Menteri yang sebenarnya adalah kepada DPR.

II. Hindia-Belanda

Pemerintahan di Indonesia dikepalai oleh seorang wali negara (land-voogd) yang berpangkat Gubernur Jenderal. Dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari dibantu oleh delapan kepala departemen (direktur) beserta staf dan pembantu-pembantunya.

Departemen-departemen tersebut adalah:

1. Departemen Kehakiman
2. Departemen Keuangan
3. Departemen Pemerintahan Dalam Negeri
4. Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan *)
5. Departemen Urusan Ekonomi **)
6. Departemen Perhubungan dan Pengairan ***)
7. Departemen Peperangan
8. Departemen Marine (Angkatan Laut)

Gubernur Jenderal diangkat untuk waktu yang tidak terbatas, tetapi menurut kebiasaan yang berlaku tenggang waktu jabatannya adalah 5 tahun. Dalam melakukan tugasnya ia dibantu oleh satu lembaga yaitu Sekretariat Umum (Algemene Secretarie) dengan beberapa Sekretaris negara (Gouvernements-Secretarissen). Mereka ini menjalankan tugas pembantuan yang bersifat teknis untuk kelancaran pekerjaan Gubernur Jenderal. Tetapi sejak tahun 1918 lembaga ini dan para sekretarisnya mulai kurang berperan dalam pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu

*) Pada tahun 1912 Departemen P.A.K. diganti menjadi Departemen Pendidikan dan Agama (Departement van Onderwijs en Eredienst).

***) Urusan Ekonomi meliputi pertanian, perikanan, kedokteran hewan, kerajinan, kehutanan, perusahaan negara, perkebunan (taman) Negara Bogor, perdagangan, statistik, percetakan negara, lembaga tera.

****) Perhubungan dan pengairan meliputi PJKA, PTT, Bank Tabungan Pos, PUL, pelabuhan, penerbangan, irigasi, jembatan dan jalan, pengawasan jalan, gedung-gedung negara dan pertambangan

ada lembaga lain yang bernama Dewan Hindia (Raad van Indië) yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur Jenderal dan mempunyai "wewenang pemerintahan serta" (medebesturende bevoegdheid).

Sebagai lembaga yang mempunyai fungsi perundang-undangan dan kontrol adalah Dewan Rakyat (Volksraad) yang dianggap "mewakili rakyat" Hindia-Belanda yang anggotanya semula mayoritas orang Belanda, tetapi kemudian berangsur-angsur diduduki oleh orang-orang Bumiputera. Sebagian besar anggotanya dipilih dan sebagian diangkat.

Pejabat di bawah Gubernur Jenderal adalah Gubernur, Residen, Bupati, dan selanjutnya. Mulai dari Bupati ke bawah dijabat oleh tokoh-tokoh dan pemuka Bumiputera. Tetapi Bupati selalu didampingi oleh seorang pejabat Eropa (Belanda) yaitu di pulau Jawa dan Madura Asisten Residen, dan di daerah seberang seorang Kontrolir. Di samping itu terdapat pula pemuka Bumiputera yang berstatus Kepala Daerah Swapraja (Zelf-bestuurder) besar dan kecil ada yang setingkat Residen seperti Yogyakarta dan Surakarta dan ada pula setingkat Kabupaten atau lebih rendah, bahkan setingkat dengan desa. Kalau jabatan Bupati, Wedono, dsb. diangkat oleh Pemerintah Hindia-Belanda, maka kepala swapraja dijabat secara turun-temurun.

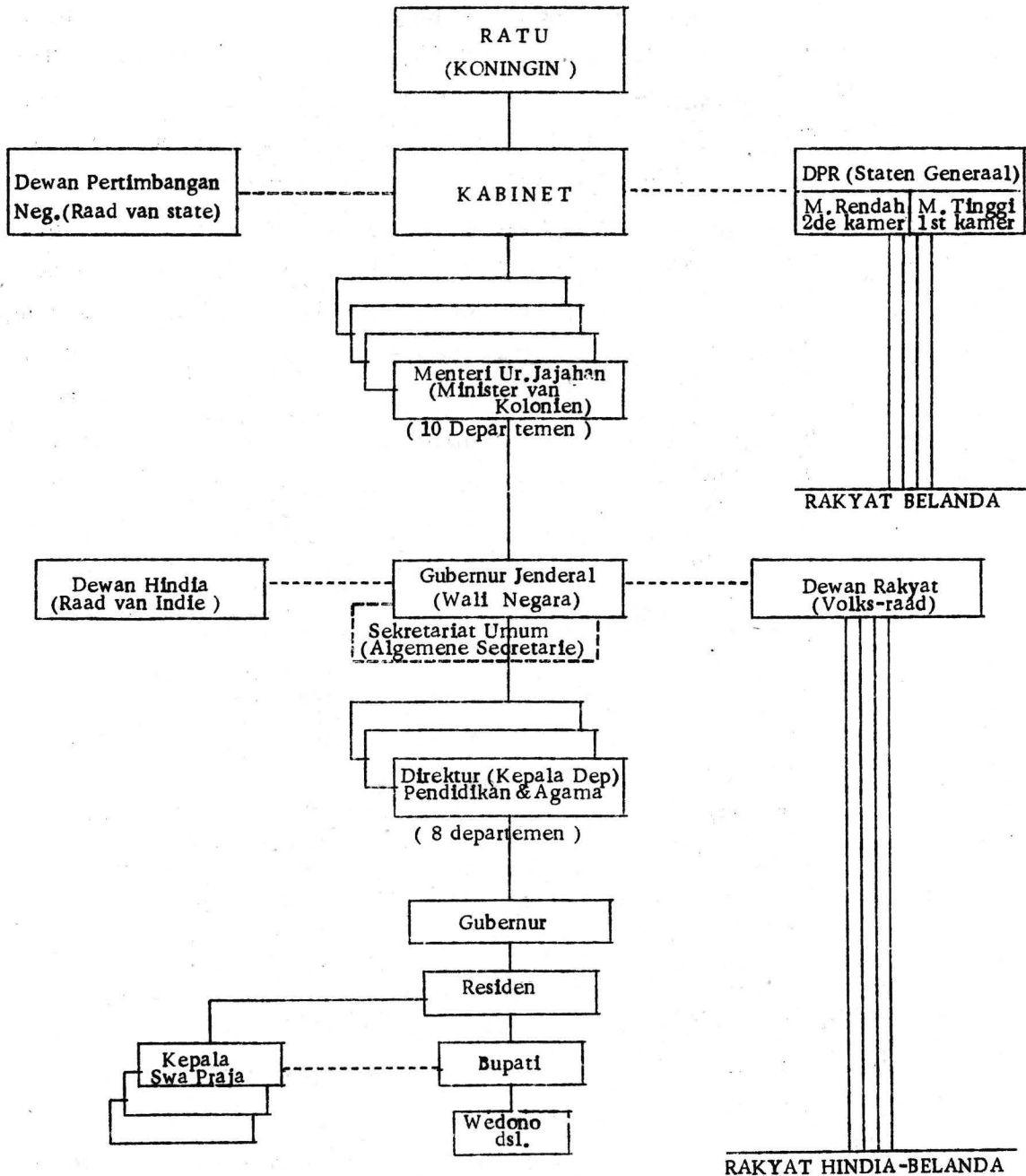
Dalam hubungan itu maka dalam buku ini terdapat surat-menyurat mengenai pendidikan di Hindia-Belanda antara pejabat-pejabat yang relevan dengan masalah tersebut. Khususnya mengenai pendidikan dasar, Departemen yang banyak terlibat selain Departemen Pendidikan, Agama, (dan Kerajinan) ialah Departemen Pemerintahan Dalam Negeri. Pejabat-pejabat yang banyak terlibat dalam surat-menyurat dalam buku ini antara lain Asisten Residen, Gubernur, Gubernur Jenderal, Direktur P.A.K., Direktur P.D.N., Sekretaris (Kelas I), Menteri Jajahan, dll. Selain itu lembaga-lembaga seperti Dewan Hindia, Dewan Rakyat, DPR (Staten Generaal), dsb banyak pula disebut-sebut.

Dengan penguraian kami yang sekedarnya ini kami harapkan para pembaca dapat memperoleh gambaran tentang susunan dan hirarki pemerintahan Hindia-Belanda pada waktu itu.

ORGANIGRAM KETATANEGARAAN DAN TATA-PEMERINTAHAN

DI NEGERI BELANDA DAN HINDIA-BELANDA

(1900-1940)



PENDIDIKAN TINGGI

65. Surat Direktur Pekerjaan Umum (J. Homan van der Heide) kepada Gubernur Jenderal (Idenburg), tanggal 27 Januari 1913 nomor 1606/D

Memenuhi perintah dalam surat Gubernur Jenderal tanggal 26 September 1913 nomor 26596 mengenai usul dari Perkumpulan Universitas Hindia-Belanda untuk mendirikan sebuah Sekolah Teknik Tinggi (Technische Hooge School) di Betawi, Direktur Pekerjaan Umum mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Mengingat ke arah mana kemajuan Hindia Belanda bergerak, maka pada waktunya pendidikan tinggi akan masuk ke sini dan pertama-tama dalam bentuk pendidikan tinggi teknik, medis, dan juridis-administratif. Apakah sekarang sudah waktunya untuk mendirikan sekolah teknik tinggi di sini?

Dikemukakan, bahwa sekolah teknik tinggi, jika didirikan, harus memenuhi syarat sedemikian rupa, sehingga mutunya kira-kira sama tingginya dengan sekolah teknik tinggi yang ada di negeri Belanda, Jerman, Denmark, dan Jepang, sehingga mereka yang diluluskan dari Sekolah Teknik Tinggi Hindia-Belanda dalam dunia teknik internasional dapat dianggap sebagai Insinyur penuh dalam arti kata Eropa kontinental dan bukan sebagai "Engineer" dalam arti kata Inggris-Amerika. Sangat menyetujui, untuk mendirikan sebuah "sekolah tinggi dalam nama", karena akibat dan kerugian dari "sekolah tinggi dalam nama" yang tidak memenuhi syarat-syarat mutu yang ditentukan, pertama-tama akan menimpa bekas murid-muridnya, meskipun diantaranya ada beberapa yang sangat baik. Keseluruhannya mereka dalam beberapa hal mengalami akibat-akibat dari kekurangan-kekurangan lembaga pendidikan yang mendidik mereka.

Terutama di tanah jajahan seperti Hindia-Belanda, akan menumbuhkan antagonisme (pertentangan) antara para terpelajar kolonial, yang karena pendidikannya dipandang kurang berharga, dan para terpelajar yang dididik di negeri Belanda. Antagonisme demikian, jika

berkembang dalam kelas yang memimpin (golongan atas), akan dapat berbahaya, karena sebagai akibatnya dalam waktu-waktu krisis akhirnya seluruh mesin pemerintahan dapat dilumpuhkan.

Tuntutan pertama bagi Sekolah Teknik Tinggi di sini ialah harus dapat dipandang sebagai "bermutu penuh". Kemudian ada beberapa persoalan pokok yang perlu mendapat penyelesaian seperti:

1. Kebutuhan tenaga kerja teknis yang berpendidikan tinggi untuk saat sekarang dan untuk masa depan.
2. Memperoleh murid-murid yang dipersiapkan dengan cukup.
3. Memperoleh tenaga-tenaga pengajar yang cakap.
4. Penyesuaian Betawi (Weltevreden) untuk pendirian lembaga-lembaga pendidikan tinggi.
5. Biaya yang berhubungan dengan pendirian Sekolah Teknik Tinggi dan biaya lainnya, yang dalam usul Perkumpulan Universitas Hindia Belanda tidak ada atau tidak cukup penjelasannya.

(Berdasarkan data-data mengenai 5 persoalan pokok di atas, maka disusunlah Nota mengenai rencana dari Perkumpulan Universitas Hindia Belanda. Dalam nota ini tidak dapat disetujui pendirian sekolah teknik tinggi. Pengurus Besar dari Perkumpulan Universitas Hindia Belanda tidak dapat menyangkal argumen yang dikemukakan dalam Nota tersebut). Tidak dapat dianjurkan untuk menyediakan tiap tahun uang sebanyak setengah juta gulden, meskipun Perkumpulan Universitas Hindia Belanda sanggup mengeluarkan biaya untuk pembangunan gedung dan pengaturan pertama kira-kira sebanyak satu juta gulden.

Pendirian sekolah teknik tinggi baru akan dapat dipertimbangkan, segera sesudah Pendidikan Menengah meluas juga di kalangan orang-orang Bumiputera dan Cina Peranakan dengan penyebaran yang sedemikian, sehingga tiap tahun dapat diharapkan beberapa ratus tamatan H.B.S.5 tahun, karena dengan demikian akan baru dapat diharapkan tiap tahun lima puluhan pendaftar baru untuk sekolah teknik tinggi.

Perluasan pendidikan menengah, terutama dalam arti bahwa lebih banyak Bumiputera dan Cina Peranakan dapat ikut menikmati, merupakan satu-satunya jalan yang dapat menuju ke pembukaan sekolah teknik tinggi.

66. Surat Direktur Pendidikan dan Agama (G.A.J. Hazeu) kepada Gubernur Jenderal (Idenburg) tanggal 27 Nopember 1914 nomor 23814

Dengan surat Sekretaris Pemerintah Kelas I tanggal 4 Mei 1910 nomor 985 kepada Direktur Pendidikan dan Agama lama (M.S. Koster), disampaikan satu eksemplar laporan rapat ^{umum} Perhimpunan Hindia Belanda di den Haag pada tanggal 1 Pebruari 1910 dan diharap menghubungi dan mohon pendapat dari Penasehat Urusan Bumiputera, dan kemudian menyampaikan pendapatnya tentang pikiran-pikiran dari C.Th. van Deventer tentang pendidikan tinggi bagi Hindia Belanda yang dikemukakan dalam rapat umum tersebut.

Yang menjabat Penasehat Urusan Bumiputera pada waktu itu Dr. Hazeu sendiri. Karena pemikiran tersebut mengenai persoalan yang sangat penting dan penuh "duri" dari politik pendidikan di Hindia Belanda, sebagian juga di negeri Belanda, maka pada waktu itu ia merasa belum cukup mampu untuk memberikan nasehat yang cukup beralasan. Segera sesudah pengangkatannya sebagai Direktur Pendidikan dan Agama, maka Dr. Rinkes - Ajun Penasehat Urusan Bumiputera atas nama Dr. Hazeu telah memenuhi perintah Gubernur Jenderal.

Dalam suratnya kepada Direktur Pendidikan dan Agama tanggal 19 Pebruari 1912 nomor 37, Dr. Rinkes hanya mengemukakan persetujuannya dengan pikiran Mr. Van Deventer pada umumnya, tanpa memberikan pandangan secara terperinci dan teliti.

Dr. Hazeu, selaku Direktur Pendidikan dan Agama, akan memberikan nasehat-nasehat lebih lanjut, segera sesudah ia dapat menyusun pendapatnya yang mantap mengenai masalah tersebut.

Dalam usul-usul dan nasehat yang pernah diajukan kepada Gubernur Jenderal, ada hal-hal yang secara langsung atau tidak langsung menyangkut soal-soal mengenai masalah tersebut dan dari usul-usul itu dapat diketahui pendiriannya.

Pikiran Mr. Van Deventer dalam pokoknya dapat diringkas dalam 8 persoalan sebagai berikut:

ad.1 Lama kelamaan di Hindia Belanda, seperti di masyarakat yang maju lainnya, harus ada pendidikan tinggi. Pendidikan sedemikian perlu sekali a). untuk membentuk staf penyelidik ilmiah yang harus menjadi pemimpin terpelajar dari bangsanya; b). untuk dapat memperoleh orang-orang yang terdidik cukup ilmiah, untuk memangku jabatan dan pekerjaan yang tinggi.

ad.2 Sekarang belum masak waktunya untuk mengadakan pendidikan tinggi di Hindia Belanda. Sambil menunggu tibanya waktu itu, diharapkan supaya kepada pemuda Hindia Belanda yang paling berbakat diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan tinggi di negeri Belanda. Jadi kepada pemuda Hindia Belanda harus diberi kemungkinan untuk mempersiapkan diri di sini (Hindia Belanda) sedemikian, sehingga akan mampu mengikuti pendidikan tinggi di negeri Belanda.

Ad.3 Sebagai lembaga persiapan perguruan tinggi di sini (Hindia Belanda) diharap jangan dipilih Gymnasium. Gymnasium tidak logis dan tidak praktis, karena di Hindia Belanda bahasa Latin dan bahasa Yunani tidak perlu. Sebagai gantinya diharap mempergunakan H.B.S.5 tahun yang sudah ada, yang diatur "sebaik mungkin dan tepat".

Ad.4 Dengan diploma akhir H.B.S. itu harus dapat memasuki semua universitas negeri Belanda dengan semua fakultasnya. Mengenai pengetahuan bahasa Latin dan bahasa Yunani diharap supaya diserahkan kepada pemuda Hindia Belanda sendiri untuk mempelajari serta menguasainya, tanpa dituntut untuk menempuh ujian tersendiri bahasa-bahasa itu, kecuali untuk belajar Ilmu Agama (teologi) dan belajar kesusasteraan klasik.

Ad.5 Lebih lanjut - sebagai syarat kedua untuk mencapai tujuan dalam ad.2 - diharap supaya kepada para lulusan sekolah kejuruan tinggi di Hindia Belanda, yang telah mencapai tingkat kesempurnaan dan keilmiahannya yang cukup, diberi kesempatan untuk

melanjutkan pelajarannya pada universitas di negeri Belanda, dengan pengertian bahwa mereka langsung diterima untuk pelajaran doktoral.

Hal ini sudah dilaksanakan terhadap dokter-dokter Hindia Belanda (lulusan Sekolah pendidikan dokter Bumiputera - STOVIA dan Sekolah Dokter Bumiputera - NIAS) yang di negeri Belanda langsung diterima untuk ujian kedokteran teoritis. Di kemudian hari, sedemikian itu akan diijinkan pula terhadap ahli hukum Bumiputera (lulusan Sekolah Pendidikan Ahli Hukum Hindia Belanda) yang harus diterima untuk pelajaran doktoral di universitas negeri Belanda.

Dengan cara yang serupa pula akan dapat diatur penyambungan pendidikan pertanian di Bogor dengan pendidikan pertanian tinggi negeri Belanda.

Ad.6 Dokter-dokter Hindia Belanda, di kemudian hari juga ahli-ahli hukum, dll. tersebut dalam ad.5, harus dapat mempromovir di negeri Belanda. Sivil efek (Effectus civilis) dari tingkat doktoral yang bersangkutan, perlu berlaku hanya buat Hindia Belanda, tidak buat negeri Belanda.

Ad.7 Karena dipandang penting sekali, bahwa Hindia Belanda selekas mungkin harus dapat menyediakan ilmiawan dalam jumlah yang cukup banyak, untuk dapat membentuk kelompok yang dapat disebut "kelompok pilihan" dari pemimpin intelektual, perintis, cendekiawan dalam arti yang baik, maka sangat diharapkan bahwa Pemerintah dan fihak-fihak swasta kerja sama untuk secara finansial memungkinkan pemuda Hindia Belanda yang sungguh berbakat mendapat kesempatan belajar di sekolah tinggi negeri Belanda.

Ad.8 Jika pada akhirnya telah terbentuk kelompok besar cendekiawan Hindia Belanda, yang saling membentuk masyarakat intelektual, yang pengaruhnya atas seluruh masyarakat Hindia Belanda tidak dapat diungkiri, maka barulah tiba waktunya untuk memberikan pendidikan tinggi kepada Hindia Belanda.

Lembaga pendidikan kejuruan yang sudah ada seperti sekolah-sekolah dokter (STOVIA dan NIAS), sekolah hukum (Pechtsschool), sekolah pertanian menengah, dan sekolah teknik menengah, akan harus ditingkatkan lebih tinggi dan digabungkan jadi satu dalam Universitas Hindia Belanda.

Dr. Hazeu menyatakan penghargaan atas skema yang direncanakan oleh Mr. Van Deventer mengenai perkembangan secara berangsur-angsur dari pendidikan di Hindia Belanda sampai ke pendidikan universitas. Rencana Van Deventer ini sungguh-sungguh suatu rencana, yang jasanya tidak dapat diungkiri dan dibuat menurut garis-garis yang tetap, dan membuka perspektif di bidang perkembangan pendidikan Hindia Belanda.

Rencana tersebut tentu terbuka bagi bermacam-macam kritik. Bagi banyak orang pendidikan Hindia Belanda merupakan jika tidak "rimba raya yang tak dapat dimasuki", ya "tempat sesatan yang membingungkan".

Pendapat Dr. Hazeu mengenai 8 pokok soal tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Ad.1 dapat disetujui sepenuhnya. Dalam hal ini ia menunjukkan suratnya tanggal 4 Nopember 1914 nomor 22166 yang berisi nasehat mengenai usul dari Perkumpulan Universitas Hindia Belanda untuk mendirikan sekolah teknik tinggi di Betawi.
2. Ad.2 sesuai dengan pendapatnya, bahwa pendirian sekolah tinggi harus menunggu cukup adanya "bibit", pemuda Hindia Belanda yang tiap tahun lulus ujian akhir HBS 5 tahun atau ujian lainnya yang dapat memasuki perguruan tinggi dalam jumlah yang besar. Ia menunjuk suratnya tanggal 4 Nopember 1914 nomor 22166, suratnya tanggal 21 September 1914 nomor 2324 yang membalas surat Sekretaris Pemerintah Kelas I tanggal 2 Juni 1914 nomor 10107 mengenai kemungkinan akan didirikannya lembaga pendidikan teknik yang lebih diperluas.

Dalam surat terakhir ia antara lain mengemukakan:

- a. "----- kesempatan untuk menerima pendidikan persiapan yang baik terlalu sedikit jumlahnya, untuk dapat memberikan cukup murid kepada lembaga-lembaga pendidikan, yang menerima murid dari sekolah yang bertingkat lebih rendah".
- b. "Perbaikan dalam masalah tersebut hanya dapat diharapkan, dengan memberikan kesempatan secara besar-besaran kepada orang-orang Bumiputera dan Cina untuk selain menerima pendidikan rendah yang diperluas (MULO) juga dapat menerima pendidikan menengah, yang bersangkutan dengan sekolah-sekolah yang didirikan bagi mereka".

Ia menunjuk suratnya tanggal 16 Maret 1914 nomor 5080, yang diputuskan dalam Surat Keputusan tanggal 19 Mei 1914 nomor 1.

Menurut pendapatnya hal-hal yang dikemukakan Mr. Van Deventer dalam ad.2 merupakan kewajiban Pemerintah, untuk mengusahakan dengan segala sarana yang tersedia, supaya kepada pemuda-pemuda Hindia Belanda yang berbakat dan dapat diterima diberikan kesempatan untuk menikmati pendidikan universitas di negeri Belanda. Pemerintah tidak boleh menghindari kewajiban ini.

Bagaimana harus membuka kemungkinan untuk mempersiapkan pemuda Hindia Belanda sehingga dapat diterima di pendidikan tinggi negeri Belanda?

Ada dua jalan yang saling berlawanan, yakni:

1. Mendirikan di sini lembaga yang sama dengan lembaga di negeri Belanda untuk tujuan masuk universitas.
2. Mengadakan ketentuan yang memungkinkan, bahwa kesempatan pendidikan di Hindia Belanda yang sudah ada atau akan didirikan, yang kira-kira sama tingginya dengan lembaga yang ada di negeri Belanda, dapat masuk ke sekolah-sekolah tinggi di negeri Belanda.

Jika menempuh jalan pertama, maka:

1. Sistem pendidikan Hindia Belanda akan tetap merupakan tiruan dari sistem pendidikan di negeri Belanda.

2. Diperlukan 2 (dua) sistim pendidikan, yaitu:

- a. sistim pendidikan Eropa yang merupakan contoh dari sistim pendidikan di negeri Belanda;
- b. sistim pendidikan Hindia Belanda yang diperhitungkan dengan kebutuhan orang-orang Bumiputera dan Cina peranakan.

Untuk menjelaskan mengenai apa yang dikemukakan terakhir (2) di atas, maka dengan teliti dan panjang lebar (4 halaman) diuraikan sejarah terjadinya keadaan sekarang dari pendidikan di Hindia Belanda.

Singkatnya keadaan sekarang dari pendidikan di Hindia Belanda (dengan tidak mengikutkan H.C.S. untuk Cina), adalah seperti berikut:

1. E.L.S. (dengan bahasa Perancis dalam rencana pelajaran) yang merupakan copy E.L.S. di negeri Belanda, dengan sambungan ke H.B.S.5 tahun yang merupakan tiruan juga dari H.B.S. di negeri Belanda.
2. H.I.S. dengan rencana pelajaran yang diatur menurut kebutuhan orang-orang Bumiputera.

H.I.S. sampai akhir-akhir ini hanya bersambungan dengan Sekolah Pendidikan Pegawai Pemerintah Bumiputera (OSVIA) dan sekolah pendidikan guru Bumiputera (Inlandse Kweekschool). Sesudah reorganisasi bersambungan juga dengan MULO, tetapi tidak dengan H.B.S.

Sebelum reorganisasi MULO hanya menerima murid dari E.L.S.

Melangsungkan dualisme di bidang pendidikan akan membawa biaya yang sangat besar, yang sesungguhnya dapat dipergunakan untuk hal lain yang lebih berguna. Dualisme seharusnya segera dihentikan, dan diusahakan unifikasi; sebagaimana diungkapkan dalam suratnya tanggal 20 Nopember 1914 nomor 23349. Differensi pendidikan rendah sementara masih belum dapat dihindarkan. Unifikasi pertama-tama harus ditujukan kepada pengaturan dan perluasan pengajaran rendah lanjutan (MULO) dan pendidikan menengah.

Ia mengusulkan supaya tiap kesempatan dipergunakan untuk mengatur rencana pelajaran pada berbagai cabang pendidikan menurut

kebutuhan khas Hindia Belanda. Hal ini harus diperhatikan pula pada pemilihan alat-alat pelajaran.

Maka dalam suratnya tanggal 16 Maret 1914 nomor 508 ia kemukakan:

"----- perkembangan dari semua cabang pendidikan supaya dengan kuat diusahakan ke arah 'Hindia Belanda', menuju ke sistim pendidikan yang melepaskan diri dari 'model' Belanda. Yang pertama-tama ialah agar secara berangsur-angsur makin banyak memperhitungkan kebutuhan masyarakat Hindia Belanda dalam semua cabangnya, dan terutama dengan kebutuhan penduduk Bumiputera".

Ad.3 s/d ad.6

Van Deventer memilih sebagai lembaga persiapan untuk sekolah tinggi negeri Belanda H.B.S.5 tahun dari tipe Belanda yang sudah ada di Hindia Belanda, yang diatur "sebaik mungkin dan tepat". Jadi kesimpulannya, bahwa ia tidak keberatan untuk mengadakan perubahan di beberapa hal pada sekolah itu.

Van Deventer sama sekali tidak memperhitungkan, bahwa sekolah menengah sekarang (H.B.S.5 tahun) menurut kenyataan hanya dapat dicapai oleh pemuda Bumiputera dalam jumlah yang sangat kecil, karena sedikit sekali anak Bumiputera dapat diterima di E.L.S. dengan bahasa Perancis dalam rencana pelajarannya.

Hindia Belanda memerlukan pendidikan yang khas Hindia Belanda, maka dari itu H.B.S. - sebagian dari sekolah-sekolah itu - harus diberi program yang khas Hindia Belanda.

Dengan cara lain memenuhi kebutuhan pendidikan menengah khas Hindia Belanda dengan memberikan kepada beberapa sekolah MULO sambungan dengan kursus lanjutan 2 atau 3 tahun.

Van Deventer mengusulkan supaya universitas di negeri Belanda memberikan uluran (konsesi) kepada pemuda Hindia Belanda yang ingin memasukinya, dengan memberikan pembebasan dari ujian bahasa Latin dan Junani. Dr. Hazeu mengusulkan tambahan pembebasan pula bagi ujian bahasa Perancis.

Bahwa Van Deventer tidak akan menaruh keberatan ternyata dari ad.5

Van Deventer menginginkan agar pemuda Hindia Belanda dapat memasuki universitas di negeri Belanda melalui 2 jalan, yaitu:

1. Melalui H.B.S.5 tahun di sini, yang diploma akhirnya membuka jalan ke semua universitas serta semua fakultasnya, dan semua lembaga pendidikan tinggi lainnya.
2. Melalui sekolah menengah kejuruan Hindia Belanda, dan yang sudah mungkin melalui STOVIA di Weltevreden, dan dari NIAS di Surabaya (didirikan tahun 1913). (Lembaran Negara 1904 nomor 487). Di kemudian hari dari Sekolah Hukum Hindia Belanda (Rechtsschool) diharapkan untuk dapat mengikuti ujian doktoral hukum, dan begitu pula dari sekolah menengah pertanian Hindia Belanda ke sekolah pertanian tinggi di negeri Belanda.

Van Deventer menginginkan, bahwa kelompok mahasiswa Hindia Belanda dapat memperoleh gelar doktor di negeri Belanda (periksa ad.6).

Oleh beberapa pihak tertentu usul Van Deventer dipandang sangat revolusioner, sehingga menaruh keberatan, tetapi tidak mungkin mengemukakan keberatannya, karena tidak mungkin mengadakan pernyataan yang berapi-api dan meyakinkan, yang dapat menarik kesimpulan, bahwa rencana Van Deventer membahayakan nama baik pendidikan di negeri Belanda. Di samping itu tindakan dalam jiwa rencana Van Deventer akan sangat menurunkan mutu pendidikan universitas negeri Belanda.

Direktur Pendidikan dan Agama mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting, yaitu apa yang akan terjadi, jika tidak dilaksanakan tindakan dalam jiwa Van Deventer?

Universitas-universitas di negeri Belanda akan tertutup bagi sebagian besar pemuda Hindia Belanda. Lama-kelamaan akan sangat sukar bahkan tidak mungkin, untuk memberikan pendidikan rendah dan pendidikan menengah yang murni menurut model Belanda kepada pemuda Bumi-putera, yang makin lama makin bertambah jumlahnya, karena dualitas yang ada di bidang pendidikan tidak hanya harus dipertahankan, akan tetapi juga harus sangat diperluas, dengan mendirikan E.L.S. (dengan bahasa Perancis dalam rencana pelajarannya) dalam jumlah yang sangat

besar, atau harus mengajarkan bahasa Perancis di H.I.S.

Kedua tindakan tersebut, mengingat keadaan personil yang tersedia, praktis tidak akan dapat dilaksanakan, dan lagi pula tidak diinginkan.

Karena di masa dekat tidak akan ada Pendidikan Tinggi di Hindia Belanda, para terpelajar tidak akan dapat memenuhi keinginan mereka memperoleh pendidikan tinggi Belanda, karena mendapatkan pintu-pintu universitas di negeri Belanda tertutup bagi mereka. Hal ini akan menimbulkan kekesalan dan sakit hati yang makin bertambah di kalangan Bumiputera dan Cina peranakan. Dan tidak akan tinggal pada sakit hati saja, mereka akan mengikuti contoh dari dokter-dokter Jawa Hindia Belanda, yang mengambil ujian dokter dan mempromovir di universitas luar negeri (negeri Belgia atau Jerman). Mereka akan mencoba memperoleh pendidikan tinggi serta keuntungan materiil, intelektual, dan sosial di lain tempat (di luar negeri), karena ditolak oleh Belanda. Mereka terutama akan belajar lebih mendalam bahasa Inggris dan mengunjungi universitas luar negeri (jika tidak di Inggris, juga di Cina, Jepang, India, Mesir).

Bahaya ini bukan khayalan saja, bahwa lama-kelamaan bahaya mengancam kebudayaan Belanda di Hindia Belanda, karena sekolah tinggi di Hongkong membuat propaganda ke arah tersebut, juga Jepang sudah bekerja ke arah itu.

Dr. Hazeu menunjuk apa yang ia kemukakan dalam suratnya tanggal 16 Maret 1914 nomor 5088 (halaman 10 dan berikutnya), dan terutama yang termuat dalam surat Hindia Belanda tanggal 19 Mei 1914 no.535.

Sebelum menolak pemuda Hindia Belanda untuk selama-lamanya dari universitas di negeri Belanda, harus diinsyafi kepentingan politik yang besar dari masalah ini, dan sangat diharap supaya sekali lagi dipertimbangkan dengan baik-baik akibat dari penolakan itu.

Ia menyangsikan, apakah berbagai alasan yang dikemukakan dalam pembicaraan dalam Majelis Rendah dari Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 27-28 Januari 1914 yang menentang dilaksanakannya rencana Van Deventer, masih berlaku.

Ia yakin, bahwa mungkin sekali dapat ditemukan jalan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang sungguh-sungguh hangat ini. Pokoknya asal orang mau insyaf saja, bahwa hal itu merupakan keharusan.

Dalam harapan, bahwa akan ada penyelesaian, ia banyak diperkuat, setelah ia mengetahui surat Menteri Urusan Dalam Negeri kepada Menteri Jajahan tanggal 31 Agustus 1914 bagian C nomor 14355 mengenai kemungkinan didirikannya kursus Gymnasium di Hindia Belanda. Menteri Cort van der Linden mengemukakan, bahwa tindakan yang akan dilaksanakan di Hindia Belanda harus diarahkan kepada calon-calon A, karena akhir-akhir ini di negeri Belanda ada aliran yang bekerja keras untuk memberikan kemungkinan kepada mereka, yang telah lulus ujian akhir H.B.S.5 tahun, untuk diterima di fakultas kedokteran dan ilmu pasti-alam.

Usul tersebut dapat disetujui, dan diharapkan selanjutnya terbentuk kerja sama antara Pemerintah dengan prakarsa swasta. Perlu ia mengingatkan kembali usaha Pemerintah untuk mempermudah dan memajukan dinas kepegawaian Hindia Belanda dengan memberikan beasiswa.

PENDIDIKAN BAGI ORANG - ORANG CINA
SEKOLAH PENDIDIKAN GURU CINA BELANDA
(HOLLANDSE CHINESE KWEEKSCHOOL)

67. Pj. Direktorat Pendidikan dan Agama (E. Moresco) kepada Gubernur Jenderal (Idenburg) tanggal 8 Pebruari 1915 nomor 3206

Dengan surat Sekretaris Pemerintah Kelas I tanggal 27 Nopember 1913 nomor 2728 disampaikan kepada Direktorat Pendidikan dan Agama lama (Dr. Hazeu) sebuah kutipan dari Nota dari Penasehat Pemerintah untuk Urusan Cina (pada waktu itu W.J. Oudendijk) tanggal 20 Juli 1913 nomor 20 mengenai tindakan yang harus diambil demi kepentingan penduduk Cina, dengan permohonan supaya Dr. Hazeu

menyampaikan pandangan disertai dengan usul-usul yang dirumuskan mengenai masalah tersebut. Menurut Dr. Hazeu dalam suratnya tanggal 16 Desember 1912 nomor 21791, pandangan yang penting dan usul-usul berjangkauan jauh dari Oudendijk itu meliputi persoalan pendidikan bagi orang-orang Cina di Hindia Belanda. Surat ini disusul dengan surat Sekretaris Pemerintah tanggal 12 Januari 1914 nomor 116.

Satu bagian yang penting dari masalah itu - yaitu mengenai pemberian pengajaran bahasa Cina pada sekolah H.C.S. - sudah dipenuhi tersendiri menurut keinginan Gubernur Jenderal (lihat surat kawat Menteri Jajahan tanggal 12 September 1914 bagian Al nomor 31/2286).

Dimohon perhatian Gubernur Jenderal atas masalah lain yang disinggung dalam Nota Oudendijk tersebut, yaitu perlunya di Hindia Belanda didirikan sekolah guru untuk mendidik orang-orang Cina untuk jabatan guru pada sekolah-sekolah H.C.S.

Dalam suratnya tanggal 1 April 1914 nomor 6280 Dr Hazeu mengemukakan, bahwa masalah itu akan dibicarakan dalam konperensi dengan Oudendijk dan Van Wettum (almarhum, dan bekas Penasehat Urusan Cina & Jepang). Usul-usul mengenai masalah itu akan diusahakan supaya tepat pada waktunya dapat disampaikan kepada Gubernur Jenderal, sehingga mungkin sekali dapat diperhitungkan dengan anggaran belanja tambahan (supletoir) tahun 1915. Akan tetapi dikemukakan juga, bahwa sejauh mungkin sebelumnya akan diselidiki lebih dahulu, apakah ada cukup banyak tamatan H.C.S. yang ingin diterima untuk pendidikan guru.

Dalam notanya Oudendijk mengemukakan, bahwa karena ikut campur tangannya Perhimpunan Guru (Nederlands Indisch Onderwijs Genootschap = NIOG) sering tidak dapat diperoleh tenaga pengajar dalam jumlah yang cukup. Maka perlu diadakan pengadaan guru (rekrutering) sendiri di Hindia Belanda, dengan mendirikan sekolah guru. Hal tersebut sesuai dengan sistim, yang telah diterima sebagai penyelesaian masalah penyediaan personil untuk pendidikan model

Belanda kepada penduduk bukan Eropa di masa depan, yaitu dengan mendidik tenaga-tenaga Bumiputera untuk tugas yang sampai kini hanya dilakukan oleh guru-guru Eropa. Maka dari itu pikiran untuk mendirikan sekolah guru Belanda Cina (Hollands Chinese Kweekschool = H.C.K.) tidak perlu adanya dukungan lebih lanjut.

Alasan-alasan, yang menyebabkan didirikannya Hogere Kweekschool (H.K.S.) di Purworejo berlaku pula bagi pendirian H.C.K. Perluasan pendidikan bagi orang-orang Cina tidak akan dapat dilaksanakan tanpa mempergunakan tenaga pengajar yang cakap yang berasal dari golongan penduduk itu sendiri, karena tenaga pengajar Eropa saja terlalu sedikit jumlahnya.

Satu-satunya alasan mengapa H.C.K. belum dapat didirikan terletak dalam jumlah calon murid yang cakap masih sangat kecil, karena jumlah H.C.S. yang sudah tumbuh penuh masih kecil, dan kelas 7-nya hanya sangat sedikit muridnya. Maka dari itu diusulkan supaya ditangguhkan.

Dalam tahun ajaran yang akan datang (1915/1916) akan diminta daftar baru dari calon-calon murid H.C.K. dari komisi sekolah yang bersangkutan, untuk mengetahui apakah H.C.K. akan sudah dapat dibuka dalam tahun ajaran 1916/1917. Jika sementara waktu itu telah ternyata, bahwa Gubernur Jenderal menyetujui rencana tersebut dan Menteri Jajahan pada dasarnya menyatakan sedia untuk menyediakan dana yang diperlukan dalam anggaran belanja, segera sesudah diperoleh cukup banyak calon yang cakap.

Diharapkan Gubernur Jenderal mengadakan tukar pikiran dengan Menteri Jajahan mengenai masalah tersebut, sehingga jika disetujui dalam pembicaraan rencana anggaran belanja 1916 sudah dapat dikemukakan beberapa penjelasan mengenai rencana sekolah guru tersebut.

68. Nasehat Dewan Hindia Belanda tanggal 9 April 1915 nomor XXX

Dewan setuju dengan pendapat Pj. Direktur Pendidikan dan Agama (suratnya tanggal 8 Pebruari 1914 nomor 3206), bahwa penyelesaian masalah personil bagi sekolah H.C.S. harus dicari dalam pendidikan

tenaga dalam negeri untuk tugas yang tadinya khusus dilakukan oleh tenaga-tenaga Eropa. Tetapi itu tidak berarti, bahwa pada dasarnya harus diputuskan untuk mendirikan H.C.K. tersendiri, sejajar dengan H.K.S. bagi guru-guru Bumiputera di Purworejo.

Menurut Dewan tujuan tersebut dapat dicapai dengan jalan lain yaitu mengubah supaya di sekolah pendidikan guru Bumiputera dapat diterima murid-murid Cina (lulusan H.C.S.) dan kemudian murid-murid Cina dari sekolah pendidikan guru Bumiputera dapat diterima di HKS.

Menurut Dewan dalam tindakan tersebut di atas ada beberapa keuntungan, antara lain ialah:

1. Karena dengan jalan demikian akan melangkah mendekati unifikasi pendidikan rendah, yang pada akhirnya menuju ke arah sekolah buat semua kategori (golongan) penduduk.
2. Konsekwensi keuangan akan sangat lebih kecil dari pada mendirikan H.C.K. tersendiri.
3. Dengan demikian maka pendidikan bagi orang Cina untuk menjadi guru masih mungkin, jika jumlah calon murid ternyata terlalu sedikit untuk dijadikan alasan mendirikan sekolah tersendiri.
4. Dengan pendidikan yang sama dalam lembaga pendidikan yang sama, maka jika perlu guru Cina lulusan H.K.S. dapat mengajar di H.I.S. dan guru Bumiputera lulusan H.K.S. dapat mengajar di H.C.S.

Berkali-kali dikemukakan, bahwa orang-orang Bumiputera dan Cina itu saling bersifat tidak dapat dipersatukan untuk dapat diterima di satu lembaga pendidikan.

Sementara Dewan masih meragukan, apakah keberatan itu sungguh-sungguh ada, dan apakah dalam praktek sudah ada bukti-bukti?

Kenyataan memang ada, bahwa di H.I.S. yang terbuka juga bagi anak-anak Cina, belum ada murid Cina. Dengan sendirinya, di mana pendidikan rendah Cina dapat dinikmati di H.C.S. dan di sekolah Cina swasta yang banyak jumlahnya, mereka lebih suka memilih sekolah itu dari pada H.I.S.

Lain halnya, jika melalui jalan yang berkaitan dengan syarat untuk pengangkatan di jabatan Pemerintah, seperti pengalaman Pemerintah di NIAS (Sekolah Dokter Bumiputera) di Surabaya.

Perpustakaan
Direktori

69. Surat Pejabat Penasehat Urusan Bumiputera (G.A.J. Hazeu) kepada Pejabat Direktur Pendidikan dan Agama (K.F. Creutzberg) tanggal 8 Desember 1916 nomor 289

Menurut surat rahasia Pj. Direktur Pendidikan dan Agama tanggal 9 Oktober 1916 nomor 402, kepada Ajun Inspektur Pendidikan Raden Kamil dan Mas Budiardjo ketika diminta pendapatnya mengenai pikiran untuk mempergunakan H.K.S. untuk mendidik juga tenaga-tenaga pengajar bagi H.C.S. Nasehat mereka dengan surat tersebut di atas disampaikan kepada Pj. Penasehat Urusan Bumiputera dengan permohonan untuk diberi pendapat dan kesimpulan mengenai nasehat itu. Di kalangan para penguasa, yang telah mengadakan pandangan mengenai masalah yang sangat penting itu terdapat banyak perbedaan pendapat. Maka ia mengira akan mendapat kesepakatan dalam nasehat kedua Ajun Inspektur Jawa itu, yang telah dimintai nasehat. Tetapi aneh sekali, bahwa pandangan-pandangan mereka sangat berlainan, bahkan saling bertentangan.

Raden Kamil menentang pendidikan gabungan dari orang-orang Bumiputera dan Cina, sedangkan rekannya Mas Budiardjo tidak keberatan dan akan menyambut dengan gembira pendidikan gabungan itu. Raden Kamil lebih tegas dan positif dalam keberatannya. Budiardjo akhirnya menganjurkan penerimaan orang-orang Cina itu "sementara sebagai percobaan, dan mengharap pemuda-pemuda Cina itu ditempatkan dalam bangsal-bangsal tersendiri, terpisah dari pemuda-pemuda Bumiputera".

Hazeu mengirimkan nasehat Kamil kepada Budiardjo, dan mengharap supaya memberikan alasan-alasan dari keberatannya terhadap nasehat Kamil. Begitu pula nasehat Budiardjo disampaikan kepada Kamil dengan permintaan serupa.

Ternyata kedua-duanya tetap pada pendiriannya semula. Pendapat Kamil - yang banyak didasarkan atas pengamatan dalam praktek kehidupan dan sesuai dengan kenyataan - mengatakan bahwa orang-orang Bumiputera dan Cina untuk tidak mengatakan saling bermusuhan, mereka saling bertentangan dengan tajam, dan tinggal bersama dalam satu asrama seperti di Purworejo akan mengakibatkan ketegangan dan bentrokan.

Pendapat Budiardjo dalam suratnya tanggal 16 Nopember 1916 didasarkan atas pengamatan, bahwa lapisan atas dari berbagai golongan penduduk di sini makin lama makin saling mendekat, yang menurut pendapatnya disebabkan oleh kenyataan, bahwa di E.L.S., di MULO dan di sekolah menengah diterima murid-murid dari berbagai bangsa.

Tetapi menurut Hazeu saling pengertian dan penghargaan yang makin tumbuh itu hanya "semu" belaka. Mereka saling mentolerir, tetapi keadaan masih jauh, bahwa orang Eropa dan Cina memberi penghargaan sepenuhnya dan sesungguhnya kepada orang-orang Bumiputera, meskipun mereka sama-sama mengunjungi sekolah yang sama, bekerja di cabang jawatan yang sama. Simpati timbal-balik di luar sekolah dan pekerjaan, belum ada dengan sungguh-sungguh, jika ada merupakan satu dua kekecualian. Dalam banyak hal, yang satu merasa lebih tinggi daripada yang lain, merasa dihina jika dipersamakan dengan Bumiputera, dan menyakiti hati Bumiputera dengan tindakan dan sikap yang congkak dan angkuh.

Kamil mengemukakan lebih lanjut dengan kata-kata lunak tetapi tegas, bahwa akhir-akhir ini sebaliknya dari pendekatan ternyata lebih banyak ada penjarahan antara orang-orang Bumiputera dan Cina. Praktek membuktikan bahwa Kamil benar.

Akhir-akhir ini kesadaran diri dan kesadaran nasional dari penduduk Bumiputera telah tumbuh dengan kuat, pakaian nasional, adat dan kebiasaan sendiri dan semuanya itu dihormati lagi, juga perasaan keagamaan bangkit kembali (periksalah surat penghantar laporan Konggres Sarekat Islam di Bandung).

Mengenai hubungan orang Cina terhadap orang Bumiputera dapat dilihat dari surat Pj. Penasehat Urusan Cina (Mouw) tanggal 2 September 1916 nomor 61/16. Dalam surat itu Mouw mengemukakan antara lain bahwa kemungkinan berhasilnya pendidikan gabungan di Purworejo sejauh mengenai orang-orang Cina sama sekali tidak dapat diharapkan. Oposisi akan sangat besar. Maksud baik dari Pemerintah, bagi pihak Cina akan diartikan sebagai politik tindakan reaksioner yang selalu berusaha untuk membuat orang Cina menjadi Bumiputera

melalui jalan pendidikan. Untuk menghindari kekecewaan dari Pemerintah dan kepahitan dari pihak Cina, maka diharap pikiran tentang pendidikan gabungan tenaga-tenaga pengajar Bumiputera dan Cina "ditinggalkan" saja.

Dengan demikian apa yang dikemukakan Raden Kamil itu betul.

Raden Kamil merumuskan pendapat akhirnya: "Tabiat, adat, dan kebiasaan mereka bedanya terlalu banyak, sehingga kedua bangsa itu tidak akan dapat hidup damai di bawah atap yang sama.

Sehubungan dengan nasehat tersebut di atas maka pendidikan gabungan pengajar Bumiputera dan Cina untuk sementara waktu tidak dapat disetujui.

70. Surat Gubernur Jenderal (Van Limburg Stirum) kepada Menteri Jajahan (Pleijte) tanggal 4 April 1917 nomor 273/2

Pj. Direktur Pendidikan dan Agama dalam suratnya tanggal 20 Pebruari 1917 nomor 5181 - yang salinannya dikirimkan dengan laporan pos nomor 427 - mengingatkan kembali, bahwa di sini (Hindia Belanda) telah terjadi pertukaran pikiran yang panjang lebar mengenai bagaimana caranya mengatur pendidikan guru bagi sekolah-sekolah H.C.S.

Dalam surat Sekretaris Pemerintah Kelas I tanggal 1 Desember 1915 nomor 2973 - yang salinannya dikirimkan dengan laporan pos tahun 1915 nomor 2320 - Gubernur Jenderal Idenburg menyetujui pendapat Dewan Hindia Belanda yang lebih suka memilih pendidikan gabungan dari orang-orang Bumiputera di H.K.S. di Purworejo daripada pendidikan tersendiri di H.C.K. yang diusulkan oleh Dr. Moresco (Pj. Direktur Pendidikan dan Agama).

Sekarang ternyata, bahwa Pj. Penasehat Urusan Bumiputera dan Pj. Penasehat Kepala Urusan Cina, menaruh keberatan terhadap rencana pendidikan gabungan itu. Mengingat nasehat-nasehat mereka dan juga nasehat Ajun Inspektur Pendidikan Bumiputera Raden Kamil, Pj. Direktur Pendidikan dan Agama dalam suratnya tersebut di atas, menyatakan bahwa pendidikan gabungan pengajar Bumiputera dan Cina

tidak mungkin dapat dilaksanakan, juga tidak sebagai percobaan, karena akan mempertaruhkan seluruh pendidikan tenaga pengajar Cina. Jika setelah beberapa waktu percobaan akan harus dihentikan, maka mungkin sekali akan lama sekali baru dapat dipikirkan untuk menangani sebuah pendidikan dengan cara lain. Pendidikan tenaga pengajar Cina dalam bentuk apapun, mungkin sekali akan tetap tercatat bagi yang berkepentingan sebagai usaha untuk membawa orang Cina se-garis dengan orang Bumiputera, dan tidak akan dipercaya lagi, sehingga kerja sama mereka tidak dapat lagi diharapkan.

Pj. Direktorat Pendidikan dan Agama berpendapat, bahwa sebaiknya kembali lagi pada keputusan yang telah diambil oleh Gubernur Jenderal lama, untuk mempertimbangkan memasukkan dalam rencana anggaran belanja 1918 sejumlah f.30.220.-- buat pendirian sekolah pendidikan guru Cina tersendiri. Jumlah ini masih ditambah dengan pengeluaran untuk sewa ruang sekolah sementara yang diperlukan dan untuk pemondokan murid-murid, pengeluaran mana akan diberatkan pada Bagian VII anggaran belanja.

Dewan Hindia Belanda, setelah didengar tentang usul-usul ini, menyatakan dalam nasehatnya tanggal 9 Maret 1916 nomor XIX - yang salinannya dilampirkan bersama ini - antara lain bahwa Dewan sedia tunduk pada kata-kata Mouw dan Hazeu, sehingga tidak ada jalan lain kecuali mendirikan sekolah pendidikan tersendiri bagi guru-guru Cina, sebagaimana diusulkan oleh Pj. Direktorat Pendidikan dan Agama. Bahwa Dewan merasa kurang pasti, apakah akan dapat diharapkan sedikit hasil dari sekolah ini, yang seimbang dengan biayanya.

Gubernur Jenderal berpendapat bahwa sekolah pendidikan guru seperti yang dimaksud di sini perlu sekali diadakan dan segera, karena perluasan pendidikan Cina Belanda sangat perlu sekali.

Sekolah pendidikan guru itu akan dapat menyelesaikan masalah tenaga pengajar bagi pendidikan tersebut. Tidak dapat disangsikan, bahwa orang-orang Cina yang berpikiran baik akan menghargai, bilamana Pemerintah memberikan bukti berusaha meluaskan pendidikan bagi anak-anak mereka. Meskipun masih harus menunggu beberapa tahun lagi,

sebelum sekolah itu dapat menghasilkan guru-guru, kenyataan bahwa Pemerintah sudah mulai bertindak akan sangat dihargai. Jika Pemerintah tidak bertindak, dikhawatirkan bahwa dari pihak penduduk Cina akan timbul lagi usaha yang kuat untuk mendirikan sekolah yang mereka inginkan bagi anak-anak mereka.

Penangguhan lebih lama akan sangat berbahaya, dengan adanya bukti didirikannya sebuah sekolah Cina di bawah pimpinan seorang Inggris di Semarang.

Maka dari itu Gubernur Jenderal dengan Direktur Pendidikan dan Agama mengusulkan supaya pada permulaan tahun ajaran Eropa 1917/1918 (Juli 1917) sudah harus dibuka sekolah pendidikan guru Cina, bila mana sudah ada cukup calon murid yang cakap.

Dengan surat ini Gubernur Jenderal menjelaskan lebih lanjut kawat yang dikirimkan kepada Menteri Jajahan, kawat nomor 9:

"Continuation mail report Rembrandt Council agrees proposals Creutzberg establish trainingschool chinese teachers (.) consider opening school beginning July urgently desirable, please wire agreement".

Dalam pasal 3 dari surat keputusannya tanggal sekarang (4 April 1917) nomor 2 dengan nota perubahan pada Pos-pos mereka dalam rencana anggaran belanja 1918 Gubernur Jenderal memberi kuasa kepada Pj. Direktur Pendidikan dan Agama dan Direktur Pekerjaan Umum untuk memperhitungkan pengeluaran bagi pendirian sekolah pendidikan guru seperti tersebut di sini.

PENDIDIKAN BAGI

GADIS-GADIS BUMIPUTERA - PENDIDIKAN GURU-GURU WANITA BUMIPUTERA

71. Surat Pj. Direktur Pendidikan dan Agama (K.F. Creutzberg) kepada Gubernur Jenderal (van Limburg Stirum) tanggal 16 Mei 1917 nomor 13606

Dalam 10-20 tahun akhir-akhir ini penyediaan sarana pendidikan bagi orang-orang Bumiputera menjadi masalah yang sangat penting.

Berulang kali pada setiap perbincangan mengenai usaha untuk membuat rencana yang efektif agar dapat dipakai dan dilaksanakan untuk masa kini dan masa depan, selalu pertanyaan dikemukakan, dengan cara bagaimana akan dapat dipenuhi kebutuhan pendidikan bagi gadis-gadis Bumiputera. Dalam tahun 1907 dan tahun 1909 diadakan angket mengenai masalah tersebut. Aksi pembuka jalan, yang dilakukan oleh al-marhumah Raden Ajeng Kartini, menambah kesadaran di mana-mana, bahwa tidak akan ada usaha untuk meninggikan tingkat inteletuil dan sosial dari penduduk Bumiputera yang akan mencapai tujuannya, selama wanita Bumiputera tidak diikut sertakan dalam proses pendidikan itu.

Diikut sertakannya dalam proses pendidikan membuat mereka sadar untuk melakukan kewajibannya dalam keluarga lebih baik, pendidikannya membuat kesadaran diri-sendiri makin besar, yang keduanya merupakan syarat yang penting untuk kehidupan keluarga Bumiputera yang lebih erat, yang pada gilirannya merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi pendidikan seluruh rakyat ke arah kemajuan yang lebih besar, tidak sedikit pula dalam hal ekonomi.

Kesadaran ini telah terbukti bahwa sejak lama dengan masuknya murid murid wanita ke sekolah-sekolah yang diperuntukkan bagi penduduk Bumiputera.

Bahwa sampai kini kesadaran itu belum sampai dapat menyebabkan didirikannya sekolah negeri bagi gadis-gadis Bumiputera, dan Pemerintah hanya membatasi diri dengan memberikan bantuan kepada apa yang telah dikerjakan oleh pihak swasta di bidang ini, hanya disebabkan karena ketidak pastian tentang cara bagaimana harus mengatur pendidikan di sekolah-sekolah itu.

Memori penjelasan atas Rencana Anggaran Belanja Hindia Belanda tahun 1914 - dimana terdapat pula peraturan pemberian subsidi kepada sekolah swasta bagi gadis-gadis Bumiputera, termuat dalam Lembaran Negara 1914 nomor 592 - didahului dengan pernyataan pemerintah secara terbuka sebagai berikut:

"Karena hasil-hasil dari semua usaha untuk membawa penduduk Bumiputera ke tingkat kemajuan yang lebih tinggi itu sebagian

terbesar tergantung dari ikut sertanya wanita Bumiputera dalam proses pendidikan, maka sekali lagi perlu dipertimbangkan dengan cara bagaimana dapat diatur kesempatan tersendiri untuk pendidikan bagi gadis-gadis Bumiputera¹⁷.

Hasil penelitian yang dahulu kurang meyakinkan adanya kebutuhan akan pendidikan demikian, tetapi dalam tahun-tahun akhir ini terdapat perubahan sangat besar, yang terbukti dalam kenyataan, bahwa di beberapa tempat oleh yang berkepentingan sendiri telah dilakukan usaha untuk dengan kekuatan sendiri mengadakan kesempatan pendidikan bagi gadis-gadis Bumiputera sebanyak mungkin.

Tujuan yang ingin dicapai pada umumnya ialah bukan semata-mata memberikan kepada gadis-gadis Bumiputera pengetahuan sekolah yang sama dengan yang diperlukan bagi anak laki-laki, melainkan pendidikan yang sederhana dan praktis, yang dapat membentuk wanita dan ibu yang baik dan beradab -- meskipun terutama di kalangan priyayi sangat dihargai pula untuk memberikan juga sedikit pengetahuan bahasa Belanda kepada gadis-gadis Bumiputera, demi kepentingan kedudukan dan tugas kehidupan yang menunggu mereka.

Prakarsa yang keluar dari masyarakat Bumiputera ini, belum dapat dianggap sesuatu yang menentukan terhadap pendirian sekolah oleh Pemerintah bagi gadis-gadis Bumiputera, karena lebih dahulu praktek harus menunjukkan, apa yang harus dipakai sebagai ukuran (norm) pengaturan sekolah dan rencana pelajaran. Tugas pemerintah untuk memberikan bantuan keuangan kepada prakarsa swasta supaya dapat mewujudkan cita-citanya sebagaimana mestinya.

Sekarang sesungguhnya sudah mungkin, untuk dengan mempergunakan pengalaman dari lembaga-lembaga swasta dalam bidang pendidikan bagi gadis-gadis Bumiputera menentukan, bagaimana caranya mengorganisir pendidikan sedemikian yang diberikan oleh Pemerintah, meskipun di kemudian hari masih perlu dan dapat diperbaiki.

Karena maksud surat ini sesungguhnya menyampaikan usul rencana buat pendidikan sistematis bagi guru-guru wanita Bumiputera, maka mengenai pendidikan rendah bagi gadis-gadis Bumiputera akan dibatasi pada hal-hal, yang pemutusannya harus didahulukan daripada rencana pendidikan guru.

Untuk memilih titik tolak yang tepat, maka harus diperhatikan tujuan ke mana pendidikan pemuda-pemudi Bumiputera akan diarahkan. Dipandang dari gambaran masyarakat Bumiputera sekarang, akan segera disadari, bahwa dalam stadium kemajuan masyarakat sekarang - kecuali jika ada perubahan yang tidak terduga - bahwa mungkin masih beberapa tahun lagi, kebutuhan pendidikan bagi generasi mendatang laki-laki pada umumnya, akan lain sekali sifatnya daripada kebutuhan pendidikan generasi wanita yang akan datang.

Pendidikan sekolah bagi anak-anak laki-laki Bumiputera - mengingat cara bagaimana hasrat pendidikan itu biasanya dinyatakan - hanya dianggap efektif, jika ia menuju daya bertahan ekonomis yang lebih besar. Untuk sementara waktu pendidikan bagi gadis-gadis Bumiputera belum perlu dengan sengaja diarahkan ke tujuan itu. Hal ini sangat berbeda dengan di berbagai negeri Eropa, di mana hubungan masyarakat dari setengah abad terakhir ini telah mengarah sedemikian rupa sehingga wanita - juga dari kelas-kelas yang lebih baik - makin lama makin harus sedia, bahwa ada kemungkinan akan harus mencukupi kehidupannya sendiri. Pengaturan pendidikan bagi gadis-gadis Bumiputera di Hindia Belanda harus bertolak dari kenyataan, bahwa sekarang dan mungkin sekali dalam waktu yang masih jauh yang akan datang, tempatnya wanita adalah di tengah-tengah keluarga.

Perbedaan antara apa yang diperlukan anak Bumiputera laki-laki dan anak-anak Bumiputera perempuan untuk persiapan tugas kehidupan yang menunggu mereka dapat dilihat paling nyata, jika memandang kebutuhan pendidikan dari golongan penduduk yang terkemuka. Jika di sekolah pendidikan dasar Bumiputera yang diperuntukkan untuk rakyat jelata (sekolah desa dan sekolah kelas 2) dengan sejumlah bahan pelajaran, yang juga berlaku bagi murid-murid wanita, sekalipun di sampingnya tidak diberikan pengajaran kerumah tanggaan, maka pengajaran di sekolah itu dapat dianggap sebagai minimum dari apa yang mereka butuhkan sebagai pendidikan dasar umum. Lain sekali halnya dengan pendidikan yang menuju ke pendidikan lebih tinggi, misalnya dengan H.I.S. Perlu diingatkan kembali bahwa H.I.S. dalam tahun

1914 telah ditingkatkan sampai tingkat sekarang untuk dapat bersamaan dengan MULO, dan dengan demikian bagi beribu-ribu orang Bumiputera sekarang ada kesempatan untuk kalau tidak menuntut pelajaran lebih lanjut ke sekolah-sekolah lanjutan kejuruan, ya menemukan jalan ke kedudukan dalam masyarakat, yang dahulu hanya dapat dicapai oleh mereka yang tamat E.L.S.

Bagi gadis-gadis Bumiputera pendidikan jenis ini masih merupakan kekecualian. Hanya ada beberapa gadis Bumiputera, yang baik dengan tujuan untuk melanjutkan pendidikan tertentu, misalnya pendidikan guru wanita pada sekolah tipe HIS maupun karena kebutuhan untuk dapat memperoleh pendidikan sekolah yang terbaik dapat diterima - menjadi murid HIS. Tetapi jumlahnya begitu kecil, sehingga hilang jika dibandingkan dengan kebutuhan akan pendidikan bagi gadis yang sangat besar sekali. Proses kemajuan yang berjalan sangat cepat di kelas tinggi dan menengah dari penduduk Bumiputera sejak permulaan abad ini (abad 20) telah menimbulkan kepada para wanita kebutuhan akan pendidikan yang sedemikian, sehingga orang-orang Bumiputera dari kelas-kelas itu akan dapat membentuk rumah tangga, di mana para isteri dapat menempati tempat yang lebih mulia/dihormati daripada yang sekarang. Hal ini sungguh-sungguh merupakan tuntutan zaman yang mendesak, karena - perlu diulangi lagi - pendidikan rakyat seluruhnya akan tetap merupakan pekerjaan setengah, selama kehidupan rumah tangga tidak diperkuat dan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi.

Bagi tujuan pertama-tama - yaitu membentuk wanita dan ibu-ibu yang betul-betul baik dan beradab, pendidikan melalui HIS memberikan terlalu banyak dan terlalu sedikit. Terlalu banyak dari pengetahuan sekolah, dan terlalu sedikit atau sama sekali tidak ada apa-apa yang langsung dirasakan bermanfaat dan praktis bagi wanita Bumiputera, sebagai kepala rumah tangga, seperti pekerjaan tangan wanita, kemandirian memasak, pengetahuan mendidik, hygiene, tata buku rumah tangga, dan lain-lain.

Selain dari itu HIS yang tinggi dan mahal, hanya akan dapat dicapai oleh sebagian yang sangat kecil dari pemuda Bumiputera, sedangkan

rencana pendidikan bagi gadis yang lebih sederhana - asalkan memenuhi syarat-syarat seperti itu, sehingga bagi siapa yang telah menikmatinya ada tempat juga di keluarga atau rumah tangga Bumiputera yang beradab - dapat memberikan perluasan pendidikan bagi gadis yang sangat diperlukan.

Dengan alasan-alasan ini, maka jika Pemerintah mau mulai mendirikan sekolah bagi gadis-gadis Bumiputera ia akan mengusulkan, supaya kepada sebagian terbesar dari gadis-gadis diberikan pengetahuan sekolah sesungguhnya yang tidak lebih daripada yang diberikan di Sekolah Bumiputera kelas 2 (dengan 4 kelas) atau di sekolah desa plus 2 kelas tertinggi sekolah Bumiputera kelas 2. Di sini perlu segera ditambahkan, bahwa bagi sebagian dari gadis-gadis itu - umumnya dari yang berasal dari keluarga yang anak-anaknya laki-laki mengunjungi HIS atau dapat diterima di HIS - sedikit pengetahuan bahasa Belanda perlu sekali. Pengetahuan bahasa Belanda ini sudah cukup, bahwa bagi isteri seorang Bumiputera yang terdidik, bagi ibu yang anak-anaknya menikmati pendidikan Belanda, bahasa Belanda itu menjadi bahasa pengantar, yang dapat ia gunakan dalam percakapan sederhana.

Program pelajaran yang disusun menurut pikiran dasar tersebut, diperluas dengan mata-mata pelajaran yang bersifat kerumah tanggaan yang diperlukan menurut kebutuhan kehidupan keluarga yang sederhana dan betul-betul baik - terutama jangan terlalu ditingkatkan. Dengan jalan ini, yang dalam segi personil dan finansial paling ekonomis, lapisan yang sangat luas dari wanita Bumiputera akan dapat ditingkatkan dengan pendidikan, tanpa pendidikan tersebut pendidikan rakyat umum tidak akan dapat berhasil.

Untuk menjelaskan maksud di atas, ia memberikan dua bagan untuk membandingkan pendidikan rendah, yang perlu dan cukup bagi anak-anak wanita, dengan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak laki-laki.

Anak laki-laki	
Pendidikan H.I.S.	Pendidikan Rendah Bumiputera

Anak wanita		
Pendidikan H.I.S. dengan atau tidak dengan diperluas dengan mata-mata pelajaran rumah tangga.	Pendidikan Rendah Bumiputera dengan bahasa Belanda sebagai matapelajaran dengan diperluas dengan mata mata pelajaran rumah tangga.	Pendidikan Rendah Bumiputera diperluas dengan mata-mata pelajaran rumah tangga.

Perbandingan ini semau-maunya.

Bagan ini dapat dipersatukan dengan pikiran, yang dikemukakan oleh Direktur Pendidikan dan Agama yang lama dalam suratnya tanggal 5 April 1916 nomor 8999, dimana ia mengusulkan supaya gadis-gadis sampai umur 10-11 tahun dapat menikmati pendidikan di sekolah campuran, dan kemudian pendidikannya dilanjutkan ke arah kerumah tanggaan dalam kursus sambungan bagi gadis, dimana pendidikan yang telah diterima akan dipelihara dan ditambah juga.

Bersama dengan Pj. Penasehat Urusan Bumiputera (periksalah suratnya tanggal 25 Mei 1916 nomor 139 yang dilampirkan pada surat Direktur Pendidikan dan Agama tanggal 5 Januari 1917 nomor 406), Direktur P.A. melihat dalam usul tersebut dalam surat tanggal 5 April 1916 nomor 8999 bahwa suatu penyelesaian yang praktis bagi masalah ko-edukasi - setidaknya-tidaknya bagi gadis-gadis yang pendidikan sekolahnya tidak perlu lebih dari tingkat pendidikan Bumiputera. Jika lembaga baru itu bersambungan dengan sekolah desa, maka suatu

peraturan pendidikan bagi gadis-gadis Bumiputera akan ternyata mungkin tanpa mengganggu organisasi sekolah desa yang sudah ada, yaitu tanpa mendirikan sekolah desa tersendiri bagi gadis-gadis. Dengan menguraikan hal-hal tersebut di atas ia berharap dapat memberikan keyakinan kepada Pemerintah, bahwa mendirikan sekolah negeri bagi gadis Bumiputera sekarang tidak akan terbentur pada ketidakpastian mengenai cara yang terbaik untuk mengatur sekolah demikian. Tinggal ada keadaan lain, yang sekarang bagi Pemerintah merupakan rintangan yang tidak dapat diatasi untuk dapat melaksanakan tugasnya, yaitu tidak tersedianya sama sekali tenaga pengajar wanita yang cakap.

Bagi Pj. Penasehat Urusan Bumiputera kekurangan tersebut merupakan salah satu alasan yang terpenting mengapa ia tidak menyokong usul Direktorat Pendidikan dan Agama yang lama untuk mendirikan sebagai percobaan 6 buah kursus rumah tangga bagi gadis-gadis Bumiputera (periksa surat Pj. Penasehat Urusan Bumiputera tanggal 25 Mei 1916 nomor 169).

Dalam suratnya tanggal 5 Januari 1917 nomor 406 (yang diputuskan dengan Surat Keputusan tanggal 12 Januari 1917 nomor 16) ia dapat menyetujui pendapat Dr. Hazeu.

Juga ternyata, bahwa sekolah swasta bagi gadis-gadis Bumiputera mengalami banyak kesulitan karena kekurangan guru-guru wanita Bumiputera yang cakap, dan menurut pendapatnya prakarsa swasta, yang melaksanakan pekerjaan perintis di bidang pendidikan atas anjuran Pemerintah, ada hak menuntut Pemerintah memberikan bantuan, dimana prakarsa swasta tidak dapat memenuhi sarana untuk dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Memperbantukan guru-guru wanita Bumiputera (guru negeri) pada sekolah swasta bagi gadis-gadis dengan syarat-syarat yang dapat diterima, merupakan satu-satunya jalan yang baik.

Kedua hal yang diuraikan di atas membuat pengadaan pendidikan yang sistematis dari guru-guru wanita Bumiputera menjadi tuntutan zaman yang sangat mendesak.

Cara, bagaimana pendidikan tenaga-tenaga pengajar wanita Bumiputera harus mulai dilaksanakan, tergantung dari garis-garis pokok yang pada dasarnya telah diterima bagi lembaga pendidikan rendah bagi gadis-gadis Bumiputera, sebagaimana terlihat dalam skema tersebut di atas.

Jumlah sekolah swasta bagi gadis-gadis, yang telah menerima subsidi dari Kas Negara yang telah mengajukan permohonan subsidi ada 30, terdiri dari 12 apa yang disebut sekolah Kartini (H.I.S.) (Lembaran Negara 1913 nomor 524) dan 18 apa yang disebut sekolah Kabupaten (Lembaran Negara 1914 nomor 592), 4 diantaranya mempunyai bahasa Belanda sebagai mata pelajaran dalam rencana pelajaran, untuk mana menurut paragraf III pasal 3 dari Lembaran Negara 1914 nomor 592 dapat diberi subsidi tersendiri. Jumlah 12 sekolah Kartini menurut bagan tersebut di atas terlalu banyak.

Tidak boleh dilupakan bahwa sudah selayaknya bahwa perkumpulan yang didirikan dengan kerja sama antara orang-orang Eropa dan orang-orang Bumiputera terkemuka, yang bertujuan memenuhi kebutuhan pendidikan bagi gadis-gadis Bumiputera, pertama-tama mengingat kelas yang lebih tinggi dari penduduk Bumiputera, dan untuk kepentingan mereka dipandang perlu sekali sekolah-sekolah type H.I.S.

Meskipun pada penyusunan rencana pembentukan tenaga-tenaga pengajar wanita Bumiputera tidak ditonjolkan kebutuhan bagi H.I.S. untuk gadis-gadis, tetapi pendirian sekolah itu sendiri untuk mendidik personil wanita Bumiputera bagi pendidikan tersebut tidak boleh ditunggu-tunggu lebih lama lagi. Lembaga ini harus sama tingginya (tidak sama) dengan sekolah-sekolah pendidikan guru (kweekschool) yang sudah ada.

Bahwa sekarang belum diajukan usul-usulnya, disebabkan bukan karena takut akan "over" produksi, karena tenaga-tenaga pengajar wanita tersebut akan dapat juga ditempatkan di H.I.S. Campuran, akan tetapi terutama karena sangat kurangnya personil wanita yang cakap untuk mendidik guru-guru wanita Bumiputera.

Maka pada permulaan harus dibatasi pada yang perlu perlu saja.

Pendidikan guru wanita Bumiputera dibatasi pada Kweekschool yang sudah ada. Untuk dapat menghasilkan tiap tahun 15 guru wanita Bumiputera, sudah cukup jika di masing-masing sekolah dari 7 kweekschool yang sudah ada tiap tahun diterima 3 murid wanita. Dengan mengadakan formasi 5 kelas, maka dengan mengingat adanya yang keluar (putus sekolah) dari tiap sekolah diharapkan dapat menghasilkan rata-rata 12 guru wanita. Di tiap sekolah dididik tidak boleh lebih dari 125 murid.

Lain dari pada itu harus dipenuhi kebutuhan akan pemondokan murid wanita dengan pengawasan Eropa.

Untuk penyelesaian masalah pemondokan murid-murid wanita diusulkan agar diusahakan dengan kelompok 6 orang di satu pondokan. Pengurusan pondokan terutama diserahkan kepada isteri-isteri dari tenaga pengajar Eropa dari Kweekschool tersebut. Untuk murid-murid wanita diberi hak tunjangan untuk keperluan hidup per bulan f.10.-- dan untuk makanan extra f.3.--

Tunjangan ini dapat dipergunakan untuk penyediaan tempat pemondokan (jika perlu dengan membangun bangunan tambahan oleh Pemerintah) dan pengawasan uang pondokan sebesar f.25.-- bagi murid pertama dan f.15 bagi murid berikutnya, dipandang sudah layak.

Pengawasan pusat diserahkan kepada Inspektur Pendidikan H.I.S. Setelah menerima persetujuan Gubernur Jenderal akan segera diselidiki, apakah cara pemondokan ini sudah dapat dimulai dalam tahun ini.

Kebutuhan akan sekolah-sekolah bagi gadis-gadis yang lebih sederhana akan jauh melebihi kebutuhan akan sekolah Kartini. Pendidikan guru wanita Bumiputera untuk sekolah bagi gadis harus lebih kuat ditangani daripada pendidikan guru wanita di kweekschool yang ada. Untuk pendidikan ini diusulkan mempergunakan lembaga sekolah normal yang telah didirikan sejak tahun 1915, dengan merubah rencana pelajaran sedemikian rupa sehingga sebagian dari waktu belajar dapat dipergunakan untuk pengajaran yang betul-betul mengenai mata-mata pelajaran kerumah tanggaan.

Jika usul ini dapat disetujui Gubernur Jenderal, maka segera akan diambil tindakan yang perlu atau perlu dipertimbangkan, untuk mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan sekolah itu. Bagi sebagian dari sekolah normal yang diperuntukkan untuk murid-murid wanita, masih ada perubahan rencana pelajaran lagi, yaitu memasukkan bahasa Belanda sebagai mata pelajaran dalam rencana pelajaran, karena menurut bagan tersebut di atas dalam pendidikan rendah bagi gadis-gadis dari kelas yang lebih baik harus diajarkan juga bahasa Belanda. Pada sekolah normal demikian disusulkan bahasa Belanda diajarkan di kursus-kursus sore hari.

Maka dari itu guru wanita keluaran dari sekolah normal tidak akan disertai mengajar bahasa Belanda di sekolah bagi gadis. Tetapi karena mereka itu tergolong jadi tenaga pengajar penting bahkan sering menjadi Kepala Sekolah bagi gadis-gadis, maka sedikit pengetahuan bahasa Belanda demi kedudukan dan wibawa mereka harus dimiliki.

Di sekolah normal bagi guru wanita yang pertama-tama akan diberikan bahasa Belanda harus segera mulai diajarkan, karena sekarang kebutuhan yang paling besar ialah kebutuhan pendidikan rendah bagi gadis-gadis dari kalangan terdidik dan terkemuka. Lama-kelamaan jumlah sekolah bagi gadis tanpa bahasa Belanda akan jauh melebihi dari jumlah sekolah gadis dengan bahasa Belanda. Keadaan memaksa, bahwa harus dimulai dengan yang paling sederhana, dan tidak akan memberikan perkiraan berapa jumlah sekolah normal yang akan didirikan bagi pendidikan tenaga pengajar wanita. Lagi pula perkiraan itu sangat sulit, karena adanya faktor-faktor sebagai berikut:

1. Keharusan, supaya jika sudah cukup tersedia personil yang diperlukan, perlu segera didirikan sekolah bagi gadis-gadis, atau sekolah "vervolg", dalam jumlah besar-besaran.
2. Keharusan, untuk memperlancar guru-guru wanita negeri kepada sekolah bagi gadis swasta, supaya prakarsa swasta dengan adanya pendidikan guru wanita keaktifan kerjanya dapat lebih dikembangkan.

3. Guru-guru wanita Bumiputera yang terdidik baik dapat ditempatkan di sekolah Bumiputera kelas 2 Campuran.
4. Adanya kenyataan yang pasti, bahwa sebagian besar guru-guru wanita setelah selesai pendidikannya akan kawin.
5. Mereka, yang telah mengikuti tujuan kodrat ini, tidak selamanya hilang bagi pendidikan, karena banyak guru wanita yang telah kawin tetap bekerja dalam dinas Pemerintah, atau mendirikan sekolah sendiri dan dengan demikian berguna bagi masyarakat sekelilingnya.

Bagi mereka, yang karena kewajiban rumah tangga tidak dapat jadi guru atau mendirikan sekolah, pendidikan yang telah dinikmati itu merupakan suatu keuntungan.

Dengan uraian di atas akan menjadi lebih jelas, bahwa jumlah sekolah normal puteri pasti akan di bawah jumlah sekolah normal putera. Bahwa sekarang hanya berani mengusulkan beberapa sekolah normal puteri, disebabkan karena kekurangan personil wanita yang cakap untuk memberikan pendidikan lanjutan.

Personil sekolah normal puteri harus terdiri dari tenaga pengajar puteri, dan untuk sekolah lengkap dari 4 kelas terdiri dari 1 Direktris Eropa dan 4 guru wanita Bumiputera yang terdidik di Kweek-school, dan selanjutnya guru puteri untuk mata pelajaran rumah tangga.

Karena dalam tahun yang akan datang (1918) belum ada atau masih sangat kurang personil puteri, dan pembukaan lembaga-lembaga pendidikan demikian tidak dapat ditunda-tunda lebih lama lagi, maka diusulkan supaya sekolah normal puteri yang pertama didirikan akan dikepalai oleh seorang guru laki-laki Eropa, yang isterinya bersedia dan cocok untuk diserahi mata pelajaran rumah tangga (c.q. mata pelajaran lain), pengawasan pondokan, serta pendidikan murid-murid.

Personil lainnya - jika belum ada tenaga pengajar wanita - dapat terdiri dari guru-guru laki-laki yang agak berumur, yang isterinya dapat diserahi pengurusan sehari-hari dari rumah-rumah pondokan, dengan diberi tunjangan yang layak.

Diusulkan supaya didirikan 3 sekolah normal puteri, untuk daerah bahasa Jawa, daerah bahasa Sunda dan daerah bahasa Melayu.

Karena di daerah Sunda tahun depan akan didirikan sekolah normal swasta, yang direncanakan dan diatur menurut sistim yang diusulkan Direktur P.A., maka sekarang hanya diusulkan 2 sekolah normal putri di Jawa Tengah dan di Sumatera Barat.

Jika Gubernur Jenderal dapat menyetujui usul-usul dan rencana pelaksanaannya tersebut di atas, maka segera akan dilakukan tindakan yang perlu seperti memilih guru-guru wanita Eropa yang cakap yang diperlukan, yang harus segera tekun dan giat mempelajari bahasa daerah Bumiputera serta ilmu bangsa-bangsa, agar supaya segera dapat disertai pimpinan sekolah normal puteri.

Berusaha mendapat jaminan kerja-sama dan bantuan ahli, supaya pengaturan dari sekolah-sekolah normal puteri pertama dan hal lain yang berhubungan dengan itu dapat dilaksanakan dengan baik (rencana pelajaran, buku pelajaran untuk pengajaran rumah tangga, reglemen sekolah, dll.).

(Rancangan biaya dari sekolah-sekolah normal putri yang diusulkan).

Dengan cara yang sama personil untuk Kweekschool putri harus diatur nanti pada waktunya.

Salinan surat ini disampaikan kepada Direktur Keuangan dan Direktur Pekerjaan Umum. Salinan disampaikan kepada Direktur Pekerjaan Umum mengingat penyediaan gedung dan ruangan untuk 2 sekolah normal putri dan mungkin sekali penambahan bangunan dari beberapa perumahan guru Kweekschool untuk pondokan murid-murid puteri.

Gubernur Jenderal diharap mohon kepada Menteri dapat menyetujuinya, dan pula mengijinkan bahwa sambil menunggu keputusan dari pembuat undang-undang anggaran belanja, sudah dapat segera dimulai dengan tindakan untuk pemondokan sementara dari 2 sekolah normal puteri. Untuk cepatnya, mohon persetujuan dikawatkan.

SEKOLAH MENENGAH HINDIA BELANDA
(INDISCHE MIDDELBARE SCHOOL)

72. Surat Pj. Direktur Pendidikan dan Agama (F.K. Creutzberg) kepada Gubernur Jenderal (Van Limburg Stirum) tanggal 18 Mei 1917 no.13795

Dengan surat Menteri Jajahan tanggal 2 Maret 1916 bagian A1 nomor 227/446 disampaikan kepada Gubernur Jenderal beberapa eksemplar laporan dari Komisi nasehat mengenai pendidikan menengah (persiapan pendidikan tinggi) yang sesuai di Hindia Belanda. Dijanjikan pula akan dikirim eksemplar laporan itu dalam jumlah yang banyak agar supaya dapat dibagi-bagikan kepada berbagai orang dan lembaga serta pers.

Menteri Jajahan lebih lanjut menerangkan, bahwa ia dan Komisi yakin bahwa sangat penting untuk segera mengambil keputusan mengenai penyediaan bahan pendidikan yang diusulkan dalam laporan itu. Bahwa ia dapat menyetujui seluruhnya tujuan umum dari laporan itu.

Akhirnya kepada Gubernur Jenderal dimohon supaya segera mungkin membicarakan laporan itu, dan segera mungkin menyampaikan pendapatnya tentang pandangan dan usul-usul dalam laporan itu.

Salinan dari surat Menteri tersebut dikirimkan pula kepada Direktur Pendidikan dan Agama yang lama dengan surat pengantar tanggal 29 April 1916 nomor 12094 untuk diberi nasehat dan kabar.

Dengan suratnya tanggal 18 September 1916 nomor 24942 Direktur P.A. (Dr. Moresco) memberitahukan, bahwa penyebaran laporan tersebut kepada para penguasa yang patut menerima, baru dapat dilaksanakan kira-kira pertengahan bulan Agustus 1916, dan karena itu ia akan dapat menyampaikan nasehatnya kepada Gubernur Jenderal dalam bulan Desember 1916. Tetapi karena sakit dan kemudian berangkat ke Eropa, ia tidak dapat menepati janjinya.

Creutzberg sebagai penggantinya sekarang memenuhi tugas itu, dan untuk dapat diperiksa dengan mudah ia menyampaikan nasehatnya dalam bagian-bagian seperti berikut:

A. Penyimpulan isi laporan.

B. Pandangan umum mengenai beberapa hal yang prinsipil.

C. Pembahasan beberapa detail dari laporan itu.

D. Usul-usul.

A. Penyimpulan isi laporan

Laporan dibuka dengan penjelasan dari tugas yang diberikan kepada Komisi untuk memberi nasehat dan penyuluhan tentang cara bagaimana memenuhi kebutuhan akan pendidikan menengah (persiapan pendidikan tinggi) di Hindia Belanda, yang menyesuaikan diri dengan kepentingan dan kebutuhan khas Hindia Belanda bagi berbagai golongan penduduk, dan yang memberi kesempatan untuk memperoleh ijazah, yang memberikan hak-hak yang sama terhadap penerimaan pelajaran dan ujian pada universitas dan lembaga pendidikan tinggi lainnya di negeri Belanda, seperti yang diberikan sebagai ijazah yang sekarang diminta untuk pendidikan tinggi.

Isi dari laporan sesungguhnya disimpulkan dalam 9 bab yang isinya disebutkan dalam garis-garis pokok seperti yang akan dikemukakan di bawah ini. Kemudian akan menyusul laporan tersendiri dari anggota W.H. Bogaardt.

Garis-garis pokok itu ialah:

1. Ringkasan pendidikan persiapan pendidikan tinggi, pendidikan universiter, dan pendidikan kejuruan tinggi di India serta juga syarat-syarat masuk bagi mahasiswa India ke universitas Inggris.
2. Beberapa keterangan tentang pendidikan di Jepang.
3. Ringkasan perbandingan dari waktu-waktu pelajaran di sekolah, yang direncanakan Komisi, dengan beberapa pendidikan menengah (persiapan pendidikan tinggi) lainnya.

BAB I: Pandangan Umum

Paragraf 1

Memberikan sketsa dari keadaan pendidikan sekarang. Hanya E.L.S. dimana diajarkan bahasa Perancis, membuka kesempatan berikutnya untuk pendidikan tinggi.

Dalam paragraf 2 ditunjukkan keharusan perlu adanya pendidikan persiapan bagi pendidikan tinggi yang memenuhi kebutuhan khas Hindia Belanda dan dapat dimasuki oleh semua golongan penduduk.

Pendirian Komisi ialah konvergensi pada pendidikan rendah (E.L.S., H.I.S., dan H.C.S.) dan unifikasi pada pendidikan lanjutan.

Dalam paragraf 3 dijelaskan tentang pentingnya bahasa Belanda bagi pendidikan di Hindia Belanda yang diarahkan ke kemajuan Barat, hal ini juga penting dari sudut pandangan politik.

Bahasa Belanda, dan bukan salah satu dari bahasa-bahasa Bumiputera, harus jadi bahasa pengantar dalam pendidikan itu.

Dalam paragraf 4 ditunjukkan, bahwa anak Bumiputera (juga anak Cina) dibandingkan dengan murid Belanda dibebani tidak sama beratnya, dan ini dapat menimbulkan bahaya, bahwa di satu pihak ada bebanan terlalu berat dan di pihak lain ada penarikan waktu pendidikan (menjadi lebih lama).

Untuk mencegah ini, maka pada umumnya disarankan, agar supaya untuk bahasa Belanda jangan ditentukan syarat-syarat yang terlalu tinggi dan kaku, dan harus lebih memperhatikan apa yang dibutuhkan masyarakat Hindia Belanda sekarang daripada memperhatikan tradisi pendidikan di sini (Belanda).

Dalam paragraf 5 ditentang keras pendidikan bahasa Perancis di sekolah rendah.

Dalam paragraf 6 dikemukakan perlunya pembatasan-pembatasan yang rasional dari bahan pelajaran, untuk mencegah waktu pelajaran yang terlalu lama.

Dalam paragraf 7, dalam hubungan yang sama diberikan perbandingan antara pendidikan Barat di Hindia Belanda dengan pendidikan Barat di India dan di Jepang, di mana bahan pelajaran menurut perbandingan sangat terbatas.

BAB II: Pengaturan Umum dari sekolah Hindia Belanda untuk pendidikan menengah (persiapan pendidikan tinggi)
Indische Middelbare School (I.M.S.)

Paragraf 8, memuat penjelasan-penjelasan lebih lanjut tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pendidikan yang berhubungan dengan kepentingan dan kebutuhan khas Hindia Belanda. Syarat-syarat itu terdiri dari 3 bagian:

1. Banyak pengajaran bahasa Belanda (bagi Hindia Belanda dan orang-orang Hindia Belanda - dasar dari peradaban Barat dan mata pelajaran kebudayaan, yang di sini harus menggantikan tempat sastra klasik di negeri Belanda), untuk lain-lainnya perlu ada pembatasan yang efektif dengan menghindari hal yang berat sebelah, dan akhirnya memberikan tempat kepada kebudayaan Hindia Belanda.

Menurut Paragraf 9, Komisi menganggap perlu ada penyimpangan dari sistim Belanda dalam hal mengenai bentuk, yaitu bukan merupakan satu kursus yang bersambungan jadi satu, tetapi dipecah dalam dua bagian, yaitu bagian bawah (onderbouw) yang umum dan ditujukan pada pendidikan yang lebih luas dari murid-murid, dan bagian atas (bovenbouw) yang dibagi dalam dua jurusan pokok yaitu jurusan sastra-sejarah dan jurusan ilmu pasti ilmu alam. Masing-masing bagian lamanya belajar 3 tahun.

I.M.S. tidak akan dapat sama dan sebangun dengan Gymnasium Belanda atau H.B.S. 5 tahun Belanda. Tetapi I.M.S. dapat dan harus mempunyai persamaan, bahwa pendidikannya ditujukan untuk menumbuhkan kecakapan untuk mempelajari ilmu pengetahuan sendiri, atau dengan kata lain membawa murid ke tingkat pengetahuan dan kemajuan yang memungkinkan pelajaran (studi) universitas; Mengenai kekuatan mendidik dan mengembangkan, pendidikan pada I.M.S. harus senilai dan setaraf dengan pendidikan pada H.B.S. atau Gymnasium.

Dalam Paragraf 10 dijelaskan keuntungan dalam pecahan menjadi onderbouw dan bovenbouw ini, yaitu pendidikan personil yang lebih mudah dan kemungkinan untuk memberikan kepada onderbouw 3 (tiga) tujuan, ialah merupakan lembaga untuk pendidikan akhir, lembaga untuk persiapan untuk sekolah kejuruan, dan lembaga persiapan untuk bovenbouw, penundaan pemilihan pekerjaan, pemilihan (seleksi) yang lebih baik dari murid-murid untuk pendidikan tinggi dan penghematan biaya dan kemungkinan perluasan yang lebih besar.

BAB III: Bagian bawah (onderbouw)

Komisi menganjurkan MULO yang sudah ada sebagai "onderbouw", yang rencana pelajarannya harus ditinjau kembali. Bahasa Melayu akan dimasukkan dalam rencana pelajaran. Di samping bahasa Belanda hanya akan diajarkan bahasa Inggris.

Dalam Paragraf 21 dijelaskan lagi, bahwa "onderbouw" dengan rencana pelajaran yang ditujukan pada kemajuan umum yang harmonis dapat dipergunakan selain sebagai dasar bagi "bovenbouw", juga dapat dipergunakan untuk tujuan lain seperti untuk pendidikan akhir dan untuk persiapan ke pelajaran kejuruan di Hindia Belanda, meskipun mungkin sekali pelajaran pada beberapa sekolah kejuruan harus diperpanjang waktunya dengan satu tahun untuk "propaedeuse" yang lebih khusus.

BAB IV: Bagian atas (bovenbouw)

Paragraf 22 memberikan gambaran tentang tujuan dan pengaturan pendidikan di "bovenbouw" pada umumnya. Sifat persiapan ke pendidikan tinggi akan nampak jelas pada pendidikan dimana mata pelajaran tidak diikuti sama oleh murid-murid.

Menurut Paragraf 22 Komisi menginginkan, supaya pemecahan yang diusulkan dalam 2 jurusan - bagian sastra-sejarah (A) dan bagian ilmu pasti-alam (B) jangan menjurus ke penekanan pada jurusan yang satu atau yang lain. Maka dari itu bagian A jangan diabaikan pengajaran ilmu alam, kimia dan hayat, begitu pula di bagian B jangan diabaikan pengajaran bahasa dan kesusasteraan Belanda dan bahasa Melayu.

Dalam paragraf 24 ditegaskan, bahwa bagian B harus memberikan hasil yang sama mengenai mata-mata pelajaran ilmu-pasti dan ilmu-alam seperti H.B.S.5 tahun yang sudah ada.

Dalam paragraf 25 diperjuangkan, supaya di bagian A diadakan pengajaran sastra-sejarah Hindia Belanda.

Komisi beranggapan: "- usaha ke pengetahuan dari kebudayaan sendiri, orientasi ilmiah dalam suasana intelektual, di mana mereka harus hidup, bekerja, dan memangku jabatan pimpinan, merupakan hak dan kewajiban bagi orang-orang Hindia Belanda".

Di samping mempelajari lebih lanjut bahasa Melayu, bahasa Jawa (- dipandang dari sudut pandangan sejarah kebudayaan bahasa yang paling penting di Nusantara Hindia Belanda -) diterima sebagai salah satu mata pelajaran dalam "humaniora" Hindia Belanda, begitu pula ilmu pengetahuan purbakala Hindia Belanda dan Ilmu Bangsa-bangsa Hindia Belanda.

Paragraf 26 mengenai pemecahan bagian A dalam bagian-sastra-sejarah Timur (A.I) dan bagian klasik Barat (A.II). Tentang perlunya dan keharusannya pembagian tersebut ada perbedaan pendapat dalam Komisi.

Sebagian menganjurkan bagian klasik Barat (A.II) dengan penuh keyakinan, sebagian lainnya menganggap bagian A.II hanya sebagai:

"Tindakan darurat sementara" dengan pertimbangan supaya ada sambungan langsung antara I.M.S. dengan salah satu cabang pendidikan universitas di negeri Belanda yaitu fakultas Hukum, yang sangat penting bagi penduduk Hindia Belanda.

Pencantuman bahasa Latin dalam rencana pelajaran I.M.S. tidak menimbulkan keberatan, jika sudah ternyata bahwa tidak mungkin diterima di ujian juridis pada universitas Belanda tanpa persiapan bahasa Latin.

Seluruh Komisi sepakat untuk mendesak, supaya dipertimbangkan agar supaya pemuda Hindia Belanda yang telah memperoleh pendidikan tanpa bahasa Latin di I.M.S., yang setaraf (sama tingginya meskipun tidak sama dan serupa) dengan pendidikan di negeri Belanda, diberi kesempatan menempuh ujian kandidat Hukum di negeri Belanda.

Sebagian yang lain berpendapat, bahwa selama hukum Romawi merupakan bagian integral dari pelajaran hukum di universitas-universitas negeri Belanda, bagi mereka yang tidak mengetahui sepatah kata bahasa Latin akan sangat sukar bahkan tidak mungkin untuk mengikuti pelajaran hukum itu dengan berhasil.

Akhirnya Komisi beranggapan, bahwa sama sekali bukan keharusan bahwa bovenbouw harus terdiri dari 3 bagian, dalam beberapa hal cukup 2 atau 1 bagian saja.

BAB IV: Pandangan-pandangan Penutup

Dalam paragraf 37 dinyatakan, bahwa waktunya sekarang belum tiba untuk mendirikan universitas sendiri di Hindia Belanda, dan selama itu adalah kewajiban negeri Belanda, untuk sejauh mungkin membuka pintu gerbang dari sekolah tingginya bagi pemuda-pemuda Hindia Belanda. Ini adalah tuntutan hak dan keadilan, tuntutan politik dari zaman, dan tuntutan kepentingan nasional sendiri.

Sesudah dalam paragraf 38 menganjurkan untuk menyediakan beasiswa secara besar-besaran bagi pelajaran di sekolah tinggi negeri Belanda dan untuk mendirikan suatu Badan Pemerintah untuk mengawasi dan membina mahasiswa Hindia Belanda dengan beasiswa, maka Komisi mengakhiri laporannya dan dalam paragraf 39 mendesak supaya segera diadakan keputusan mengenai penyediaan sarana pendidikan tersebut.

Nota tersendiri dari anggota Komisi, W.H. Bogaardt, menyatakan keberatan terhadap:

1. Bahasa Melayu dimasukkan sebagai mata pelajaran wajib dalam rencana pelajaran I.M.S., karena pengajaran di I.M.S. sejauh mungkin harus dibina ke arah Barat.
2. Tentang pembagian Bagian A dengan adanya Bagian A.I bagian sastra-sejarah Timur.

B. Pandangan umum (dari Direktur Pendidikan dan Agama) mengenai laporan

Pertama-tama menyatakan penghargaan kepada Komisi atas cara kerjanya, yang telah dapat membuahkan hasil yang sangat dihargai dengan

rasa terima kasih oleh Hindia Belanda, terutama generasi yang sedang tumbuh.

Bahwa Komisi yang begitu heterogeen telah berhasil dengan hampir mencakup seluruhnya dengan kesepakatan mengembangkan rencana lengkap bagi pendirian I.M.S.

Apa yang dikemukakan Komisi dalam paragraf 37, dihubungkan dengan pernyataan Gubernur Jenderal lama (Idenburg) sangat disetujui dan tidak perlu ada penambahan-penambahan.

Rencana pendidikan yang telah disusun Komisi, yang dipertimbangkan dengan masak dan dikerjakan sampai mendetail, dalam hal-hal pokoknya dapat disetujui seluruhnya. Rencana ini dengan sedikit perubahan harus dilaksanakan dengan segera. Jika kritik atas rencana itu harus dibantah satu demi satu, hanya akan mempersukar dan memperlambat pelaksanaannya.

Yang dimaksud dengan kritik di atas ialah pandangan dan pernyataan dari sementara orang, yang telah dikirim eksemplar laporan Komisi oleh Departemen Pendidikan dan Agama oleh Direktur lama (dr. Moresco). Keuntungannya ialah, bahwa rencana itu telah diperkenalkan kepada publik (= masyarakat umum) yang dapat berpikir, dan tidak seperti yang telah sering terjadi suatu lembaga pendidikan penting telah didirikan tanpa seorangpun yang berkepentingan telah diberi kesempatan mengeluarkan pendapatnya.

Setelah menghubungi para Inspektur MULO dan pendidikan menengah dipandang perlu adanya beberapa perubahan. Mengenai hal lainnya setuju dengan laporan, yang telah dilengkapi dengan alasan yang begitu baik, sehingga kritik sebagian besar telah mendapat bantahannya dalam laporan tersebut.

Dari nasehat yang diterima dan dari laporan Bogaardt dibuat penyimpulan singkat dari pandangan dan pernyataan, dan dilampirkan pada surat ini.

Sifat "khas Hindia Belanda".

Menurut paragraf 8 ternyata bahwa jika I.M.S. dibandingkan dengan lembaga pendidikan model Belanda, maka sifatnya adalah:

1. Memberikan tempat yang sangat penting kepada bahasa dan kesusasteraan Belanda.
2. Menghindari bahan pelajaran yang bagi Hindia Belanda hanya merupakan beban tidak berguna (ballast).
3. Memasukkan dalam rencana pelajaran, beberapa mata pelajaran kebudayaan Hindia Belanda, antara lain sedikit satu bahasa Bumiputera dengan kesusasteraannya.
4. Demikian pula pembentukan bagian A.I bagian sastra sejarah Timur.

Apa yang diusulkan di ad.1 dan ad.2 dapat diterima begitu saja, tetapi ad.3 minta dibicarakan lebih lanjut, juga sehubungan dengan perbedaan pendapat di antara banyak anggota Komisi dan juga nota anggota Komisi W.H. Bogaardt.

Satu masalah yaitu di tempat mana kebudayaan sendiri dari daerah ini harus ditempatkan dalam bagan Hindia Belanda dalam pendidikan persiapan bagi pendidikan tinggi.

Masalah ini harus ditinjau dari 2 sudut pandangan yaitu: dari sudut pandangan politik jajahan umum, yang perkembangannya merupakan proses sejarah yang lamban, yang titik akhirnya terletak di masa depan yang jauh tidak menentu, dan dari sudut pandangan dalam batas politik pendidikan praktis.

Dari sudut pandangan politik jajahan umum:

Dalam kebudayaan Hindia Belanda seluruhnya atau dalam bagian-bagiannya ada benih yang akan mendorong menyongsong masa depan kehidupan berdiri sendiri - (meskipun masih begitu jauh) - dengan kemerdekaan tata negara, dan kemudian menghendaki kebijaksanaan politik, yang menginginkan tidak ada apa-apa yang menghalang-halangi jalannya pertumbuhan (- untuk tidak mengatakan adanya usaha dengan sengaja untuk memajukannya -), maka mau tidak mau kebudayaan Barat dalam arti sejarah harus dipandang sebagai sarana dan bukan tujuan akhir.

Dalam jalan pemikiran ini, maka perbedaan pendapat dalam Komisi tersebut di atas, dapat dianggap sudah diputuskan oleh arah politik jajahan modern yang dimenangkan bagian terbesar dalam Komisi.

Dari sudut pandangan politik pendidikan praktis: pada dasarnya diakui kebenaran pernyataan Komisi mengenai arti pentingnya mata pelajaran kebudayaan Hindia Belanda.

Dengan panjang lebar dijelaskan, bahwa menurut pendapatnya, yang diinginkan oleh orang-orang Hindia Belanda, yang mau maju, hanya pendidikan Barat, atau lebih baik dikatakan pendidikan yang sama jenisnya dengan yang dinikmati oleh orang Barat.

Lembaga pendidikan yang diusulkan sudah cukup memenuhi keinginan mereka, dan dianjurkan supaya sebanyak mungkin dihindari hal-hal yang dapat memberi kesan seolah-olah di sini hanya diberikan yang "bagi orang Hindia Belanda cukup baik".

Oleh karena itu jangan sampai ada paksaan untuk mengarah kepada "jurusan Hindia Belanda", misalnya dengan memasukkan pelajaran bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib dalam rencana pelajaran, walau bagaimanapun sedikitnya argumentasi yang ada dalam laporan (paragraf 16).

Keputusan sebaiknya diserahkan kepada masyarakat, dan sejauh mana para orang tua memandang perlu untuk memberikan bahasa Melayu kepada anak-anak mereka, dan apakah bahasa tersebut diberikan secara wajib atau pilihan.

Selanjutnya kebudayaan Nusantara dapat diberikan melalui mata pelajaran lain seperti sejarah, dan ilmu bumi, asal saja jangan ditonjolkan secara menyolok.

Karena alasan tersebut di atas, Direktorat P dan A mengusulkan agar bagi sekolah yang akan didirikan sebaiknya diberikan nama lain dari pada I.M.S. (Indische Middelbare School), misalnya Sekolah bagi Persiapan Pendidikan Tinggi (School van Voorbereidend hooger onderwijs). Seperti yang telah dikemukakan dalam paragraf 25, dan sambutan yang hangat serta simpati terhadap kebudayaan Nusantara, dan dukungan terhadap bagian sastra dan sejarah Timur, tidak perlu dibicarakan lagi bahwa hal tersebut merupakan hal yang bernilai tinggi. Tanpa diragukan lagi bahwa apa yang dinamakan dengan "Humaniora Hindia Belanda" menempati tempat yang penting.

Dalam hubungan ini sejauh mana masyarakat Bumiputera menilai kebudayaannya sendiri? Jika mereka dianggap sebagai anak kecil, maka mereka akan tertarik kepada sesuatu yang berkilauan, dalam hal ini kebudayaan Barat. Baru kemudian mereka akan menyadari akan nilai kebudayaannya sendiri.

Pentingnya bagian Sastera Timur dapat ditinjau secara ganda. Pertama mengenai nilai pasarannya yaitu seseorang yang mampu menggunakan bahasa Belanda akan memperoleh tempat yang terhormat dalam masyarakat, dan kedua mereka akan menyadari bahwa kebudayaan Barat di mana bahasa Belanda merupakan bagian dari padanya, lebih berkembang dari pada kebudayaan mereka.

Oleh karena itu bagian Sastera Timur akan segera memperoleh sukses. Kemungkinan besar bahwa studi ini akan banyak menarik minat karena pada ijazahnya dilekatkan hak yang mempunyai "effectus civilis". Bagaimana pun juga suksesnya bagian ini terletak kepada masyarakat sendiri, dan di kemudian hari jika dipandang perlu akan diadakan dorongan agar bagian sastera Timur ini segera dilaksanakan.

Direktur P dan A telah berkesempatan untuk membicarakan tentang ciri-ciri khas dari pada bagian sastera Timur I.M.S. ini dengan Dr. Hazeu dan ingin mengetahui pandangannya mengenai masalah tersebut. Seperti diketahui Dr. Hazeu adalah anggota Komisi penasehat, di mana nasihatnya akan berbobot dan sangat berpengaruh. Dr. Hazeu dapat menyetujui sepenuhnya.

Mengenai Bagian A.II bagian klasik Barat.

Dalam Komisi terdapat perbedaan pandangan yang prinsipil mengenai bagian ini. Ia dapat menyetujui pendapat para anggota Komisi yang beranggapan, bahwa bagian sastera Barat hanya akan dapat diterima, jika sudah ada kepastian, bahwa tanpa persiapan klasik Barat tidak mungkin untuk menerima mereka (para tamatan I.M.S.) dalam ujian-ujian juridis pada universitas Belanda.

Terpisah dari hasil pembicaraan antara Menteri Jajahan dan Menteri Urusan Dalam Negeri, ia berpendapat bahwa daya hidup dari bagian sastera Barat dari I.M.S. harus dibuktikan oleh praktek. Menurut

pendapatnya, akan sukar sekali untuk membela bahwa pendidikan klasik Barat dapat dicapai bagi murid I.M.S., tetapi tidak atau sementara belum dapat dicapai bagi murid-murid H.B.S.biasa. Dalam hubungan ini perlu diingatkan kembali usul-usul Hindia Belanda dahulu untuk mengubah sekolah Koning Willem III di Betawi menjadi Lyceum, tentang mana Menteri Jajahan belum dapat mengambil keputusan terakhir, karena menunggu laporannya.

Sehubungan dengan itu ia usulkan, supaya rencana Lyceum lama dan penambahan bagian klasik Barat pada I.M.S. bersamaan dipertimbangkan, dan pada waktunya ia akan mengajukan usul-usulnya.

Mengenai masalah ini telah diadakan pembicaraan dengan Dr. Hazeu, yang mengemukakan pendapatnya bahwa masih perlu diadakan penyelidikan lebih dahulu tentang daya hidup bagian klasik Barat pada I.M.S. Apabila segera diadakan bagian klasik Barat, sedangkan bagian sastra Timur harus menunggu, akan merupakan tindakan yang sangat disesalkan, dan akan sangat merugikan perkembangan dari lembaga pendidikan yang baru ini, yang justru harus diperhitungkan dengan kebutuhan Hindia Belanda.

Masalah yang penting selanjutnya ialah pemecahan sekolah itu dalam "onderbouw" dan "bovenbouw", yang berhubungan dengan 3 macam tujuan dari "onderbouw".

Pembagian dalam "onderbouw" dan "bovenbouw" dengan alasan yang dikemukakan Komisi dalam paragraf 9 dan paragraf 10 dapat disetujui sepenuhnya.

Menurut pendapatnya keuntungan yang terpenting ialah, bahwa dengan pemecahan itu timbul kemungkinan untuk memberikan 3 sifat kepada "onderbouw" yaitu sifat sebagai pendidikan akhir, sifat sebagai persiapan ke sekolah kejuruan, dan sifat sebagai persiapan ke "bovenbouw".

Pendapat sementara anggota Komisi, bahwa akan juga ada keberatan yang bersifat teknis pendidikan terhadap 3 macam tujuan itu, tidak dapat disetujui. Tidak akan ada keberatan teknis pendidikan, asalkan "onderbouw" tetap bersifat "pendidikan umum" dan merupakan keseluruhan yang bulat.

Pendapat Komisi tersebut berlawanan dengan apa yang dikemukakan sendiri dalam paragraf 21, dimana Komisi menggambarkan dengan tepat cara bagaimana "onderbouw" akan bekerja sebagai lembaga persiapan pelajaran kejuruan misalnya sekolah kedokteran, sekolah pendidikan pegawai (pangreh praja) Bumiputera, sekolah ahli hukum, sekolah pertanian, dan sekolah kedokteran hewan.

Bagian persiapan dari sekolah-sekolah kejuruan yang ada akan dapat diganti dengan "onderbouw" tersebut.

Kemungkinan terakhir ini telah dibicarakan pada waktu membicarakan persiapan reorganisasi H.I.S. dan MULO, yang dilaksanakan dalam tahun 1914, yaitu memindahkan persiapan-persiapan dari sekolah-sekolah kejuruan ke sekolah MULO.

Penghapusan sesungguhnya dari bagian persiapan itu akan baru dapat diusulkan untuk dipertimbangkan, jika MULO sudah tumbuh penuh dalam bentuknya yang baru, sudah ada penilaian tentang kecakapannya dalam menyiapkan calon-calon murid sekolah kejuruan, dan sesudah ada kepastian, bahwa bagian kejuruan dari sekolah kejuruan akan dapat dicukupi sepenuhnya hanya melalui jalan "onderbouw" IMS (= MULO).

Pendapat ini sesuai dengan pendapat Direktur NIAS dalam suratnya tanggal 10 Januari 1917 nomor 6.

Menurut pendapatnya (Direktur P.A.) perlu sekali adanya Peraturan Umum mengenai kedudukan pegawai negeri Eropa dan Bumiputera dengan memperhitungkan pendidikan sekolah yang dinikmati dan lamanya pendidikan.

"Onderbouw" sebagai pendidikan akhir.

Dalam paragraf 21 Komisi mengemukakan, bahwa "onderbouw" dengan kursus 3 tahun dalam batas-batas yang dapat tercapai akan dapat memberikan pengetahuan dan pendidikan umum, yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan Hindia Belanda, kepada mereka yang sesudah selesai pelajaran akan memperoleh pekerjaan sederhana dalam masyarakat Hindia Belanda, dan dengan mengikuti kursus tambahan akan dapat mencapai jabatan yang lebih tinggi di Jawatan dan Perusahaan tertentu (Rumah Gadai, Kereta Api, dll.)

Pendapat Komisi sungguh tepat sekali.

Catatan Komisi:

Tidak ada keberatan, bahwa dalam praktek di beberapa tempat di samping "onderbouw" dari I.M.S. didirikan bagian, di mana hanya diberikan pendidikan rendah yang diperluas, dalam arti seperti di negeri Belanda. Mengenai hal ini dahulu juga pernah diketengahkan oleh Direktur Pendidikan lama (Dr. Moresco) dalam suratnya tanggal 5 Agustus 1916 nomor 20279 dan diteruskan dengan surat Hindia Belanda tanggal 29 September 1916 nomor 938/37. Dr. Moresco berpendapat, bahwa sukar sekali untuk memutuskan mengenai masalah perlunya beberapa sekolah MULO nanti dalam reorganisasi tetapi dipertahankan seperti keadaan sekarang, tanpa sekaligus memberi keputusan tentang pendirian sekolah menengah Hindia Belanda.

Menurut pendapatnya (Direktur P.A. sekarang), mempertahankan beberapa sekolah MULO dalam bentuknya sekarang disamping "onderbouw" dari I.M.S. yang direncanakan (= MULO yang direorganisir) tidak perlu dan juga tidak diinginkan.

Melanjutkan MULO demikian hanya akan dapat dipertimbangkan, jika ada keharusan untuk menentukan syarat-syarat yang lebih keras untuk penerimaan ke "onderbouw" dari I.M.S. daripada yang dilakukan sekarang terhadap MULO. Menurut pendapatnya keharusan itu tidak ada, dan pemilihan (seleksi) murid menurut kecakapan untuk persiapan ke pendidikan tinggi dan pendidikan kejuruan akan baru dapat dibicarakan sesudah mengakhiri pelajaran di "onderbouw". Agak berbeda halnya dengan MULO khusus bagi gadis-gadis. Komisi menganggap, bahwa kemungkinan tidak tertutup, bahwa untuk sekolah ini direncanakan rencana pelajaran yang sedikit banyak diubah (paragraf 20). Untuk hal ini perubahan peraturan pemberian subsidi kepada MULO yang sedang diadakan akan banyak memberikan kesempatan. Sebagaimana dikemukakan dalam suratnya yang bersangkutan tanggal 1 Pebruari 1917 nomor 4844, sementara tidak ada alasan untuk mendirikan MULO negeri bagi gadis-gadis.

(syarat-syarat wewenang mengajar bagi personil pengajar, pernyataan mengenai rencana pelajaran "onderbouw" dan rencana pelajaran "bovenbouw").

Mengenai luasnya pengajaran bahasa Latin.

Dalam paragraf 30 dari Laporan Komisi dikemukakan, bahwa pengajaran bahasa Latin di bagian A.II tidak hanya akan memberikan pengetahuan teknis yang perlu bagi calon-calon mahasiswa hukum, tetapi juga yang akan dapat dipergunakan pada pemberian pendidikan klasik, jika dapat tercapai oleh mereka yang hanya mempelajari bahasa Latin. Anjuran ini menduakan angan-angan. Dalam paragraf 26 Komisi menganggap, bahwa bahasa Latin hanya diajarkan, jika sudah ada kepastian, bahwa tanpa pengetahuan bahasa Latin tidak mungkin mahasiswa yang dididik di IMS dapat diterima di fakultas hukum universitas negeri Belanda.

Menurut pendapat Direktur Pendidikan, karena di sini menyangkut soal pelajaran hukum, pemberian pengetahuan bahasa Latin sebanyak mungkin yang diperlukan untuk dapat mengerti "Pandecten" yang relatif sederhana, dimana perlu dengan ditambah sedikit pengetahuan sejarah Romawi. Jangan berusaha ke pendidikan klasik, yang meningkatkan bahasa Latin lebih dari pada yang diperlukan. Pendidikan klasik tanpa pengetahuan bahasa Yunani hanya dangkal.

Karena penambahan bagian klasik Barat, jika sekiranya usulnya diikuti sementara belum akan dilaksanakan, maka masalah pendidikan bahasa Latin ditinggalkan saja dahulu.

(Beasiswa untuk mahasiswa di universitas-universitas negeri Belanda; pengawasan atas mahasiswa tersebut; menyesuaikan undang-undang pendidikan dengan pendirian I.M.S.; rancangan biaya).

Tempat berdirinya sekolah persiapan pendidikan tinggi yang pertama dipilih Yogyakarta, karena sesudah Betawi, Surabaya, Semarang dan Bandung, yang semuanya sudah memiliki H.B.S.5 tahun, Yogyakarta merupakan kota yang paling penting di Nusantara. Pemilihan Yogyakarta tepat, karena di sana ada hasrat sangat kuat untuk memperoleh pendidikan lebih lanjut, terbukti adanya perkumpulan atau Komite yang mengadakan aksi untuk dapat memperoleh HBS dan MULO. Letaknya tepat bagi lembaga pendidikan sentral. Dalam bulan Juli 1917 di sana akan

dibuka sekolah teknik, dan kemungkinan tahun berikutnya akan didirikan sekolah gula, sehingga untuk penyediaan dalam beberapa pelajaran (misalnya menggambar, ilmu kimia) dapat mempergunakan dosen-dosen dari salah satu dari kedua lembaga tersebut.

Sebagai kesimpulan dari yang diuraikan di atas Direktur Pendidikan dan Agama mohon kepada Gubernur Jenderal supaya:

1. Mohon kepada Menteri Jajahan, agar:
 - a. segera mungkin memberikan hak yang diuraikan di atas kepada pemegang ijazah dari sekolah persiapan pendidikan tinggi yang direncanakan, walaupun untuk sementara hanya bagi bagian B saja.
 - b. segera sesudah pembicaraan mengenai masalah ini di negeri Belanda sudah mencapai taraf yang tepat supaya pemberian ijinnya dikirimkan dengan surat kawat agar dapat segera dimulai untuk mengadakan tindakan yang perlu, supaya pada permulaan tahun ajaran 1919/1920 di Yogyakarta akan dapat dibuka sekolah menurut rencana yang disusun oleh Komisi dan dirubah oleh Direktur P dan A.
 - c. segera sesudah dalam prinsip diambil keputusan tentang pendidikan sekolah tersebut di sub a. dan b., maka supaya mengusahakan Surat Keputusan Sri Ratu untuk penerimaan tamatan lembaga tersebut ke ujian saringan calon pegawai negeri.
 2. Memberitahukan, apakah Gubernur Jenderal dapat menyetujui bahwa pada permulaan tahun kursus 1917/1918 dapat diadakan penelitian untuk mengetahui kebutuhan akan pengajaran bahasa Melayu di lembaga baru itu.
- Pada waktunya memberi kuasa kepada Direktur Pendidikan dan Agama untuk memperhitungkan pendirian sekolah persiapan pendidikan tinggi di Yogyakarta atas sumbangannya pada Rencana anggaran belanja 1919.

Tembusan surat ini disampaikan kepada Direktur Pekerjaan Umum, mengingat kemungkinan, bahwa harus diperhitungkan dalam program kerjanya 1918 dengan pendirian gedung untuk sekolah yang akan didirikan di Yogyakarta.

73. Nasehat Dewan Hindia Belanda tanggal 15 Juni 1917 nomor II

Dewan Hindia Belanda menyatakan persetujuannya tanpa syarat atas rencana dalam Laporan Komisi Penasehat mengenai pendirian pendidikan persiapan pendidikan tinggi di Hindia Belanda yang disusun sangat lengkap dan sangat baik.

Kesimpulan mengenai berbagai hal dari Laporan yang diperbincangkan Direktur P dan A serta usul-usulnya yang ter-rumus, termaktub dalam suratnya tanggal 18 Mei 1917 nomor 13795.

PERLUASAN PENDIDIKAN RENDAH BUMIPUTERA - DAN PENDIDIKAN
BUMIPUTERA BELANDA (H.I.S.). DESENTRALISASI
PENDIDIKAN RENDAH BUMIPUTERA

74. Surat Menteri Jajahan (Pleijte) kepada Gubernur Jenderal (Van Limburg Stirum) tanggal 2 Maret 1918 nomor 13/133

Perhitungan kebutuhan akan personil pengajar Bumiputera untuk jangka waktu 7 tahun pertama yang akan datang dan jumlah guru yang dihasilkan oleh berbagai lembaga pendidikan yang telah ada dan yang akan didirikan dalam tahun ini dalam jangka waktu yang sama, yang dilampirkan pada laporan pos 1917 nomor 1520 serta pula lampiran dari laporan pos 2324, mendesak Menteri Jajahan mohon perhatian Gubernur Jenderal atas pandangannya mengenai perluasan H.I.S. dan pendidikan rendah Bumiputera.

Hasil perhitungan tersebut membuktikan, bahwa jumlah guru yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang telah ada dan yang akan didirikan dalam tahun ini, hampir-hampir tidak cukup untuk memenuhi permintaan guru dalam jangka waktu 7 tahun yang akan datang. Akan ada kekurangan 650 tenaga pengajar, yang dianggap dapat dicukupi dengan tenaga didikan bebas dan sekolah guru swasta.

Jumlah permintaan guru yang ditentukan ini didapat dari rencana pendirian sekolah, yang meliputi 62 sekolah Bumiputera kelas 2 dan 7 sekolah H.I.S. per-tahun.

Apakah perluasan jumlah sekolah itu tidak dapat dilaksanakan lebih cepat?

Mengenai H.I.S. perluasan perlu sekali dilaksanakan lebih cepat, karena hasrat ke pendidikan ini sangat besar sekali, dan ternyata dalam membanjirnya anak-anak yang akan masuk ke sekolah yang sudah ada.

Dalam perhitungan itu dikemukakan, bahwa perluasan yang lebih cepat dari sekolah ini dapat atau tidaknya tergantung dari jumlah tenaga pengajar Eropa bagi HIS. Tetapi dalam perhitungan itu tidak diperhitungkan faktor, yang akan lebih penting bagi perluasan itu, yakni penggantian tenaga pengajar Eropa oleh guru-guru Bumiputera didikan HKS di Purworejo.

Jika tiap tahun HKS Purworejo menghasilkan 20 guru, maka dari sekolah HIS yang ada akan terbebas pula sekitar 20 guru Eropa yang akan dapat dimanfaatkan di sekolah-sekolah baru. Dengan demikian akan segera dapat dilaksanakan perluasan lebih dari 7 sekolah per tahun (dalam rencana anggaran belanja ditetapkan 10).

Lama-kelamaan, bagi tiap HIS yang sekarang mempunyai 3 guru Eropa, selanjutnya akan cukup dengan 1 kepala sekolah Eropa dan 2 orang guru Bumiputera lulusan HKS Purworejo, jika tidak ditentukan syarat syarat yang berlebih-lebihan pada kecakapan mengajar mereka dalam bahasa Belanda.

Tidak tertutup kemungkinan, bahwa di masa depan sekolah-sekolah itu dapat diserahkan seluruhnya kepada tenaga pengajar Bumiputera. Dengan pembatasan 1 guru Eropa pada tiap HIS dalam waktu dekat akan dapat dilaksanakan perluasan dengan jumlah yang lebih besar, dan tidak tergantung dari faktor yang kurang pasti yaitu pengiriman guru Eropa dari negeri Belanda.

Pemberian tunjangan belajar untuk pendidikan akte kepala sekolah memberi pengaruh baik atas kesediaan guru Belanda untuk dinas di Hindia Belanda, sehingga dalam tahun-tahun 1916 dan 1917 ada 96 dan 162 orang guru. Dengan memperhitungkan beberapa faktor, maka dapat dikirimkan guru Eropa ke Hindia Belanda rata-rata 100 orang per

tahun. Korps guru Eropa yang ada sekitar 1000 orang, tiap tahun dikurangi karena cuti, pensiun, sakit, meninggal, kira-kira 10%. Sehingga tiap tahun tetap ada 1000 guru Eropa, yang dapat dipekerjakan pada 125 sekolah HIS yang ada.

Perluasan HIS secara agak besar-besaran hanya mungkin jika dapat tersedia guru Bumiputera keluaran HKS Purworejo dalam jumlah sebanyak mungkin. Tujuan akhir perluasan, sampai sejumlah 300 HIS (dalam hal ini, belum ada 1 sekolah per 100.000 jiwa).

Untuk 300 sekolah akan diperlukan 300 Kepala Sekolah terdiri dari guru Eropa dan 600 guru Bumiputera sebagai pengganti guru Eropa. Untuk Kepala Sekolah akan dapat dengan mudah dipenuhi dari korps guru Eropa yang selalu tersedia, terdiri dari 1000 guru. Untuk memenuhi 600 guru Bumiputera (pengganti guru Eropa), jika mengingat HKS Purworejo tiap tahunnya hanya dapat menghasilkan 20 orang guru, maka akan baru dapat dipenuhi sesudah 30 tahun, jangka waktu yang terlalu lama. Sehingga sekarang mendesak sekali adanya perluasan kesempatan untuk mendidik guru-guru Bumiputera ke tugas itu. Sebagaimana termaktub dalam surat Gubernur Jenderal tanggal 11 Oktober 1917 nomor 801a/33, sebagian dapat dicukupi dengan mengadakan sekolah (= leergang) yang direncanakan bersambung dengan sekolah MULO Tondano. Menurut pendapat Menteri Jajahan hal tersebut tidak cukup dengan demikian saja. Untuk dapat memenuhi kebutuhan HIS dengan segera, jumlah guru Bumiputera yang tiap tahun dapat disediakan paling sedikit harus dilipatkan dua kali.

Menteri Jajahan menyerahkan, apakah perlu didirikan sekolah guru kedua dari type HKS Purworejo atau cukup dengan kursus (= leergang) yang bersambungan dengan sekolah MULO, yang tahun ini mulai menerima lulusan HIS. Ia menyetujui maksud Gubernur Jenderal, untuk sambil menunggu sampai HIS mendapat cukup perluasan memberikan bantuan yang kuat kepada kursus-kursus (= leergang) pengajaran bahasa Belanda, yang didirikan oleh Perhimpunan Belanda Umum (Algemeen Nederlandsch Verbond), yang untuk sementara dapat memberikan kepuasan kepada kebutuhan pengajaran bahasa Belanda.

Pendidikan Rendah Bumiputera

Menteri mengharap dipertimbangkan apakah dengan jejak yang sekarang penyebaran umum dari pendidikan ini mungkin dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Jumlah sekolah rendah Bumiputera (negeri, swasta, dan desa) sekarang kurang lebih 10.000. Bagi jumlah penduduk 50.000.000 jiwa menurut penetapan sekarang akan diperlukan 40.000 sekolah untuk dapat menampung semua anak yang berusia sekolah. Dalam tahun 1911-1915 tambahnya jumlah sekolah rata-rata 780 per tahun. Dengan kecepatan yang sama keterlambatan ini akan baru dapat terkejar dalam 38 tahun, sedangkan dalam jangka waktu itu penduduk sudah berlipat dua kali, sehingga akan hanya 50% dari anak-anak akan mendapat kesempatan sekolah.

Apakah perluasan pendidikan ini tidak dapat lebih dipercepat? Secara keseluruhan untuk Hindia Belanda jangka waktu 35 tahun ini mungkin dianggap tidak terlalu lama, tetapi buat Jawa, Madura, Sumatera Barat dan Tondano, jangka waktu ini harus lebih singkat. Segi keuangan dari masalah ini harus ditinjau dengan sungguh-sungguh. Penyediaan sarana pendidikan secara umum dengan mengingat akibat keuangan tidak akan terpikir tanpa penyerahan yang dilaksanakan sejauh mungkin dari kewajiban mengurus pendidikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu sekali dibebani dengan pembagian yang lebih besar dari pada yang dibebankan kepada pengurus sekolah swasta menurut peraturan pemberian sumbangan yang sudah ada.

Mungkin sekali sistim yang dianjurkan oleh Komisi Pemuasan (Bevredigings Commissie) bagi negeri Belanda dapat dipakai sebagai dasar yang baik bagi Hindia Belanda. Menurut sistim ini Negara hanya dibebani dengan pembayaran gaji dari para guru, sedangkan pemerintah daerah mengurus biaya pengelolaan seperti pembangunan dan pengaturan gedung-gedung, alat-alat pelajaran, dengan penggantian rugi yang sebagian diambil dari pemungutan uang sekolah. Hal ini sebaiknya diteliti lebih lanjut.

Sekolah Bumiputera kelas 2

Pendidikan desa semakin meluas dan makin baik mutunya, maka sekolah-sekolah kelas 2 akan terbatas hanya memberikan pendidikan kepada anak-anak yang sudah lebih maju, dan sekolah desa hanya memberi pendidikan kepada anak-anak pemula. Ke arah ini, dimana keadaan memungkinkan, sekolah kelas 2 dijadikan sekolah lanjutan ("vervolg"). Harus diusahakan terus, supaya segera mungkin dapat dicapai tujuan akhir, yakni Pemerintah Pusat menarik diri seluruhnya dari lapangan pendidikan rendah Bumiputera, dan menyerahkannya kepada pemeliharaan oleh Pemerintah Daerah dengan bantuan dari Kas Negara. Dalam sistim ini bagi sekolah kelas 2 dalam bentuknya sekarang tidak akan ada tempat lagi. Akan terdapat "sekolah rendah Bumiputera" yang dibiayai oleh pemerintah daerah dan sekolah "vervolg" yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Keberatan yang diajukan terhadap ini oleh Direktur Pendidikan dan Agama dalam suratnya tanggal 14 April 1917 nomor 10849 dianggap kurang meyakinkan. Ia menunjuk sebagai contoh Jepang. Jepang tidak akan mampu untuk dalam waktu kurang dari setengah abad memberikan pendidikan rendah yang lengkap kepada seluruh penduduknya, jika biayanya tidak sebagian besar dibebankan kepada pemerintah daerah (shi, cho, sen).

Bagaimanapun juga desentralisasi yang umum dan lengkap dari pendidikan hanya dapat dilaksanakan, jika organ-organ dengan tugas mengatur sendiri yang bersangkutan dengan dilengkapi sebagaimana mestinya untuk memenuhi tugasnya, didirikan di mana-mana.

Sekarang sudah dapat dimulai untuk menyerahkan pendidikan rendah Bumiputera seluruhnya kepada pemerintah daerah. Dari dokumen-dokumen yang dibicarakan ternyata, bahwa masalah yang sudah dikemukakan dalam tahun 1916, sekarang masih dalam perbincangan.

Secara umum telah diakui, bahwa bagian dari pendidikan ini harus diurus oleh dewan-dewan lokal. Pembagian dari biaya antara Pusat dengan Daerah yang harus dibuat, menurut pendapatnya bahwa Daerah tidak dapat ditempatkan segaris dengan lembaga dan perkumpulan.

Kembali kepada masalah "sekolah rendah Bumiputera" yang dibiayai oleh Daerah dan "sekolah vervolg" yang dibiayai oleh Pemerintah. Bates antara kedua jenis sekolah ini di mana-mana tidak akan dapat ditarik sama tajamnya. Buat tempat-tempat yang agak besar akan selalu dipertahankan beberapa sekolah lengkap, di mana dipelajari apa yang diajarkan dalam 3 tahun di sekolah desa, karena pada umumnya penduduk kota memerlukan jalan pendidikan yang lebih cepat dari pada penduduk pedesaan. Penduduk kota tidak akan cukup dengan jumlah pendidikan minimum yang sudah dianggap cukup bagi penduduk desa.

Juga bagi sekolah-sekolah lengkap ini akan diadakan ukuran yang sama dalam pembagian biaya antara Pusat dengan Daerah, sebagai yang berlaku bagi sekolah-sekolah desa. Sudah lebih dari wajar dan adil, bahwa penduduk dari Daerah menuntut bagian yang lebih besar untuk pendidikan yang lebih baik yang diterimanya dengan juga membayar lebih banyak menurut perbandingan dari pada penduduk desa bagi sekolah desanya yang sangat sederhana.

Dimohon Gubernur Jenderal mempertimbangkan pandangan ini dan menyampaikan pendapatnya mengenai masalah tersebut.

MEMPERSAMAKAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA SEKOLAH SWASTA DAN NEGERI

75. Menteri Daerah Jajahan Indenburg dalam surat tanggal 19 Pebruari 1919 memberitahukan kepada Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum

Bahwa menurut pertimbangannya dalam prinsip harus diambil keputusan untuk melaksanakan persamaan bantuan keuangan kepada sekolah swasta dengan sekolah negeri, baik pun sekolah dengan pendidikan Eropa maupun sekolah untuk pendidikan Bumiputera.

Sekolah negeri sifatnya terbuka atau disediakan untuk umum, tanpa mengadakan pembedaan atas dasar kepercayaan atau agama. Untuk pendidikan Eropa diberlakukan pada umumnya alasan-alasan yang sama

seperti di negeri Belanda, di mana hak orang tua dihormati dalam kebebasan memilih sekolah untuk anak mereka. Hal ini juga diberlakukan dalam pendidikan Eropa di Hindia Belanda. Terhadap persamaan bantuan keuangan kepada sekolah swasta dengan sekolah negeri untuk pendidikan Eropa juga tidak ada suara yang menentang, baik pun dalam Majelis Rendah (Tweede Kamer) pada waktu diadakan pembahasan masalah ini dalam hubungan dengan pembicaraan budget Indonesia untuk tahun 1918, maupun dalam perembukan di Dewan Rakyat (Volksraad) mengenai mosi Bergmeyer.*)

Agak berbeda masalahnya mengenai sekolah untuk Bumiputera. Dalam hal ini alasan untuk menghormati hak orang tua kurang berlaku dari pada di negeri Belanda, meskipun dari perembukan dan pemungutan suara mengenai mosi Bergmeyer ternyata, bahwa juga di kalangan orang Indonesia terkemuka yang berpendidikan ada yang menyetujui kebebasan dalam haluan memilih pendidikan dan menyadari, bahwa dalam azas ini terkandung kekuatan yang besar. Demikianlah menurut Menteri Idenburg.

Colijn dalam prasarannya untuk Kongres Pertama Pendidikan Kolonial membela pendirian, bahwa sekolah swasta di Hindia Belanda sebenarnya adalah suatu bentuk khusus atau luar biasa dari pendidikan yang diurus pemerintah, karena dengan demikian pemerintah dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan pendidikan dengan melimpahkan secara tidak langsung kepada pihak lain kewajiban tersebut. Pandangan ini menurut Menteri tidak banyak berbeda dengan pendiriannya dan memberi alasan untuk mengakui persamaan sekolah swasta dengan sekolah negeri di bidang bantuan keuangannya. Menteri juga sependapat dengan Bergmeyer dalam pembelaan mosinya mengenai masalah tersebut.

*) Dalam mosi ini, yang diajukan pada 27 Juni 1918 oleh P. Bergmeyer cs., dinyatakan harapan, bahwa Pemerintah secepatnya akan melaksanakan peraturan yang diperlukan untuk mempersamakan bantuan kepada sekolah swasta dengan sekolah negeri.

Pasal 192 Undang Undang Dasar (Kerajaan Belanda) menetapkan bahwa harus disediakan sekolah negeri (sekolah untuk umum) di mana saja. Di Hindia-Belanda ketetapan ini tidak dapat dipenuhi. Karena kekuatan pemerintah, yang pada hakekatnya juga kekuatan segenap rakyat sebagai keseluruhan, masih kekurangan untuk dapat menyediakan segala keperluan pendidikan. Maka dengan mempersamakan bantuan keuangan kepada sekolah swasta dengan sekolah negeri, diciptakan prasarana yang kuat untuk mendekati tujuan, yaitu mengadakan pendidikan pada umumnya, karena dengan demikian sekolah swasta tidak akan terhambat oleh masalah keuangan untuk berkembang dengan lebih pesat.

Menurut pendapat Menteri, untuk mempersamakan keuangan di bidang pendidikan Eropa tidak diperlukan perubahan dalam Peraturan Pemerintah (Regeeringsreglement). *) Dalam Pasal 126 dinyatakan bahwa pendidikan adalah bebas dan tidak diadakan pembedaan bantuan di bidang keuangan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri. Bantuan itu dapat dinaikkan sebanyak mungkin, sehingga selisih biaya yang sebenarnya dengan penerimaan jumlah uang sekolah dapat diimbangi.

Argumentasi yang sama dapat diterapkan untuk sekolah swasta Indonesia (Bumiputera), tetapi dalam kenyataannya eksistensi sekolah tersebut tidak diakui secara eksplisit dalam "Regeeringsreglement". Pada hemat Menteri mengenai masalah ini mungkin diperlukan perubahan atau tambahan peraturan. Karena itu disarankan untuk menetapkan secara keseluruhan prinsip persamaan keuangan, agar supaya tersedia dasar hukum yang diperlukan. Sementara itu dianjurkan untuk melaksanakan persamaan bantuan keuangan bagi pendidikan Eropa tanpa menunggu perubahan peraturan, yang mungkin akan diadakan. Juga sangat diharapkan oleh Menteri, bahwa agar segera diadakan peninjauan kembali dan pembaharuan yang diperlukan dalam peraturan subsidi yang sudah ada dengan maksud memberi penggantian seluruh biaya yang digunakan dengan ketentuan jumlah yang perlu dibatasi dan secepat mungkin dituangkan ke dalam usul rencana anggaran belanja.

*) "Regeeringsreglement" adalah semacam Undang-Undang Dasar bagi Hindia-Belanda sebelum tahun 1922. Kemudian diganti dengan "Indische Staatsregeling".

76. Surat Gubernur Jenderal (Van Limburg Stirum) kepada Menteri Jajahan (De Graaff) tanggal 17 Januari 1920

Dengan menunjuk kepada surat Menteri yang mendahuluinya (Idenburg) mengenai pelaksanaan persamaan bantuan keuangan sekolah swasta dengan sekolah negeri, bahwa Direktur Pendidikan dan Agama dalam surat tanggal 20 September 1919 nomor 31611 menyatakan untuk mengadakan penelaahan dengan saksama sebelum dapat mengambil keputusan terakhir. Pada mulanya ia ini bermaksud secara prinsipil meninjau kembali untuk sementara waktu masalah persamaan keuangan pada umumnya, tetapi kemudian ternyata bahwa timbul beberapa pendapat yang sangat penting untuk dipertimbangkan.

Sesuai dengan pendapat Idenburg, Kepala Departemen tersebut juga beranggapan bahwa harus diadakan pengecualian terhadap pendidikan Eropa dan dengan demikian pelaksanaan persamaan keuangan tersebut tidak perlu menunggu perubahan, yang mungkin akan diadakan dalam Regeeringsreglement. Dalam pembahasan di Dewan Rakyat (Volksraad) mengenai usul rencana tambahan anggaran belanja untuk tahun 1920 dalam hubungan dengan persamaan keuangan yang dimaksudkan, diusulkan amandemen oleh Sastrowijono cs. untuk mengadakan persamaan di bidang keuangan bagi semua cabang pendidikan. Maka kemudian usul rencana anggaran tersebut ditarik kembali oleh Direktur Pendidikan dan Agama (K.F. Creutzberg).

Dengan menunggu penyelesaian masalah secara keseluruhan, maka Gubernur Jenderal mendesak kepada Menteri untuk menunda pengambilan keputusan mengenai persamaan keuangan sekolah swasta Eropa dengan sekolah negeri.

77. Surat Gubernur Jenderal (van Limburg Stirum) kepada Menteri Jajahan (De Graaff), tanggal 26 Agustus 1920

Menteri Daerah Jajahan (De Graaff) mengirim telegram 22 Mei 1920 nomor 106 sebagai jawaban atas surat Gubernur Jenderal (Van Limburg Stirum) tanggal 17 Januari 1920 dan memberitahukan, bahwa

usul rencana tambahan keuangan untuk pos persamaan keuangan sekolah swasta Eropa dengan sekolah negeri yang ditarik kembali, jangan dibawa dalam perembukan mengenai tambahan anggaran belanja untuk tahun 1920, melainkan untuk tahun 1921. Mengenai masalah yang bersangkutan dengan pendidikan Bumiputera diambil pendirian seperti dikemukakan dalam pidato di Majelis Tinggi (Eerste Kamer), bahwa tidak dapat diadakan sistim subsidi untuk sekolah swasta Bumiputera yang secara otomatis dapat dilaksanakan, sehingga keperluan pendidikan Bumiputera seluruhnya menjadi tanggungan Pemerintah.

Jika sistim tersebut dilaksanakan, pemerintah akan menanggung beban yang sangat berat. Menteri mengharapkan, bahwa dalam suasana yang demikian itulah masalah tersebut harus dibawa lagi dalam perembukan dengan Dewan Rakyat.

Dalam hubungan dengan saran Menteri tersebut Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum mengirim telegram 30 Mei 1920 nomor 126, yang memberitahukan, bahwa untuk membawa lagi masalah persamaan keuangan dalam perembukan di Dewan Rakyat dapat dipastikan, bahwa Dewan Rakyat hanya akan mau menerimanya, apabila diadakan perubahan peraturan untuk melaksanakan persamaan secara keseluruhan. Waktunya sangat pendek untuk mengadakan persiapan dan lain daripada itu ditunggu pertimbangan penjelasan lebih jauh dari Direktorat Pendidikan dan Agama K.F. Creutzberg mengenai keberatan-keberatan terhadap usul rencana semula.

Dalam suratnya kemudian (26 Agustus 1920) Gubernur Jenderal memberitahukan, bahwa persamaan keuangan sekolah swasta Eropa dengan sekolah negeri sebagai azas harus juga dilaksanakan di Hindia Belanda dan lambat laun juga bagi sekolah untuk Bumiputera, tetapi kondisi dalam masyarakat memaksa menundanya untuk sementara. Terutama dalam pertimbangan dari sudut politik dilihat ada bahaya besar untuk melaksanakan azas persamaan tersebut untuk sekolah rendah Bumiputera. Pertama, adalah sewajarnya bahwa yang paling giat akan menentang pemerintahan kolonial ialah gerakan politik dari pihak Bumiputera, dan dikhawatirkan akan berpengaruh dalam pendidikan,

sehingga seluruh angkatan dididik membenci pemerintah. Selanjutnya sebagai akibat persamaan keuangan akan memungkinkan timbulnya bahaya yang tidak kurang mengkhawatirkan, ialah bahwa sebagian dari sekolah-sekolah Bumiputera akan dipengaruhi oleh Islam. Juga pengaruh politik yang tidak dikehendaki dan pengaruh-pengaruh lainnya akan sukar dicegah masuk ke dalam pendidikan.

Tetapi apabila persamaan keuangan bagi sekolah Bumiputera untuk sementara ditangguhkan dan azas persamaan tersebut dilaksanakan bagi sekolah Eropa, maka dalam kalangan luas orang Bumiputera terpelajar akan merasakan perlakuan yang tidak adil dan menyakitkan hati, karena orang Eropa diberi kesempatan untuk pendidikan anak mereka dengan biaya pemerintah dan memilih sekolah swasta yang cocok dengan keinginan mereka, sedangkan kesempatan seperti itu tidak diberikan kepada orang Bumiputera. Maka oleh Gubernur Jenderal diberikan sebagai pertimbangan kepada Menteri untuk tidak melaksanakan persamaan keuangan bagi sekolah Bumiputera dan karena itu juga persamaan keuangan bagi sekolah Eropa dianggap tidak bijaksana, mengingat reaksi yang akan timbul dalam Dewan Rakyat dan dalam kalangan orang Bumiputera di luar Dewan Rakyat.

78. Menteri Daerah Jajahan (De Graaff) menyampaikan kesimpulannya dalam surat 14 Oktober 1920 kepada Gubernur Jenderal (Van Limburg Stirum)

Secara keseluruhan ia tidak sependapat dengan pertimbangan yang disampaikan kepadanya. Ia tetap berpendirian, bahwa persamaan keuangan bagi sekolah Eropa sudah dapat dengan segera dilaksanakan, tetapi bagi sekolah Bumiputera untuk sementara masih harus ditangguhkan. Dan ia masih ingin lebih mengutamakan penyelesaian kedua masalah tersebut secara terpisah, tetapi karena alasan-alasan yang praktis semata-mata, ia membatalkan niatnya semula supaya dalam rencana usul anggaran biaya tahun 1921 persamaan keuangan bagi sekolah Eropa dimasukkan. Sebagai penyelesaiannya ia menghendaki, supaya dengan segera diadakan perbaikan secara menyeluruh dalam peraturan pemberian subsidi kepada sekolah rendah swasta Bumiputera dan Eropa.

SEKOLAH PERALIHAN (SCHAKELSCHOOL)

79. Dari Direktorat Pendidikan Agama (K.F. Creutzberg) kepada Gubernur Jenderal (van Limburg Stirum) tanggal 11 Maret 1920

Dalam surat tanggal 11 Maret 1920 diberitahukan oleh Direktorat Pendidikan dan Agama (K.F. Creutzberg) kepada Gubernur Jenderal (van Limburg Stirum), bahwa terhadap sistim pendidikan rendah yang ada untuk orang Bumiputera sering datang kritik dari berbagai pihak, bahwa HIS walaupun dalam arti yang sebenarnya bukan sekolah ningrat, terutama disediakan untuk anak-anak dari kaum paling terkemuka dalam masyarakat Indonesia dan bahwa anak-anak, yang masuk di sekolah kelas dua, relatif mempunyai sedikit kemungkinan untuk melanjutkan belajar.

Kedua persoalan tersebut telah dibahas dalam pidato pada 21 Juni 1918 di Dewan Rakyat mengenai keseluruhan politik pendidikan dan di dalam pidato itu diuraikan, bahwa ada kemungkinan untuk mengatasi kedua persoalan tersebut. Dalam usaha mencari perbaikan yang diadakan olehnya dalam pembicaraan dengan inspektur pendidikan HIS (Hellwig) mengenai kemungkinan mempersiapkan siswa-siswa yang sangat pandai dari kelas 4 atau 5 di sekolah kelas dua Bumiputera untuk melalui semacam sekolah peralihan melanjutkan belajar di MULO. Sudah barang tentu di sekolah type baru itu harus diajarkan bahasa Belanda dengan intensif. Inspektur Hellwig menanggapi gagasan tersebut, bahwa ia melihat dalam type sekolah tersebut kemungkinan untuk berhasil. Dengan dapat diwujudkannya kemungkinan tersebut tidak berarti, bahwa seluruh kepincangan dalam sistim pendidikan yang ada dapat dihapuskan, karena hanya untuk jumlah yang terbatas, yang dipilih dengan sangat saksama dari siswa-siswa kelas dua, dapat dibuka jalan untuk melanjutkan sekolah. Kendati pun demikian hasil yang dapat dicapai sangat penting, sehingga perlu diadakan percobaan secara sungguh-sungguh dengan sekolah peralihan tersebut.

Baik Dewan Hindia (Raad van Indië) maupun Dewan Rakyat (Volks raad) tidak keberatan dan ternyata gagasan K.F. Creutzberg tersebut di atas disetujui pemerintah dan dalam tahun 1921 dibuka sekolah peralihan yang pertama di Bandung dan Padangpanjang.

PENGAWASAN (SUPERVISI) PEMERINTAH
ATAS SEKOLAH SWASTA TIDAK BERBANTUAN (TIDAK BERSUBSIDI)

80. Pejabat Direktur Pendidikan dan Agama (J.T.W. van der Meulen) dalam suratnya 27 Juli 1922 kepada Gubernur Jenderal (Fock)

Pengawasan oleh pemerintah atas sekolah swasta Bumiputera dan Cina menjadi keharusan, karena menurut hematnya di sekolah swasta Bumiputera tumbuh pengaruh politik yang merusak (destruktif) dan di sekolah swasta Cina pengaruh nasionalisme Cina yang anti Belanda menjadi makin besar.

Dengan surat rahasia 1 Juni 1922 nomor 296/I, satu kali telah disampaikannya kepada Gubernur Jenderal suatu rencana ordonansi untuk mengadakan pengawasan atas sekolah swasta sepanjang pengawasan yang dimaksudkan belum diatur secara umum atau secara khusus. Kemudian pendapat dan nasehat Jaksa Agung, Kepala Penasehat Urusan Cina, dan Pejabat Penasehat Urusan Bumiputera, setuju dengan usul rencana ordonansi tersebut. Maka saatnya dianggap sudah matang untuk menentukan surat keputusan dan dengan surat 27 Juli 1922 tersebut di atas disampaikan usul rencana ordonansi tersebut kepada Gubernur Jenderal. Motivasinya dikemukakan sebagai berikut:

Masalah pengawasan atas pendidikan, yang sepanjang tidak diberikan oleh guru Eropa di sekolah swasta Bumiputera dan orang Timur Asing menjadi aktuil lagi karena surat-surat rahasia Pemerintah tanggal 2 Desember 1921, 21 Pebruari, 25 Maret dan 3 April 1933. Yang pertama-tama memberi dorongan ialah surat Residen Semarang, J.H. Niewenhuys, tanggal 27 Oktober 1921 nomor 425 mengenai sekolah S.I. (Sarekat Islam) di Semarang. Dalam bagian akhir surat itu

diusulkan supaya peraturan dalam Lembaran Negara 1880 nomor 201, yang seperti telah ditambah dalam Lembaran Negara 1903 nomor 389 dan 1912 nomor 780, mengenai pendidikan swasta yang diberikan oleh orang Eropa diterapkan pada pendidikan swasta yang diberikan oleh orang Bumiputera kepada orang Bumiputera.*)

Untuk melaksanakan usul ini kemudian Nieuwenhuys mendesak dalam suratnya tanggal 10 Pebruari 1922 nomor 75 sehubungan dengan suatu berita dalam harian "De Expres" 8 Pebruari tahun itu, bahwa di bawah pimpinan R.M. Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara) akan didirikan suatu sekolah pendidikan guru. Dalam surat ini diutarakan oleh Nieuwenhuys, bahwa Suwardi Surjaningrat dan Douwes Dekker serta Tjipto Mangunkusumo memimpin redaksi Harian "De Expres" dan pernah diasingkan karena "delik pers yang keterlaluan".

Nasehat yang senada ialah dari G.W. Uhlenbeck sebagai Jaksa Agung (21 Maret 1922 nomor 219 Rahasia A.P.). Ia memberi tahukan, bahwa di Bandung juga didirikan sekolah S.I. dengan kira-kira 300 orang murid. Menurut rencana Tan Malaka akan membagi waktunya untuk sekolah S.I. di Bandung dan Semarang. Dalam bulan Pebruari 1922 ia ditahan dan kemudian diasingkan ke luar negeri (diekster-nir). Uhlenbeck berpendapat supaya mencegah pemberian pendidikan kepada para muda Bumiputera menuju ke arah paham komunisme dengan mengadakan pengawasan terhadap pendidikan kepada anak Bumiputera oleh orang Bumiputera.

R.A. Kern sebagai Pejabat Penasehat Dalam Urusan Bumiputera menyatakan dalam nasehatnya 25 Pebruari 1922 nomor D.37, bahwa

*) Peraturan tersebut termaktub dalam Lembaran Negara (Indisch Staatsblad) 1880 nomor 21, yaitu pengawasan terhadap pendidikan swasta dari orang Eropa kepada orang Bumiputera. Untuk pengawasan ini baikpun yang diberikan di sekolah maupun di rumah diwajibkan ada ijin dari Kepala Daerah, yang diberikan dengan syarat bahwa "kondisi setempat tidak mempunyai keberatan". Dalam Lembaran Negara 1903 nomor 389 diganti dengan: "jika tidak menimbulkan gangguan tata tertib dan keamanan". Dalam Lembaran Negara 1912 nomor 286 ditetapkan, bahwa yang bersangkutan harus membuktikan telah tamat sekolah rendah di negeri Belanda atau sekolah rendah dengan pengantar bahasa Belanda di Hindia Belanda.

sekolah negeri sendiri merupakan penangkal atau penolak paling ampuh terhadap sekolah-sekolah politik. Banyak orang tua, yang ingin menyekolahkan anak mereka di HIS negeri, tetapi dikecewakan karena anak mereka tidak dapat diterima. Menurut Kern sekolah swasta pada umumnya mendapat siswa, bukan karena orang tua berkeinginan agar anak mereka diberikan pendidikan dalam bentuk tertentu di sekolah tersebut, melainkan karena anak mereka tidak diterima di sekolah negeri. Ia yakin, bahwa banyak anak yang masuk sekolah HIS, yang didirikan oleh S.I. di Priangan, akan segera pindah ke HIS negeri, apabila disediakan tempat untuk mereka. Dari sebab itu pada hematnya sekolah negeri merupakan pencegahan yang paling efektif terhadap sekolah politik.

Pengawasan terhadap sekolah swasta Cina, yaitu masalah yang sudah sangat tua, diperintahkan melalui surat rahasia Sekretaris Pemerintah (Negara) I tanggal 18 Maret 1922 nomor 171X, yang menyampaikan antara lain salinan surat Duta Belanda di Bangkok tanggal 8 Pebruari 1922 nomor 92 mengenai undang-undang sekolah swasta di Siam (Muang Thai) dari tahun 1918 dan undang-undang yang menetapkan, bahwa kepada anak-anak Cina di Siam juga harus diajarkan beberapa pengetahuan mengenai Siam untuk mengembangkan kesadaran nasional Siam. Persoalan ini dengan lebih mendesak dikemukakan oleh Penasehat Kepala Dinas Urusan Cina, dalam surat sangat rahasia tanggal 27 Maret 1922 nomor 153/22, yang kemudian disusul dengan surat rahasia Sekretaris Pemerintah (Negara) I tanggal 3 April 1922 nomor 206x. Oleh Penasehat Urusan Cina diperingatkan, bahwa dalam tahun 1919 Direktur Pendidikan dan Agama menganggap perlu diadakan "pengawasan yang sistematis terhadap sekolah swasta Cina sambil memanfaatkan kesempatan dalam pengawasan itu untuk memperbaiki pendidikan dan tidak mendasarkan pengawasan itu hanya semata-mata atas alasan-alasan politik".

Pengawasan pemerintah baik pun terhadap pendidikan oleh orang Bumiputera kepada orang Bumiputera, maupun terhadap pendidikan swasta Cina tidak bersibsi telah berkali-kali dipersoalkan. Mengenai

masalah yang pertama oleh Direktur Pendidikan dan Agama pernah ditanyakan dengan surat edaran tanggal 28 Oktober 1914 nomor 21520 kepada para Inspektur Pendidikan Bumiputera apakah diketahui fakta-fakta yang menunjukkan, bahwa pendirian pemerintah untuk tidak turut campur dalam urusan itu perlu ditinggalkan dan apakah jika perlu turut campur pengawasan terhadap orang Eropa yang memberi pendidikan swasta diperluas dengan pengawasan terhadap orang Timur Asing dalam kasus yang sama atau lebih baik mengadakan pengawasan terhadap semua sekolah swasta. Jawaban yang diperoleh memberikan kesan, bahwa pada waktu itu belum ada keharusan mengadakan peraturan dengan maksud tersebut.

Mengenai sekolah swasta Cina, **pendahulu Gubernur Jenderal Fock** berpendapat seperti dinyatakan dalam surat rahasia Sekretaris Negara I tanggal 13 Januari 1920 nomor 24X, bahwa untuk sementara turut campur Pemerintah ke dalamnya harus dibatasi pada pengawasan keras terhadap apa yang disebut para guru dan para pelajar, yang masuk ke Hindia Belanda tanpa sebelumnya mendapat undangan dari perkumpulan-perkumpulan sekolah Cina untuk mencari pekerjaan di Indonesia.

Departemen Pendidikan dan Agama mendesak untuk mengubah pendirian pemerintah terhadap sekolah swasta Indonesia dan Cina, karena beranggapan, bahwa dengan pendirian sekolah S.I. di Semarang dan sekolah pendidikan guru Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta kaum muda Bumiputera diancam oleh pengaruh politik yang merusak. Dari Kalimantan diberitakan mengenai kebangkitan nasionalisme Cina yang anti Belanda, yang terutama diungkapkan oleh sekolah-sekolah swasta Cina.

Menurut Pejabat Direktur Pendidikan dan Agama J.F.W. van der Meulen dalam suratnya 27 Juli 1922 kepada Gubernur Jenderal Fock tersebut di atas pengawasan atas sekolah swasta Bumiputera dan Cina menjadi keharusan. Menurut hematnya pemerintah akan melalaikan kewajibannya dengan membiarkan pengaruh kedua gerakan itu masuk ke dalam bidang pendidikan. Ia tidak menyangkal pendapat R.A. Kern, Penasehat Urusan Bumiputera, bahwa sekolah negeri yang bermutu merupakan penolak paling ampuh terhadap pengaruh tersebut, tetapi

pemerintah belum mampu menyediakannya seperti yang dapat diharapkan dan lagi pula hal tersebut bukan satu-satunya cara pencegahan. Ia menyarankan, supaya pengawasan dilaksanakan secara berangsur-angsur. Sebagai permulaan diadakan peraturan legal agar pemerintah mempunyai kepastian untuk selalu dapat mengetahui volume dan luas serta corak pengajaran di sekolah swasta, sehingga dapat diadakan pengawasan seperlunya dan akhirnya pengajaran dapat dihentikan, apabila ditempuh arah yang mengancam keamanan umum. Menurut pendapatnya kepastian ini dapat diperoleh dengan mewajibkan orang yang berkehendak mengajar di sekolah swasta menyampaikan pemberitahuan kepada Pemerintah. Dikecualikan guru-guru yang mengajar di sekolah negeri dan sekolah swasta bersubsidi, juga guru-guru yang terkena ordonansi pengawasan dalam Lembaran Negara 1880 nomor 201. Demikian juga pengajaran agama, yang terkena pasal 123 dan 124 Regeeringsreglement (R.R.) serta peraturan-peraturan khususnya.*^{*)} Ijin mengajar tidak perlu diberikan, sudah cukup apabila pemerintah diberi tahu. Para guru tersebut diwajibkan memberikan semua keterangan yang diperlukan kepada petugas-petugas pemerintah, yang disertai pengawasan. Kepala pemerintah daerah diberi wewenang melarang para guru tersebut mengajar, jika kepentingan keamanan umum mengharuskan. Dengan demikian sistim pengawasan tersebut ditujukan kepada guru-guru sekolah swasta.

Dengan maksud melaksanakan sistim pengawasan seperti tersebut di atas disampaikan kepada Gubernur Jenderal suatu usul rencana ordonansi. Selanjutnya dianggap perlu, bahwa peraturan pelaksanaannya disertai surat edaran untuk menjelaskan kepada Pemerintah Daerah dan Inspeksi maksud ordonansi dengan pengertian, bahwa kecuali kewajiban guru untuk melapor (memberi tahu), pada umumnya

^{)} Pasal 123 R.R. mengatur secara khusus pemasukan guru-guru agama Kristen, Pendeta dan Zendeling. Pasal 124 menempatkan guru agama orang Indonesia yang bukan Kristen di bawah pengawasan raja, bupati, dan pemuka masyarakat menurut agama yang dianut oleh mereka.

tetap dipelihara keadaan yang lama. Hanya jika benar-benar ber-alasan untuk melihat ada ancaman bahaya, diambil tindakan pengawas-an dan baru dalam kasus yang memaksa digunakan larangan mengajar.

Usul rencana ordonansi dari Van der Meulen tersebut diterima tanpa diadakan perubahan yang berarti dan menjadi ordonansi dalam Lembaran Negara 1923 nomor 136. Untuk pengawasan terhadap sekolah swasta Indonesia dan orang Timur Asing yang dimaksudkan dalam ordonansi, ditunjuk pegawai pangreh praja, kecuali itu juga petugas Inspeksi pendidikan rendah dan Dinas Urusan Cina (Lembaran Negara 1923 nomor 374).

81. Dari Direktur Pendidikan dan Agama (K.F. Creutzberg) kepada Dewan Pendidikan *) tanggal 21 September 1923

Dalam tahun 1923 telah tersedia aparat untuk secara legal melaksanakan pengawasan terhadap sekolah-sekolah swasta tidak bersubsidi (yang lazim disebut "sekolah liar"). Keadaan sekolah-sekolah ini diutarakan oleh Direktur Pendidikan dan Agama (K.F. Creutzberg) dalam surat tanggal 21 September 1923 kepada Dewan Pendidikan (Onderwijsraad). Kepada dewan disampaikan inventarisasi laporan inspeksi mengenai sekolah swasta Bumiputera tidak bersubsidi, yang memberikan apa yang disebut sebagai pendidikan Barat. Menurut pendapatnya dari laporan-laporan terbukti, bahwa pengajaran di sekolah sekolah tersebut biasanya sangat tidak memenuhi syarat. Sebagai penegasan pendapat itu, dikemukakan isi surat, yang diterimanya dari Residen Manado J. Tideman, bahwa dalam ujian pegawai kecil (kleinambtenaarsexamen), yang diadakan di ibukota daerah tersebut, dari 189 orang peserta ujian hanya 47 orang yang dapat diberi ijazah. Menurut Residen J. Tideman, jumlah calon sebesar itu, yang tidak mempunyai persiapan secukupnya untuk ujian, adalah akibat

*) Dewan Pendidikan didirikan dengan SK Gubernur Jenderal tanggal 8 Maret 1918 nomor 1218, dengan tugas untuk memberikan petunjuk kepada Direktur P & A mengenai soal-soal teknis pendidikan dan masalah pendidikan. Pada tahun 1931 karena alasan penghematan, Dewan ini dibubarkan.

dari sangat banyaknya sekolah "Belanda" swasta, di mana "pengajaran bahasa Belanda" diberikan oleh sembarang orang saja. Menurut Tideman, sekolah-sekolah tersebut lebih banyak merugikan dari pada menguntungkan penduduk.

Menurut Creutzberg, keburukan sekolah swasta "liar", di mana diajarkan bahasa Belanda, sudah lama menarik perhatiannya. Kecaman kepada pengajaran di sekolah-sekolah tersebut makin menumpuk dengan makin bertambahnya jumlah sekolah semacam itu. Berkali-kali timbul persoalan, dan apakah dapat dipertanggung jawabkan memberi kebebasan kepada pendidikan di sekolah-sekolah tersebut atau haruskah ditetapkan syarat-syarat untuk mendapat wewenang mengajar sebagai jaminan, bahwa orang-orang yang berkepentingan dengan sekolah-sekolah tersebut tidak akan dirugikan.

Pengendalian keburukan seperti dikemukakan di atas menurut Creutzberg dapat dijalankan dengan menetapkan peraturan seperti pemberian pendidikan di sekolah rendah swasta Eropa, sebagai syarat ditentukan harus mempunyai akte atau sertifikat kemampuan tertentu, misalnya sebagai syarat minimum ijazah HKS (Hogere Kweek School). Menurut pendapatnya barangkali tidak perlu menuntut pemilikan ijazah tertentu, tetapi cukup dengan adanya keterangan mengenai kemampuan yang memadai, yang diberikan oleh pejabat Inspeksi Pendidikan. Dapat juga diadakan peraturan campuran, yaitu dituntut salah satu syarat misalnya ijazah tertentu dan kewenangan mengajar atau keterangan kemampuan. Ia menganggap perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut guna menetapkan syarat-syarat minimum dalam penyelesaian masalah.

Di samping itu perlu diadakan kompensasi untuk mengimbangi pengurangan kesempatan mendapat pendidikan Barat sebagai akibat tindakan tersebut di atas. Sementara kompensasi itu tidak dapat diberikan dengan menambah jumlah HIS atau Sekolah Peralihan, yang kemungkinannya di bidang keuangan sangat terbatas, maka mungkin kompensasi itu dapat diadakan dengan memberi bantuan kepada prakarsa swasta yang menyelenggarakan "pendidikan Belanda", yang sangat diinginkan itu, dalam bentuk kursus-kursus.

Creutzberg meminta kepada Dewan Pendidikan untuk menelaah seluruh masalah itu dan memberikan nasehatnya.

PENGHEMATAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN
DAN SUASANA MASYARAKAT

82. Dari Pejabat Sementara Penasehat Urusan Bumiputera (R.A. Kern) kepada Gubernur Jenderal (Fock), 24 Januari 1924

Untuk memenuhi tugas yang disampaikan secara lisan oleh Gubernur Jenderal kepada Pjs. Penasehat Urusan Bumiputera untuk meneliti akibat dari penghematan *) dalam bidang pendidikan bagi penduduk Bumiputera dengan ini disampaikan bahwa tidak mungkin diadakan penelitian secara terperinci, karena kekurangan waktu dan kesempatan.

Dewan Rakyat memberi kesempatan untuk perdebatan mengenai segi-segi teknis dan di samping itu pers terbuka lebar untuk masalah pendidikan.

Perhatian terhadap masalah pendidikan sangat berbeda. Rakyat kecil bersikap acuh tak acuh dan orang-orang desa bahkan menganggap Sekolah Desa sebagai beban daripada keuntungan untuk anak-anak mereka. Pengaruh dari Pangreh Praja masih diperlukan dan lebih-lebih kunjungan kepada sekolah-sekolah desa dirasakan perlu. Menurut ketentuan lama, desa dapat memperoleh uang muka yang akan dibayar kembali oleh desa setelah beberapa tahun kemudian. Tetapi setelah penghematan, desa harus mengusahakan sendiri pembangunan sekolah tersebut, termasuk juga pemeliharaannya. Sikap acuh tak acuh tersebut terutama dirasakan di Madura, tetapi sebaliknya di daerah Parahiangan pembangunan sekolah desa oleh masyarakat sendiri disambut dengan rasa gembira.

Suasana lesu itu sama sekali tidak tampak di kalangan orang-orang bukan tani, seperti mandor, tukang, pedagang kecil, dlsb. Mereka mengirimkan anak-anaknya ke sekolah kelas 2 atau ke HIS. Yang

*) Penghematan dalam bidang pendidikan yang dimaksud adalah untuk tahun 1924. Penghematan terutama ditujukan untuk membatasi beasiswa untuk studi pada sekolah menengah, teknik, dan MULO. Selain itu tidak lagi memberikan uang muka untuk biaya pembangunan sekolah desa, uang muka untuk kenaikan uang sekolah bagi MULO, HIS, dan sekolah-sekolah kelas 2. Penghematan tsb. dilakukan sedemikian rupa sehingga bagian vital dari pendidikan tidak terganggu dan dapat berjalan terus.

paling beruntung adalah mereka yang berhasil menyekolahkan anak-anaknya ke HIS karena murid memperoleh pendidikan terbaik, yaitu pendidikan Eropa. Dengan demikian mereka merasa pendidikannya dipersamakan dengan anak-anak orang Belanda. Kalau mungkin mereka menginginkan pendidikan yang lebih maju dari HIS, tetapi hanya sedikit sekali anak orang Bumiputera yang memperoleh kesempatan tersebut, karena bahasa Belanda merupakan syarat mutlak sebagai instrumen untuk dapat diterima. Oleh karena itu apabila ada murid yang ditolak karena alasan kekurangan tempat, maka hal tersebut menyebabkan kekecewaan yang mendalam bagi orang tua murid.

Untuk mengatasi itu para orang tua mencari pemecahan pada sekolah swasta. Ada tiga macam HIS, yaitu HIS Negeri, bersubsidi, dan yang tidak bersubsidi. HIS negeri adalah yang paling disenangi, tetapi kalau yang Negeri sudah penuh, yang bersubsidi pun jadilah. Walaupun HIS bersubsidi dipersamakan dengan Negeri, tetapi orang masih mendahulukan sekolah negeri. Baru kalau kedua kesempatan tersebut sudah tidak ada lagi, orang menyekolahkan anaknya ke HIS swasta yang tidak bersubsidi.

Walaupun terdapat hambatan akibat penghematan, orang masih tetap memilih sekolah-sekolah negeri, meskipun di kalangan politisi, pers, dll. tadinya terdengar suara-suara untuk memperluas pendidikan swasta.

Orang tua yang menginginkan anaknya bersekolah di HIS terdiri dari golongan menengah, yang menginginkan ketenangan, dan orang baik-baik yang tidak menentang pemerintah. Jadi adanya hambatan pada HIS Negeri menjadikan pemikiran juga bagi mereka. Adanya sekolah kelas 2 hanyalah pertolongan dalam keadaan darurat karena murid sekolah kelas 2 jarang yang dapat pindah ke sekolah kelas 1 (HIS). Pada umumnya mereka tetap di sekolah kelas 2.

Kenaikan uang sekolah dalam rangka penghematan ini mempersulit orang tua juga, karena uang sangat berarti untuk golongan ini. Sebagai akibatnya banyak orang tua yang terpaksa memindahkan anaknya ke sekolah yang lebih murah.

Untuk lapisan masyarakat yang termiskin hal kenaikan uang sekolah sangat dirasakan, meskipun pada golongan menengah terdapat pengertian akan kenaikan tersebut dan mereka bersedia membayar uang sekolah lebih banyak.

Bagi kalangan atas dan kaum intelektual Bumiputera seperti di kalangan Budi Oetomo penghematan ini mereka anggap suatu pukulan dan seolah-olah jarum jam diundurkan. Mereka sebenarnya berusaha untuk memajukan pendidikan di segala tingkat, dalam waktu yang singkat, sehingga semua pembatasan dalam bidang pendidikan akan ditentangnya. Apapun alasan pemerintah, akan ditentangnya dengan argumentasi yang beralasan. Dapat dimengerti bahwa mudah timbul kecugraan atas maksud baik dari pemerintah dan mereka mencari-cari sumber dari orang-orang Eropa yang menentang terhadap kemajuan bangsa Bumiputera.

Di samping adanya arus yang mendasarkan kepada Boedi Oetomo, ada juga aliran yang mendasarkan kepada Islam dan komunisme yang tidak menentang sistim pendidikan Barat.

Untuk menanggulangi komunisme jalan yang terbaik ialah melalui sekolah-sekolah negeri karena masyarakat masih percaya pada arah yang ditempuh oleh sekolah-sekolah negeri.

PENGAWASAN (SUPERVISI) PEMERINTAH ATAS SEKOLAH SWASTA TIDAK BERBANTUAN (TIDAK BERSUBSIDI)

83. Nota Direktur Pendidikan dan Agama (J.F.W. Van der Meulen) tanggal 6 Januari 1925

Masalah pengawasan terhadap apa yang disebut sekolah "liar" itu dibahas lagi oleh J.F.W. Van der Meulen, Direktur Pendidikan & Agama, dalam nota tanggal 6 Januari 1925. Ia berpendapat, bahwa yang pertama-tama harus dipersoalkan dalam masalah tersebut ialah bahwa masalah itu sendiri tidak berurusan dengan pemberantasan pengaruh yang tidak diinginkan dalam arti politik dari guru kepada

siswa, teristimewa pengaruh propaganda komunis. Terlepas dari pemberantasan pengaruh komunis itu, masalah sekolah liar itu tetap ada sekali-pun tidak ada guru-guru komunis.

Dengan sekolah liar itu dimaksudkan semua sekolah, yang kepada bidang teknis pengajarannya tidak diadakan pengawasan oleh pejabat yang berwewenang di bidangnya, sedangkan sekolah-sekolah tersebut tidak terikat oleh hubungan keuangan dengan pemerintah. Apakah dalam sekolah liar itu terkandung bahaya, yang mengancam ketenteraman dalam perkembangan kecerdasan penduduk. Bahaya itu, yang dapat timbul dari pendidikan yang tidak memenuhi syarat di bawah kondisi kolonial, terkandung dalam rasa tidak puas, yang timbul dari kekecewaan pada para tamatan sekolah tersebut. Di sekolah negeri dan sekolah swasta Berbantuan dapat diadakan pembatasan terhadap kegagalan belajar dengan pengketatan syarat-syarat penerimaan siswa dan melalui pengawasan intensif di bidang teknis pengajaran serta juga pengawasan terhadap absensi siswa di sekolah. Di sekolah swasta tidak mungkin diberlakukan secara ketat syarat-syarat penerimaan siswa, termasuk ke dalamnya syarat mengenai batas umur. Untuk mengadakan pengawasan yang teratur, apalagi yang intensif, personalia yang tersedia jauh daripada mencukupi. Taraf pendidikan yang bermutu rendah di sekolah liar menimbulkan kekecewaan yang sangat besar bagi siswa dan orang tua. Menurut J.F.W. van der Meulen kekecewaan tersebut mengakibatkan kejengkelan, yang dalam kehidupan dalam kondisi kolonial selalu akan dilampiaskan terhadap "kapitalisme" atau terhadap "penjajahan". Maka pemberantasan bahaya tersebut harus dicoba berdasarkan motivasi ekonomi dan politik. Untuk dapat menentukan arah tujuan peraturan mengenai pemberantasan perlulah pertama-tama diadakan penelaahan keadaan, yang menyebabkan timbulnya dan kesuburan perkembangan "sekolah liar" tersebut. Sebagai sebab-sebab umum dapat disebut:

1. Pemenuhan kebutuhan akan sekolah yang tidak memuaskan.
2. Untuk mata pencaharian bagi pimpinan sekolah.
3. Menggunakan sekolah untuk propaganda tertentu.

Ad.1 Mengenai pemenuhan kebutuhan akan sekolah atau pendidikan dapat diadakan pembedaan kebutuhan yang obyektif dan yang subyektif. Dengan kebutuhan yang obyektif dimaksudkan kebutuhan yang diakui dan diusahakan penyediaannya oleh pemerintah. Menurut Van der Meulen, penyediaan sekolah negeri dan sekolah swasta berbantuan dengan diperluas terus-menerus dapat dikatakan dengan sedikit reserve tidak terlalu jauh ketinggalan di belakang kebutuhan obyektif. Tetapi keadaannya lain sama sekali mengenai kebutuhan subyektif, yaitu kebutuhan berdasarkan keinginan dan harapan tertentu. Rasa yang tidak puas dalam hal ini tertuju ke dua arah, yaitu (a) terhadap sistim pendidikan yang resmi, dan (b) terhadap kesempatan untuk memanfaatkan sistim tersebut.

- Terdapat dua macam kecaman, yaitu bahwa sistim tersebut terlalu kebarat-baratan atau terlalu "kapitalistis". Belakangan ditambah dengan keberatan terhadap pengajaran agama (Kristen) di sekolah swasta bersubsidi bagi penganut agama lain.
- Lebih penting daripada keberatan terhadap sistim ialah rasa tidak puas mengenai kesempatan yang tersedia untuk masuk sekolah. Terutama sekolah dengan pengajaran bahasa Belanda seperti HIS, dsb. tetap tidak memenuhi kebutuhan subyektif dengan memuaskan. Golongan penduduk yang karena posisi sosialnya tidak boleh menyekolahkan anak di HIS, terpaksa berpaling ke sekolah swasta. Terutama oleh dorongan kepada pengajaran bahasa Belandalah mereka berani berkorban untuk membayar uang sekolah yang tinggi, asal anak mereka dapat belajar bahasa Belanda. Dan di sinilah sumber kekecewaan yang tidak kecil.

Ad.2 Menurut Van der Meulen, sekolah liar didirikan untuk dijadikan sumber penghasilan bagi pendirinya atau para kaum kerabatnya, dan di samping itu dalam beberapa kasus nafsu mencari keuntungan mempunyai peranan yang besar seperti terbukti dari pungutan uang sekolah yang tinggi di sana-sini. Ada juga diketahui, bahwa sekolah-sekolah Sarekat Rakyat harus menyerahkan 5% dari hasil pungutan uang sekolah kepada Dana Sumbangan di Semarang. Tetapi sangat

diragukan, bahwa personalia sekolah-sekolah tersebut memenuhi kewajiban itu. Egoisme, yang mendasari motivasi pendirian sekolah, akan lambat laun merupakan rem yang kuat terhadap ekseseks politik. Egoisme tersebut pada umumnya juga menghalangi penggunaan uang sekolah untuk menyediakan alat-alat pelajaran dan ruangan belajar yang memadai.

Ad.3 Menurut Van der Meulen tidak begitu mudah untuk menentukan penggunaan yang berarti untuk propaganda. Pendapatnya mengenai sekolah Muhammadiyah, bahwa jika motivasinya bukan propaganda agama ialah terutama keinginan memasukkan pengajaran agama dalam sekolah. Jika maksud untuk propaganda politik dapat disebut sebagai salah satu sebab dari pendirian sekolah-sekolah Sarekat Rakyat, tetapi kelangsungan pembinaan sekolah-sekolah tersebut dapat dipertanyakan, karena ada pengaruh dari faktor-faktor dalam ad.1 dan ad.2. Perkembangan kursus-kursus ABC *) menunjukkan, bahwa jumlah orang yang mau bekerja dengan pengorbanan keuntungan bagi pribadinya untuk kepentingan pendidikan rakyat hanya sedikit. Di sini terdapat petunjuk yang kuat, bahwa sekolah-sekolah liar itu tidak dapat dibina kelestariannya hanya dengan guru-guru, yang bersedia mengorbankan kepentingan kepribadiannya, dan dengan siswa-siswa, yang orang tuanya menginginkan untuk anak mereka pengajaran komunis saja. Sekolah-sekolah tersebut harus memberikan penghasilan dan orang-orang tua murid dikelabui dengan harapan-harapan palsu sehingga membayar uang sekolah yang terlalu tinggi.

Di samping sebab-sebab yang umum tersebut kondisi setempat yang berbeda-beda akan dapat mendorong timbulnya sekolah-sekolah liar. Di Minahasa misalnya, dan rupanya juga di Ambon, didirikan sekolah swasta karena dorongan bahwa orang ingin belajar bahasa Belanda bukan hanya untuk memperoleh pekerjaan kantor ("witte jas

*) Kursus-kursus ini diadakan untuk orang dewasa oleh suatu panitia pemberantasan buta huruf (Alphabetisme Bestrijdings Committee), yang di-infiltrasikan dengan kuat oleh kaum komunis.

baantje") setelah menamatkan sekolah, tetapi juga karena pengetahuan bahasa Belanda yang sederhana makin dirasakan sebagai kebutuhan dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Pada hemat Van der Meulen, hal yang lebih penting untuk penyelesaian masalah dengan tepat perlu diketahui adanya pengaruh faktor faktor setempat dan arti faktor-faktor tersebut. Misalnya pendirian sekolah-sekolah Muhammadiyah di Jawa Tengah motivasinya apakah keinginan untuk memberikan posisi yang sepatutnya kepada pengajaran agama Islam ataukah dimaksudkan sebagai reaksi kepada penyebaran agama Kristen. Juga dalam anggapan, bahwa tidak perlu memberikan banyak perhatian kepada sekolah liar Cina, perlu diadakan koreksi, karena biasanya anak Cina yang menjadi siswa di sekolah tersebut tidak menaruh harapan untuk dapat memperoleh pekerjaan melalui sekolah tersebut.

Menurut Van der Meulen, pemerintah harus menyambut dengan baik setiap usaha penyelenggaraan pendidikan yang baik, betapapun sederhananya. Dalam hal kebutuhan akan pendidikan tidak dapat dipenuhi seluruhnya dengan penyediaan sekolah negeri atau sekolah bersubsidi maka tidak perlu diadakan pengawasan secara langsung terhadap sekolah, yang dengan atau tidak dengan sengaja mempunyai kurikulum lain atau yang sama sekali tidak mempunyai kurikulum. Yang harus dibebaskan ialah pendidikannya yang buruk di sekolah seperti itu, atau di sekolah yang pada orang tua murid menimbulkan harapan yang tidak dapat dipenuhi oleh sekolah. Sekolah semacam itu biasanya memberikan apa yang disebut "pengajaran bahasa Belanda". Ia sampai kepada kesimpulan sementara, bahwa di samping atau sama sekali terpisah dari peraturan untuk mengambil tindakan terhadap guru-guru berbahasa berdasarkan pertimbangan dari segi politik, juga perlu diadakan peraturan untuk mencegah keburukan-keburukan yang membahayakan dari sekolah liar.

84. Dari Pj. Sekretaris Pemerintah (Negara) I kepada Kepala Keresidenan (Hoofden van gewestelijk bestuur) 7 Juni 1925

Untuk mengadakan pengawasan yang lebih efektif terhadap sekolah liar maka dalam ordonansi 28 Maret 1923 (Lembaran Negara nomor 136) diadakan perubahan (Lembaran Negara nomor 260). Dalam surat edaran Pejabat Sekretaris Pemerintah (Negara) I tanggal 7 Juni 1925 kepada Kepala-kepala Pemerintah Daerah perubahan tersebut dijelaskan mengenai tiga hal.

Menurut ordonansi lama baru diambil tindakan jika ternyata, bahwa pendidikan yang diberikan mengancam ketertiban umum. Menurut Gubernur Jenderal dengan demikian pemerintah tidak dapat dengan tuntas memberantas pendidikan yang berlandaskan ^{ajaran} revolusioner. Karena itu diadakan perubahan dengan perluasan dalam peraturan mengenai larangan mengajar, sehingga untuk selanjutnya larangan tersebut tidak hanya dikenakan terhadap seseorang yang memberikan pengajaran, tetapi juga terhadap orang, yang bermaksud akan menjadi guru dan untuk itu telah memberitahukan sebagaimana mestinya menurut peraturan. Karena berbagai sebab tidak dapat diadakan pengawasan preventif terhadap sekolah liar dengan mengharuskan meminta izin untuk mengajar, sehingga tidak akan selalu mungkin untuk melarang seorang bakal guru yang dianggap berbahaya, sebelum ia menjalankan pekerjaannya. Tetapi kesulitan ini menjadi kecil, apabila para kepala pemerintahan daerah berusaha memberitahukan dengan segera keterangan-keterangan mengenai orang-orang yang dicurigai. Dengan demikian dimungkinkan untuk mengeluarkan larangan dalam waktu yang singkat, sehingga praktis tidak akan diberikan kesempatan untuk berbuat jahat.

Perubahan yang dimaksudkan di atas memungkinkan untuk mengambil tindakan terhadap guru-guru, yang bertanggung jawab atas perbuatan murid dan adanya sarana atau benda-benda di sekolah, yang dianggap merongrong wibawa pemerintah. Benda-benda tersebut misalnya gambar-gambar pemimpin ekstremis atau hiasan dinding yang menghasut. Untuk menghalangi seorang guru yang terkena larangan mengajar di suatu daerah muncul di daerah lain, sesogyanya para kepala pemerintahan

daerah memberitahukan setiap penindakan larangan kepada masing-masing yang bersangkutan dan kepada Kantor Kejaksaan di daerah-daerah.

Perubahan kedua ialah bahwa larangan mengajar yang berlaku untuk waktu yang lamanya ditetapkan, menjadi larangan yang dikeluarkan untuk waktu yang lamanya tidak ditetapkan. Hal ini terutama penting artinya sebagai larangan terhadap orang-orang, yang memberi pendidikan dengan tujuan mendidik kaum muda, supaya pada mereka tumbuh sikap menentang pemerintah.

Perubahan ketiga ialah penggantian kata "kinderen" (anak-anak) dengan "personen" (orang-orang) sedemikian rupa, sehingga tercakup ke dalamnya larangan mengajar kepada orang dewasa.

Dalam bagian akhir surat dikemukakan pula kemungkinan untuk mengadakan tindakan di beberapa daerah secara luas terhadap sekolah Sarekat Rakyat dengan penutupan lebih banyak dari sekolah tersebut.

PENDIDIKAN UNTUK RAKYAT

PENDIDIKAN UNTUK GADIS-GADIS BUMIPUTERA

85. Menteri Daerah Jajahan (Welter) dalam surat kepada Gubernur Jenderal (Fock), tanggal 16 Januari 1926

Menegaskan, bahwa pendidikan harus berfungsi lebih daripada yang sudah-sudah, menciptakan tanggung jawab kewargaan negara dan ketabahan moral. Pertama-tama ia menghendaki pembaharuan ke arah itu dalam sekolah-sekolah desa.

Dalam permulaan surat dikemukakan penjelasan yang diberikan oleh Direktur Pendidikan dan Agama, Mr. K.F. Creutzberg, dalam pidatonya yang terkenal ketika diadakan pembicaraan mengenai rancangan anggaran biaya untuk tahun 1919 dalam rapat-rapat Dewan Rakyat pada tanggal 21 dan 22 Juni 1918. Oleh Mr. Creutzberg dijelaskan bahwa untuk memperoleh wawasan yang benar dalam tugas pendidikan, yang harus dilaksanakan pemerintah di kemudian hari yang dekat ini, harus dibedakan dua kelompok induk persekolahan, yang menuntut pemeliharaan pemerintah berdasarkan syarat-syarat yang sangat berlainan.

Kelompok induk pertama terdiri dari sekolah desa dan sekolah kelas dua atau apa yang disebut sekolah standar untuk Bumiputera, yang mempunyai tujuan terutama pendidikan rakyat dengan dasar pribumi dalam arti paling umum dan luas. Kelompok induk kedua meliputi semua lembaga pendidikan yang memberikan pengajaran, yang sedikit atau banyak bersifat Barat. Creutzberg menunjukkan, bahwa kelompok induk pertama dalam arti tertentu dapat dianggap sebagai dasar dari keseluruhan dan diuraikannya lebih lanjut, bahwa pemerintah menganggap sebagai termasuk ke dalam kewajibannya yang pertama untuk memajukan pendidikan rakyat dengan sekuat kemampuan yang ada. Kewajiban ini tidak boleh dipandang sebagai keluar dari wawasan yang semau-maunya, yang dianut pada hari sekarang untuk ditinggalkan pada keesokan harinya, melainkan sebagai tugas yang dibebankan oleh sejarah dengan kekuatan hukum alam. Dikatakannya lebih lanjut, bahwa "Perkembangan kecerdasan penduduk sebenarnya berhubungan sangat erat dengan usaha untuk memajukan kemakmuran suatu massa yang buta huruf dan tidak dapat dimajukan secara ekonomis dengan berarti".

Menteri Welter dalam suratnya itu mengingatkan kepada kebijaksanaan pemerintah dalam hubungannya dengan pembiayaan sekolah desa. Mula-mula dianut pendirian, bahwa pembiayaan sekolah desa harus diambil dari pendapatan lokal dan dari uang sekolah. Tetapi ternyata, bahwa pelaksanaan secara ketat prinsip swasembada dalam pembiayaan ini merintangi perkembangan pesat pendidikan untuk rakyat. Maka dalam tahun 1919 dianggap mendesak untuk melunakkan atau mengurangi sistim pembiayaan sendiri. Sejak itu dipakai sistim dengan prinsip bahwa akan didirikan sekolah menurut kebutuhan, dan pembiayaannya oleh masyarakat setempat, yang sejauh itu dimungkinkan dalam hubungannya dengan keadaan kemakmuran. Sebelumnya yang menjadi pegangan ialah: "tidak mendirikan sekolah, jika terbukti tidak ada kesediaan penduduk memberikan pengurbanan untuk pembiayaannya". Dalam anggaran biaya pemerintah Hindia Belanda untuk tahun 1919 berikutnya disediakan sejuta gulden sebagai subsidi untuk pendirian 1000 sekolah

baru, sedangkan selain itu untuk gaji guru-guru, biaya pemeliharaan, dsb. diberikan bantuan biaya, yang tidak dibebankan kepada desa. Tetapi masih ada kelemahan-kelemahan dalam sistim baru itu. Kekurangannya yang terutama ialah, bahwa sebenarnya dalam pembagian biaya tidak dapat dikatakan tidak ada satu sistim, karena terlalu banyak bergantung kepada pegawai pangreh praja setempat, yang sesungguhnya sering kali berbeda pendapat dalam penilaian terhadap kekuatan keuangan desa. Selanjutnya tidak ada kriterium untuk dipakai dalam memperkirakan pengeluaran, yang dengan kecepatan perluasan sekolah-sekolah biayanya untuk pemerintah akan naik. Maka sejak tahun 1922 dipakailah sistim pembagian biaya antara pemerintah dengan desa, yang berpijak pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Desa harus menanggung biaya pendirian, perlengkapan dan pemeliharaan sekolah-sekolah. Jika dianggap perlu pemerintah memberikan persekot, yang dibayar kembali dengan bunga dalam angsuran setiap tahun. Dalam keadaan istimewa persekot itu dapat dibayar tanpa bunga atau dengan bunga yang lebih rendah dari pada yang biasanya.
- Gaji guru-guru dibayar oleh pemerintah, sedangkan dalam kasus-kasus tertentu desa dapat memberikan tunjangan sebagai tambahan gaji.
- Uang sekolah diterimakan kepada desa dan digunakan pertama-tama untuk menutupi biaya pembangunan dan pemeliharaan sekolah.

Dalam tahun-tahun 1920, 1921, dan 1922 diadakan kegiatan dengan gesit dalam perluasan pendidikan-pendidikan untuk rakyat, sehingga jumlah sekolah desa dalam tahun-tahun tersebut di Jawa dan Madura naik dengan lebih kurang 830, 950, dan 600, dan di daerah-daerah di seberang dengan lebih kurang 300, 150, dan 150. Setelah itu perluasan sekolah sangat diperlambat oleh berbagai sebab. Sejak tahun 1930 setiap tahun rata-rata dibuka tidak lebih dari 300 sekolah desa baru. Dalam tahun 1926 jumlah sekolah desa seluruhnya di Indonesia diperkirakan ada sekitar 10.000 buah.

Mengenai sekolah kelas dua (sekolah standar), jumlahnya di seluruh Indonesia dalam tahun-tahun 1920, 1921, 1922, 1923, dan 1924 naik berturut-turut dengan lebih kurang 80, 70, 30, 60, dan 60; dan dalam tahun 1926 seluruhnya diperkirakan ada sekitar 2100 buah.

Jadi dalam tahun 1926 itu untuk keperluan pendidikan rendah yang sederhana bagi anak Indonesia disediakan oleh Pemerintah kira-kira 12.000 buah sekolah untuk seluruh Indonesia. Dipukul-ratakan untuk hanya kira-kira 20% dari seluruh jumlah anak Indonesia, yang telah mencapai usia-sekolah, disediakan kesempatan bersekolah oleh pemerintah. Biar pun bagaimana giatnya pihak swasta mendirikan sekolah, jelaslah bahwa masih banyak harus dikerjakan oleh pemerintah untuk menyediakan keperluan pendidikan rendah bagi rakyat Indonesia.

Menurut Menteri, untuk memenuhi tuntutan yang mendesak perluasan sekolah untuk rakyat mula-mula harus digarap terutama penambahan jumlah sekolah desa, yang harus diusahakan dengan lebih keras dari tahun-tahun sebelumnya, karena sekolah desa harus dianggap sebagai bagian bawah sekolah kelas dua. Diharapkannya, bahwa dalam rancangan anggaran biaya untuk tahun 1927 diadakan perhitungan untuk pembangunan sekolah desa baru, dua kali jumlah dalam anggaran biaya untuk tahun 1926.

Oleh Menteri juga dibahas corak atau sifat pendidikan pada sekolah untuk rakyat. Hubungan sekolah desa dengan sekolah kelas dua lebih dipererat dengan pembentukan "sekolah vervolg", yaitu sekolah lanjutan dari sekolah desa (atau sekolah kelas dua tanpa tahun ajaran pertama, kedua dan ketiga). Kemudian diusahakan perbaikan dan intensifikasi inspeksi sekolah dan peningkatan kuantitas serta kualitas personalia pengajaran. Juga harus diusahakan, supaya di sekolah desa diberikan perhatian sebanyak-banyaknya kepada pelajaran pekerjaan tangan. Selanjutnya diusahakan penyambungan yang sempurna dari sekolah desa ke sekolah kelas dua. Murid sekolah desa, yang melanjutkan belajar di sekolah kelas dua, dirugikan dengan satu tahun, karena dengan surat tanda tamat belajar di sekolah desa ia hanya berhak untuk duduk di kelas tiga sekolah kelas dua. Dengan

merubah kurikulum sekolah kelas dua dan perbaikan pendidikan di sekolah desa, diusahakan kemungkinan untuk dapat naik dari sekolah desa ke kelas empat sekolah kelas dua. Sekolah kelas dua dalam bentuk sekolah "vervolg" dengan dua atau tiga tahun ajaran akan dijadikan lanjutan yang benar-benar dari sekolah desa. Dengan demikian akan dibuka perspektif untuk secara berangsur-angsur mengembangkan sekolah rendah untuk massa rakyat yang luas menjadi sekolah rakyat enam tahun.

Pada umumnya telah disadari, bahwa metode pengajaran yang lama terlalu menekankan kepada aspek intellektuil, kata Menteri Welter. Terlalu sedikit perhatian diberikan kepada pembentukan watak, kepada pendidikan budi pekerti dan pembinaan kesadaran untuk bekerja sendiri. Begitu juga pengajaran di sekolah sangat kurang diarahkan kepada tujuan-tujuan yang praktis. Menurut Menteri, saran-saran baik pun secara lisan maupun secara tertulis, yang menganjurkan pembaharuan metode pengajaran, mendapat sambutan yang baik, seperti dalam rapat-rapat DPR (Staten Generaal) di negeri Belanda dan dalam Dewan Rakyat di Indonesia. Sebagai contoh diingatkannya pidato tuan Roep pada tanggal 22 Juni 1925, yang mengemukakan sistim pendidikan di sekolah-sekolah yang didirikan oleh perusahaan perkebunan swasta Senemba di Deli (propinsi Sumatera Utara sekarang). Di sekolah Senemba itu, anak-anak para buruh perkebunan di samping mendapat pendidikan formil umum, kepada mereka juga diberikan pelajaran pekerjaan tangan, a.l. latihan di dalam kebun-kebun sekolah. Diharapkan oleh Menteri, supaya sekolah mendidik anak-anak menjadi orang-orang yang berkesadaran sosial dan gemar bekerja. Sekolah harus dapat mengembangkan cinta kepada kerja, kesukaan menabung, kesadaran akan tata tertib, kerapian dan kebersihan, mengembangkan cinta kepada tanah air dan kebudayaannya, rasa hormat kepada sesama manusia, ketulusan hati, kejujuran, kesetiaan kepada janji, sikap lemah-lembut terhadap binatang, dsb. Juga diharapkannya supaya diberikan lebih banyak perhatian kepada pendidikan jasmani. Disebutkannya sebagai syarat pertama-tama untuk mengadakan pembaharuan yang dimaksudkan,

bahwa guru-guru yang bersangkutan harus menyadari akan perlunya diadakan pembaharuan tersebut dan karena itu juga harus dipikirkan cara memberikan kesadaran, baik pun dengan cara yang banyak berhubungan dengan pendidikan mereka maupun dengan cara lain (misalnya menyediakan buku tuntunan yang praktis). Gubernur Jenderal diharapkan mencari nasehat dari Dewan Pendidikan dengan maksud menyusun bagan rencana pembaharuan yang terperinci dengan disertai perhitungan secara global pembiayaannya untuk digunakan sebagai landasan perembukan usul rencana anggaran biaya yang akan diajukan.

86. Menteri Daerah Jajahan (Welter) kepada Gubernur Jenderal (Fock), tanggal 12 Pebruari 1926

Dalam surat yang berikut kepada Gubernur Jenderal tanggal 12 Pebruari 1926, Menteri Welter juga menghendaki supaya lebih banyak anak gadis bersekolah dan jika diperlukan dengan mendirikan sekolah istimewa atau khusus untuk gadis Bumiputera. Dimintakannya perhatian khusus dari Gubernur Jenderal kepada arti sekolah untuk gadis Bumiputera, baik pun untuk memberantas analfabetisme (kebutaan huruf), maupun untuk memperkuat pengaruh sekolah di bidang susila dalam masyarakat. Disebutnya apa yang telah dikemukakannya dalam suratnya yang terdahulu, bahwa di antara nilai-nilai sosial yang harus dikembangkan oleh sekolah ialah cinta kepada kerja, suka menabung, kerapian, kebersihan, cinta kepada tanah air dan kebudayaannya, rasa hormat kepada dan menghargai sesama manusia, ketulusan hati, kejujuran, kesetiaan kepada janji, dan sikap ramah kepada binatang. Teristimewa dengan perhatian kepada tujuan-tujuan inilah sekolah untuk gadis sangat penting artinya. Apakah usaha sekolah untuk mengembangkan nilai-nilai sosial tersebut ditunjang oleh keluarga di rumah, hal itu bergantung sekali kepada suasana keluarga di rumah dan suasana tersebut dicerminkan oleh ibu rumah tangga.

Menurut Menteri, oleh pendidikan di sekolah rendah untuk anak perempuan di samping diberikan pengetahuan sekolah elementer yang berguna bagi anak laki-laki dan wanita, juga harus diadakan

pengarahan kepada tujuan khusus dari pendidikan kepada anak gadis. Jika dibandingkan dengan di negeri-negeri Barat pendidikan untuk anak gadis Indonesia mengarah jauh lebih banyak kepada kehidupan dalam keluarga di rumah. Pembentukan watak dalam pendidikan untuk anak perempuan efeknya kepada masyarakat lebih besar dan ditinjau dari sudut ini Menteri memberikan perhatian khusus kepada pendirian sekolah untuk anak gadis Bumiputera. Lain dari pada itu ia menganggapnya teristimewa penting untuk membantu pemberantasan buta huruf.

Menteri Welter berpegang teguh kepada pendirian, bahwa untuk usia murid sekolah desa harus dilaksanakan ko-edukasi. Tetapi diharapkan untuk dipertimbangkan di daerah-daerah yang jumlah murid perempuan di sekolah desa jauh lebih sedikit dari pada di daerah-daerah yang lain, didirikan sekolah desa khusus untuk anak gadis sebagai usaha dalam masa peralihan dengan tujuan untuk mendorong lebih banyak anak wanita masuk sekolah. Apabila percobaan usaha membiasakan penduduk untuk juga menyekolahkan anak gadisnya agar mendapat pendidikan yang sederhana sekali dalam membaca, menulis dan berhitung, dapat diharapkan pengaruhnya yang baik kepada penduduk, sehingga kapasitas sekolah-sekolah yang kecil akan berkembang. Dengan demikian dapatlah diimbangi keberatan terhadap biaya yang lebih tinggi dalam pengelolaan sekolah desa khusus untuk anak wanita, yang disebabkan oleh penghamburan tenaga.

Juga dapat diharapkan, bahwa pendirian sekolah khusus untuk anak perempuan akan menampilkan lebih banyak tenaga pengajar wanita, yang kehadirannya juga akan lebih banyak terjadi di sekolah desa dan sekolah kelas dua campuran, sehingga dengan demikian keberatan pada banyak orang terhadap koedukasi dapat berkurang.

Pada hemat Menteri, masa peralihan tersebut di atas dengan tujuan untuk mendorong perkembangan sekolah desa campuran yang sudah ada mempunyai arti penting untuk mempertimbangkan rencana pengadaan pendidikan guru wanita untuk sekolah desa. Menurut ikhtisar statistik tahun 1924 jumlah murid wanita di sekolah desa negeri hampir

sekitar 13% dari seluruh jumlah murid, sedangkan jumlahnya di sekolah kelas dua masih lebih kurang. *) Menurutny dapat diharapkan, bahwa jumlah murid wanita di sekolah campuran akan berangsur-angsur naik dengan peningkatan produksi sekolah normal untuk mendidik guru bantu wanita **) dan kenaikan guru wanita di sekolah kelas dua. Lain dari pada itu sekolah kelas dua ini akan berkurang artinya untuk pendidikan anak gadis, apabila didirikan sekolah "vervolg" untuk anak gadis ("meisjes-kopscholen"), yang merupakan kelanjutan dari sekolah desa dan tiga kelas terendah sekolah kelas dua untuk anak wanita. ***)

Pengajaran bahasa Belanda (sebagai mata pelajaran) di sekolah gadis tersebut di atas kepentingan sosialnya harus ditinjau dalam hubungan dengan pengajaran di HIS. Pada mulanya kebutuhan akan pengajaran dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar hanya diakui untuk kelompok penduduk, yang kepentingannya diperhatikan berdasarkan keturunan, kedudukan dalam masyarakat atau penghasilan. Kriteria yang demikian ini tidak berlaku lagi sejak didirikan sekolah peralihan, yang menyediakan jembatan bagi murid-murid yang terpilih berdasarkan bakat dari sekolah kelas dua semata-mata untuk melanjutkan belajar di MULO. Sementara itu HIS telah mengalami perkembangan sedemikian rupa, sehingga dengan berangsur-angsur juga mempunyai sejumlah besar murid, yang membutuhkan pengajaran dengan bahasa pengantar bahasa Belanda, meskipun tidak memenuhi kriteria berdasarkan keturunan, kedudukan, atau penghasilan orang tua atau wali mereka. Untuk fenomena ini dapat ditunjukkan dua sebab.

*) Dalam tahun 1924 jumlah seluruh murid di sekolah desa 685.222 diantaranya 92.621 murid wanita. Di sekolah kelas dua jumlah seluruh murid 249.143, diantaranya 30.816 murid wanita. (Iktisar Statistik Tahunan Hindia-Belanda, dari kantor pusat statistik di Hindia Belanda, 1924, hal.48)

**) Dalam tahun 1924 ada 390 anak gadis dididik untuk menjadi guru bantu wanita.

***) Di sekolah gadis ini diajarkan kesejahteraan rumah tangga dan bahasa Belanda sebagai mata pelajaran.

Pertama-tama, jumlah tenaga kerja di lapangan pekerjaan dengan gaji yang baik pada pemerintah dan swasta telah menimbulkan suatu kelompok besar dari orang-orang, yang meskipun tidak dapat digolongkan ke dalam orang kaya, namun selama masih mempunyai pekerjaan mereka memperoleh pendapatan, yang memungkinkan untuk mampu membayar uang sekolah yang cukup tinggi di HIS.

Kedua, dalam kalangan luas dari orang-orang yang sebenarnya penghasilannya tidak memberi kemampuan, timbul kesadaran, bahwa suatu kedudukan, yang ditinjau dari sudut material menggiurkan, dapat dicapai oleh setiap orang lebih banyak dari pada dulu-dulu, jika melalui sekolah dengan pendidikan Barat dapat memperoleh ijazah tanpa didasarkan pada keturunan atau perlakuan istimewa. Banyak contoh dapat diberikan dari orang tua, yang memberikan pengorbanan sangat besar agar anaknya dapat menempuh jalan itu.

Karena kedua sebab tersebut di atas itu, berubahlah kadar sosial murid HIS dalam perkembangannya itu. Kenyataan menunjukkan, bahwa di HIS makin banyak murid yang orang tuanya tidak memenuhi syarat menurut kriteria keturunan atau kekayaan, tetapi sanggup membayar uang sekolah untuk menyekolahkan anak di HIS. Menteri dengan sengaja tidak mau mempersoalkan gerakan-gerakan politik yang timbul karena pengaruh pendidikan Barat, juga dalam kesempatan itu tidak mau mempertanyakan apakah demokratisasi HIS itu dapat diterima dengan baik atau tidak, karena perkembangan tersebut bagaimanapun juga tidak dapat dihindari. Karena itu ia membatasi diri dengan mengemukakan, bahwa perkembangan yang telah diuraikannya itu menuju kepada perluasan kalangan yang memerlukan bahasa Belanda untuk digunakan, jika tidak dalam percakapan, paling sedikitnya untuk dapat dimengerti dengan cukup. Gejala ini dianggap penting dalam hubungan dengan masalah sekolah untuk anak gadis.

Karena faktor-faktor yang mendorong perkembangan HIS akan lebih banyak berpengaruh kepada peningkatan jumlah murid laki-laki daripada wanita, maka pada hemat Menteri makin penting mempertimbangkan usaha mengadakan keseimbangan antara kedua kelompok murid-murid itu.

Pengajaran bahasa Belanda akan menunjukkan hasil yang lebih baik, jika pengetahuan bahasa Belanda di luar sekolah dimiliki oleh orang-orang dalam kalangan tertentu tidak hanya di antara kaum pria, tetapi juga di antara kaum wanita, mengingat peranan penting kaum wanita sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga, yang akan sangat membantu penyebaran pengetahuan bahasa Belanda dalam kalangan yang lebih luas. Menurut Menteri, hanya dengan cara itu diperkuat pengaruh Belanda dan peresapan cita atau pikiran Belanda, yang tetap bertahan sekalipun seandainya dalam waktu akan datang kekuasaan Belanda akan mengalami perubahan.

Menurut Menteri Welter, pendirian sekolah Kartini^{*)} atau HIS untuk murid wanita, yang selama itu diserahkan kepada prakarsa swasta dan yang perkembangannya akan didorong lebih pesat oleh pemberian sokongan dengan sukarela, ternyata tidak memenuhi harapan. Mengenai luas jangkauan pendidikan rendah Barat untuk anak gadis Bumiputera telah dibuat rencananya oleh Pemerintah dalam tahun 1918 dan digambarkan dalam pidato di Dewan Rakyat oleh K.F. Creutzberg, Direktur Pendidikan dan Agama pada waktu itu. Intisari isinya ialah sebagai berikut:

Sekolah rendah untuk anak gadis Bumiputera harus bertujuan terutama mempersiapkan gadis itu untuk menduduki tempat terhormat dalam keluarga yang sopan (beradab). Hal ini berbeda sekali dengan tujuan untuk remaja laki-laki, yang pendidikannya di sekolah relatif sebagian besar ditujukan untuk melanjutkan belajar. Karena itu pemerintah menganggap HIS untuk anak gadis dengan program pelajaran HIS untuk murid campuran hanya untuk memenuhi kebutuhan terbatas, antara lain mendidik untuk pekerjaan khusus bagi wanita. Sebaliknya Pemerintah melihat adanya kebutuhan tidak terbatas akan sekolah untuk

*) Sekolah Kartini yang dibina oleh "Perkumpulan Kartini" dengan bantuan "Dana Kartini" di negeri Belanda diselenggarakan seperti HIS ditambah pengajaran kesejahteraan rumah tangga dan pekerjaan tangan. Sekolah Kartini yang pertama didirikan di Semarang dalam tahun 1913; kemudian didirikan di tujuh tempat di Jawa.

anak perempuan dengan tipe yang lebih sederhana, tetapi harus diselenggarakan dengan baik, sehingga menjamin pengaruhnya yang membawakan kesopanan umum kepada para calon ibu rumah tangga. Di sekolah ini juga akan diajarkan bahasa Belanda, tetapi sebagai mata pelajaran saja dengan tujuan untuk sekedar dapat mengerti dalam percakapan biasa yang sederhana.

Pelaksanaan rencana ini baru dimulai dengan pendirian apa yang disebut "sekolah lanjutan untuk anak gadis" ("meisjes-kop-scholen"). Dalam pandangan Menteri Welter, penyelenggaraan sekolah ini dan kemungkinan perluasannya harus dipelajari lebih jauh dalam hubungan dengan perkembangan HIS untuk murid campuran dan pada umumnya dengan penyebaran pengetahuan bahasa Belanda di kalangan penduduk Indonesia, seperti dapat disaksikan dalam tahun-tahun belakangan. Untuk mengajarkan bahasa Belanda kepada anak gadis Bumi-putera dalam perbandingan yang kira-kira sama dengan pengajaran bahasa Belanda kepada para muda laki-lakinya, baru benar-benar dapat dilaksanakan apabila jumlah sekolah dari type baru ini sangat ditingkatkan.^{*)} Diharapkan dari Gubernur Jenderal supaya memberikan laporan yang lengkap mengenai pengalaman-pengalaman, yang telah diperoleh mengenai perkembangan sekolah gadis ini dan juga dikehendakinya supaya diadakan tindakan untuk memperkembangkan tipe sekolah itu secara berarti. Lain dari pada itu diharapkannya pula supaya diadakan penelitian mengenai kemungkinan sejauh mana sekolah tersebut dapat dimanfaatkan untuk melanjutkan dengan pendidikan anak gadis menjadi guru sekolah desa dengan tujuan dapat memperbanyak guru guru wanita di sekolah kelas dua dan jika mungkin dalam masa peralihan yang dimaksudkan di atas mendirikan sekolah-sekolah campuran, yang di kemudian hari diubah menjadi sekolah-sekolah untuk anak gadis.

^{*)} Menurut angka ikhtisar statistik tahunan untuk tahun 1924, jumlah murid perempuan di HIS ada 27% dari seluruh jumlah murid yang belajar di HIS.

87. Dari Gubernur Jenderal (De Graeff) kepada Menteri Daerah Jajahan (Koningsberger), 25 Agustus 1928

Usul-usul bekas Menteri Daerah Jajahan (Welter) itu telah ditanggapi oleh Gubernur Jenderal De Graeff, yang memberitahukan dengan surat tanggal 11 Mei 1927 nomor 318/64 kepada Menteri Koningsberger, pengganti Menteri Welter, bahwa usul-usul tersebut sedang dipelajari oleh Dewan Pendidikan. Dengan surat Gubernur Jenderal kepada Menteri tanggal 25 Agustus 1928 dikirimkan laporan mengenai hasil penyelidikan. Ia berkesimpulan, bahwa usul Welter mengenai peningkatan jumlah sekolah lanjutan untuk anak gadis ("meisjes-kop school") akan sukar dilaksanakan, karena fasilitas keuangan yang terbatas atau dibatasi akan menjadi hambatan.

Ia sependapat dengan nasehat Dewan Pendidikan, yang diamendir oleh Direktur Pendidikan dan Agama, J. Hardeman, dan didasarkan kepada pendirian bahwa perkembangan sekolah untuk anak Bumiputera diserahkan kepada kehendak waktu, supaya dapat berlangsung dengan tenang dalam wujudnya atau bentuknya pada waktu itu. Dewan Pendidikan juga tidak menyetujui untuk mengadakan perubahan yang mendalam pada sistim pendidikan untuk anak Bumiputera. Tetapi Dewan Hindia Belanda dalam nasehatnya menganggap pendapat Dewan Pendidikan itu tidak tepat, bahwa seakan-akan Welter menghendaki perubahan yang mendalam itu. Menurut Gubernur Jenderal dengan mengingat pendapat-pendapat Dewan Hindia-Belanda beberapa kesimpulan dirumuskan terlalu tajam oleh Dewan Pendidikan, yang agaknya menolak memasukkan pembaharuan dalam kurikulum sekolah. Seperti Dewan Hindia-Belanda, ia sepaham dengan J. Hardeman, yang dapat menerima beberapa hal dalam gagasan Welter untuk meningkatkan mutu pengajaran di sekolah Bumiputera. Hal ini segera dinyatakan dengan pelaksanaan gagasan untuk mengadakan mata pelajaran pekerjaan tangan dan latihan jasmani di sekolah desa dan mata pelajaran pekerjaan tangan di sekolah kelas dua.

Tetapi Gubernur Jenderal berpendirian, bahwa untuk sementara tidak boleh dulu diadakan perubahan tujuan dan penyelenggaraan

sekolah desa. Kendatipun demikian ia sependapat dengan J. Hardeman sebagai Direktur Pendidikan dan Agama untuk memungkinkan pengarahannya kurikulum yang masih berlaku, kepada perbaikan agar pendidikan di sekolah lebih menarik dan lebih disukai dengan memasukkan dua mata pelajaran tersebut ke dalam kurikulum, tetapi harus dilaksanakan dengan berencana dan tanpa melampaui batas kewajaran. Dalam surat edaran Direktur Pendidikan dan Agama tanggal 16 September 1926 nomor A.8/1/71 dimintakan perhatian pemerintah daerah kepada kemungkinan untuk mempopulerkan sekolah desa dengan memberikan latihan pertanian, pekerjaan tangan dan olah raga sebagai mata pelajaran tambahan belaka. Juga di sekolah kelas dua ditambahkan latihan pertanian dan pekerjaan tangan. Gubernur Jenderal juga sependapat dengan J. Hardeman, bahwa terserah kepada kebijaksanaan para Inspektur yang bersangkutan mengenai apa yang dapat dilaksanakan yang berhubungan dengan pelajaran pekerjaan tangan tanpa mengganggu kurikulum biasa. Terhadap latihan jasmani di sekolah kelas dua tidak ada keberatan dari Dewan Pendidikan dan rupanya sudah biasa sejak lama diadakan di sekolah kelas dua. Dewan Pendidikan juga dengan tegas menghendaki perbaikan dan penambahan dalam penyediaan alat-alat dan perlengkapan pelajaran yang dianggapnya urgen. Terutama nasehatnya untuk mengangkat "penasehat buku pegangan guru" diterima oleh Pemerintah. (Lembaran Negara 1927 nomor 327 dan Lembaran Tambahan nomor 11412).

Tetapi Dewan Pendidikan bertentangan dengan gagasan Welter untuk memperhubungkan semesra-mesranya sekolah desa dengan sekolah kelas dua dengan tujuan akhir mengembangkan secara berangsur-angsur sekolah rendah untuk anak Bumiputera menjadi sekolah rakyat enam tahun. Dewan Pendidikan justru menunjukan perhatiannya kepada kemungkinan untuk memutuskan perhubungan itu, katanya untuk kepentingan pendidikan elementer itu sendiri. Meskipun Dewan Pendidikan menganggap perlu mempertahankan kemungkinan pemindahan kenaikan dari sekolah desa ke sekolah kelas dua, namun sebagai suatu sistim penyambungan yang tetap ditolak oleh mayoritas dalam Dewan. J. Hardeman

rupanya menganggap belum tiba saatnya untuk merubah sistim, karena tidak ada tersedia data yang dapat membuktikan dengan pasti keharusan inovasi yang sangat penting itu.

Mengenai masalah sekolah untuk anak gadis, Gubernur Jenderal mengemukakan setuju sekali dengan argumentasi Welter untuk membela nilai yang istimewa pentingnya dari pendidikan bagi anak gadis untuk kecerdasan masyarakat. Juga semua penasehatnya setuju. Tetapi katanya perspektif keuangan yang sementara menjadi kurang baik segera sudah menjadi hambatan terhadap perluasan sekolah untuk anak gadis. Selanjutnya diuraikannya halnya anggapan Dewan Pendidikan terhadap keterangan yang diminta Welter dan data yang disediakan Direktorat Pendidikan dan Agama mengenai perkembangan sekolah untuk anak gadis dan mengenai kecenderungan guru-guru wanita untuk tetap mengabdikan kepada sekolah setelah kawin. Oleh Dewan Pendidikan dibahas dua persoalan, yaitu: (1) bagaimana mempopulerkan perhatian kepada sekolah untuk anak gadis dalam bentuknya yang elementer, dan (2) kemungkinan memanfaatkan "kopschool" sebagai sekolah latihan untuk pendidikan guru wanita untuk sekolah desa dan sekolah kelas dua.

Mengenai persoalan pertama, Dewan Pendidikan berpendapat, bahwa melalui penerangan yang terus-menerus akan berangsur-angsur tumbuh pengertian pada penduduk di daerah-daerah, dimana perhatian itu belum ada. Di mana terdapat keberatan terhadap koedukasi di kalangan penduduk, jika perlu didirikan sekolah desa khusus untuk anak perempuan, seperti telah dilaksanakan di beberapa tempat dan sebagai keistimewaan diadakan sekolah kelas dua untuk anak gadis.

Mengenai persoalan kedua Dewan Pendidikan tidak dapat merumuskan usul-usul, sehingga persoalannya masih menjadi pemikiran lebih lanjut. Tetapi Dewan Hindia Belanda dalam nasehatnya mengarahkan perhatian kepada akibat, yang tidak diinginkan dapat timbul di kemudian hari dari pengajaran bahasa Belanda secara luas di "kopschool", sehingga pendidikan bahasa Belanda diterima oleh sejumlah besar anak wanita dari keluarga-keluarga, sedangkan anak laki-laki dalam

keluarga-keluarga tersebut tidak dapat diterima sebagai murid di HIS. Gubernur Jenderal sepaham dengan Dewan Hindia Belanda, bahwa gejala itu akan menimbulkan kepincangan (anomali) berupa keadaan, yang bertentangan dengan anggapan tradisional dalam masyarakat Indonesia mengenai kebutuhan pendidikan untuk para muda wanita dan pria. Maka oleh Gubernur Jenderal dimintakan perhatian istimewa untuk memikirkan cara-cara mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan dalam perluasan sekolah untuk anak wanita. Ditambahkannya keterangan mengenai pembaharuan sekolah rendah pada umumnya dan dalam hubungan ini mengenai perbaikan yang diperlukan dalam pendidikan guru laki-laki. Perspektif keuangan tidak membuka kemungkinan realisasi rencana di bidang itu. Mengenai penetrasi unsur-unsur keagamaan ke dalam sekolah desa dibenarkannya pendapat J. Hardeman, bahwa pembentukan suatu panitia untuk meneliti masalah itu belum diperlukan.

KEPUSTAKAAN RAKYAT (VOLKSLECTUUR)

88. Dari Menteri Jajahan (Welter) kepada Sang Ratu, 26 Pebruari 1926

Dengan surat kepada Ratu Belanda tanggal 26 Pebruari 1926 Menteri Daerah Jajahan (Welter) memberikan laporan mengenai pekerjaan "Panitia untuk kepustakaan rakyat", dengan tujuan menyebarkan majalah dan buku di kalangan penduduk Bumiputera. Usaha itu harus dilaksanakan dengan mendirikan sendiri perusahaan penerbitan, percetakan, perpustakaan dan penjualan buku untuk menyediakan dan menyebarkan bacaan yang sangat murah tetapi menyenangkan, dalam bahasa Belanda, Melayu, Jawa, Sunda dan Madura bagi penduduk Bumiputera. Panitia Bacaan atau Komisi Lektur itu terkenal dengan nama Balai Pustaka. Usaha ini oleh Menteri Welter dianggap sebagai salah satu tindakan yang kuat dalam pengembangan pendidikan untuk rakyat Bumiputera. Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Balai Pustaka itu, kecuali terdiri dari beberapa majalah, juga dari beberapa ratus

buku, yang diterbitkan sendiri dan ditambah dengan buku-buku terbitan swasta, untuk dijual dan dipinjamkan kepada pembaca umum.

Untuk memberikan kesan kepada Ratu mengenai arti dan luas lingkup pekerjaan Balai Pustaka, disusun oleh Kemmeterian Daerah Jajahan suatu nota yang dilengkapi dengan daftar pengeluaran Balai Pustaka. Nota mengenai pekerjaan Balai Pustaka di Indonesia itu isinya antara lain sebagai berikut.

Ada kalanya di suatu desa yang terletak jauh dari keramaian kota, terlihat sebuah mobil Balai Pustaka yang kira-kira dalam 20 tahun telah berkembang menjadi badan penerbit dan penjual buku yang besar. Dalam toko buku *keliling* dipajangkan berbagai macam buku besar dan kecil dari yang berjudul "Kucing berspatu seti-wel" ("De gelaarsde kat") sampai "Buku penuntun mengenai tanaman budidaya ananas", dari buku-buku nyanyian untuk anak-anak sampai karya-karya tulis ilmiah populer dan tulisan-tulisan untuk memberantas pemakaian madat (candu) dan alkohol.

Tujuan Balai Pustaka ialah menyebarkan bacaan yang baik untuk rakyat dan secara tidak langsung membantu pemberantasan buta huruf. Sejak 1908 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Heutz dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pemberantasan buta huruf itu dengan mendirikan sekolah desa yang sederhana (yang setelah kira-kira 20 tahun mencapai jumlah lebih dari 11.000 di seluruh Hindia Belanda) dan sejak itu disadari pula oleh Pemerintah, bahwa masalahnya bukan hanya penduduk harus dapat membaca dan menulis, tetapi juga mengenai apa yang harus dibaca oleh penduduk. Bacaan murah sering kali merupakan bacaan yang paling berbahaya dan bacaan yang paling digemari tidak selalu edukatif. Dan akan sulit untuk mendesak bacaan hiburan yang murah, yang secara teratur telah mendapat pasaran di kalangan penduduk, dengan bacaan yang lebih serius dan lebih bermanfaat. Karena itu bacaan hiburan semacam itu harus didahului kehadirannya dan dikalahkan. Tetapi usaha Balai Pustaka tidak hanya terbatas pada persaingan seperti itu saja. Buku-buku yang diedarkan dan disebar-kan harus juga diusahakan dengan mempertimbangkan keinginan mendapat

hiburan, membaca cerita-cerita jenaka yang memikat dan mengharukan, asal saja hiburan dan keharuan yang sehat serta sebaiknya dalam bentuk dan isinya menyajikan pengetahuan yang berguna dan mendidik. Penyelenggaraan dan pengembangan usaha mencerdaskan rakyat secara demikian dapat dibanggakan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, yaitu sebagai kebijaksanaan politik yang arif dan pernyataan kesadaran akan tugas di bidang pendidikan. "Balai Pustaka di Batavia" merupakan kebanggaan Pemerintah Hindia Belanda, karena katanya tidak ada duanya pada pemerintah kolonial yang lain pun.

Usaha Balai Pustaka menyebarkan bacaan di kalangan penduduk melalui dua macam cara, yaitu dengan penjualan dan dengan peminjaman. Penjualan dilakukan secara langsung melalui pemesanan atau agen-agen penjual yang mendapat 25% dari harga jual. Ke pasar tahunan dikirimkan buku-buku Balai Pustaka sebagai reklame atau untuk dijual. Juga di setasiun-setasiun kereta-api diadakan kios penjualan buku Balai Pustaka. Peminjaman buku dilakukan oleh perpustakaan, yang oleh Balai Pustaka dititipkan di asrama polisi dan militer, rumah sakit, sekolah-sekolah kelas dua, dan untuk buku bahasa Belanda di HIS.*^{*)} Oleh perpustakaan rakyat itu kecuali buku penerbitan sendiri juga disediakan buku yang dibeli dari penerbit lain yang sesuai dengan tujuan Balai Pustaka.

Sejak tahun 1920 Balai Pustaka mempunyai percetakan sendiri. Selain menerima naskah untuk dibeli dan diterbitkan, juga diadakan penterjemahan ke dalam bahasa-bahasa daerah. Juga diterbitkan majalah-majalah:

1. Sejak 1918 diterbitkan Sri Pustaka sebagai kalawarta bulanan berilustrasi dalam bahasa Melayu dengan tujuan mempopulerkan pengetahuan di bidang teknik dan sosial, yang berasal dari Barat.
2. Sejak 1923 diterbitkan majalah Panji Pustaka, yang mula-mula sebagai kalawarta sepekan, kemudian terbit dua kali seminggu dalam bahasa Melayu dan berilustrasi mengenai peristiwa-peristiwa aktuil.

^{)} Di HIS diadakan sejak 1915. Dalam tahun 1917 diangkat pegawai tinggi sebagai Kepala Balai Pustaka (D.A. Rinkes).

3. Belakangan (tahun 1928) diterbitkan seminggu sekali majalah dalam bahasa Jawa, namanya Kejawen, yang bertujuan sama dengan Panji Pustaka.

Setiap tahunnya juga diterbitkan almanak untuk rakyat (Volks almanak) dalam berbagai bahasa daerah, yang seluruhnya mencapai jumlah cetakan kira-kira 50.000 buah. Untuk mempopulerkan terbitan ini oleh pimpinan Balai Pustaka ditunjukkan bakat dagang yang tinggi melalui periklanan. Untuk menarik perhatian lebih banyak pembeli dimuatkan di dalamnya teka-teki berhadiah, dengan hadiah pertama sebuah mobil sedan.

Bacaan-bacaan populer yang diterbitkan dan dijual, dimaksudkan sebagai persiapan untuk lektur yang lebih serius. Oleh Balai Pustaka dibina dengan saksama dan **teratur** statistik mengenai selera para pembaca. Buku-buku yang paling banyak pembacanya di kalangan kaum dewasa biasanya buku-buku yang di dunia Barat bagi orang dewasa dianggap kekanak-kanakan dan terlalu sentimentil. Dari perpustakaan buku anak-anak yang paling banyak dibaca ialah "Kucing Bersepatu Setiwel" dan "Si Kecil" (Klein Duimpje atau Tom Thumb), setelah itu cerita-cerita jenaka, seperti cerita tentang "Sang Kancil", dan dongeng-dongeng tentang binatang dll., dan untuk anak-anak Jawa juga cerita wayang. Saduran buku untuk anak laki-laki dari bahasa Belanda yang berjudul "Dik Trom", digemari oleh anak-anak Sunda, tetapi tidak menarik perhatian anak Madura.

Buku untuk anak-anak dengan cerita bermoral untuk membangkitkan kesayangan kepada binatang, makin banyak dibaca, misalnya tentang "burung glatik yang tertangkap". Cerita-cerita yang mengandung unsur pendidikan budi pekerti paling sedikit dibaca oleh para remaja sekolah, tetapi ada beberapa buku tentang itu yang disukai. Jadi masalahnya yang sangat penting ialah memilih dengan caksama bentuknya yang baik.

Di antara buku rekreatif untuk kaum dewasa, yang paling banyak dibaca termasuk yang juga sangat terkenal di negeri Belanda, misalnya "Pengembala Domba" (oleh Oltmans), "Sebatang Kara di Dunia"

(oleh Hecter Malot), "Tiga Orang Pengawal Raja" (oleh Alexander Dumas), "Anak Raja dan Anak Pengemis" (oleh Mark Twain), "Binatang Dalam Rimba" (oleh Kipling) dan "Pangeran Kecil" (oleh Burnett).

Buku hiburan untuk masyarakat Jawa dan Sunda, yang diantaranya terdapat lebih sedikit buku terjemahan, yang paling banyak dibaca ialah buku cerita wayang, sedangkan orang Madura lebih tertarik kepada cerita sejarah daerah sendiri, misalnya "Babad Sumenep". Dalam lektur untuk masyarakat Jawa, Sunda dan Madura juga terdapat terjemahan, misalnya "Sebatang Kara di Dunia", "Empat Anak di Rimba" (Harryst), "Robinson Crusoe" (Daniel Defoe), "Perjalanan Gulliver" (Jonathan Swift), dll.

Di antara karya ilmiah populair yang paling banyak dibaca ialah terjemahan karya Ny. Fruin-Mees "Geschiedenis Van Java" ke dalam bahasa Jawa dan Melayu (Sejarah Jawa), tetapi jumlah para pembacanya jauh lebih kurang dari pada pembaca cerita roman. Lebih kecil lagi jumlah pembaca penerbitan khusus mengenai pertanian, peternakan dan kerajinan, setelah itu dibaca buku-buku mengenai ilmu pengobatan, kedokteran dan ilmu kesehatan (higiene).

Yang juga menarik perhatian ialah bahwa buku-buku yang banyak dibaca di negeri Belanda juga digemari oleh sebagian pembaca Bumi-putera meskipun ceritanya disadur ke dalam gaya Timur, moralnya tidak berubah dan bahkan suasana yang sama sekali bersifat Barat dalam buku-buku seperti karangan Oltmans dan Hector Malot tersebut di atas tidak menghalangi untuk digemari oleh pembaca. Juga buku-buku yang mengisahkan pahlawan-pahlawan laut Belanda, seperti De Ruyter dan Tromp serta kisah tentang Heemskerck, yang terpaksa bermusim dingin di P. Nova Zembla, mempunyai ribuan pembaca.

Sebagai penutup laporan dalam nota itu dimaktubkan iklan, yang disebar oleh Balai Pustaka dalam gaya bisnis Amerika.

PENELITIAN TENTANG KEBUTUHAN MASYARAKAT AKAN
PENDIDIKAN DASAR DENGAN BAHASA PENGANTAR BE-
LANDA UNTUK ORANG BUMIPUTERA

89. Nasehat Dari Dewan Hindia Belanda tanggal 3 September 1926 nomor XIX

J. Hardeman sebagai Direktur Pendidikan dan Agama dalam alinea 1 s/d 20 dari surat 28 Mei 1926 nomor A.9/1/5 membahas rencana mengenai sekolah pendidikan umum untuk menghasilkan guru sekolah rendah Barat. Dewan Hindia-Belanda dalam nasehatnya tanggal 3 September 1926 nomor XXX sependapat dengan J. Hardeman, karena rencananya itu ditolak oleh Dewan Rakyat dalam sidang akhir tahunan, November, untuk mempertahankan sistim pendidikan guru yang mengadakan differensiasi (yaitu adanya pendidikan guru untuk sekolah rendah yang berbeda-beda - penyadur). Jika rencananya itu dilaksanakan, orang kuatir bahwa anak tamatan HIS akan sangat terbelakang atau ketinggalan dari tamatan sekolah rendah Eropa, karena kurang trampil menggunakan bahasa Belanda.

Masalah yang penting dalam surat J. Hardeman itu ialah penilaian terhadap harapan dan keinginan untuk mengganti guru-guru Eropa di HIS dan HCS dengan guru-guru Bumiputera dan Cina, yang telah mendapat pendidikan yang lebih baik. Dewan Hindia Belanda, setelah mengadakan pertukaran pikiran secara lisan dengan J. Hardeman, tidak dapat menyetujui dengan begitu saja harapan tersebut. Dewan mengakui kegunaan guru-guru Bumiputera dan Cina yang mendapat pendidikan lebih baik daripada sebelumnya, bagi pendidikan pada umumnya di sekolah-sekolah tersebut, tetapi menganggap tidak bertanggung jawab, jika bermaksud tidak memerlukan sama sekali guru Belanda dalam pengajaran bahasa Belanda, teristimewa dengan tujuan untuk penggunaan dalam praktek hidup sehari-hari. Pendapat ini masih harus dibuktikan dahulu kebenarannya dalam praktek. Lebih-lebih anggapan ini

kurang dapat dipertanggung jawabkan, karena menurut para penasehat ahli pada Departemen Pendidikan dan Agama, diantaranya dari Inspeksi HIS, diperlukan tiga orang guru Eropa di HIS. Gagasan J. Hardeman untuk mengadakan perubahan yang mendalam itu akan ditentang oleh Dewan Rakyat, karena terutama para anggota Bumiputera berkali-kali mendesak dengan keras untuk mempertahankan guru-guru Eropa di HIS, meskipun dari pihak mereka itu pada umumnya dinyatakan harapan penyerahan sebanyak-banyaknya jabatan dari orang-orang Eropa kepada orang Bumiputera.

Dalam pertukaran pikiran tersebut di atas dapat dicapai kesimpulan bahwa di HIS dan HCS dapat ditempatkan paling sedikit satu orang guru Eropa (tidak terhitung orang Bumiputera dengan ijazah guru Eropa), walaupun J. Hardeman tetap menaruh harapan besar kepada prestasi guru-guru Bumiputera dan Cina, hasil pendidikan guru yang diperbaharui. Mengenai penyediaan personalia yang mencukupi kebutuhan, persoalannya dihubungkan oleh J. Hardeman dengan perluasan HIS dan HCS yang sudah dilaksanakan dan akan masih terus dilaksanakan. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan guru Belanda diusahakan mendatangkan mereka dari negeri Belanda. Usaha ini sejak permulaan tahun 1926 dilakukan lebih keras dengan hasil yang lebih baik, tetapi menurut J. Hardeman untuk sementara. Dalam hubungan ini Dewan Hindia Belanda mempunyai kesan, bahwa J. Hardeman tidak mempunyai kepastian dalam menghadapi dilema apakah meneruskan atau mengurangi perluasan dengan personalia yang kualitatif kurang. Sebaiknya dipilih yang pertama.

Dewan Hindia Belanda dalam nasehatnya menarik kesimpulan, bahwa dalam praktek tidak akan mungkin dapat dilaksanakan perluasan pendidikan Barat di sekolah rendah untuk orang Indonesia dengan dapat memenuhi harapan penduduk Indonesia. Keadaan ini akan terus berlangsung demikian, terutama dengan makin meningkatnya jumlah orang yang menghendaki macam pendidikan demikian itu, baik pun dari lapisan atas maupun dari lapisan bawah. Kesulitan yang sukar diatasi ialah penyediaan guru-guru yang kualitatif memenuhi syarat. Dengan ini

tidak dimaksudkan oleh Dewan Hindia Belanda, bahwa perluasan HIS (dan HCS) harus dihentikan. Maka oleh Dewan dianggap perlu dan disarankan untuk mengadakan penelitian secara sengaja mengenai masalah perluasan HIS. Dengan bantuan Kantor Pusat Statistik dan Dinas Perpajakan, harus dapat dicoba menentukan jumlah yang mendekati kekuatan dalam lapisan-lapisan penduduk yang perlu diperhitungkan dan bagaimana hubungannya dengan kesempatan untuk memperoleh fasilitas pendidikan rendah Barat. Dengan bantuan data mengenai hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dengan lebih baik kemungkinan untuk menetapkan garis kebijaksanaan yang akan diikuti.

Peninjauan rencana pembaharuan sekolah pendidikan guru (kweek-school) disarankan untuk diteruskan dengan mengajukan usul rencana anggaran biaya kepada Dewan Rakyat.

Usul Dewan Hindia Belanda mengenai penelitian masalah HIS tersebut di atas mempunyai kelanjutan berupa pembentukan dan pengangkatan Komisi HIS berdasarkan surat keputusan Pemerintah tanggal 28 Nopember 1927. Laporan mengenai kegiatan panitia itu terdapat dalam publikasi yang diterbitkan dalam tahun 1930-1931 (Publicaties Hollandsch-Inlandsch Onderwijs-commissie):

- No. 1: Perluasan sekolah Barat/pendidikan Barat di Hindia Belanda sejak tahun 1900 (De uitbreiding van het Westersch onderwijs in Nederlandsch-Indie sedert 1900).
- No. 2: Pemasukan dan pengeluaran murid dan penampungan tamatan sekolah-sekolah Barat di Hindia Belanda (Het leerlingen-verloop en de bestemming der abiturienten bij de instellingen van Westersch onderwijs in Menderlandsch-Indie).
- No. 3: Pengeluaran Pemerintah untuk tujuan-tujuan pendidikan di Hindia Belanda (De overheidsuitgaven voor onderwijs doeleinden in Nederlandsch-India).
- No. 4: Biaya pendidikan Barat dalam perbandingan kemampuan penduduk (De kosten van het Westersch onderwijs in verhouding tot de draagkracht der bevolking).
- No. 5: Asal-usul (dari lingkungan) sosial dan geografis orang-orang Bumiputera yang mendapat pendidikan Barat (De sociale

en geographische herkomst van de Westersch opgeleide inlanders).

- No. 6 dan 6a: Kesempatan kerja di Hindia-Belanda untuk orang-orang yang (pandai) berbahasa Belanda (De werkgelegenheid in Nederlandsch-Indie voor Nederlandsch sprekenden).
- No. 7 dan 7a: Penyebaran geografis sekolah-sekolah di Hindia-Belanda dan tugas yang masih harus diselesaikan di bidang pendidikan (De geographische verspreiding van het onderwijs in Nederlandsch-Indie en de nog wachtende taak op onderwijsgebied).
- No. 8: Sekolah swasta dalam perbandingan dengan sekolah negeri (Het bijzonder onderwijs in vergelijking met het openbaar onderwijs).
- No. 9: Ikhtisar sejarah tentang kebijaksanaan pemerintah mengenai penyelenggaraan sekolah untuk penduduk Bumiputera (Historisch overzicht van het regeeringsbeleid ten aanzien van het onderwijs voor de Inlandsche bevolking).
- No.10: Data tambahan keluar masuknya murid (Nadere gegevens omtrent het leerlingenverloop).
- No.10a: Data tambahan mengenai keuntungan dan produksi (Nadere gegevens omtrent rendement en productie).
- No.10b: Perkiraan perkembangan sekolah dengan pendidikan Barat di masa yang akan datang di Hindia-Belanda (Becijferingen over de toekomstige ontwikkeling van het Westersch onderwijs in Nederlandsch-Indie).
- No. 11: Laporan penutup (Eindrapport).
- No. 12: Ringkasan isi Publikasi 1-106 (Resume van de inhoud der publicaties 1-106).

PENDIDIKAN UNTUK
PENDUDUK CINA - BAHASA MELAYU DAN CINA DI HCK
(HOLLANDSCH CHINEESCHE KWEESCHOOL)

90. Dari Direktur Pendidikan dan Agama (J. Hardeman) kepada Gubernur Jenderal (De Graeff), 20 September 1927

Dalam tahun 1927 diadakan pembaharuan sekolah pendidikan guru untuk sekolah dasar dengan bahasa Belanda melalui reorganisasi Kweek-school. Dari 12 Kweekschool negeri, 5 buah diubah menjadi HIK (Hollandsch-Inlandsche Kweekschool), yang lainnya ditiadakan. Dalam reorganisasi ini Kweekschool dan Hoogere Kweekschool dipersatukan dalam satu pendidikan guru dengan nama HIK. Selanjutnya HIK terdiri dari bagian bawah (onderbouw) yang sederajat dan sama dengan MULO, sedangkan bagian atas (bovenbouw) selama tiga tahun untuk pendidikan guru. Reorganisasi yang sama diadakan dalam HCK.

J. Hardeman sebagai Direktur Pendidikan dan Agama dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal De Graeff tanggal 23 September 1927 nomor Ax.5/1/10 Rahasia mengusulkan penyelesaian masalah pengajaran bahasa Cina-Mandarin di HCK, yang dibahasnya sebagai berikut:

Kepada Gubernur Jenderal dikemukakannya, bahwa dalam bagian penutup suratnya 3 Juni 1927 nomor A.5/1/8, yang dibahas dalam surat Sekretaris Pemerintah (Negara) tanggal 12 Juli 1927 nomor 1417/A.2, diberikan catatan, bahwa pengadaan pengajaran bahasa Cina-Mandarin merupakan persolan yang masih sedang dipikirkan penyelesaiannya.

Dalam sidang mutakhir Dewan Rakyat anggota Han Tiauw Tjeng menolak usul Dewan Pendidikan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai mata pelajaran di onderbouw HCK. Ia mendesak lagi supaya diberikan pengajaran bahasa Cina-Mandarin di HCK (Handelingen Volksraad 1927-1928, k.295-296, 687 dan 691). Ia menganggap pengajaran bahasa Melayu tidak berguna sama sekali, karena orang Cina telah cukup menguasai bahasa itu.

Menurut J. Hardeman, anggota Dewan Rakyat tersebut di atas dapat dianggap sebagai juru bicara kelompok orang Cina, yang melihat HCS (Hollandsch-Chineesche School) sebagai sekolah untuk mereka.

Prasangka yang ada di kalangan mereka ini terhadap bahasa Melayu harus dipertimbangkan, meskipun ia tidak sependirian dengan juru bicara mereka. Dikemukakannya bahwa sangat tidak bijaksana untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai mata-pelajaran wajib di HCK seperti diusulkan oleh Dewan Pendidikan. Untuk sementara bahasa Melayu dijadikan mata-pelajaran fakultatif dengan pengecualian kemungkinan mewajibkan pilihan antara bahasa Melayu dengan bahasa Cina Mandarin, apabila Gubernur Jenderal setuju untuk mengadakan lagi percobaan dengan pengajaran bahasa Cina Mandarin secara fakultatif di HCK, seperti yang dibahasnya di bawah ini.

Pada waktu diadakan pembicaraan mengenai rancangan anggaran biaya untuk tahun 1927 di Dewan Rakyat, J. Hardeman mengemukakan pandangannya, bahwa dari sudut pedagogik dan teknik pendidikan ada keberatan terhadap pengajaran bahasa Cina di HCS. Tetapi keberatan itu berkurang terhadap percobaan mengajarkannya di HCK, karena tamatan sekolah rendah akan lebih siap untuk belajar bahasa asing yang sukar. Sebagai contohnya ialah bahasa Yunani dan Latin di Gymnasium. Dengan mempertimbangkan gagasan untuk menyediakan dalam kurikulum HCS lebih banyak tempat bagi adat dan kebudayaan Cina maka pendidikan untuk guru HCS perlu diorientasikan ke arah itu. Jika ternyata untuk kepentingan itu kepada calon guru di HCK perlu diajarkan bahasa Cina-Mandarin, tidak ada keberatan prinsipial, asal saja ada kepastian, bahwa mutu pendidikan di HCK pada taraf terakhir tidak dibahayakan. Demikian argumentasi J. Hardeman (Handelingen Volksraad, sidang biasa pertama, 1926, h.683).

Dari sudut pedagogik J. Hardeman sependapat dengan sikap skeptik Dewan Pendidikan, bahwa pengajaran bahasa Cina-Mandarin di HCK hanya akan sedikit berguna atau tidak berguna apa-apa. Tetapi ia tidak berkeberatan terhadap pemasukan mata pelajaran bahasa itu secara fakultatif ke dalam kurikulum. Pendapatnya sama seperti dalam nasehat Dewan Hindia-Belanda 1 April 1927 nomor XXXV yang meminjam masalah dari sudut politik, yaitu di bidang pedagogik tidak ada apa-apanya; tidak ada kerugian dan keuntungan, sedangkan di bidang teknik pendidikan tidak menimbulkan kesulitan untuk dimasukkan ke dalam kurikulum baru, yang diproyeksikan untuk HCK.

Menurut J. Hardeman sukar bagi pemerintah untuk menolak keinginan yang dinyatakan dengan jelas oleh kelompok penduduk Cina. Menurut nasehat Dewan Hindia-Belanda karena sekali pemerintah sudah memberikan perhatiannya kepada kepentingan pendidikan untuk orang Cina sebagai kelompok penduduk tersendiri, maka tidak ada alasan untuk mengabaikan keinginan mereka supaya diajarkan bahasa Cina. Karena itu menurut J. Hardeman perlu diulangi percobaan mata pelajaran fakultatif bahasa Cina di HCK yang telah diadakan dalam tahun 1918 dan dihentikan dalam tahun 1922.

Percobaan yang mengalami kegagalan itu menurut surat keputusan pemerintah 7 Oktober 1918 nomor 212/III.A2 diadakan dengan tujuan, bahwa bahasa Cina tidak dijadikan baik sebagai mata pelajaran wajib maupun sebagai mata pelajaran fakultatif, tetapi pengajarannya diberikan dalam kursus di luar program pelajaran, sehingga tidak akan merugikan mata pelajaran yang lain. Murid yang ingin mengambil kursus itu harus menambah kesungguhan belajarnya. Dari laporan mengenai kelangsungan percobaan yang terdapat dalam arsip Departemen Pendidikan dan Agama, ternyata bahwa kegagalannya disebabkan oleh karena para pengajarnya yang direkomendasikan oleh Kantor Urusan Cina, tidak menguasai dengan cukup bahasa yang dipahami oleh para murid, yaitu bahasa Belanda atau Melayu.

Menurut J. Hardeman, percobaan ulangan harus dilaksanakan dalam keadaan yang lebih menguntungkan. Ada kemungkinan bahwa mata pelajaran bahasa Cina itu diberikan dalam waktu pelajaran biasa. Pilihan antara bahasa Melayu dengan bahasa Cina diwajibkan. Guru bahasa Cina harus dipilih dengan saksama. Ada gagasan dari Direktur HCK untuk mengikutkan sebagai pendengar dalam pengajaran bahasa Cina beberapa orang guru Eropa dari sekolahnya yang akan menggunakan kesempatan untuk mengenali bahasa kebudayaan tanah leluhur murid-murid mereka.

Dalam kurikulum untuk "bovenbouw" HCK direncanakan dua jam pelajaran setiap minggu untuk mata pelajaran kebudayaan Cina yang tersendiri (tidak disatukan dengan mata pelajaran bahasa Cina). Yang

dimaksudkan dengan mata pelajaran itu ialah sejarah dan ilmu bumi Cina, pengenalan beberapa karya penulis-penulis Cina dalam terjemahan bahasa Belanda dan Inggris, kesenian Cina, renaissance Cina dan adat-istiadat Cina di Indonesia. Sebagai kekurangan yang makin dirasakan oleh penduduk Cina yang berkepentingan ialah bahwa HCS sama sekali terpisah dari lingkungan sosial para muridnya dan program pelajarannya merupakan tiruan sempurna dari sekolah untuk anak Belanda. Lain dari pada itu guru-gurunya yang berbangsa Eropa sama sekali asing terhadap dunia pikiran dan perhatian murid-muridnya. Untuk menjembatani jurang ini dianggap perlu, bahwa guru-guru Eropa menambah pengetahuannya dengan pengetahuan mengenai kehidupan sosial budaya orang Cina yang menjadi sesama warga dalam masyarakat. Dalam hubungan dengan ini sangat penting artinya penyusunan suatu buku tuntunan atau buku sumber yang berorientasi kepada tujuan tersebut dan oleh Dewan Pendidikan dianggap perlu untuk pengajaran dalam "kebudayaan Cina". Salah seorang guru pada HCK, J. Moerman yang mempunyai minat khusus untuk mempelajari mata pelajaran ini secara lebih ilmiah, menyatakan kesediaannya untuk menulis buku tersebut dengan bantuan para pegawai ahli pada Dinas Urusan Cina. J.A.M. Bruineman, yang dihubungi oleh J. Hardeman dengan segera bersedia untuk secara pribadi membantu Moerman. Mengingat sangat pentingnya pekerjaan ini akan diberikan penghargaan selayaknya kepada para pelaksananya.

Mengenai mata pelajaran bahasa Melayu akhirnya dikemukakanannya sebagai berikut. Ia sama sekali sependapat dengan Dewan Pendidikan, bahwa bahasa Melayu perlu diajarkan di HCK, karena bahasa ini merupakan bahasa pergaulan dalam keluarga di rumah dan dalam masyarakat dari penduduk, yang anak-anaknya belajar di HCS. Meskipun guru-guru lulusan HCK tanpa diberi pengajaran bahasa itu telah cukup menguasainya sebagai bahasa pergaulan biasa, barangkali lebih baik dari kebanyakan anak Indo-Eropa, tetapi mempelajari bahasa ini secara metodik akan ada gunanya bagi pendidikan mereka untuk menjadi guru, juga dalam kesempatan yang tersedia untuk mengadakan studi perbandingan bahasa akan dapat diketahui kesukaran yang khas dengan lebih baik.

Dengan melihat kenyataan, bahwa perhatian di kalangan penduduk Cina kurang tertarik kepada pengajaran bahasa Melayu, maka bahasa Melayu untuk sementara dijadikan mata pelajaran pilihan di HCK. Masih ada satu alasan lagi untuk tidak dengan segera menjadikan bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib. Salah satu keberatan dari kalangan Cina terhadap pengajaran bahasa Melayu ialah, bahwa bahasa Melayu seperti diajarkan di sekolah kelas dua dan digunakan dalam buku-buku sekolah, hanya sedikit atau tidak berguna dalam praktek hidup sehari-hari. Ada jurang yang menganga besar antara bahasa Melayu Riau yang secara resmi harus diajarkan di sekolah, dengan bahasa Melayu sopan yang secara umum dipergunakan di Jawa, walaupun ada perbedaan-perbedaan lokal, dalam pergaulan sehari-hari, rapat dan pers. Supaya pengajaran bahasa Melayu lebih memikat perhatian dan lebih memenuhi tujuannya serta lebih dihargai, maka pengajaran bahasa Melayu Riau harus secepat mungkin diganti dengan pengajaran bahasa Melayu yang lebih dekat kepada penggunaannya sebagai bahasa percakapan dan tulisan sehari-hari. Direktur Institut Bahasa-Bahasa Bumiputera, J. Kats, dan penasehat buku-buku tuntunan, G. Boswinkel, menyatakan persetujuan sepenuhnya dan J. Kats menganggap sangat mungkin dapat dilaksanakan perencanaan bahasa Melayu sekolah, yang berakar dalam bahasa yang hidup dalam pergaulan. Tetapi tidak disembunyikan, bahwa harus diatasi berbagai kesulitan. Antara bahasa tulis dengan ucap masih belum ada cara yang mendekati kesamaan dalam bahasa Melayu Umum, seperti yang telah berkembang dengan bebas dalam masyarakat di luar daerah bahasa Melayu Riau dalam buku-buku sekolah. Kepada perkembangan itu para wartawan Cina banyak menyumbangkan sahamnya.

Kepada J. Kats dipercayakan dalam kerja sama dengan J.A.M. Bruinenman suatu tugas, yang oleh J. Hardeman dianggap sangat penting untuk merencanakan buku pelajaran bahasa Melayu, yang dapat menggantikan bahasa Melayu Riau di sekolah, terutama untuk diajarkan di sekolah di Jawa dan Madura. Untuk pekerjaan itu J. Kats dapat memilih sendiri pembantu-pembantu dari kalangan orang Bumiputera dan Cina.

Diharapkan oleh J. Hardeman bahwa berangsur-angsur akan diadakan perbaikan dalam pengajaran bahasa Melayu.*)

Akhirnya diusulkannya kepada Gubernur Jenderal untuk mengambil keputusan mengenai masalah penempatan pelajaran bahasa Melayu dan bahasa Cina-Mandarin dalam kurikulum HCK. Didesakannya juga dengan sangat pertimbangan untuk memutuskan agar menjadikan kedua bahasa itu sebagai mata pelajaran fakultatif yang untuk sementara diberikan di "onderbouw" selama tiga tahun, dengan ketentuan mewajibkan para murid memilih salah satu mata pelajaran yang harus diikuti. Dalam tahun ajaran 1928-1929 akan dimulai rencana baru itu.

91. Dari Sekretaris Pemerintah (Negara) I kepada Direktur Pendidikan dan Agama (J. Hardeman), 5 Januari 1928

Jawaban Gubernur Jenderal kepada J. Hardeman mengenai usul tersebut di atas diberikan oleh Sekretaris Pemerintah (Negara) I dengan surat tanggal 5 Januari 1928 nomor 3/A2 Rahasia. Diberitahukan, bahwa keputusan pemerintah yang dimuat dalam surat tanggal 12 Juli 1927 nomor 1417/A2, kurang diperhatikan.

Dalam keputusan itu telah dinyatakan secara prinsipil pendidikan pemerintah terhadap pengajaran bahasa Cina di HCS. Pemerintah sudah dari dulu menetapkan bahwa pengajaran bahasa Cina di HCS bukan tanggung jawab dan tugas pemerintah. Karena itu Gubernur Jenderal tidak melihat ada alasan yang cukup untuk mengajarkan bahasa Cina kepada calon guru untuk HCS. Gubernur Jenderal berkebebasan terhadap pengajaran bahasa Cina di HCK, karena ia berkeyakinan bahwa pengajaran bahasa Cina di HCK itu akan dijadikan batu loncatan oleh para pemuka Cina untuk menuntut kepada Pemerintah,

*) Buku pelajaran hasil perencanaan itu ialah J. Kats, Spraakkunst en Taaleigen van het Maleisch (Tata Bahasa dan Idiom bahasa Melayu), deel I, 3e stuk, Weltevreden, 1928. Dalam prakata ditegaskan bahwa dalam perubahan melalui cetakan ketiga ini lebih banyak diperhatikan perbedaan antara bahasa Melayu buku dengan bahasa Melayu Umum yang sopan.

supaya diadakan pengajaran bahasa Cina di HCS. Menurut keyakinan Gubernur Jenderal dengan mengadakan pengajaran bahasa Cina di HCK akan ditempuh jalan, yang dapat menuju kepada sinifikasi (pencinaan) pengajaran di HCS. Karena itu sebenarnya keinginan para pemimpin dalam masyarakat Cina bertentangan dengan pandangan pemerintah. Gubernur Jenderal sampai kepada keputusan untuk tidak membolehkan pengajaran bahasa Cina di HCK. *)

Tetapi Gubernur Jenderal menyetujui mata pelajaran "kebudayaan Cina", karena mempunyai kegunaan nyata yang praktis. Sangat dipujinya gagasan untuk menerbitkan buku sumber atau buku tuntunan. Ia juga tidak berkeberatan terhadap bahasa Melayu yang berakar dalam bahasa pergaulan yang beradab atau bahasa Melayu Umum yang sopan, tetapi untuk sementara ditetapkan fakultatif, karena dengan penolakan terhadap pengajaran bahasa Cina dan mewajibkan mempelajari bahasa Melayu akan mengundang agitasi terhadap perbedaan tersebut.

PENDIDIKAN TINGGI - FAKULTAS SASTRA

92. Direktur Pendidikan dan Agama (J. Hardeman) dalam surat tanggal 28 Oktober 1927 nomor X2/1/11 Rahasia kepada Gubernur Jenderal (De Graeff)

Membahas persiapan mengenai pendirian suatu fakultas sastra di Indonesia, seperti pernah dikemukakan dalam pembicaraan lisan. Ia menyarankan akan membangun fakultas sastra dan kebudayaan Indonesia (Indologisch-literarische fakulteit), yang diperlengkapi dengan baik. Dalam tubuh pendidikan tinggi di Hindia-Belanda dianggap perlu

*) Dewan Hindia Belanda dalam nasehatnya tanggal 23 Desember 1927 nomor II mengusulkan seperti itu. Tetapi wakil ketuanya, K.F. Creutzberg, dalam nasehat tersendiri menyarankan untuk mengikuti usul J. Hardeman dengan perubahan, bahwa baik pun bahasa Melayu maupun bahasa Cina-Mandarin ditetapkan sebagai mata pelajaran fakultatif.

adanya suatu fakultas yang mencakup ilmu kebudayaan dalam arti yang seluas-luasnya, agar supaya pendidikan tinggi di Hindia Belanda dapat memenuhi fungsinya di bidang sosial-budaya sebagaimana mestinya.

Gagasan mengenai pendirian fakultas sastra di Indonesia telah didukung oleh sarjana-sarjana terkemuka dari kalangan ilmiah Belanda dalam Kongres Pendidikan Kolonial ketiga, yang membahas masalah pendidikan tinggi di Hindia Belanda. Dalam Kongres yang diadakan di Den Haag dalam bulan April 1924, dikemukakan argumentasi mengenai keharusan adanya fakultas sastra sebagai inti ilmu kebudayaan dalam universitas di Hindia Belanda pada masa yang akan datang. Dalam Kongres ini dibahas banyak prasaran. Mengenai keharusan mendirikan fakultas sastra dibahas empat prasaran, yaitu dari Dr. Adriani, Prof. Dr. N.J. Krom, Pater F.G.J.M. van Lith dan Dr. R. Ng. Purbaraka. Beberapa tahun sebelumnya Dr. N.J. Krom dalam Kongres 1919 mengemukakan prasaran mengenai "mata pelajaran sastra pada universitas di Hindia-Belanda". Oleh kongres 1919 itu dibentuk panitia untuk menyusun saran yang diumumkan dalam tahun 1922, mengenai penyelenggaraan universitas di Hindia Belanda. Oleh J. Hardeman diminta perhatian kepada saran tersebut dan penerbitan prasaran-prasaran serta perembukan dalam kongres ketiga. Acara dalam Kongres ketiga itu terdiri dari:

- I. Pendidikan tinggi di Hindia-Belanda pada umumnya.
- II. Organisasi perguruan tinggi Hukum untuk dihubungkan dengan pendidikan pegawai urusan pemerintahan dan administrasi di Hindia-Belanda.
- III. Organisasi sekolah tinggi Kedokteran.
- IV. Pengembangan perkuliahan ilmu-ilmu sastra yang segera diperlukan pada sekolah tinggi Hukum, menjadi fakultas sastra yang mandiri.

Berbagai faktor yang mendukung keharusan mendirikan fakultas sastra dengan segera di Hindia Belanda, dikemukakan oleh J. Hardeman dalam argumentasi untuk membela usulnya. Dimintakannya perhatian kepada tujuan ganda atau rangkap perguruan tinggi, seperti dinyatakan

dalam artikel 1 Ordonansi Perguruan Tinggi. Dari dua aspek tujuan tersebut pada fakultas sastra aspek pendidikan dengan tujuan untuk dapat mandiri bekerja di bidang ilmiah lebih menonjol dari pada tujuan menghasilkan tenaga ahli untuk jabatan-jabatan dalam pemerintahan dan masyarakat. Ia menganut pandangan Profesor Dr.J.Huizinga yang melihat universitas sebagai "pusat dari seluruh kehidupan ilmiah tinggi, yang mampu menampung dan melayani segala aspirasi untuk memajukan kebudayaan".*) Setiap orang yang berpendidikan demikian, menurut J. Hardeman, akan menyambut dengan baik pendirian fakultas sastra yang akan memperkaya lingkungan ilmiah perguruan tinggi. Karena pengaruh luhur akan terpancar dari suatu pusat ilmiah untuk mempelajari dan mengadakan penelitian dengan metode-metode ilmiah Barat yang teruji mengenai humaniora Nusantara. Bahasa dan sastra Indonesia, sejarah, ilmu bumi dan bangsa-bangsa (land en volkenkunde), dan ilmu purbakala, sedapat mungkin juga filsafat dan agama. Pengaruh tersebut tidak boleh diremehkan terhadap pendidikan yang harmonis dari pemimpin dan pemuka intelektual dalam kelompok-kelompok penduduk di Hindia Belanda yang telah didorong untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan Barat. Demikianlah menurut J. Hardeman.

Ia tidak hanya menonjolkan faktor-faktor idiilnya saja, tetapi dalam argumentasinya itu dikemukakannya pertimbangan mengenai faktor-faktor yang mempunyai kegunaan sosial yang praktis dan mendukung pendirian fakultas sastra di Hindia-Belanda. Diakuinya, bahwa kegunaan sosial yang praktis dari fakultas sastra tidak begitu jelas dapat dinyatakan seperti pada sekolah-sekolah tinggi, yang sudah ada.

Pada waktu itu sudah ada tiga buah perguruan tinggi di Hindia-Belanda. Yang pertama didirikan ialah Sekolah Tinggi Teknik di Bandung. Usul pendiriannya diprakarsai oleh swasta di bidang perda-

*) J. Huizinga, "De Universiteit van Nederlandsch-Indie", De Gids, Oktober 1923, dan Verzamelde Werken, VIII, h.464

gangan dan industri, yang dalam tahun 1919 mendirikan "Koninklijk Instituut Voor Hooger Technisch Onderwijs in Nederlandsch-Indie" (Institut Kerajaan Untuk Pendidikan Tinggi Teknik di Hindia-Belanda). Oleh badan swasta ini didirikan di Bandung Sekolah Tinggi Teknik, yang dibuka pada tanggal 3 Juli 1920. Dalam pembukaannya berpidato a.l. Direktur Pendidikan dan Agama, Mr. K.F. Creutzberg, dan Rector-Magnificus yang pertama, Prof. Ir. J. Kloppe. Sejak 18 Oktober 1924 perguruan tinggi ini diserahkan kepada pemerintah (Lembaran Negara 1924 nomor 476. Reglemen untuk Sekolah Tinggi Teknik dalam Lembaran Negara 1925 nomor 271 dan terakhir dirubah dalam Lembaran Negara 1937 nomor 375 dan nomor 456).

Pada 28 Oktober 1924 dibuka Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Sebelumnya pemerintah berkali-kali berjanji dalam Dewan Rakyat untuk dengan segera, jika keadaan memungkinkan, membuka perguruan tinggi Hukum. Dalam pembicaraan mengenai rencana anggaran biaya Hindia-Belanda untuk tahun 1923 pemerintah memberitahukan akan mendirikan sekolah tinggi hukum. Untuk pendiriannya diadakan perubahan ordonansi perguruan tinggi dalam Lembaran Negara 1924 nomor 456 dan dibuat Reglemen untuk Sekolah Tinggi Hukum dalam Lembaran Negara 1924 nomor 457. Di samping itu sekolah untuk mendidik yuris (ahli hukum) Bumiputera yang didirikan dalam tahun 1909 dan sejak tahun 1922 dinamakan "Rechts-school" (Sekolah Hukum), yang bertujuan mendidik fungsionaris dan panitera (grifir) pada pengadilan negeri diadakan terus sampai tahun 1928.

Pada tanggal 16 Agustus 1927 dibuka Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta, dan untuk pendiriannya ordonansi perguruan tinggi dirubah dalam Lembaran Negara 1927 nomor 395 dan dibuatkan reglemen untuk Sekolah Tinggi Kedokteran dalam Lembaran Negara 1927 nomor 396.

Mengenai kegunaan sosial yang praktis dari fakultas sastra di Hindia Belanda, J. Hardeman berpendapat bahwa Hindia Belanda membutuhkan cukup banyak kaum orientalis, yang terdidik secara ilmiah, untuk berbagai jabatan dan bidang pekerjaan. Diingatkannya pertama-tama kebutuhan untuk mengisi jabatan keguruan sebagai akibat

pendirian AMS-AI dan reorganisasi OSVIA serta "Kweekschool". Pengajaran bahasa-bahasa daerah di sekolah menengah dan kejuruan (termasuk ke dalamnya sekolah normal untuk pendidikan guru bantu) memerlukan perbaikan yang mendesak. Guru-guru Bumiputera yang dididik untuk tugas ini selama setahun di Institut Kats, *) sebenarnya kurang memenuhi syarat. Alumni fakultas sastra diperlukan dalam jabatan-jabatan pimpinan pendidikan di departemen, di inspeksi dan Dewan Pendidikan, juga di luar bidang pendidikan, tenaga mereka diperlukan seperti pada "Kantor Urusan Bumiputera", Balai Pustaka, dan Dinas Purbakala. Juga terbuka kesempatan bekerja untuk para alumni fakultas sastra dalam pekerjaan bebas seperti jurnalistik, museum dan perpustakaan. Akhirnya disebutkan kelompok orang-orang yang ingin mengabdikan dirinya kepada studi sastra-sastra Timur dan terdorong bukan untuk mendapat penghasilan, tetapi semata-mata untuk memajukan ilmu pengetahuan. Orang-orang seperti ini menurut J. Hardeman jumlahnya cukup besar, mengingat dalam kalangan orang Bumiputera perhatian kepada bahasa dan kebudayaan sendiri makin meningkat. Mereka ini dianggap sebagai pemimpin intelektual dan pendukung kebudayaan bangsa Indonesia. Menurut J. Hardeman, di antara mereka itu yang telah menyelesaikan studinya melalui metode ilmiah yang ketat, di masa yang akan datang akan termasuk kaum intelektual Bumiputera yang tercabut dari akar kebudayaan sendiri dan menolak cara kerja yang tenang untuk membangun. Dari mereka ini dapat diharapkan ada pengaruh moderat kepada pergerakan nasional. Mereka ini akan cenderung untuk mau bekerja sama dengan pemerintah.

Dari alumni fakultas sastra itu ada yang akan mendapatkan lapangan kerja yang berguna pada perguruan nasional Taman Siswa, yang mutu pendidikannya dapat ditingkatkan oleh mereka. Menurut J. Hardeman, Taman Siswa telah banyak berjasa bagi orang Bumiputera di bidang pendidikan yang diselenggarakan secara jujur dengan kekuat-

*) Didirikan dalam tahun 1920 dengan tujuan mempelajari bahasa-bahasa Bumiputera, ilmu tentang bumi dan bangsa-bangsa di Hindia-Belanda. Ke dalamnya termasuk kursus untuk mendidik orang Bumiputera menjadi guru bahasa.

an sendiri dan atas dasar kebudayaan bangsa sendiri. Juga dimintakannya perhatian pemerintah kepada kegiatan Drs. Sosrokartono, sarjana sastra Timur dan adik R.A. Kartini. Dengan dibantu oleh Ir. Soekarno dan Mr. Soenario, dipimpinnya sekolah menengah nasional di Bandung.

Dalam Dewan Rakyat sudah berkali-kali dinyatakan keinginan akan fakultas sastra Timur dan dijanjikan oleh pemerintah, bahwa harus menunggu sampai ada cukup calon mahasiswanya. Pemerintah sebenarnya sudah setuju untuk mengadakan fakultas tersebut. Saatnya sudah tiba untuk memperbolehkan pendiriannya dengan mengingat, bahwa di Sekolah Tinggi Hukum sudah diberikan kuliah dalam beberapa mata pelajaran dari fakultas sastra Timur, yaitu oleh Dr. Husein Djajadiningrat (dalam hukum Islam, pranata-pranata Islam, bahasa Melayu dan Sunda). Dr. B.J.O.Schrieke (dalam sosiologi, antropologi budaya dan sejarah Indonesia), dan J. Kats (dalam bahasa Jawa). Selain itu AMS-AI di Surakarta, yang sejak Juli 1926 mempersiapkan untuk perguruan tinggi dengan pengajaran sastra Timur, murid-muridnya dalam pertengahan tahun 1929 akan menamatkan pelajarannya. Menurut J. Hardeman pendirian fakultas sastra yang dimaksudkan tidak dapat ditangguhkan lebih lama lagi dari pada tahun 1930. Diusulkannya untuk mengangkat suatu panitia dengan tugas terutama untuk menetapkan keharusan pendirian fakultas tersebut dalam tahun 1930. Disarankannya panitia tersebut terbentuk sebagai berikut:

- Ketua : Prof.Dr. Husein Djajadiningrat
- Angota-anggota: Dr. F.D.K.Bosch, Kepala Dinas Purbakala
 Ch.O. van der Plas, Asisten-Residen diperbantukan kepada Advisur Urusan Bumiputera,
 Dr. Fajiman Wediadipura, dokter istana Susuhunan Solo (sbg. pejuang perintis tertua dalam pergerakan kebudayaan nasional).
 Prof.Dr. B.J.O.Schrieke,
 Dr. W.F. Stutterheim, Direktur AMS-AI di Solo
 Mr. L.J.A. Trip, Pejabat Ketua Dewan Penyantun sekolah-sekolah tinggi di Jakarta.

Untuk mewakili Departemen Pendidikan dan Agama ditambahkan Mr. J.A. Jonkman, sebagai Sekretaris-anggota. Selanjutnya kepada panitia diberikan wewenang menambah beberapa anggota, yang ahli di beberapa bidang tertentu.

93. Gubernur Jenderal (De Graeff) kepada Menteri Urusan Daerah Jajahan (Koningsberger), 13 Agustus 1928

Gubernur Jenderal De Graeff tidak dapat memutuskan terhadap usul Direktur Pendidikan dan Agama mengenai pendirian fakultas Sastra Timur di Betawi selambat-lambatnya pada tahun 1930, karena itu dimintakan kepastian dari Menteri Daerah Jajahan (Koningsberger). Diberitahukannya kepada Menteri dengan surat tanggal 13 Agustus 1928 nomor 14/1 Rahasia (Vb. 30 Januari 1929 nomor 24) pokok-pokok pikiran dalam surat J. Hardeman 28 Oktober 1927 nomor Ax2/1/11 dan tanggapannya serta saran Dewan Hindia-Belanda terhadap usul tersebut.

Dalam Dewan Hindia-Belanda ternyata usul itu tidak mendapat persetujuan suara mayoritas. Pada umumnya para anggota Dewan mengakui nilai-nilai idil dan kulturil dari suatu lembaga seperti fakultas sastra, tetapi mayoritas dari mereka meragukan, apakah para alumninya dalam masyarakat akan mendapatkan lapangan kerja yang sesuai dengan pendidikannya. Sebagian besar dari para alumninya akan berusaha mencari pekerjaan dalam jabatan negeri dan jika tidak akan terpaksa mencari lapangan kerja di luar dinas pemerintah dengan kemungkinan harus terpaksa menerima penghasilan yang lebih rendah. Keadaan dengan sejumlah besar orang berpendidikan tinggi tanpa gaji memadai dianggap mengkhawatirkan, bahwa mereka itu akan mengadakan tuntutan kepada pemerintah, supaya memproduktifkan pendidikan dari lembaga yang diadakannya dengan menampung sebanyak-banyaknya orang yang mendapat pendidikan dari lembaga tersebut dalam dinas negeri, meskipun sebenarnya pada pemerintah tidak ada kebutuhan nyata untuk menampung mereka semua. Dalam situasi keuangan pemerintah yang tidak menggembirakan itu tidak dapat diadakan penyelesaian masalah seperti itu. Maka mayoritas anggota Dewan meng-

anggap tidak benar, bahwa pendirian fakultas Sastra tidak dapat ditangguhkan lebih lama dari pada tahun 1930. Mereka juga tidak berpendapat bahwa pengaruh dari fakultas sastra itu akan melunakkan temperamen para pemimpin pergerakan nasional.

Saran mayoritas dalam Dewan Hindia-Belanda menolak usul Direktur Pendidikan dan Agama tetapi wakil ketuanya, K.F. Creutzberg, menyetujui sebagian besar argumentasi J. Hardeman dan mendukung usulnya untuk menugaskan kepada suatu panitia menangani pendirian fakultas itu dan mencari pemecahan persoalan. Jika benar fakultas itu menimbulkan "over produksi", Gubernur pederal juga tidak menutup mata terhadap kemungkinan "overproduksi" sarjana sastra yang dalam masyarakat tidak akan menemukan kepastian mendapat penghasilan yang sepadan dengan pendidikan mereka. Tetapi ia tidak dapat menolak pandangan J. Hardeman mengenai pengaruh yang menguntungkan terhadap pergerakan nasional. Pendalaman studi sejarah peradaban bangsa-bangsa akan membawakan pengertian untuk lebih menghargai pimpinan Barat dan menghindarkan penilaian yang terlalu berlebihan terhadap kebudayaan sendiri. Hal ini secara psikologis akan berpengaruh baik kepada para calon pemimpin pergerakan nasional.

Menurut Gubernur Jenderal, perlu diadakan reorientasi dalam sistim pendidikan di Hindia-Belanda. Dalam kalangan luas masyarakat Bumiputera ada penghargaan yang berlebih-lebihan kepada pendidikan Barat, sehingga mau mengorbankan kepentingan bahasa daerah untuk pengetahuan bahasa Belanda. Sekolah Rendah Eropa dinilai lebih tinggi daripada HIS, sedangkan HIS dihargai lebih daripada sekolah peralihan. Tetapi arus balik sedang mulai kelihatan seperti di India. Sudah mulai kedengaran suara yang mendesak untuk menyesuaikan HIS kepada kebudayaan bangsa sendiri. Dari pihak nasionalis yang ekstrim ada usaha untuk mengkesampingkan bahasa Belanda dan mengangkat bahasa Melayu menjadi "bahasa Indonesia" sebagai media universal dalam komunikasi intelektual. Yang perlu diusahakan ialah men-sintesa-kan unsur-unsur baik dari Barat dan Timur menjadi kesatuan yang utuh dan harmonis. Di sinilah menurut Gubernur Jenderal terletak tugas

pemimpin-pemimpin intelektual yang akan dihasilkan oleh fakultas sastra dan kebudayaan Indonesia. Diingatkannya juga pendapat Ch.O. van der Plas, pegawai tinggi diperbantukan kepada Urusan Bumiputera yang dalam laporan mengenai netralisasi dan pemberantasan propaganda revolusioner di kalangan penduduk menyarankan, supaya kepada para pemuda diberikan kesempatan mempelajari ilmu Sastra Timur dan kebudayaan sendiri dan sebagai satu-satunya jalan paling memuaskan ialah membuka di Hindia-Belanda sendiri kesempatan untuk itu.

Gubernur Jenderal melihat seperti J. Hardeman, pada fakultas sastra titik berat dalam arti yang sangat penting sebagai pusat penelitian ilmiah di bidang bahasa dan sejarah kebudayaan. Untuk penelitian di bidang itu pusatnya masih ada di Leiden, berbeda misalnya dengan di Indo-Cina Perancis (Vietnam) yang mempunyai "Ecole Française d'Extreme-Orient". Dari sudut yang praktis ditunjukkannya keuntungan, bahwa penelitian yang dilaksanakan di Hindia-Belanda sendiri dalam daerah bahasa dan kebudayaan dengan pembatasan yang nyata serta di dalamnya selalu dapat berhubungan dengan materi hidup yang diselidiki, akan lebih menguntungkan dari pada penelitian yang diadakan di pusat yang sangat jauh (yaitu terletak di negeri Belanda). Hindia Belanda di bidang bahasa baru diselidiki untuk sebagian sangat kecil secara intensif dan sistimatis. Jadi untuk fakultas sastra banyak pekerjaan yang harus digarap.

Gubernur Jenderal berkesimpulan, bahwa fakultas sastra sangat penting untuk Hindia Belanda dan berkeyakinan bahwa pada waktunya harus didirikan. Ia menganggap bijaksana supaya pemerintah di negeri Belanda menangani masalahnya dan membuat keputusan. Dimintakannya pendapat Menteri mengenai pembentukan suatu panitia dengan tugas seperti yang disarankan oleh Mr. K.F.Creutzberg.

Jawaban diberikan oleh Menteri Koningsberger dengan telegram 30 Januari 1930, bahwa pembentukan panitia disetujui dan sangat diharapkan susunan panitia menjamin peninjauan masalah dari segala

segi dan juga dari sudut praktisnya., Ia berpendapat, bahwa tidak bijaksana untuk bekerja dengan terlalu tergesa-gesa dan secara apriori diarahkan kepada pembukaan fakultas dalam tahun 1930.

Pada pembukaan sidang Dewan Rakyat 1929-1930 Gubernur Jenderal menyatakan, bahwa pemerintah telah menyadari keharusan perluasan perguruan tinggi dengan fakultas sastra yang tidak hanya akan mendidik ahli sastra, tetapi juga akan merupakan pusat penelitian di bidang bahasa dan ilmu bangsa-bangsa di Nusantara. Karena itu pemerintah telah menugaskan untuk menyusun perencanaan mengenai organisasi dan penyelenggaraan fakultas tersebut. (Handelingen Volksraad 1929-1930, k.5). Nota Departemen Pendidikan dan Agama mengenai pendirian dan organisasi fakultas sastra di Hindia Belanda dipublikasikan dengan maksud memancing pertukaran pikiran secara umum. (Djawa, 1930). Karena gagasan mengenai pendirian fakultas sastra telah diuraikan dalam nota itu, Gubernur Jenderal De graeff berpendapat sesuai dengan pandangan B.J.O. Schrieke dan saran Dewan Hindia-Belanda, bahwa tidak perlu lagi membentuk panitia. Dalam telegramnya 6 Maret 1930 nomor 66 (Vb. 27 Maret 1930 nomor 24) dimintakannya pendapat apakah disetujui cara kerja demikian tanpa melalui pembentukan panitia, karena kurang berguna dan membuang-buang waktu, sedangkan menurut perhitungan diharapkan dengan budget untuk tahun 1931 dapat didirikan fakultas itu. Lain daripada itu Gubernur Jenderal De Graeff memberitahukan bahwa mosi Sandkuyl, yang mendesak pendirian fakultas itu harus terjadi dalam tahun 1931, diterima dengan suara 35 lawan 7.

Menteri Daerah Jajahan De Graeff memberi jawaban dengan telegram tanggal 27 Maret 1930 nomor 68, bahwa dianggap belum ada urgensinya untuk segera mendirikan fakultas itu dan belum cukup diadakan sorotan terhadap segi sosialnya. Menteri meragukan apakah dalam keadaan keuangan yang diduga akan menjadi buruk, pengeluaran baru untuk tujuan itu dapat dipertanggung jawabkan. Ia hanya akan memberikan persetujuannya jika benar-benar dapat dipastikan, bahwa pembiayaannya tidak akan merugikan kepentingan lain, yang

dilihat semata-mata dari sudut kebijaksanaan praktis pemerintah, dianggap lebih perlu.

Dalam anggaran biaya Hindia-Belanda untuk tahun 1931 disediakan f.55.000.-- yang direncanakan sebagai biaya selama lima bulan terakhir dalam tahun itu untuk fakultas yang akan didirikan. Tetapi keadaan keuangan negara menyebabkan pembukaan fakultas pada pertengahan tahun 1931 dibatalkan.

Dalam tahun 1938 masalah pendirian fakultas sastra menjadi hangat lagi seperti ternyata dari pertukaran nota antara Menteri Daerah Jajahan Welter dengan Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachhouwer dan antara Gubernur Jenderal dengan Direktur Pendidikan dan Agama, P.J.A. Idenburg.

NASIONALISASI PENDIDIKAN BUMIPUTERA BELANDA (HOLLANDS - INLANDS ONDERWIJS)

94. Pj. Penasehat Urusan Bumiputera (E. Gobee) menyampaikan nota dengan surat 9 Desember 1927 nomor 1/477 Sangat Rahasia, kepada Gubernur Jenderal (De Graeff)

Dengan perantaraan Direktur Pendidikan dan Agama, nota itu disusun oleh Ch.O. van der Plas, asisten-residen diperbantukan kepada Penasehat Urusan Bumiputera, mengenai usul pembentukan panitia kedua untuk pendidikan pada sekolah Bumiputera berbahasa Belanda. Sudah ada Komisi pendidikan Bumiputera Belanda yang dibentuk berdasarkan surat keputusan pemerintah tanggal 28 Nopember 1927 (Vi.89 di bawah judul VII Penyelidikan tentang kebutuhan sosial akan pendidikan dasar dengan bahasa pengantar bahasa Belanda untuk orang Bumiputera, k.409-411). Van der Plas juga duduk di dalamnya.

Dalam hubungan dengan pembentukan Komisi Pendidikan Bumiputera Belanda (yang pertama) itu, Van der Plas diberi perintah dengan surat Sekretaris Pemerintah (Negara) nomor 382 untuk tugas mengadakan penelitian bagaimana menetralsir dan memberantas propaganda revolusioner di kalangan penduduk Bumiputera, khususnya di Jawa dan

Madura. Penyelidikan diadakan atas perintah Penasehat Urusan Bumiputera untuk Gubernur Jenderal.

Teks nota dirahasiakan sama sekali, juga bagi anggota-anggota Komisi Pendidikan Bumiputera-Belanda. Isinya informasi berasal dari percakapan percaya-mempercayai dengan penduduk dan pembahasannya masalah dari segi sosial-politik dan sosial-budaya. Dari berbagai pihak yang dihubungi, diterima keluhan mengenai denasionalisasi pendidikan pada HIS.

Isi nota dimaksudkan memberikan argumentasi pembentukan Komisi Pendidikan Bumiputera Belanda kedua. Beberapa pokok yang menarik perhatian Van der Plas dalam penelitian ialah sebagai berikut:

Harus dibedakan dengan tajam pemimpin-pemimpin spirituil utama dari massa rakyat. Mereka yang disebut belakangan ini mudah dipengaruhi; makin tidak berpengalaman makin mudah. Banyak pemimpin yang tergolong ekstremis, orang Bumiputera yang baik di Jawa maupun di negeri Belanda, kata Van der Plas, adalah orang-orang yang tidak lagi berakar dengan kuat dalam masyarakat dan kebudayaannya.

Dr. Sukiman ialah seorang Jawa yang tidak lagi dapat berbahasa Melayu atau Jawa dengan baik. Putera seorang Bupati Purworejo, R.T.A. Suriadi, termasuk seorang revolusioner berapi-api di negeri Belanda dan tidak mengherankan karena ia dilahirkan di dibesarkan di luar Jawa. Mr. Achmad Subardjo, ipar Bupati Jatinegara R.T.A. Abdurakhman, ialah seorang Jawa yang dilahirkan di Karawang dan dibesarkan dalam lingkungan semi-Eropa, juga tercabut dari akar lingkungan kebudayaan bangsanya sendiri. Dr. Cipto Mangunkusumo berbahasa Belanda dalam keluarganya di rumah. Ia berpendapat, bahwa pendidikan bercorak makin Barat dan makin Eropa adalah makin baik, karena justru melepaskan dari akar dan menimbulkan gejolak. Pergolakan perlu untuk perjuangan kemerdekaan. Contoh-contoh dapat ditambah dengan yang lain dan dijadikan generalisasi dengan kesimpulan bahwa di dalam kelompok intelektual yang paling peka terhadap propaganda revolusioner ialah mereka yang telah kehilangan landasan kehidupan emosional dan terlepas dari ikatan sosial dengan bangsanya

sendiri. Kesimpulan ini menurut Van der Plas sesuai dengan dalil, bahwa masyarakat Bumiputera yang seharmonis mungkin tersusun dari individu-individu menurut watak sendiri yang terbentuk secara nasional, merupakan jaminan terbesar terhadap aliran-aliran revolusioner. Dengan ini dapat dijelaskan bahwa pendidikan yang lebih nasional menurut watak sendiri merupakan obat penangkal atau penolak racun (anti-toksin) untuk menyelamatkan individu-individu dari bahaya kehilangan akar yang lebih banyak diakibatkan daripada yang dapat ditolong oleh sistim pendidikan Barat.

Gejala kedua yang menonjol dalam pengamatan Van der Plas ialah bahwa penduduk Bumiputera di daerah-daerah yang berbeda-beda mempunyai konsep berbeda tentang tugas sekolah daripada masyarakat orang Barat. Mereka beranggapan bahwa dari sekolah diharapkan juga memberi pendidikan (budi pekerti), bukan hanya memberi pengajaran saja. Dengan adanya sikap seperti itu menjadi jelas bahwa pengajaran di sekolah tidak dapat dibantu dan ditunjang oleh keluarga di rumah.

Selanjutnya yang menarik perhatiannya ialah bahwa di kalangan intelektual yang makin luas bangkit kesadaran bahwa HIS dengan pendidikan Barat, yang dulu banyak diminta dengan sangat oleh kaum nasionalis tidak lagi memberikan kepuasan. Karena itu usaha Ki Hajar Dewantara mendapat sambutan dengan penuh simpati.

Kenyataan keempat yang dikonstatir oleh Van der Plas ialah bahwa kebanyakan kaum non-koperator bersedia untuk ikut membantu dalam pembangunan masyarakat Bumiputera jika kepada mereka diberikan kesempatan. Bukti yang nyata ialah sambutan yang diberikan kepada seruan pemerintah kepada kaum intelektual untuk memberantas perkawinan kanak-kanak.

Dr. Soetomo menyempatkan diri dalam pekerjaan sehari-hari yang sangat sibuk untuk menyusun brosur dengan judul "Perkawinan dan Perkawinan Anak". Dalam rapat-rapat baik pun dari Partai Sarekat Islam maupun dari Nahdat'ul Ulama (artinya Kebangunan Para Ulama) dikeluarkan pernyataan-pernyataan yang dengan tegas menentang perkawinan kanak-kanak. Hanya untuk bekerja sama dalam lembaga-lembaga

bentukan pemerintah (seperti Dewan Rakyat dan Dewan Kotapraja) mereka enggan. Demikian menurut Van der Plas. Secara umum dikeluarkan keluhan, baik pun di Surabaya maupun di Bandung, bahwa pemerintah sama sekali tidak bersungguh-sungguh memberi kesempatan kepada orang Bumiputera untuk menyelesaikan urusan sendiri. Segala urusan diselesaikan tanpa dan di luar orang Bumiputera. Kegetiran teristimewa dirasakan ialah dalam bidang pendidikan, karena urusan itu diselesaikan di luar orang Bumiputera.

Cara yang paling baik dalam berhadapan dengan kaum ekstremis ialah memberi kesempatan dalam pekerjaan pembangunan di bidang sosial-budaya dan sebaik-baiknya dalam kerja sama dengan kaum moderat. Banyak jasa diamalkan oleh dr. Sutomo dengan para pengikutnya di bidang pekerjaan sosial. Ia berani menunjukkan kesalahan-kesalahan bangsanya sendiri. Dalam rapat umum ia berani menyatakan bahwa pajak-pajak tidak terlalu tinggi.

Mengenai pemberantasan ekstremisme ditegaskan oleh Van der Plas bahwa sangat perlu dan menjadi keharusan untuk menarik perhatian kaum intelektual dari antara mereka itu ke dalam pemecahan berbagai masalah sosial dan meninggalkan sistim kepanitiaan serba-pejabat dalam kepegawaian negeri (*ambtelijke commissies*) untuk mengadakan penelitian masalah-masalah aktual. Disarankan dalam pembentukan panitia-panitia supaya melibatkan ke dalamnya sebagian besar unsur Bumiputera, jika perlu panitia dibentuk seluruhnya dengan anggota orang-orang Bumiputera (misalnya dengan sekretarisnya orang Belanda). Cara demikian itu seyogianya digunakan untuk menangani masalah-masalah dekat dengan hati atau intim dengan mereka.

Mengenai Komisi Pendidikan Bumiputera Belanda, yang dibentuk dengan keputusan pemerintah 28 Nopember 1927, dikemukakan bahwa para anggotanya terdiri dari para pensiunan pegawai dan tidak dari para pemimpin intelektual penduduk, sehingga menurut Van der Plas tidak sesuai dengan tujuan dari tugasnya, yaitu menyelidiki apakah dasar-dasar pendidikan perlu dirobah apakah dengan mempertahankan mutunya perlu disesuaikan kepada watak dan kebutuhan kerohanian.

masyarakat. Adanya Kepala Biro Statistik sebagai anggota menunjukkan bahwa diutamakan data statistik untuk penelitian faktor-faktor sosial. Tetapi di sini masalah politik sangat penting karena pemecahan masalah politik ini dapat membantu penyelesaian lebih harmonis, karena dapat mengembangkan kekuatan untuk melawan kegiatan revolusioner. Sistem pendidikan yang dipakai pada waktu itu menurut Van der Plas tidak dapat diharapkan mendapat hasil yang harmonis. Orang-orang terasing dari bangsa dan tradisi sendiri telah terlepas dari setiap topangan dan ikatan sosial, karena mereka itu ke dalam masyarakat Eropa juga tidak diterima. Dengan pembaruan sistem pendidikan untuk kepentingan politik dengan memberikan pendidikan berwatak nasional dapat dihilangkan kebencian kepada pemerintah yang sering disalah gunakan untuk propaganda. Demikian kata Van der Plas.

Menurut Van der Plas dengan ditinjau dari sudut kebudayaan pendidikan nasional yang lebih disesuaikan kepada watak dan bakat sendiri dengan mengutamakan bahasa sendiri, akan menumbuhkan kaum intelektual yang disamping kemahiran dalam ilmu dan teknologi Barat mengembangkan kepribadian nasional akan memberikan kemampuan kepada yang berbakat di antara mereka untuk menciptakan bentuk-bentuk budaya baru untuk dapat menggantikan kebudayaan tua yang sedang runtuk atau gugur. Dalam pada itu kondisi-kondisi yang lebih baik dapat disediakan untuk pertumbuhan dan perkembangan bahasa-bahasa penduduk Indonesia menjadi bahasa kebudayaan yang modern.

Hanya mereka sendiri yang dapat menyelesaikan itu semua, kata Van der Plas, dengan bantuan penerangan dan menggunakan pengalaman Belanda. Sekali pemerintah memutuskan untuk mencurahkan perhatian kepada masalah pendidikan, teristimewa pendidikan Bumiputera Belanda, seyogianya di samping memperhatikan masalah sosial juga tidak mengabaikan masalah spirituil. Maka menurut Van der Plas perlu dibentuk Komisi Pendidikan Bumi Putera Belanda yang kedua untuk bekerja sama dengan panitia yang sudah dibentuk untuk:

- a) bersama-sama memecahkan persoalan apa perlu atau tidak mengadakan pembaharuan mendasar secara prinsipil pada Pendidikan Bumi-

putera Belanda;

- b) jika perlu bagaimana menyusun kurikulum baru dengan konsekwensinya kepada sekolah menengah;
- c) selain itu bagaimana kedudukan bahasa-bahasa daerah serta cara membinanya.

Disarankannya untuk tidak menyerahkan masalah kebudayaan kepada Komisi pertama. Sebagai ketua Komisi yang kedua diusulkan Prof. Dr. Hesein Jayadiningrat dan sebagai sekretaris merangkap anggota Mr. Suwandi, referendaris pada Departemen Pendidikan dan Agama. Untuk anggota-anggota diusulkan: (a) para ahli di bidang pendidikan (ada 8 orang, diantaranya diusulkan Ki Hajar Dewantoro); (b) orang Indonesia terkemuka yang berminat; mereka ini diambil dari tokoh-tokoh pergerakan (ada 4 orang: Ir. Soekarno, Dr. Sutomo, Dr. Ratu-
langi dan Dr. Radjiman Wediodiningrat); (c) ahli bahasa, khusus bahasa Jawa seorang, yaitu Dr. Th.G.Th. Pigeaud di Surakarta.

95. Dari Direktur Pendidikan dan Agama, karena berhalangan, dari Wakil Direktur (W.J.A.C. Bins) kepada Gubernur Jenderal (De Graeff), 17 Januari 1928

Nota Van der Plas dianggap mempunyai arti sangat prinsipil oleh Wakil Direktur Pendidikan dan Agama, W.J.A.C. Bins. Pada waktu itu J. Hardeman sebagai Direktur sedang menjalani cuti sakit. Dengan surat kepada Gubernur Jenderal De Graeff 17 Januari 1928 nomor Ax5/1/16 Rahasia, dimohonkan supaya tidak diambil keputusan lebih dahulu mengenai usul dalam nota itu, sebelum J. Hardeman berkesempatan menanggapi. Tetapi Bins memberanikan diri dengan mendahului saran Hardeman untuk mengemukakan pendapatnya, yang ringkasnya ia berkeberatan terhadap pembentukan komisi kedua.

Menurut Wakil Direktur itu jika Komisi kedua itu dibentuk dengan tujuan mengadakan pembaharuan mendasar pada pendidikan Bumiputera Belanda dengan segala konsekwensinya, berarti Komisi yang sudah ada tidak diperlukan lagi, karena tugasnya sama. Dengan demikian akan sia-sia belaka semua pekerjaan yang dilakukan oleh Komisi

pertama, apabila komisi kedua sampai kepada kesimpulan, bahwa perlu diadakan pembaharuan kulturil yang radikal terhadap pendidikan Bumiputera Belanda. Menurut W.J.A.C. Bins tidak tepat diadakan dua Komisi untuk pekerjaan yang sama pada stadium yang sama.

Tetapi terlepas dari persoalan di atas tidak ada alasan untuk membentuk suatu Komisi seperti yang diusulkan oleh Van der Plas, karena tidak ada keharusan merombak pendidikan di HIS, sekalipun dengan argumentasi Van der Plas. Menurut sejarahnya sistim pendidikan yang digunakan diadakan dalam kebutuhan tiga kelompok penduduk yaitu Eropa, Bumiputera, dan Cina, dan untuk sebagian dengan tujuan mencapai hasil setaraf dengan sekolah-sekolah di Barat. Dalam sistim pendidikan yang telah menjadi historis itu HIS sebagai keharusan mata rantai untuk bersambungan dengan sekolah menengah. Lain dari pada itu banyak jabatan dalam pemerintahan menuntut lulusan dari ujian pegawai rendah (klein-ambtenaarexamen), yang setaraf dengan tamatan HIS. Juga dalam macam-macam perusahaan swasta tamatan HIS mendapat mata pencaharian yang baik. Di samping mempertahankan corak pendidikan Barat di HIS masih terbuka kemungkinan untuk memperbaiki bidang-bidang tertentu dari sistim ini.

Di sini, kata Bins, ternyata tidak ada keharusan untuk mengadakan perombakan dengan radikal. Dalam peninjauan lebih jauh terhadap argumentasi Van der Plas juga terbukti bahwa keharusan itu tidak ada. Ia tidak menyangkal kenyataan bahwa di antara para intelektual dan tokoh-tokoh ekstrim adalah orang-orang yang tercabut dari landasan dan terlepas dari akar kebudayaan dalam masyarakat mereka sendiri dan mereka inilah yang paling peka terhadap propaganda revolusioner. Contoh-contoh orang yang dikemukakan oleh Van der Plas ialah orang-orang yang dididik dan dibesarkan di luar lingkungan HIS. Sama sekali tidak jelas hubungan mereka dengan HIS. Kesimpulan Van der Plas juga tidak dapat didukung oleh kenyataan menurut asal-usul sosial, umur, pendidikan sekolah dan pekerjaan dari orang-orang komunis yang diasingkan. Menurut hasil penelitian terhadap lebih dari 331 orang komunis, ternyata persentase orang komunis

yang belajar di HIS tidak lebih dari 22% dari seluruh jumlah mereka itu, sedangkan kurang dari 8% berhasil meraih ijazah HIS. Argumen-tasi Van der Plas juga kurang tepat untuk mempersamakan pendidikan Barat dengan pengaruh Barat. Pendidikan Barat dapat dihentikan atau ditiadakan sewaktu-waktu oleh manusia, tetapi penolakan pengaruh Barat ada di luar kemampuan manusia.

Bahwa dalam kalangan intelektual ada keinginan mengubah sistim pendidikan di HIS karena tidak memuaskan dapat dibenarkan, tetapi jumlah mereka jauh lebih kecil daripada jumlah orang yang menginginkan pendidikan corak Barat. Bahkan ada yang menginginkan pengajaran Barat secara khusus dengan memasukkan anak di sekolah Eropa. Van der Plas membuat generalisasi yang terlampau jauh.

96. Direktur Pendidikan dan Agama (J. Hardeman) kepada Gubernur Jenderal (De Graeff), 23 Pebruari 1928

Juga J. Hardeman dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal tanggal 23 Pebruari 1928 nomor Ax5/1/19 Rahasia menyatakan sependapat dengan wakilnya, yang telah mengirimkan pendapatnya kepada Gubernur Jenderal selama Direktur P & A menjalani cuti sakit.

97. Sekretaris Pemerintah (Negara) I kepada Direktur Pendidikan dan Agama (J. Hardeman), 27 Pebruari 1928

Sekretaris Pemerintah (Negara) I dengan surat kepada Direktur Pendidikan dan Agama tanggal 27 Pebruari 1928 nomor 73x Rahasia memberitahukan atas nama Gubernur Jenderal, bahwa beliau tidak dapat menyetujui semua argumen keberatan terhadap usul Van der Plas. Meskipun demikian ia sependapat dengan kesimpulan untuk menolak usul tersebut. Tetapi masalah pembaharuan pada pendidikan Bumiputera Belanda agar ada pendekatan dengan kebudayaan Bumiputera masih tetap minta perhatian.

Secara politik menurut Gubernur Jenderal, waktunya belum matang untuk pembaharuan pendidikan HIS dengan tujuan mempererat hubungan dengan kebudayaan dalam masyarakat Bumiputera sendiri. Ia juga belum

dapat meyakini akibat denasionalisasi kepada orang Bumiputera, sehingga mereka menjadi terasing dari lingkungan sosial-budayanya sendiri. Bagi pemerintah juga sulit untuk menentukan sikap antara kelompok intelektual yang mendukung corak Barat pada pendidikan di HIS dengan kelompok yang berkeberatan terhadapnya. Sementara masih menunggu hasil pekerjaan Komisi HIS persoalan mengenai proses denasionalisasi itu didiamkan dahulu. Meskipun demikian, masalah yang diungkapkan oleh Van der Plas itu dianggap termasuk salah satu dari masalah sosial-politik yang sangat penting, dan lambat atau cepat akan dimintakan penyelesaiannya. Pengalaman di India dan Filipina menunjukkan bahwa corak terlalu Barat pada pendidikan untuk Bumiputera ternyata tidak dapat dipertahankan.

Sebelum masalah itu mendapat giliran untuk ditangani, menurut Gubernur Jenderal sudah ada satu dua hal yang telah dikerjakan. Ia menyambut dengan sangat baik, bahwa dalam hubungan dengan pengajaran bahasa Belanda dan sejarah diadakan peninjauan secara mendasar terhadap buku-buku bacaan dan pelajaran untuk HIS. Diharapkannya bahwa pekerjaan itu seyogianya dilaksanakan dengan cepat dan tidak hanya oleh unsur-unsur serba-pejabat pemerintah. Karena itu dianggap langkah yang baik adanya pembentukan suatu panitia atas usul "Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen", seperti diberitahukan dalam surat Pj. Penasehat Urusan Bumiputera tanggal 13 Januari 1928 nomor J/19 Rahasia. Usul Direktur Pendidikan dan Agama dalam surat 24 Januari 1928 nomor Ax5/1/18 untuk juga melibatkan bantuan beberapa orang intelektual Bumiputera terkemuka ditanggapi dengan penuh simpati oleh Gubernur Jenderal.

Usul mengenai bahasa Melayu untuk dipertimbangkan supaya ditetapkan sebagai mata pelajaran fakultatif di HIS di tempat-tempat tertentu telah diberitahukan cara penanggulangannya melalui surat Sekretaris Pemerintah (Negara) I tanggal 5 Desember 1927 nomor 2444/A2 dan perlu dimintakan pendapat beberapa orang Bumiputera terkemuka yang berminat dan ada di luar ikatan serba-pejabat kepegawaian pemerintah.

Akhirnya Gubernur Jenderal minta, supaya diadakan hubungan dengan pemimpin Taman Siswa untuk ditawarkan subsidi dengan sedapat-dapatnya tanpa ikatan mengenai kurikulum dan sebagainya.

SEKOLAH DAN ORGANISASI PEMUDA BUMIPUTERA

98. Dari Direktorat Pendidikan dan Agama (J. Hardeman) kepada Gubernur Jenderal (De Graeff), 11 Desember 1928

Direktur Pendidikan dan Agama, J. Hardeman, mendapat perintah dari Gubernur Jenderal De Graeff dengan perantaraan surat Sekretaris Pemerintah I tanggal 26 September 1928 nomor 362x/Rahasia, supaya memberikan perhatian khusus kepada masalah pengaruh revolusioner kepada para remaja **Bumiputera**, bagaimana caranya memberantas dengan penuh kebijaksanaan dan dalam hubungan dengan itu meminta bantuan kepada guru-guru Eropa dan Bumiputera atas dasar percaya-memercayai untuk menyediakan saluran yang mengarah kepada penyelesaian yang sebaik-baiknya.

Dalam surat kepada Gubernur Jenderal tanggal 11 Desember 1928 nomor Ax 35/5/8/Rahasia, J. Hardeman mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Beberapa kasus yang terjadi di sekolah menengah memberikan kesan bahwa para guru tidak selalu bersikap sebagaimana mestinya terhadap kelakuan para murid dalam hubungan perhatian mereka kepada pergerakan nasional. Sejak tahun 1927 J. Hardeman sudah siap dengan konsep Surat Edaran kepada para kepala sekolah yang telah ditetapkan untuk menerimanya, tetapi surat edaran itu tidak jadi dikirimkan karena dikhawatirkan akan mengakibatkan efek yang tidak diharapkan berhubung dengan terjadinya peristiwa-peristiwa politik pada waktu itu, dan keresahan yang ditimbulkan dalam golongan penduduk Eropa.

Sejak itu diadakan konperensi-konperensi untuk membahas secara terperinci tugas para guru sekolah MULO dalam menghadapi pendidikan murid di luar sekolah. Konperensi diadakan sebagian di bawah

pimpinan J. Hardeman dengan para Direktur Sekolah MULO negeri dan swasta bersubsidi.

Sebelum ada nota Van der Plas dikandung maksud lagi untuk mengadakan surat edaran, karena kunjungan pada MULO dengan asrama di Purwokerto dalam bulan Agustus 1928 diketahui bahwa beberapa guru mempunyai pendirian yang bukan-bukan dalam sikap menghadapi kehidupan para murid di luar sekolah.

Dalam hubungan itu oleh J. Hardeman dengan bantuan Pj. Direktur Urusan Bumiputera yang dahulu, disusun suatu konsep surat edaran untuk disampaikan kepada para Kepala Sekolah dan asrama yang memerlukan. Tujuannya ialah untuk dijadikan tuntunan bagi mereka dan guru-guru dari sekolah dan asrama yang bersangkutan, agar mereka mendapat petunjuk dalam sikap mereka menghadapi perhimpunan-perhimpunan pemuda Bumiputera (Indonesia), yang di dalamnya mungkin ikut aktif para remaja yang dipercayakan kepada bimbingan para guru itu.

Konsep surat edaran itu dilampirkan untuk dipertimbangkan oleh Gubernur Jenderal dan jika isinya sudah mendapat persetujuan akan diedarkan kepada Kepala-kepala sekolah dan asrama seperti dimaksudkan di atas. Pokok-pokok isinya adalah sebagai berikut:

Telah beberapa kali terjadi kesulitan dalam hubungan antara kepala sekolah, pemimpin asrama, dan atau guru-guru di sekolah-sekolah dengan para remaja yang sudah akil balig dan meningkat kepada kedewasaan sebagai akibat dari kegiatan perkumpulan-perkumpulan pemuda Bumiputera (Indonesia), yang kebanyakan bergerak di bidang politik atau sangat dekat dengan politik. Di luar peristiwa yang terjadi di dalam sekolah atau asrama, ada gerakan pemuda yang terjadi di luar sekolah atau asrama. Semula segalanya berjalan dengan tenang, tetapi tiba-tiba hubungan sangat baik itu dikeruhkan oleh suasana yang menyakitkan perasaan dan mengacaukan hubungan yang sudah terjalin dengan erat. Sudah barang tentu gerakan pemuda sekolah memerlukan bimbingan yang termasuk tanggungan para petugas sekolah dan asrama tanpa merugikan para remaja yang dipercayakan kepada

mereka. Tugas itu pertama-tama memberikan pengajaran tetapi tidak boleh dipisahkan dari pendidikan karena tanpa pendidikan tidak akan berguna.

Dalam hubungan dengan hal di atas dijelaskan pandangan pemerintah mengenai tuntutananya kepada para pemimpin sekolah dan asrama untuk mengambil tindakan-tindakan dengan bijaksana dalam menghadapi peristiwa-peristiwa seperti di atas.

Ciri sekolah untuk umum (openbare school) membawa konsekwensi untuk berada di luar politik. Bagi murid-murid sekolah dalam umurnya yang belum matang untuk memperbincangkan masalah politik, banyak kesibukan dengan masalah tersebut dan akan merugikan studi mereka. Dengan sendirinya sudah jelas bahwa menyelenggarakan rapat-rapat politik di sekolah atau di asrama tidak dapat diijinkan. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa setiap perhatian secara pasif atau aktif dari pihak murid-murid kepada organisasi pemuda harus dipandang jahat atau harus dicurigai. Namun dapat dipahami dan karena itu juga dapat dibenarkan untuk bertindak terhadap perbuatan yang berlebihan yang merugikan sekolah, tetapi harus diingat bahwa tindakan kurang bijaksana dapat merusak banyak, teristimewa apabila ditujukan kepada perkumpulan yang secara resmi diakui dan murid-murid menjadi anggotanya dengan seijin orang tua mereka. Karena itu diharapkan tidak boleh diadakan rapat-rapat remaja di sekolah atau di asrama sebelum acaranya disetujui oleh pemimpin sekolah atau asrama, sedangkan rapat-rapat demikian harus selalu dihadiri oleh seorang guru atau lebih agar dapat diambil tindakan, jika dipandang perlu.

Para pemimpin asrama diharapkan untuk selalu mencamkan bahwa mereka sedapat mungkin terhadap murid-murid asrama bersikap sebagai pengganti orang tua mereka. Pemimpin asrama seyogianya mengetahui perilaku para remaja juga di luar asrama. Jika ternyata bahwa murid-murid terlalu aktif mengambil bagian dalam pergerakan, hendaknya secara langsung diadakan hubungan dengan orang tua mereka atau wali dan ditunjukkan kepada mereka akibat yang dapat merugikan

anak didik. Tetapi janganlah ditanggapi terlalu serius perbuatan berlebihan para remaja yang wajar dalam hubungan dengan usia mereka. Cara mengatasi harus melalui percakapan dari hati ke hati dan percaya-mempercayai.

Dengan sendirinya juga jelas bahwa murid yang mengacau tidak dapat dibiarkan. Demikian juga bacaan yang isinya merusak tidak dibolehkan beredar. (Yang termasuk ke dalam bacaan yang dimaksudkan, a.l. majalah "Indonesia Muda").

Sekalipun diharapkan dengan sangat supaya selalu waspada se-yogianya jangan terlalu banyak ikut campur sehingga akan sangat mudah menimbulkan perlawanan. Tetapi sekali-kali tidak boleh diartikan bahwa kita bersikap acuh tidak acuh terhadap apa yang dipikirkan dan dirasakan para murid. Bimbingan bijaksana dalam masa pembentukan watak bagi para remaja sekolah ini dapat menghindarkan malapetaka yang tidak dapat diperbaiki lagi. Bimbingan ini diharapkan hanya dari para pendidik yang harus pandai merebut kepercayaan murid-murid yang dapat diperoleh dengan menunjukkan perhatian hangat dan ikut merasakan dengan penuh pengertian bersama dengan mereka serta membuka diri bagi banyak persoalan yang sulit yang pada masa ini dipikirkan dan dirasakan oleh para remaja.

Demikianlah pokok-pokok isi surat edaran tersebut.

PENGAWASAN (SUPERVISI) PEMERINTAH TERHADAP SEKOLAH SWASTA TIDAK BERBANTUAN (BERSUBSIDI)

99. Dari Direktur Pendidikan dan Agama (J. Hardeman) dalam surat tanggal 23 April 1929 kepada Gubernur Jenderal (De Graeff)

Dikemukakan bahwa pada waktu ia mulai memangku jabatannya tidak ada penyelesaian masalah mengenai kemungkinan pembatasan sekolah liar, yang pengajarannya tidak bermutu dan bersifat secara langsung berbahaya di bidang politik. Setelah mengadakan penelitian dengan

angket, ia mengutarakan pendapatnya mengenai masalah tersebut sebagai berikut.

Secara prinsipiil ia lebih suka untuk menetapkan syarat-syarat yang dituntut sebagai wewenang yang diperlukan untuk juga mengajar di sekolah lain daripada di sekolah Eropa. Hal ini teristimewa dikenakan kepada sekolah dimana diajarkan bahasa Belanda, karena justru di sini dikhawatirkan ada bahaya besar yang disebabkan oleh penghargaan tinggi kepada pengajaran bahasa Belanda di kalangan luas masyarakat Bumiputera. Tetapi masalahnya di samping segi prinsipiil mempunyai segi praktis yang tidak selaras dengan tuntutan syarat kewenangan.

Yang perlu ditonjolkan ialah bahwa masalahnya di sini bukan lagi mengenai pengamanan masyarakat terhadap pendidikan yang berbahaya di bidang politik. Penetapan syarat kewenangan yang dituntut dari guru sekolah swasta tidak bersubsidi harus bertujuan untuk melindungi orang yang membutuhkan pendidikan, tetapi tidak tertampung di sekolah yang diurus pemerintah, terhadap pendidikan yang mutunya rendah. Sudah barang tentu terdapat alasan kuat yang adil di sini untuk membatasi pemberian pendidikan bagi orang-orang bukan Eropa. Tetapi J. Hardeman menganggap kurang bijaksana untuk mengeluarkan larangan mengajar. Ia memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Penetapan tuntutan syarat wewenang akan merupakan rintangan besar bagi prakarsa bebas dari swasta dan dilihat dari sudut politik harus juga dianggap sangat tidak bijaksana terhadap organisasi nasionalistis di bidang pendidikan dan organisasi sekolah lain dengan maksud baik seperti pergerakan perguruan Taman Siswa yang dipimpin oleh Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), dengan tujuan menyelenggarakan pendidikan berjiwa nasional tanpa merongrong kekuasaan pemerintah, tetapi tidak sependapat dengan sistim pendidikan dari pemerintah, dan karena itu secara prinsipiil tidak mau meminta subsidi, agar supaya dengan bebas dapat mengejar cita-cita pendidikannya menurut konsepsi sendiri.

- b. Meskipun pengajaran di berbagai sekolah liar dalam pandangan pemerintah sangat rendah mutunya dan sering kali meminta pengorbanan keuangan yang besar dari para orang tua, dari jumlah murid yang relatif besar ternyata dihargai oleh para orang tua murid. Dalam hubungan dengan kebutuhan pendidikan yang biasanya subyektif berupa pengetahuan bahasa Belanda tidak dapat dipuaskan sepenuhnya oleh sekolah negeri atau sekolah swasta bersubsidi, maka setiap hambatan yang seharusnya tidak diadakan oleh pemerintah, menimbulkan kebencian dan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pergerakan rakyat Bumiputera akan dipergunakan untuk menyebarkan benih rasa tidak senang.
- c. Dengan menentukan syarat kewenangan yang tidak mengakibatkan penutupan semua sekolah liar, maka menjadi keharusan untuk mengakui ijazah (diploma) yang sebenarnya tidak merupakan jaminan cukup untuk memberi pendidikan yang baik. Ada bahaya yang dapat ditimbulkan bahwa diploma tersebut nilainya untuk wewenang mengajar akan dihargai oleh umum lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya. Hal ini akan disalahgunakan oleh yang berkepentingan untuk membuat pendidikan tidak bermutu menjadi laku. Penetapan syarat kewenangan tersebut akan merampas mata pencaharian dari banyak orang yang bekerja sebagai guru di sekolah liar walaupun pekerjaan itu bagi sebagian besar tidak memberi banyak penghasilan. Kebanyakan guru ini, meskipun tidak berwewenang atau tidak cukup berwewenang, berusaha dengan maksud baik untuk memberikan kepada murid-muridnya pengetahuan yang dimilikinya.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, J. Hardeman menasehatkan untuk sementara tidak membuat peraturan pembatasan kebebasan sekolah liar dan lebih baik mengambil sikap menunggu dan memperhatikan perkembangan lebih lanjut.

100. Saran dari Dewan Hindia Belanda, tanggal 4 Oktober 1929

Dewan Hindia Belanda (Raad van Nederlands-Indië) dalam sarannya tanggal 4 Oktober 1929 nomor XXII, menimbang mutlak perlu untuk mengadakan tindakan pembatasan guna melindungi perorangan dan masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu rendah. Menurut pertimbangannya saran J. Hardeman sebagai Direktur Pendidikan dan Agama tersebut di atas tidak tepat. Pendapat J. Hardeman, bahwa tuntutan syarat kewenangan dari guru sekolah swasta tidak bersubsidi hanya bertujuan untuk melindungi orang yang membutuhkan pendidikan tetapi tidak tertampung di sekolah yang diurus pemerintah. Terhadap pendidikan yang rendah mutunya tidak dapat diterima begitu saja, karena diragukan apakah cukup diperhatikan gangguan sosial yang tidak dapat diperhitungkan yang ditimbulkan oleh pendidikan buruk, teristimewa sekali oleh pendidikan Barat, dalam pergaulan hidup kolonial. Perhatian Dewan di sini tidak ditujukan kepada kegiatan organisasi sekolah yang nasionalistis dan yang lain, dimana menurut J. Hardeman keharusan bagi pengajarnya untuk memenuhi syarat-syarat kemampuan tertentu dipandang dari sudut politik merupakan hambatan yang tidak dapat dianjurkan. Menurut Dewan dapat diduga bahwa para pemimpin organisasi tersebut akan makin beranggapan, bahwa sebagai syarat untuk mensukseskan usaha mereka sendiri, mereka harus menyediakan pengajar-pengajar yang cakap bagi sekolah mereka. Dan mereka itu tidak perlu merasa dirugikan dengan diadakannya syarat-syarat yang diatur secara legal asal penerapannya diusahakan dengan peraturan yang luwes.

Menurut Dewan, bahaya besar tersembunyi dalam sekolah yang oleh sembarang orang dijadikan sumber penghasilan. Oleh Dewan dikutip saran yang disampaikan oleh G. van der Veen sebagai anggota dengan pelimpahan wewenang (gedelegeerd lid) Dewan Pendidikan dalam nota tanggal 10 April 1924 nomor 1148. Sekolah-sekolah tersebut dalam nota itu, dianggap sebagai "perdagangan belaka" dan didirikan oleh kaum muda yang biasanya telah gagal dalam studi di Kweek school, OSVIA, MULO, STOVIA, dsb., kemudian mereka itu mencari

sumber penghidupan dengan mengajar. Dengan cara lihai dibuat reklame untuk sekolah yang didirikan. Sekolah seperti ini merupakan ancaman bahaya yang tidak boleh diremehkan bagi perkembangan kemajuan rakyat. Oleh Dewan dikemukakan bahwa dalam nota J. Hardeman, 23 April 1929 dilaporkan bahwa jumlah sekolah liar telah naik hingga 573, diantaranya dengan program pelajaran dalam bahasa Belanda. Sejak dibentuk organisasi pendidikan rendah Barat (dan MULO) baru lewat kira-kira 15 tahun dan Dewan melihat dengan khawatir dalam perkembangannya, bahwa dalam waktu singkat apabila puluhan ribu orang Bumiputera terdidik secara Barat dengan sia-sia mencari pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya dan dengan bebas menjadi guru, sehingga dengan demikian memperoleh mata pencaharian, yang akan mengakibatkan kerugian belaka tidak hanya kepada para murid, tetapi juga kepada seluruh masyarakat. Pemerintah tidak boleh berdiam diri bahwa sebagian besar dari generasi yang sedang tumbuh dalam jumlah yang makin besar dirusak pendidikannya dan dijadikan komponen berbahaya dari masyarakat oleh guru-guru yang sama sekali tidak berwenang, karena mereka ini terpaksa terjun di bidang pendidikan oleh sebab tidak mampu memperoleh mata pencaharian lain.

Dewan tidak dapat menyetujui pandangan J. Hardeman bahwa pemerintah harus bersikap menunggu dan untuk sementara memperhatikan kelanjutan perkembangan sekolah liar. Menurut Dewan, sekolah seperti ini akan bertambah banyak dan akan berkembang menjadi terus makin buruk. Maka Dewan memberikan saran agar melindungi kepentingan perorangan dan masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu rendah, dianggap mutlak perlu untuk mengadakan pembatasan terhadap kebebasan mengajar di sekolah liar. Dengan sistim penentuan persyaratan untuk wewenang mengajar dapat diharapkan memperbaiki mutu pendidikan. Tujuan utama dari peraturan legal ialah untuk membatasi pendidikan yang kurang bermutu. Akan banyak dapat dicapai jika tidak setiap orang pandai dan pandir dibolehkan menjadi guru. Peraturan tersebut jika disusun secara luwes sejauh diperlukan, akan dapat disetujui oleh orang-orang yang

berkemauan baik, juga di dalam Dewan Rakyat. Oleh Dewan dinasehatkan untuk mempersilahkan Pejabat Direktur Pendidikan dan Agama menggarap masalah tersebut, tetapi terlebih dahulu persoalan yang menyangkut pendidikan Barat, seyogianya dipertimbangkan dengan Komisi Pendidikan Bumiputera-Belanda (Hollandsch Inlandsch Onderwijs Commissie).

BAHASA MELAYU DI HIS
(HOLLANDS INLANDSE SCHOOL)

101. Pj. Direktur Pendidikan dan Agama (B.O.J. Schrieke) kepada Gubernur Jenderal (De Graeff), 14 September 1929

Di HIS bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda. Sejak didirikannya bahasa daerah diajarkan dan juga bahasa Melayu. Keluhan timbul di daerah-daerah yang penduduk aslinya tidak berbahasa Melayu (bukan suku Melayu) karena murid-murid terlalu banyak dibebani pelajaran bahasa. Bagi murid-murid kelas rendah beban itu terlalu berat. Dengan adanya keluhan itu maka dalam tahun 1920 dimintakan pertimbangan kepada Dewan Hindia-Belanda kebijaksanaan apa yang perlu diambil terhadap pengajaran bahasa Melayu. Dalam tahun 1921 nasehat diberikan dan ternyata mayoritas anggota Dewan berpendapat bahwa bahasa Melayu yang bukan bahasa daerah bagi murid ditiadakan sebagai mata pelajaran. Meskipun mereka mengakui nilai sosial-ekonomis bahasa Melayu sehingga dibutuhkan dalam pergaulan umum, mereka beranggapan bahwa pengetahuan tentang bahasa itu dapat diperoleh dengan cukup di luar sekolah.

Direktur Pendidikan dan Agama, J. Hardeman, dalam surat kepada Gubernur Jenderal De Graeff tanggal 8 Oktober 1927 nomor B.50/2/23 minta pertimbangan untuk mengadakan percobaan bahasa Melayu sebagai mata pelajaran fakultatif di HIS dan menetapkan jam pelajaran di empat kelas tertinggi setiap minggu: 2, 2, 1 dan 1 serta pengajaran diberikan dalam waktu sekolah biasa. Murid-murid yang tidak

mengikuti pelajaran bahasa Melayu akan diberi latihan pekerjaan tangan, senam, menulis huruf, dan lain-lain, sedangkan jam yang menjadi kosong akan digunakan untuk pelajaran bahasa Belanda. Selain itu pengajaran bahasa Melayu akan disesuaikan dengan kegunaan yang lebih praktis.

Dewan Hindia-Belanda memberikan saran, bahwa sebelum mengambil keputusan untuk mengadakan percobaan tersebut, supaya lebih dahulu mengenai masalah tersebut diadakan angket di antara para Bupati di Jawa dan Madura, dan khusus dimintakan pendapat mengenai kegunaan sosial pengajaran bahasa Melayu. Juga akan dimintakan pendapat para kepala pemerintahan daerah, seperti Gubernur dan Residen.

Setelah Gubernur Jenderal menyetujui saran Dewan Hindia-Belanda itu (B.G.S. 5 Desember 1927 nomor 2444/A2), demikian Pj. Direktur Pendidikan dan Agama, B.O.J. Schrieke dalam surat kepada Gubernur Jenderal De Graeff tanggal 14 September 1929 nomor B.50/4/16, dikirimkan daftar pertanyaan kepada Gubernur Jawa Barat, para Residen di Jawa Tengah dan Jawa Timur (di luar daerah-daerah swapraja Solo dan Yogya), Gubernur Sulawesi dan daerah bawahannya dan Residen Tapanuli, diminta supaya daftar isian jawaban untuk Jawa dan Madura diisi oleh para Bupati, sedangkan untuk Sulawesi dan Tapanuli diisi oleh para Kepala Distrik, pembantu pemerintahan di daerah dan Kepala (tokoh) masyarakat. Selain itu dikirimkan daftar pertanyaan kepada 14 orang Bumiputera terkemuka dalam pergerakan nasional dan pengurus perkumpulan-perkumpulan. Kepada Balai Pustaka diminta bantuan untuk mempublikasikan daftar angket dalam pers Indonesia.

Jawaban yang terkumpul diikhtisarkan sebagai berikut. Dari para Bupati ada 32 orang menganggap bahasa Melayu di HIS perlu dipertahankan (Jawa Barat 4, Jawa Tengah 9, dan Jawa Timur 19); 25 orang menghendaki bahasa Melayu masih diharapkan (Jawa Barat 8, Jawa Tengah 8, dan Jawa Timur 9); 13 orang menimbang bahasa Melayu tidak perlu dipertahankan (Jawa Barat 3, Jawa Tengah 5, dan Jawa Timur 5); 4 orang tidak menghendaki bahasa Melayu (Jawa Barat).

Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Jawa Tengah menyetujui penghapusan pelajaran bahasa Melayu, sedangkan Gubernur Jawa Timur

menyetujui untuk terus diadakan. Gubernur Sulawesi dan Residen Tapanuli dengan pembantunya dalam pemerintahan Eropa dan Bumiputera menyatakan pendapat untuk mempertahankan pengajaran bahasa Melayu.

Orang dalam pergerakan nasional dan pengurus perkumpulan-perkumpulan yang dikirim daftar pertanyaan ialah:

1. Dr. R.T.Radjiman Wediodiningrat, di Solo
2. Ki Hajar Dewantoro, di Yogyakarta
3. Dr. R.Sutomo, di Surabaya (dosen NIAS)
4. R.M. Sosrokartono, di Bandung (Direktur MULO Taman-Siswa)
5. M. Sutedjo, guru HIS II di Semarang
6. M. Dwidjowarsito, Kepala HIS dengan Qur'an di Solo
7. Maliku Suparto, idem di Solo
8. M. Sugeng, Kepala Sekolah Adhi Darmo
9. M. Suriadiputro, Pemimpin Taman Siswa di Semarang
10. M. Suriadiradja, guru Institut Bahasa-Bahasa Daerah dan Ilmu Bumi dan Bangsa-Bangsa (Institut Kats), di Jakarta.
11. A.W. Karyoso, di Solo
12. P.G.H.B. (Persatuan Guru Hindia-Belanda), di Solo
13. H.K.S.-Bond, di Jakarta
14. Kweekschool-Bond, di Yogyakarta

Dari nomor 4, 7, 8 dan 9 tidak diterima jawaban. Nomor 2 menyampaikan jawabannya dengan perantaraan Penasehat Urusan Bumiputera. Hanya nomor 2 dan nomor 10 menyatakan supaya bahasa Melayu tetap diajarkan di HIS.

Oleh pimpinan Balai Pustaka dikirimkan ikhtisar 40 artikel dari pers Indonesia. Dari pengarangnya, 25 orang mempertahankan mata pelajaran bahasa Melayu, 11 orang menentang, sedangkan 4 orang menunjukkan jalan tengah.

Jika dibuat neraca dari data yang terkumpul melalui angket itu didapat gambaran, yang barangkali hanya mempertajam perbedaan pendapat. Mayoritas dari para Bupati mempertahankan pelajaran bahasa Melayu dengan kecenderungan antara wajib dan fakultatif, mengurangi jam pelajaran atau lebih disesuaikan dengan kebutuhan dalam praktek.

Dua orang Gubernur menyokong penghapusan, sedangkan seorang mempertahankan. Dari perorangan dalam pergerakan nasional dan pengurus perkumpulan sebagian besar menyatakan untuk menghapuskan, sedangkan pendapat pers nasional menolak penghapusan. Bahasa Melayu pada waktu itu sedang berkembang menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Menurut Schrieke tidak dapat diambil kesimpulan dengan begitu saja sebagai keputusan berdasarkan mayoritas suara, karena nilai bobot suara berbeda-beda. Misalnya seorang Bupati (dari Bangkalan-Madura) mengisi daftar angket dua kali, yakni dalam bulan Juli 1928 dan Pebruari 1929. Menurut jawaban pertama, ia menganggap tidak ada gunanya mempertahankan mata pelajaran bahasa Melayu, sedangkan menurut jawaban kedua ia menyatakan bahwa seyogianya diajarkan bahasa Melayu, tetapi hanya di dua kelas tertinggi. Atau yang lain kurang mengerti pertanyaan atau secara ceroboh memberikan jawaban dengan menuliskan "ya", sedangkan maksudnya "tidak". Dengan memperhatikan lebih jauh dan mengadakan analisa lebih kritis pendapat-pendapat yang dinyatakan oleh para responden, dapat diadakan penggolongan pendapat ke dalam tiga kategori, yaitu (1) dari para Bupati, (2) kaum nasionalis, dan (3) para guru.

(1) Para Bupati

Kebanyakan para Bupati melihat dari sudut keperluan pemerintahan menyarankan bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib, dengan tegas menyatakan supaya diadakan penyederhanaan dalam pengajaran bahasa Melayu dan menghendaki peningkatan pengajaran bahasa Belanda. Hanya ada dua orang Bupati menggunakan bahasa Melayu dalam memberikan jawaban. Penghargaan kepada bahasa daerah (sendiri) ternyata lebih kurang daripada kepada bahasa Belanda. Yang menghendaki penghapusan bahasa Melayu dari program pelajaran di HIS hanya ada beberapa orang, yang menginginkan supaya jam-jam yang menjadi kosong digunakan untuk mata pelajaran bahasa daerah. Bahkan salah seorang menolak penghapusan mengusulkan untuk meniadakan mata pelajaran bahasa daerah. Pendidikan yang dialami oleh para Bupati ada pengaruhnya kepada pemberian jawaban. Para Bupati dengan

pendidikan dari sekolah model lama pada umumnya cenderung untuk mempertahankan bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib. Mereka yang berpendidikan lebih modern menyetujui penghapusan dan melihat tidak ada kesukaran untuk belajar sendiri bahasa Melayu. Pada umumnya para Bupati berpendapat, bahwa pengajaran bahasa Melayu Riau sangat kurang diarahkan kepada kebutuhan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Karena itu, mereka yang melihat tidak ada kegunaannya dalam praktek, mempunyai alasan untuk menghapuskannya. Yang lain menganjurkan penyederhanaan. Menurut pengalaman Komisi HIS, untuk pengangkatan juru tulis pembantu di mana-mana diatuhkan pilihan kepada tamatan HIS, kendatipun pengetahuan bahasa Melayu mereka kurang. Meskipun surat tanda tamat belajar sekolah kelas dua memenuhi syarat untuk pengangkatan, mereka sekalipun lebih mahir menggunakan bahasa Melayu tidak diterima lagi.

(2) Kaum Nasionalis

Dalam tahun 1921 oleh Balai Pustaka telah dikumpulkan pendapat pers Indonesia mengenai pengajaran bahasa Melayu di HIS. Begitu pula pada tahun 1928 telah dikumpulkan lagi pendapat pers mengenai hal yang sama. Jika diadakan perbandingan, maka segera diketahui perbedaannya yang prinsipil. Dalam tahun 1921 dikeluarkan suara menentang berdasarkan pertimbangan sosial-ekonomis, tetapi dalam tahun 1928 suara itu dipenuhi dengan tuntutan politik. Bukankah sejak tahun 1928 itu bahasa Melayu sedang menjadi "Bahasa Indonesia". Mayoritas pers nasional di Bandung, dimana PNI di bawah pimpinan Ir. Soekarno mempunyai pengaruh sangat besar kepada pers Indonesia, menyerukan bahwa persatuan nasional akan dibahayakan, jika mata pelajaran bahasa Melayu dihapuskan. Lebih baik yang dihapuskan pengajaran bahasa daerah. Menurut Ir. Soekarno, perbedaan bahasa tidak akan menghalangi persatuan Indonesia, tetapi makin disebarkan-luaskannya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia akan lebih mempercepat pencapaian kemerdekaan. Orang yang tidak pandai berbahasa Melayu tidak dapat menangkap pidato-pidato para pemimpin rakyat atau mengikuti berita-berita dalam koran nasional, dan ia

sendiri tidak dapat berbicara di muka umum. Penghargaan kepada bahasa Melayu dijadikan lambang persatuan Indonesia.

Berbeda dengan kelompok nasionalis dari Bandung yang pengaruhnya terbesar kepada pers Indonesia, ialah kelompok dari Solo (Dr. Radjiman), yang mempunyai ikatan erat dengan kelompok Semarang (Sutedjo dkk.). Dr. Radjiman dengan kecintaannya kepada kebudayaan Jawa dan Sutedjo menyarankan penghapusan mata pelajaran bahasa Melayu di HIS. Sutedjo mempunyai alasan pedagogis dan disetujui oleh Persatuan Guru Hindia-Belanda (PGHB). Dalam artikel majalah Persatuan Guru Desember 1928 diusulkannya untuk meningkatkan mutu pendidikan di HIS, supaya hanya diadakan kursus bahasa Jawa dan Melayu pada waktu petang untuk murid-murid kelas enam dan tujuh saja. Pengetahuan bahasa Belanda harus diperdalam supaya kelas persiapan di MULO dapat ditiadakan. Kelompok Surabaya dalam "Soeloeh Rajat Indonesia" 27 Juni 1928 nomor 26 menghargai kegunaan bahasa Melayu dan berpendapat tidak ada keharusan menghilangkan mata pelajaran bahasa Melayu di HIS, tetapi pengajaran bahasa Belanda harus ditambah. Dr. Sutomo sependapat dengan Sutedjo yang mengutamakan kepentingan murid HIS untuk melanjutkan belajar. Ia menginginkan pembatasan pengajaran bahasa Melayu sampai di sekolah desa dan sekolah kelas dua saja (kemudian diajarkan di MULO). Supaya orang Bumiputera mencapai derajat sama dengan orang Eropa, segala rintangan harus ditiadakan. Jika perlu untuk mencapai tujuan itu bahasa dan kebudayaan daerah boleh dikorbankan. Jam untuk mata pelajaran bahasa Melayu harus disediakan untuk pengajaran bahasa Belanda, sehingga tamatan HIS mendapat persamaan hak dan tidak ketinggalan dengan tamatan sekolah rendah Eropa.

(3) Para Guru Bumiputera

Kelompok pendapat ketiga ialah dari para guru Bumiputera. Menurut Schrieke, pada waktu ia masih bekerja di Biro Urusan Bumiputera (1917-'23) dalam kongres-kongres PGHB yang dengan teratur dihadapinya, setiap tahun dibicarakan pengajaran bahasa daerah dan Melayu, dan pada waktu itu makin santer diperdengarkan suara menentang. Dalam tahun 1921 dan 1922 Kweekschool-Bond telah menyatakan

secara positif untuk menghapuskan mata pelajaran bahasa Melayu di HIS dan memanfaatkan jam pelajaran yang menjadi bebas untuk bahasa Belanda. Dalam tahun 1926 juga PGHB (yang kemudian bernama PGI = Persatuan Guru Indonesia) melalui referendum diantara para anggotanya memutuskan seperti itu. Dengan keputusan yang secara formal dirumuskan sebagai keputusan Kongres PGHB, Budi Utomo juga dalam Kongresnya dalam tahun 1926 menyatakan dukungannya. Dalam kongres Paguyuban Pasundan (31 Maret - 1 April 1929) dan dalam rapat Sekar Rukun pada tanggal 7 Oktober 1928 di Jakarta suara-suara berbeda sedemikian rupa, sehingga pengurusnya mengajukan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan membentuk suatu panitia penelitian.

Keputusan PGHB bobot nilainya menjadi lebih besar, karena perhimpunan guru yang mula-mula bersifat umum itu dalam perkembangannya menjadi federasi perkumpulan khusus dari guru-guru Indonesia sejak tahun 1926, yaitu guru-guru dengan pendidikan yang berbeda-beda sebagai anggota, misalnya dari PGB (Persatuan Guru Bantu), HKS-Bond, Kweekschool-Bond, Perserikatan Normaalschool, dll.

PGHB melayani kepentingan umum para anggotanya. Majalah federasinya yaitu "Persatuan Guru", membela dengan gigih penghapusan mata pelajaran bahasa Melayu di HIS. Dengan sendirinya pengurus tiap perkumpulan guru masing-masing menganut pendirian itu dalam mengisi jawaban untuk pertanyaan dalam daftar angket yang diedarkan oleh Departemen Pendidikan dan Agama.

Pendapat di atas itu bukan dari semua guru secara pribadi, tetapi sebagai kelompok dalam organisasi mereka mempunyai satu pendapat. Kendatipun pada waktu itu sedang menyala semangat nasionalisme Indonesia, mereka sependapat untuk menghilangkan mata pelajaran bahasa Melayu di HIS. Pendapat umum guru-guru Indonesia itu tidak boleh dianggap sebagai keputusan PGHB secara tergesa-gesa dan tanpa dilandasi pertimbangan matang jika diingat sejarah perkembangannya yang bertahun-tahun.

Menurut Schrieke, setelah diketahui suara-suara yang pro dan kontra, maka pemerintah harus mengambil keputusan untuk menghilangkan

ketidak-pastian yang mengambang dalam masyarakat Bumiputera mengenai dunia pendidikan. Tetapi lebih dahulu dikemukakan beberapa argumen yang bersifat lugas, terutama yang berasal dari pengalaman Komisi HIS. Dalam menilai pendapat mengenai keharusan atau sebaiknya dipertahankannya pengajaran bahasa Melayu di HIS harus diperhatikan adanya perbedaan pendapat mengenai pengajaran di HIS sebagai pengajaran terakhir atau untuk meneruskan belajar di sekolah yang lebih tinggi. Kebanyakan para Bupati melihatnya dari sudut syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para tamatan HIS untuk mencari karier dalam pemerintahan. PGHB dan kelompok Sutomo memandangnya dalam hubungan dengan kepentingan murid untuk melanjutkan belajar.

Pada mulanya pemerintah kolonial Hindia-Belanda mengadakan HIS dengan tujuan menciptakan suatu tipe tenaga kerja, sehingga mula-mula pendidikan di HIS dianggap sebagai jenjang pendidikan terakhir. Tetapi dalam perkembangan kemudian HIS menjadi landasan untuk meneruskan sekolah. Dalam tahun 1921 di Jawa ada 12 MULO negeri dan 3 MULO swasta bersubsidi, yang pada waktu itu sebagian belum berproduksi penuh. Sejak tahun 1929 ada 25 MULO negeri dan 23 MULO swasta bersubsidi. Di samping itu ada sejumlah MULO swasta belum bersubsidi. Dalam tahun 1920 dan 1921 di Jawa yang lulus ujian akhir MULO hanya 41 dan 65 anak Bumiputera, tetapi dari 1922 sampai 1927 jumlah itu naik berturut-turut menjadi 98, 194, 225, 288, 333, 431, dan 484.

HIS berasal dari Sekolah Kelas Satu yang jumlahnya di Jawa pada tahun 1914 ada 82 buah dan dalam tahun itu diubah menjadi HIS. Dalam periode 1914-1921 jumlahnya bertambah dengan 10 buah dan sampai 1 Juli 1929 naik dengan 17 buah. Di Jawa sejak 1 Januari 1921 ada 32 buah HIS swasta bersubsidi dan sejak 1 Juli 1929 ada 75 buah. Selain itu pada 1 Juli 1929 ada 25 buah sekolah peralihan (schakelschool) negeri dan 12 buah "Schakelschool" swasta bersubsidi, dan untuk pertama kali menghasilkan tamatannya dalam tahun 1926. Dengan mengecualikan kursus-kursus bahasa Belanda, sekolah-sekolah khusus dan HIS swasta tidak bersubsidi di Jawa dari 1921 sampai 1929

terjadi tambahan dengan 17 HIS negeri + 43 HIS bersubsidi + 25 "Schakelschool" negeri + 12 "Schakelschool" bersubsidi = 97 sekolah rendah berbahasa Belanda negeri dan bersubsidi. Dalam tahun 1921 ada 93 HIS negeri + 32 HIS bersubsidi = 125 HIS negeri dan bersubsidi, sehingga sampai tahun 1929 perkembangannya menjadi $125+97 = 222$ sekolah rendah berbahasa Belanda atau terjadi perkembangan kira-kira dua kali lipat. Sebanding dengan perkembangan ini terjadi kenaikan jumlah tamatannya, yang sejak tahun 1921 otomatis disamakan dengan "Meinambtenaren" (Pegawai rendah). Jika jumlah tamatan itu dalam masa 1915-1919 rata-rata 1000 setiap tahun, dalam masa 1920-1924 sudah menjadi rata-rata 2000 setiap tahun, sedangkan dalam tahun 1925, 1926 dan 1927 berturut-turut menjadi 3046, 3265, dan 3285. (Untuk semua tipe sekolah rendah Barat negeri dan swasta termasuk sekolah rendah Eropa (ELS) berturut-turut 3767, 3831, dan 3851 tamatan murid Bumiputera, dalam masa 1920-1927 bertambah dengan 25000 tamatan dibandingkan dengan 11000 dalam masa 1900-1919). Kenaikan untuk tahun 1928 di Jawa 2970 dan di luar Jawa 1017, sehingga jumlah kenaikan seluruhnya untuk tahun 1928 ada 3987 atau hampir 4000, sedangkan jumlah tamatan seluruhnya kira-kira 7000. Dalam perkembangan tersebut perlu juga diperhitungkan hal-hal sebagai berikut di bawah ini:

- 1) Dari 37 Sekolah Peralihan (Schakelschool) yang ada, baru beberapa yang sudah berproduksi, yaitu sebanyak 84 orang tamatan dalam tahun 1928.
- 2) Menurut laporan Komisi Pendidikan Bumiputera-Belanda, ditemukan kira-kira 60% dari murid HIS tidak sampai tamat, tetapi mereka itu dalam waktu pendek atau panjang telah mendapat pengajaran bahasa Belanda.
- 3) Oleh kursus-kursus bahasa Belanda (dari "Algemeen Nederlandsch Verbond"), pelajaran privat dan sekolah swasta tidak bersubsidi juga disebarkan pengetahuan bahasa Belanda.

- 4) Dari penelitian dalam tahun 1927 ternyata bahwa kira-kira 66% dari populasi HIS tidak berasal dari kalangan masyarakat yang semula dimaksudkan disediakan HIS untuk kepentingan pendidikan mereka.

Dengan memperhitungkan faktor-faktor di atas akan jelas, bahwa dalam waktu yang cepat penyebaran pengetahuan bahasa Belanda meresap jauh ke dalam beberapa lapisan masyarakat Bumiputera. Produksi secara besar-besaran bagi orang Bumiputera untuk berbahasa Belanda dan dalam hubungan dengan proses Belandanisasi dalam masyarakat Eropa di Jawa, mengakibatkan bahwa bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung antara kelompok Eropa dengan kelompok Indonesia makin sangat kurang diperlukan. Juga dalam berbagai cabang perusahaan swasta untuk melakukan berbagai macam pekerjaan makin banyak dipilih orang Bumiputera yang pandai berbahasa Belanda. Juga orang yang tidak sampai tamat HIS dengan demikian tidak sia-sia, karena dalam dinas-dinas swasta penghargaan kepada diploma lebih kurang diadakan daripada dalam dinas pemerintahan.

Di atas telah dikemukakan, bahwa dalam tahun 1928 kenaikan tamatan Bumiputera dari semua sekolah rendah Barat berjumlah kira-kira 4000 dari 7000 tamatan. Menurut perhitungan sementara Komisi, kebutuhan setahun akan tenaga kerja dari tipe "kleinambtenaar" dan yang lebih tinggi ditetapkan 1000 orang. Ternyata, bahwa hanya persentase yang sangat kecil dari seluruh jumlah tamatan dapat ditempatkan dalam dinas pemerintahan dalam negeri. Dalam praktek, untuk pengangkatan pegawai rendah yang menuntut syarat surat tanda tamat belajar di sekolah kelas dua, pada umumnya dipilih tamatan HIS, walaupun kurang mahir dalam bahasa Melayu, sehingga untuk tamatan sekolah kelas dua praktis tidak ada kemungkinan untuk diangkat. Maka dengan demikian keberatan kebanyakan Bupati (yang menyekolahkan anaknya sendiri ke sekolah rendah Eropa) tidak terlalu berbobot terhadap penghapusan pengajaran bahasa Melayu di HIS.

HIS dalam perkembangannya makin menjadi landasan untuk melanjutkan sekolah. Tidak dapat diragukan lagi, bahwa untuk kebanyakan

orang tua dalam masyarakat Bumiputera, HIS ialah suatu lembaga pendidikan yang memberikan persiapan untuk melanjutkan belajar. Kenaikan jumlah populasi di HIS terutama mempunyai dua sebab, yaitu (1) ekonomis, dan (2) psikologis. Faktor ekonomi dalam hal ini ialah akibat dari pendapatan rata-rata sangat kecil dari penduduk Bumiputera dengan disertai kenaikan jumlah penduduk yang pesat, sehingga timbul rangsangan untuk mencari mata pencaharian dalam lingkungan ekonomi Barat. Tidak dapat diharapkan, bahwa kenaikan populasi di HIS akan berkurang, kendatipun produksi tipe tenaga kerja yang dihasilkan mengalami penurunan penghargaan di pasaran kerja, karena mereka harus puas dengan menerima jabatan yang lebih rendah dari pada yang disediakan untuk mereka. Faktor ekonomi ini mendorong mereka seperti yang dialami oleh kelompok Indo-Eropa, yang pada waktu dulu sudah cukup dengan ijazah tamat sekolah rendah Eropa, tetapi setelah itu harus bersaing dengan pihak Bumiputera, sehingga mereka harus berusaha mencapai diploma yang lebih tinggi. Dalam hubungan dengan usaha tersebut maka perluasan MULO dapat sejalan dengan keinginan mereka.

Faktor psikologis timbul dalam usaha di kalangan masyarakat Bumiputera untuk mencari persamaan dengan orang Eropa. Gejala ini mendorong orang Bumiputera untuk memberikan kepada anaknya pendidikan yang lebih baik dan lebih sempurna. Oleh kedua faktor itu terjadi perubahan dalam corak pengajaran di HIS. Jika tersedia potensi atau kekuatan finansial dan lebih-lebih kapasitas intelektual, maka diusahakan supaya anak melanjutkan sekolah. Karena itulah Komisi Pendidikan dapat mengkonstatir bahwa corak sekolah rendah Barat untuk orang Bumiputera berbeda sekali dengan corak sekolah rendah di negeri Belanda. Di negeri Belanda hanya 5% dari tamatan sekolah rendah meneruskan belajar. Sekolah rendah di negeri Belanda adalah juga sekolah untuk rakyat. Menurut Komisi Pendidikan, berdasarkan angka-angka publikasi laporannya yang kedua dapat ditetapkan bahwa pindahan tamatan HIS yang meneruskan ke MULO untuk tahun 1915/1919 sebesar 14,4% dan dalam tahun 1927 sebesar 43,9%. Pindahan

tamatan murid Bumiputera dari sekolah rendah Barat pada umumnya meneruskan ke MULO dan sekolah menengah (umum) berjumlah 3,1% dalam tahun 1910/1914, 21% dalam tahun 1915/1919 dan 45,1% dalam th.1927. Untuk meneruskan ke sekolah kejuruan dalam tahun 1927 berjumlah 8,8%. Jadi seluruhnya yang meneruskan belajar dalam tahun 1927 berjumlah $45,1\% + 8,8\% = 53,9\%$.

Penelitian khusus yang diadakan Departemen Pendidikan dan Agama dalam medio 1929 di Jawa dan Madura, menghasilkan persentase yang lebih tinggi. Dari tamatan HIS di Jawa dan Madura ternyata tidak kurang dari 76% meneruskan belajar dengan perincian 57% ke sekolah untuk pendidikan formil umum dan 19% ke sekolah kejuruan. Angka-angka ini dapat lebih dipercayai daripada angka-angka Komisi Pendidikan, karena tidak ditanyakan kepada murid setelah tamat HIS akan meneruskan ke sekolah apa, melainkan dengan diadakan penelitian di sekolah-sekolah lanjutan, berapa jumlah murid baru yang berasal dari HIS. Persentase yang tinggi untuk tahun 1929 membenarkan kesimpulan, bahwa jumlah murid yang ingin melanjutkan sekolah akan terus naik dan harus diingat bahwa dalam perbandingan, lebih banyak tamatan HIS di Jawa daripada di luar Jawa yang melanjutkan belajar.

Dengan angka-angka tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tanpa didasarkan kepada pertimbangan subyektif dan spekulatif atau pengamatan terbatas berdasarkan perkiraan, HIS dalam segalanya telah menjadi lembaga pendidikan persiapan untuk meneruskan sekolah, tidak lagi sebagai tempat pembibitan untuk pegawai rendah. Maka karena itu masalah mengenai arti mata pelajaran bahasa Melayu untuk kegunaan praktis dalam kehidupan dalam masyarakat menjadi kurang penting dengan adanya kenaikan secara besar-besaran dalam jumlah orang Bumiputera yang pandai berbahasa Belanda.

Corak HIS sebagai akibat perkembangan dengan cepat dalam jumlah tipe sekolah ini terutama sejak tahun 1921, dan kenaikan jumlah sekolah untuk pendidikan lanjutan, mengalami perubahan mendasar. Oleh karena itu keberatan paedagogis terhadap beban berlebihan dalam program HIS dapat ditiadakan. Oleh Schrieke diakui, bahwa sebagai

akibat dari posisi mata pelajaran bahasa Belanda dalam kurikulum, HIS merupakan suatu monstrum (mahluk seram yang penuh cacat) di bidang pendidikan, tetapi tidak dapat dihindarkan sebagai produk sewajarnya dalam struktur sosial dalam jaman kolonial. Rencana pembaharuan Dr. G.J.Nieuwenhuis, yang bermaksud mengadakan perbaikan, ditolak oleh masyarakat Bumiputera sendiri. "Schakelschool" disesuaikan dengan gagasan Nieuwenhuis itu, tetapi masih tetap kurang populer dari pada HIS. Jumlah putus sekolah yang besar di HIS (60%) dapat dipastikan untuk dicari sebabnya dalam kemampuan murid untuk menyerap pelajaran dalam bahasa asing. Tuntutan luar biasa kepada intelegensi anak-anak remaja untuk dapat mengikuti pelajaran dalam bahasa asing yang pada umumnya tidak ditunjang oleh lingkungan sosial mereka itu sendiri. Maka karena itu mutu tamatan HIS dalam pengetahuan bahasa Belanda tidak dapat disetarafkan dengan tamatan sekolah rendah Eropa. Untuk meningkatkan kemampuan murid maka pada berbagai HIS ditambahkan kelas persiapan (voorklasse), yang secara praktis bukan sebagai kelas taman kanak-kanak atau kelas Frobel, melainkan harus dianggap sebagai kelas satu terselubung atau tersamar, walaupun terhadapnya timbul keberatan-keberatan pedagogis. Lain dari pada itu tamatan HIS sebelum masuk ke MULO harus melalui kelas persiapan (vooklasse) pula.

Uraian di atas dimaksudkan oleh Schrieke untuk menunjukkan, bahwa mutu HIS tertekan ke bawah bukan semata-mata oleh kejamakan bahasa (veeltaligheid). Tetapi dapat dimengerti keinginan dari orang-orang yang berkepentingan agar dicurahkan kepada peningkatan mutu pendidikan di HIS, sehingga dapat menyamai sekolah rendah Eropa. Tetapi ide ini tidak akan tercapai selama dalam lingkungan rumah tangga murid-muridnya penggunaan bahasa Belanda tidak ditunjang. Perbaikan diusahakan dengan menambah pada HIS guru-guru Belanda dan terakhir dengan memperbaiki sekolah pendidikan guru, yang harus menghasilkan guru-guru Bumiputera yang bermutu lebih tinggi.

Penelitian Komisi Pendidikan memberikan kesimpulan bahwa "kleinambtenaar" Bumiputera mengalami depresiasi (kelebihan) di pasaran kerja, bukan hanya karena diakibatkan oleh over produksi yang

bersifat relatif, tetapi juga oleh sebab yang bersifat kualitatif. Selain itu disadari sebagai kewajiban dalam hubungan dengan kepentingan pendidikan di sekolah yang lebih tinggi untuk melalui segala pengorbanan memelihara taraf dan mutu Eropa. Dengan berpegang teguh kepada norma-norma keras (juga dengan mengadakan diferensiasi dan ujian akhir negara) harus diperbaiki mutu MULO, yang dalam tahun-tahun belakangan sangat menurun dan secara otomatis mempengaruhi AMS. Dengan sendirinya HIS harus ikut diperbaiki mutunya.

Pertanyaan yang masih harus dijawab ialah apakah mata pelajaran bahasa Melayu harus sama sekali dihilangkan dari kurikulum di HIS ataukah kepadanya diberikan tempat yang kurang terhormat sebagai mata pelajaran fakultatif. Kata Schrieke, jawaban kepada pertanyaan ini tidak perlu ragu-ragu. Mengingat kegunaan bahasa Melayu dalam masyarakat dan kenyataan, bahwa persentase yang tidak boleh diabaikan dari tamatan HIS yang harus terjun dalam praktek kehidupan dalam masyarakat, maka perlu dibuka kesempatan di HIS untuk memperoleh pengetahuan bahasa Melayu. Sebagai mata pelajaran fakultatif, bahasa Melayu diberikan terbatas untuk kelas 6 dan 7, dan diadakan pada petang hari, sedangkan 9 jam pelajaran dalam seminggu yang menjadi bebas dipergunakan untuk memperdalam bahasa Belanda dan bahasa daerah, dengan demikian pelajaran bahasa Belanda pada petang hari dapat dihilangkan. Dengan diadakan pengajaran fakultatif bahasa Melayu pada waktu petang dapat dipenuhi keinginan orang-orang yang tidak menghendaki penghapusan mata pelajaran bahasa Melayu. Dengan memindahkan mata pelajaran itu pada waktu petang, maka murid-murid yang tidak mengikutinya tidak perlu disibukkan dengan kegiatan yang hanya membuang-buang waktu saja, sedangkan jika ada murid yang tidak mengambil mata pelajaran fakultatif itu, pemerintah tidak dapat dipersalahkan, tetapi karena kelalaian orang tua atau wali anak itu sendiri. Penyelesaian masalah pengajaran bahasa Melayu secara demikian itu juga sama dengan memenuhi keputusan perserikatan guru-guru Bumiputera.

Oleh Schrieke juga tidak dilupakan keberatan yang dapat dilon-tarkan terhadap mata pelajaran fakultatif bahasa Melayu, bahwa dengan

demikian pengajaran bahasa Melayu di HIS secara praktis dihapuskan, karena murid-murid akan memilih jalan paling mudah untuk mencapai tanda tamat belajar di HIS dengan tidak mengambil mata pelajaran fakultatif itu. Keberatan itu malahan diperbesar oleh penempatan jam mata pelajaran itu pada waktu petang. Karena itu dianggap perlu untuk menetapkan bahwa murid-murid yang dengan teratur dan dengan hasil baik mengikuti mata pelajaran itu, pada ijazahnya diberi catatan nilai untuk mata pelajaran tersebut. Dengan demikian, kata Schrieke, dilaksanakan percobaan secara murni. Dengan demikian keputusan tentang nilai bahasa Melayu yang diajarkan pada HIS, bukanlah terletak pada orang tua (yang tidak berwewenang) tetapi pada masyarakat sendiri.

Suatu pertanyaan yang sukar dijawab oleh Schrieke ialah jenis bahasa Melayu apa yang harus diajarkan. Secara dangkal ada kecenderungan dalam masyarakat untuk mengatakan, bahwa bahasa Melayu Riau untuk diajarkan di Jawa tidak akan ada gunanya. Tetapi pada waktu itu ada bermacam-macam pendapat tentang apa yang diinginkan sebagai pengajaran bahasa Melayu yang praktis. Para pendukungnya menghendaki supaya diajarkan bahasa Melayu yang digunakan dalam pers Indonesia dan Cina serta juga seperti yang digunakan dalam surat-menyurat dalam pemerintahan. Tetapi belum ada keseragaman aturan atau tata bahasa dalam penggunaan bahasa Melayu tersebut. Ada beberapa penasehat bahkan beranggapan begitu jauh, sehingga mereka mengatakan tentang pengajaran bahasa "Melayu Pasar", dimana orang tidak dapat mengutarakan pemikiran-pemikirannya dalam bahasa tersebut. Kesukaran yang lain ialah mengenai buku-buku pelajaran yang diperlukan untuk pengajaran bahasa Melayu seperti yang dikehendaki. Karena itu untuk sementara akan tetap diajarkan bahasa Melayu Riau di sekolah, tetapi dengan tidak menutup kemungkinan untuk mengarahkan pengajarannya kepada kebutuhan yang praktis.

Kepada pemerintah, Schrieke menyampaikan saran untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai mata pelajaran fakultatif di HIS untuk Jawa dan Madura, dan diadakan pada waktu petang. Tetapi untuk

daerah-daerah di luar Jawa dan Madura pengajaran bahasa Melayu dipertahankan tanpa diubah statusnya, yaitu bahasa diajarkan sebagai bahasa daerah, bukan sebagai bahasa asing seperti di Jawa dan Madura. Dewan Hindia-Belanda dalam nasehatnya tanggal 18 Oktober 1929 nomor X kepada Gubernur Jenderal De Graeff menilai B.J.O. Schrieke sangat berhasil dalam argumentasinya mengenai penyelesaian masalah pengajaran bahasa Melayu di HIS itu. Gubernur Jenderal juga setuju dengan Dewan Hindia Belanda, seperti dinyatakan dalam surat Sekretaris Pemerintah (Negara) I tanggal 28 Oktober 1929 nomor 2330/A2 dan dikeluarkan keputusan pemerintah dalam Lembaran Negara 1930 nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 12285. Pengajaran bahasa Belanda pada waktu petang di HIS di luar Jawa dan Madura juga dihapuskan, karena untuk mata pelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa daerah tidak perlu disediakan jam pelajaran tambahan. Dewan Rakyat sangat berkeberatan terhadap penghapusan pengajaran bahasa Belanda pada waktu petang, dengan diajukannya mosi Sutadi tanggal 29 Agustus 1930, yang diterima dengan 38 lawan 4 suara, supaya penetapan tersebut dibatalkan. Tetapi terutama atas pertimbangan penghematan pengajaran bahasa Belanda pada waktu petang dihapuskan, demikian juga mata pelajaran wajib bahasa Melayu di HIS dan "Schakelschool" di luar Jawa dan Madura. (Lembaran Negara 1932 nomor 46).

PENATAAN KEMBALI

PENDIDIKAN DASAR - DESENTRALISASI PENDIDIKAN RAKYAT

102. Dari Menteri Daerah Jajahan (De Graaff) kepada Gubernur Jenderal (De Graeff), 8 Agustus 1931

Dalam bulan Pebruari 1930 oleh B.J.O. Schrieke sebagai Direktur Pendidikan dan Agama diajukan usul untuk mengadakan reorganisasi pendidikan dasar. Penataan kembali yang dimaksudkan pada pokoknya ialah sebagai berikut. Disamping "Sekolah Rendah Belanda" yang disediakan untuk orang Belanda, tetapi dalam jumlah terbatas dapat

diterima murid Indonesia dan Cina (berdasarkan kriterium lingkungan sosial) akan diselenggarakan suatu "Sekolah Rendah Umum", yang terbagi atas bagian bawah ("onderbouw" terdiri dari Bagian A dan B), dan bagian atas ("bovenbouw") terdiri dari bagian A dan B.

Dengan mengadakan suatu sekolah rendah umum ini prinsip sekolah umum akan ditarik ke bawah, dan sistim deferensiasi di MULO sudah akan diadakan di sekolah rendah.

Gubernur Jenderal De Graeff sesuai dengan saran Dewan Hindia-Belanda menghendaki menunda pengambilan keputusan mengenai dasar-dasar reorganisasi sampai diterima usul-usul terakhir Komisi Pendidikan Bumiputera-Belanda.

Menurut Schrieke, dalam "onderbouw" yang disebutnya sebagai bagian A adalah sekolah rendah umum dimana akan diselenggarakan pengajaran rendah elementer secara bulat dengan bahasa pengantar bahasa daerah. Dalam bagian B, disamping kurikulum yang sama seperti bagian A dan dengan pengantar bahasa daerah, juga diadakan mata pelajaran bahasa Belanda.

Dalam "bovenbouw" bagian A yang lamanya 2 atau 3 tahun diadakan diferensiasi lokal, yang diarahkan kepada tuntutan praktek mengenai pengajaran akhir dan disesuaikan kepada kebutuhan lokal. Secara berangsur-angsur bahasa Belanda diberikan sebagai mata pelajaran, dan bagian B yang lama pelajarannya 4 tahun yang dapat melanjutkan ke MULO. Dewan Hindia-Belanda dalam nasehatnya tanggal 30 Mei 1930 nomor I berpendirian, bahwa tidak perlu diadakan pertukaran pikiran pendahuluan dengan pemerintah agung di negeri Belanda mengenai rencana reorganisasi tersebut. Menurut pasal 179 Undang-Undang Ketata Negara Hindia Belanda (Indische Staats Regeling) dikemukakan oleh Dewan, bahwa penyelenggaraan sekolah negeri seluruhnya ada pada wewenang badan-badan yang ada di Hindia-Belanda. Selain itu Dewan Hindia-Belanda berpendapat, bahwa pengaturan secara baru sekolah untuk orang Bumiputera dan Cina tidak begitu prinsipil dan penting, karena itu tidak ada keharusan meminta pertimbangan dari Menteri Daerah Jajahan. Tetapi Menteri De Graaff memberitahukan dengan

telegram tanggal 19 Juli 1930, bahwa suatu usul adalah sangat penting, tetapi demi kepentingan politik diharapkan sekali untuk menanggukkan pengajuan rencana usul tersebut kepada Dewan Rakyat sampai ada pertimbangan dari Menteri. Telegramnya 29 Juli 1930 juga mengatakan, bahwa ia tetap sangat berkeberatan terhadap pengajuan rencana usul Schrieke yang tergesa-gesa kepada Dewan Rakyat. Pada tanggal 1 Agustus Menteri mengulangi lagi keberatannya, tetapi ia menyatakan bahwa boleh saja mengumumkan kepada publik sehingga umum dapat menyatakan pendapatnya. Gubernur Jenderal pada pembukaan sidang 1930-1931 pada tanggal 16 Juni sudah menyatakan bahwa akan disampaikan kepada Dewan Rakyat usul-usul mengenai reorganisasi sekolah dasar, tetapi pemerintah tidak akan mendesak kepada Dewan dengan cara apa-pun untuk menyelesaikan urusan itu dalam sidang itu juga. Bagian terakhir dari pernyataan itu memudahkan penanggukan yang diminta oleh Menteri. Dengan surat pengantar tanggal 5 Agustus 1930 kepada Dewan Rakyat, disampaikan nota mengenai reorganisasi sekolah dasar dengan diiringi nota historis mengenai azas-azas politik pendidikan untuk Bumiputera, dan pemerintah memberitahukan bahwa dalam peninjauan lebih jauh ke dalam masalah yang dianggap sangat penting itu masih diperlukan pertimbangan; maka usul-usul yang dimaksudkan belum dapat diajukan dalam bentuk perumusan yang definitif kepada Dewan Rakyat.

Dengan telegram tanggal 19 Juni 1931 nomor 161, Gubernur Jenderal menyampaikan kesimpulannya mengenai rencana reorganisasi Schrieke kepada Menteri, bahwa dalam rencana itu dilihatnya pemecahan secara logis dan benar beberapa kesulitan yang berangsur-angsur menjerat sistim pendidikan di Hindia Belanda dalam perkembangannya yang bagaimana baiknya juga harus menampung keinginan dari segala kelompok penduduk dan berbagai lapisan sosial. Dan untuk kepentingan negara yang mendesak diharapkannya usul rencana reorganisasi itu dapat disetujui. Menteri De Graaff dalam telegram jawabannya tanggal 20 Juli 1931 nomor 171 memberitahukan keberatan-keberatan utamanya. Dalam surat tanggal 8 Agustus 1931 nomor 1/612

kepada Gubernur Jenderal diuraikan oleh Menteri pandangannya mengenai dasar-dasar yang harus dijadikan landasan pembaharuan sistem pendidikan di Hindia-Belanda.

Sebagai pendahuluan uraiannya dikemukakan beberapa catatan mengenai garis-garis besar kesulitan yang harus diatasi. Dalam telegramnya tanggal 12 Juni 1931 nomor 141, Menteri telah mendesak supaya pembahasan lebih lanjut mengenai rencana ordonansi penyerahan penyelenggaraan sekolah desa kepada kabupaten dan kotapraja (*stadsgemeente*) dihentikan dahulu. Ia menaruh keberatan terhadap pembahasan masalah ini di luar hubungan dengan masalah reorganisasi sistem pendidikan.

Menurut Menteri, ada dua jalur dalam sistem pendidikan dasar di Hindia-Belanda, yaitu jalur pendidikan rendah Eropa dan jalur pendidikan rendah Bumiputera. Dalam perkembangan dan perluasan penyediaan pendidikan dalam masyarakat kolonial, kedua bentuk ini menimbulkan persoalan-persoalan khusus, tetapi menurut Menteri masalah dalam dua macam jalur pendidikan itu dalam perkembangan yang bertahun-tahun tidak pernah menimbulkan kesulitan-kesulitan yang benar-benar sangat gawat. Lain halnya mengenai tipe sekolah yang biasanya disebut Sekolah Rendah Barat untuk Bumiputera (dan kelompok penduduk bukan Eropa). Dalam perkembangan tipe sekolah ini banyak timbul kesulitan dan terjadi kejutan-kejutan yang tidak mengembirakan. Tipe sekolah ini diciptakan untuk memenuhi tuntutan yang sangat langka dialami dalam sejarah dunia, yaitu tuntutan kepada pemerintah kolonial asing untuk mengantarkan jutaan penduduk yang berlainan ras yang ada di bawah kekuasaannya ke dunia ilmu pengetahuan Barat, yang baru saja terbuka bagi sekelompok kecil dari jutaan penduduk tersebut.

Menurut Menteri jika dalam sistem pendidikan mau diadakan perbaikan kesalahan-kesalahan, maka harus diambil tindakan yang harus dibatasi pada bagian yang merupakan sumber dari kesulitan, dan yang harus menangani bagian ini sesuai dengan tuntutan kesulitan yang timbul dalam bagian itu. Oleh karena itu sekolah rendah Eropa dan

sekolah rendah Bumiputera dalam rencana reorganisasi itu semestinya hanya akan dibawa sejauh yang dimungkinkan dalam hubungan umum saja. Karena itu Menteri berkeberatan terhadap rencana Schrieke, yang menurut Menteri juga akan mengadakan perubahan pada sekolah rendah Bumiputera terlalu banyak daripada yang dianggapnya perlu.

Dalam publikasi laporan Komisi Pendidikan telah cukup disoroti banyak aspek dari kesulitan yang timbul dalam perkembangan sekolah rendah Barat untuk kelompok penduduk bukan Eropa. Perubahan sekolah kelas satu menjadi HIS dalam tahun 1914 dapat dicatat sebagai langkah penting pertama di Hindia-Belanda untuk menempuh jalan pendidikan menuju ke ilmu pengetahuan Barat bagi jutaan penduduk yang dijajah. Langkah itu diambil pada waktu mulai dinyatakan keinginan kuat kepada pendidikan bercorak Barat oleh orang-orang di kalangan yang makin meluas dalam masyarakat Hindia-Belanda yang tertarik perhatiannya kepada ekonomi dan kebudayaan Barat. Perkembangan cepat dari HIS dalam waktu yang singkat menimbulkan begitu banyak keberatan terhadap coraknya yang istimewa sebagai sekolah rendah Barat untuk Bumiputera, sehingga menjadi keharusan untuk mengadakan perubahan. Kesulitan terbesar dihadapi sebagai akibat dari perkembangan tersebut, diuraikan oleh Menteri sebagai berikut:

Perluasan tipe sekolah ini dalam tempo begitu cepat membawakan kepada Pemerintah suatu beban yang tidak ter pikul baik pun di bidang finansial maupun di bidang personalia. Walaupun jumlah murid yang mendapat tempat di HIS hanya bagian sangat kecil dari penduduk Indonesia, biaya penyelenggaraan tipe sekolah ini meningkat sangat tinggi. Perhitungan Komisi Pendidikan menunjukkan bilangan-bilangan yang dapat memberikan kesan betapa besar beban yang harus ditanggung, jika meneruskan ke arah jalan yang sudah ditempuh. Jika dalam 25 tahun HIS mau dijadikan sekolah untuk rakyat umum, maka anggaran untuk menutupi biaya eksploitasi saja tiap tahun harus dinaikkan dengan 40 juta gulden, atau untuk selama 100 tahun dengan 10 juta gulden setiap tahun. (Publikasi Komisi

Pendidikan nomor 7a, halaman 9). Biaya itu tidak akan terpicul oleh budget Hindia-Belanda, kata Menteri. Kesulitan yang sama besarnya ialah tidak tersedianya personalia pengajar yang sangat diperlukan, jika dikehendaki perluasan sekolah itu dengan cara teratur. Produksi tenaga guru di negeri Belanda sangat terbatas, dan tidak dapat diharapkan bahwa akan memberikan surplus terus-menerus di atas kebutuhan negeri Belanda sendiri untuk membantu sekolah di Hindia-Belanda yang memerlukan guru Belanda.

Penyelenggaraan HIS itu selain menimbulkan berbagai konsekuensi yang tidak terpicul, juga ternyata dalam penilaian di bidang pedagogis dan sosial sangat tidak efisien. Angka-angka mengenai pelepasan murid di HIS dan HCS menunjukkan bahwa kira-kira 60% tidak mencapai tujuan sampai tamat. Selain itu murid yang memperoleh ijazah tetapi tidak mendapat lapangan kerja, jumlahnya makin naik, sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak produktif sebagaimana mestinya. Akhirnya, kata Menteri, perlu diperhatikan lembaga pendidikan untuk pendidikan rendah Barat yang menghabiskan biaya tinggi itu, hanya dapat melayani bagian minimal dari penduduk, sedangkan perluasan sekolah desa yang sangat elementer hanya sangat sedikit dapat mengejar pertambahan jumlah penduduk sehingga dengan sangat lambat dapat mengurangi buta huruf. Menurut publikasi laporan Komisi Pendidikan nomor 12 halaman 76, jika perluasan sekolah desa dilaksanakan dengan tempo sama maka sesudah 167 tahun orang buta huruf yang terakhir baru dapat terkejar. Publikasi ini tidak boleh dinilai sebagai suatu pemberian kesan belaka, tetapi juga menyuruh berpikir dan bertanya, apakah tidak sebagian besar dari biaya yang disediakan untuk pendidikan, dihabiskan oleh sekolah rendah Belanda.

Dewan Hindia-Belanda dengan pandangannya dalam nasehat tanggal 5 Juni 1931 nomor XX berpendapat bahwa menjadi keharusan untuk mengadakan pembaharuan, karena penyediaan fasilitas sekolah yang ada mengalami kemacetan. Pembaharuan yang dimaksudkan itu sesuai dengan rencana Schrieke, yang menegaskan tidak berpretensi untuk dapat

memecahkan dengan tuntas kesulitan masalah keuangan dalam pengadaan pendidikan atau sekolah, karena tidak mungkin menyelenggarakan dan melaksanakan suatu sistim pendidikan yang secara sempurna dapat melayani kebutuhan tanpa pengorbanan finansial dari negara. Maksud rencana reorganisasi itu ialah memecahkan masalah kesulitan dengan biaya yang dapat dipikul. Menteri menyetujui pandangan Dewan Hindia-Belanda, bahwa tindakan yang harus diambil diarahkan kepada akar kesulitan. Arah yang harus ditempuh ialah membatasi sekolah rendah dengan pendidikan Barat sedemikian rupa sehingga pengelolaannya di bidang finansial dan personalia ada dalam pencapaian dengan biaya yang dapat disediakan dan juga dapat dijamin kegunaan efektivitasnya. Menjadi suatu keharusan untuk menempuh jalan ke arah itu.

Keberatan prinsipial Menteri terhadap rencana reorganisasi Schrieke ialah, karena tendensinya justru sangat berlawanan dengan arah yang dikehendaki oleh Menteri. Dalam rencana itu diterapkan gagasan untuk tiap kali membangun satu bagian atas ("bovenbouw") baru di atas beberapa bagian bawah ("onderbouw") yang sudah ada, sehingga untuk selama beberapa tahun tanpa pengeluaran biaya baru dapat diatasi kenaikan jumlah murid yang akan masuk, sedangkan untuk kelas-kelas tinggi (yaitu dalam "bovenbouw") tidak akan terjadi banyak kenaikan jumlah murid. Menteri beranggapan kebalikannya mengenai kenaikan jumlah murid di "bovenbouw". Bahaya besar terdang untuk memperkuat kenaikan jumlah murid di "bovenbouw", sedangkan laju jumlah murid ke "onderbouw" B, yang direncanakan dengan bahasa Belanda sebagai mata pelajaran, tidak terbandung karena tidak disediakan rem untuk menghentikan laju murid. Disamping itu terbuka kemungkinan melalui kelas peralihan ("schakel-klasse") masuk dari "onderbouw" A yang bercorak Bumiputera ke "onderbouw" B yang bercorak Barat.

Menteri melihat pada rencana untuk mengadakan secara berangsur-angsur mata pelajaran bahasa Belanda di "bovenbouw" A sebagai suatu rencana yang sangat tidak bijaksana untuk mengadakan penetrasi unsur Barat yang lebih jauh ke dalam sekolah untuk Bumiputera. Dengan

demikian di sekolah kelas dua akan dimasukkan secara berangsur-angsur mata pelajaran bahasa Belanda. Menurut Menteri, jika sekali sudah ada sebagian dari kelas dua dengan mata pelajaran bahasa Belanda, maka apabila keuangan negara dapat memberikan kelonggaran akan timbul desakan dari dalam dan dari luar Dewan Rakyat untuk memperbanyak dan makin memperluas jumlah sekolah dengan mata pelajaran bahasa Belanda. Dan pemerintah tidak akan dapat menolak. Dengan demikian, kata Menteri, rencana reorganisasi Schrieke itu sama sekali tidak menyediakan rem terhadap laju jumlah murid ke "bovenbouw" B dengan bahasa Belanda sebagai mata pelajaran dan bahasa pengantar.

Menteri menilai rencana itu sebagai tidak berhasil untuk membatasi luas implementasi sekolah rendah Barat, sehingga pengelolaannya dalam bidang finansial dan personalia tidak akan dapat dikuasai, sedangkan untuk mempertinggi efektivitasnya yang berguna rencana itu hanya menunjukkan penyelesaian yang setengah-setengah saja. Rencana itu membuka kemungkinan bagi murid yang tidak kuat dalam bahasa Belanda untuk pindah ke "bovenbouw" A. Dengan demikian diadakan seleksi (atau menurut Menteri mengabaikan metode seleksi yang sudah diterapkan di "Schakelschool"). Kritik dilancarkan oleh Menteri, bahwa seleksi yang diharapkan itu baru terjadi setelah melalui "onderbouw" B, sehingga biaya pendidikan menjadi lebih tinggi, yang sebenarnya tidak perlu. Keberatan terhadap rencana penataan kembali Schrieke itu perlu dikemukakan oleh Menteri, karena keadaan pada masa itu mengharuskan mengadakan penghematan melalui tindakan-tindakan yang kuat dan efektif. Menurut Menteri, reorganisasi pendidikan atau sekolah rendah yang diperlukan harus didasarkan pada landasan sebagai berikut:

I. Untuk kelompok penduduk Eropa dan kelompok yang relatif kecil dari penduduk yang berbaaur dalam pergaulan dengan kelompok penduduk Eropa, tetap dipertahankan sekolah rendah Eropa, yang jika perlu boleh diganti namanya dengan sekolah rendah Belanda. Karena berbagai alasan seperti penyediaan personalia pengajar,

konkordansi yang sempurna dengan sekolah rendah di negeri Belanda, dan penyebaran sekolah di seluruh Hindia-Belanda, penyelenggaraan sekolah ini harus ada dalam wewenang pemerintah pusat. Lebih jauh dapat dipertimbangkan pengawasan dapat diserahkan sampai seberapa jauh kepada pemerintahan propinsi.

II. Untuk semua kelompok penduduk lainnya pendidikan permulaan dalam prinsip diberikan di sekolah desa yang biasanya selama tiga tahun. Hanya jika sekolah desa itu tidak ada atau tidak ada kemungkinan untuk mengadakannya, sebagai gantinya digunakan sekolah standar yang sempurna (sekolah kelas dua). Dalam pembinaan pendidikan untuk tahun-tahun selanjutnya, perhatian terutama harus dicurahkan kepada perluasan sekolah desa yang terus-menerus dan juga kepada peningkatan mutu pendidikannya. Perhatian khusus harus diberikan kepadanya, kata Menteri. Sebab selama masih dua pertiga dari jumlah anak-anak yang sudah berusia sekolah tidak mendapat pendidikan yang paling elementer, dan selama kenaikan jumlah murid di sekolah desa masih belum dapat mengimbangi kenaikan seluruh jumlah penduduk, serta selama dengan demikian pemberantasan buta huruf hanya baru membuat kemajuan yang tidak berarti, maka dari sudut sosial-ekonomi dan dari sudut pendidikan rakyat tidak dapat dibenarkan penggunaan bagian terbesar dari pada anggaran biaya untuk sekolah yang hanya menampung bagian minimum dari jumlah penduduk. Usaha terbesar harus dipusatkan kepada perluasan sekolah desa yang merupakan "onderbouw" umum bagi sekolah rendah.

Dalam hubungan itu Menteri menjelaskan keberatannya terhadap pembahasan rancangan ordonansi penyerahan sekolah desa kepada kabupaten dan kotapraja. Rencana ini bertujuan menyerahkan penyelenggaraan sekolah desa kepada kabupaten dan kotapraja, yang untuk sementara terbatas di propinsi Jawa Barat. Menurut Menteri, apabila berbicara tentang penyerahan suatu tugas kepada kabupaten atau kesatuan sosial yang otonom, selalu dianut gagasan mengenai penyerahan tugas dari pusat kepada badan-badan atau instansi-

instansi yang lebih rendah, yaitu desentralisasi. Tetapi rencana ordonansi yang disebut-sebut bertujuan kebalikannya yaitu bukannya menyerahkan sedikit tugas kepada badan-badan di bawahnya, melainkan mengambil tugas dari desa dan melimpahkannya kepada kabupaten atau kotapraja. Itu bukan desentralisasi, kata Menteri, melainkan sentralisasi. Dengan melihat dari sudut kebijaksanaan pemerintahan, Menteri sangat berkeberatan untuk mengambil dari desa sebagai satu-satunya kesatuan sosial berdasarkan adat yang masih tinggal di Jawa dan Madura, tugasnya di bidang pendidikan. Kecuali jika sudah tidak ada lagi harapan untuk meningkatkan desa itu dengan mempertinggi kecerdasan penduduknya ke taraf kehidupan otonomi yang lebih kuat. Diingatkannya kepada laporan akhir hasil penelitian Presiden F.A.E. Lacculle mengenai otonomi desa di Jawa dan Madura, 1929, yang mengemukakan bahwa desa sama sekali tidak bersikap pasif terhadap sekolah desa. Ia menasehatkan untuk mengikut sertakan desa dalam penyelenggaraan sekolah desa. Pendapatnya itu berbeda dengan memori penjelasan mengenai ordonansi penyerahan tersebut. Menurut Menteri, untuk mempopulerkan sekolah desa maka orang desa atau paling sedikitnya pamong desa harus lebih disadarkan bahwa sekolah desa adalah kepunyaan mereka. Maka penyerahan sekolah desa kepada kabupaten dianggap sebagai suatu langkah mundur yang patut disesalkan. Ia memperingatkan supaya jangan menimbulkan kesan bahwa sekolah desa itu sekolah pemerintah, tetapi harus disadarkan bahwa sekolah desa itu adalah sekolah rakyat kepunyaan masyarakat desa. Jika perlu untuk pembiayaannya harus diberi subsidi oleh pemerintah. Untuk memelihara corak khas kedesaannya, perlu diadakan pengawasan tersendiri terhadap sekolah desa. Untuk itu perlu diadakan Kantor Inspeksi di pusat Propinsi yang akan mengatur pengawasan sehari-harinya, yang dilaksanakan oleh pegawai-pegawai dengan pangkat sederhana. Mereka ini diangkat oleh propinsi untuk dibantu-bantukan kepada kabupaten.

III. Untuk melayani kepentingan mayoritas yang membutuhkan pendidikan lanjutan, diadakan "bovenbouw" murni untuk Bumiputera dan boleh diberi nama sekolah kelas dua untuk meneruskan penggunaan istilah yang sudah ada dan untuk dibedakan dari sekolah negeri kelas satu. Penyelenggaraan sekolah kelas dua yang lamanya belajar dua atau tiga tahun, ditugaskan kepada pemerintahan kabupaten dan kotapraja sedangkan pengawasannya diadakan oleh pemerintahan propinsi.

IV. Untuk menyediakan kebutuhan pendidikan bagi beberapa kalangan dalam masyarakat Bumiputera yang lebih berorientasi kepada sekolah rendah yang sedikit atau banyak bercorak Barat, diciptakan "bovenbouw" terdiri dari dua bagian dan didahului oleh suatu kelas peralihan. Di kelas peralihan tersebut diajarkan secara elementer bahasa Belanda sebagai mata pelajaran, kemudian diadakan seleksi untuk ke "bovenbouw", yang terdiri dari:

- a. Sekolah negeri kelas satu (lama belajarnya dua, tiga, atau empat tahun menurut kebutuhan lokal), yang pengajarannya sama dengan sekolah kelas dua ("bovenbouw", sekolah desa) tetapi di sekolah kelas satu diajarkan bahasa Belanda sebagai mata pelajaran.
- b. Sekolah empat tahun dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan untuk melanjutkan ke MULO (melalui kelas persiapan). Dalam sekolah ini, jika perlu diadakan diferensiasi menurut kebangsaan murid (Bumiputera-Belanda, Cina-Belanda, dan Arab-Belanda).

Penyelenggaraan dan pengawasan sekolah-sekolah tersebut sub. IV (kelas sambungan dan "bovenbouw" berjalur dua) ditugaskan kepada pemerintahan propinsi, sedangkan penyediaan personalia guru dan pimpinan pengawasan tetap ada pada pemerintahan pusat.

Dalam garis-garis besar gagasan pembaharuan sistim persekolahan yang digambarkan oleh Menteri itu, disediakan cukup ruang gerak untuk mengisi berbagai tambahan yang dianggap perlu dan menyelesaikan seluruhnya secara lengkap. Dalam garis-garis besar hanya

diadakan sedikit perubahan pada sekolah rendah Bumiputera dan Eropa. Kombinasi sekolah desa dengan "bovenbouw" sekolah desa ("vervolg-school") sudah banyak diadakan, sehingga di tempat-tempat yang sudah ada sekolah desa tidak perlu didirikan sekolah standar (sekolah kelas dua yang lengkap). Perubahan paling mendalam yang dikehendaki Menteri ialah perubahan pada HIS, HCS, dsb. Direncanakannya dua pembatasan, yaitu: (a) pengurangan laju jumlah murid yang masuk HIS (dan HCS); (b) pengurangan jumlah kelas tahun ajaran pada tipe sekolah yang mahal itu. Ia mengakui, bahwa bagian dari rencananya tersebut akan ditentang keras oleh kalangan tertentu.

Menteri mengatakan, bahwa Dewan Pendidikan dalam sarannya mengenai pembaharuan sistim pendidikan rendah menyatakan secara unanim (Publikasi nomor XI, Reorganisasi Sekolah Rendah, hal.14 dan 15), bahwa menurut Dewan itu berdasarkan pertimbangan pedagogis tidak ada yang lebih baik daripada penghapusan bahasa Belanda di "onderbouw" Sekolah Rendah, bahkan juga bahasa Belanda sebagai mata pelajaran. Tetapi mayoritas dalam Dewan itu memberikan konsesi kepada rencana Schrieke untuk mengadakan bahasa Belanda sebagai mata pelajaran dalam "onderbouw" B. Menurut Menteri, apabila sekali diadakan mata pelajaran bahasa Belanda, maka dari beberapa pihak akan diadakan desakan untuk memperbanyak sekolah dengan mata pelajaran bahasa Belanda. Pemerintah Hindia-Belanda tidak akan selalu dapat mengelak terhadap desakan itu, sehingga dengan demikian akan terjadi perluasan "onderbouw" berorientasi kepada pendidikan bercorak Barat dengan akibat membawa perluasan baru kepada "bovenbouw" dengan pendidikan bercorak Barat. Dengan demikian dimulai lagi lingkaran setan yang tidak dapat didobrak. Karena itu Menteri mau menggunakan kesempatan untuk menghilangkan pengajaran bahasa Belanda dari "onderbouw" sekolah untuk penduduk bukan Eropa. Tindakan ini dapat dipertanggung jawabkan di bidang pendidikan. Pengalaman dengan sekolah peralihan menunjukkan bahwa murid-murid yang terpilih setelah mendapat pengajaran permulaan selama tiga tahun, selama melanjutkan belajar beberapa tahun mampu

untuk mencapai tingkat kecerdasan yang diharapkan, sehingga terjamin untuk dapat meneruskan ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Dalam rancangan Menteri itu azas "schakelschool" itu lebih banyak diterapkan. Seleksi pertama sesudah sekolah permulaan diadakan lagi dalam kelas sambungan, sehingga pembatasan jumlah calon murid ke "bovenbouw" dengan bahasa pengantar Belanda dapat menahan perluasan "bovenbouw" tersebut. Sekaligus kegunaan efektivitasnya juga dinaikkan.

Menteri berkeyakinan bahwa pembatasan laju jumlah murid ke "bovenbouw" bercorak Barat hanya dapat dilaksanakan apabila diciptakan suatu tipe sekolah yang dapat menyimpangkan laju jumlah murid ke HIS yang ada. Ia bertitik tolak dari pemikiran, bahwa orang-orang yang jumlahnya makin meningkat dan menghendaki untuk anak-anak mereka suatu sekolah yang mengajarkan sekedar pengetahuan bahasa Belanda, sama sekali tidak selalu dan tidak di segala tempat membutuhkan sekolah yang menyambung ke MULO. Asumsi ini dibenarkan oleh laporan Komisi Pendidikan Bumiputera-Belanda dengan konstataasi kelebihan produksi juru tulis dan laju murid dalam jumlah yang besar ke sekolah rendah bercorak Barat. Untuk memenuhi kebutuhan yang meminta tidak terlalu banyak itu perlu diadakan suatu tipe sekolah, yang disamping memberikan pendidikan lanjutan bercorak Bumiputera juga mengajarkan barang sedikit bahasa Belanda, sehingga dapat dihasilkan tenaga kerja untuk dinas pemerintahan dan perusahaan swasta, dimana diperlukan sedikit pengetahuan bahasa Belanda.

Pembaharuan sistim sekolah rendah bertujuan untuk mengadakan penyesuaian secara sistimatis ke dalam perkembangan pendidikan rendah Barat dan evolusi dalam masyarakat, sehingga sekolah yang dijadikan sarana pendidikan bercorak Barat itu dapat memenuhi fungsinya dengan coraknya sendiri dan dapat berkembang dengan sehat. Menteri berkeyakinan bahwa gagasan pembaharuannya yang dipaparkan garis besarnya itu sejalan dengan garis historis yang dilalui perkembangan sistim pendidikan di Hindia-Belanda dan tidak dengan secara paksa membelokkan perkembangan itu.

Demikianlah Menteri De Graaff.

PENGAWASAN (SUPERVISI) PEMERINTAH
ATAS SEKOLAH SWASTA TIDAK BERBANTUAN (TIDAK BERSUBSIDI)

103. Direktur Pendidikan Agama (B.J.O. Schrieke) kepada Gubernur Jenderal (De Jonge), 13 Juni 1932

Mengenai masalah pengawasan terhadap sekolah liar dimintakan lagi perhatiannya kepada Gubernur Jenderal (De Jonge) oleh Direktur Pendidikan dan Agama (B.J.O. Schrieke). Diuraikannya bahwa masalah tersebut berkali-kali menjadi pembicaraan sejak timbulnya sekolah swasta tidak berbantuan corak baru, yaitu yang pengajarannya diberikan oleh orang Bumiputera dengan bahasa pengantar bahasa Belanda, sedangkan dalam tahun-tahun sebelumnya masalah tersebut hampir tidak ada. Sekolah swasta semacam itu baru berdiri setelah oleh Pemerintah didirikan HIS, kemudian sekolah peralihan untuk membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat Bumiputera yang sangat menginginkan pelajaran bahasa Belanda. Dengan demikian menurut B.J.O. Schrieke makin banyak orang Bumiputera yang dapat berbahasa Belanda beranggapan bahwa mereka dapat menjual kepandaian dalam bahasa Belanda, dengan mendirikan sekolah swasta.

Pendirian sekolah seperti itu dipermudah karena pada permulaan tidak ada peraturan untuk mengawasi sekolah tersebut. Selama bertahun-tahun hanya ada peraturan mengenai pendidikan Eropa kepada orang Eropa dan ordonansi 3 Nopember 1880 (Lembaran Negara nomor 201) yang mengatur pendidikan oleh orang Eropa kepada orang Bumiputera. Pendidikan oleh orang Bumiputera kepada orang Bumiputera hanya terbatas pada pengajaran agama Islam, yang diatur dengan Ordonansi-Guru (Goeroe Ordonansi, Lembaran Negara 1905 nomor 350), yang kemudian diganti dengan Ordonansi Guru 1925 (Lembaran Negara nomor 219).

Pertimbangan untuk mengadakan peraturan tentang pendidikan oleh orang Bumiputera kepada orang Bumiputera baru dirasakan oleh pemerintah pada tahun 1923, setelah diketahui bahwa di berbagai sekolah swasta, terutama pada sekolah Sarekat Rakyat, diadakan

propaganda politik yang menurut Pemerintah tidak dapat dibiarkan. Maka lahirlah Ordonansi 28 Maret 1923, Lembaran Negara nomor 136^{*)} yang menetapkan semua sekolah ada di bawah pengawasan Pemerintah, sepanjang yang belum diatur dengan Ordonansi-ordonansi yang sudah ada. Tujuan ordonansi 28 Maret 1923 bersifat politik belaka, yaitu melindungi masyarakat terhadap pendidikan yang anti-sosial. Pada waktu itu dianggap belum waktunya untuk mengadakan pengawasan terhadap mutu pendidikan oleh orang Bumiputera di sekolah swasta tidak bersubsidi.

Menurut B.J.O. Schrieke untuk tujuan terbatas di bidang politik ordonansi tersebut sudah dapat memenuhi, tetapi segera pemerintah berpendapat bahwa lama-kelamaan harus diadakan pengawasan secara intensif terhadap sekolah swasta tidak bersubsidi. Laporan-laporan yang diterima dari para pegawai pangreh praja dan para Inspektur Pendidikan memberitahukan, bahwa di kebanyakan sekolah keadaan buruk merajalela, yang meskipun dianggap tidak bertentangan dengan ketertiban umum, namun sama sekali tidak dapat dibiarkan. Para siswa seringkali belajar di ruangan yang sangat menyedihkan. Para gurunya kerap kali tidak saja tidak memiliki wewenang resmi untuk mengajar, tetapi juga sama sekali tidak berkemampuan untuk tugas mereka. Biasanya uang sekolah sangat tinggi. Yang terutama sangat menyedihkan ialah apa yang disebut "pengajaran bahasa Belanda". Di sekolah yang memakai berbagai nama mentereng, diajarkan bahasa Belanda oleh orang Bumiputera kepada anak Bumiputera, sedangkan guru itu sangat kurang menguasai bahasa Belanda. Sekolah semacam inilah yang merupakan contoh terutama dari kategori sekolah swasta tidak berbantuan, yang biasanya disebut "sekolah liar". Pendahulu B.J.O. Schrieke, yaitu J. Hardeman, dalam surat tanggal 23 April 1929 nomor A.19/1/1 menyatakan bahwa saatnya belum tiba bagi Pemerintah untuk mengambil tindakan, dan sebaiknya bersikap menunggu untuk melihat perkembangan sekolah swasta tidak bersubsidi itu lebih lanjut. Tetapi Dewan Hindia (Raad van

^{*)} Diubah dengan Lembaran Negara 1925 nomor 260.

Nederlandsch-Indie) dan Pemerintah pada waktu itu tidak sependapat dengan J. Hardeman.

Oleh B.J.O. Schrieke dikemukakan, bahwa melalui surat Sekretaris Pemerintah (Negara) I tanggal 17 Oktober 1929 nomor 337 diterima perintah untuk meninjau lebih jauh masalah tersebut di atas dengan memperhatikan saran Dewan Hindia, yang menganjurkan pengeangan kebebasan sekolah liar. Juga diperintahkan untuk membahas persoalannya dengan Komisi Pendidikan Bumiputera-Belanda. Oleh Komisi ini telah dikumpulkan sejumlah besar data mengenai sekolah swasta tidak berbantuan, tetapi dalam laporan terakhir tidak dapat dirumuskan kebulatan pendapat, apakah anjuran penghentian perluasan pendidikan rendah Barat juga dilaksanakan terhadap sekolah swasta tidak berbantuan. Komisi dibubarkan dan tidak dapat diharapkan lagi nasehat dari padanya, seperti diberitahukan oleh Sekretaris W.M.F. Mansvelt dengan surat tanggal 19 Juni 1931 nomor 5467a/24 sebagai jawaban kepada B.J.O. Schrieke, yang mencari informasi mengenai penyelesaian persoalan tersebut. Itulah sebabnya bahwa baru medio 1931 masalahnya mulai ditelaah olehnya.

Sementara itu masalah tersebut menjadi akut. Krisis ekonomi meningkatkan kebutuhan akan pendidikan, teristimewa pengajaran bahasa Belanda karena dalam perjuangan hidup yang menjadi lebih berat, pemilikan ijazah menjadi dianggap makin penting. Karena pemerintah menghentikan setiap peningkatan jumlah sekolah, maka permintaan untuk masuk sekolah dipenuhi oleh "sekolah liar", yang jumlahnya terus-menerus naik. Banyak kaum penganggur yang mau menjadi guru dengan gaji sangat kecil. Di Dewan Rakyat masalah sekolah liar diperdebatkan. Sejumlah besar para pembicaranya berbeda pendapat. Sebagian dari mereka menganjurkan supaya sekolah liar dibebaskan karena memberi pendidikan dengan uang sekolah yang tinggi untuk mengejar keuntungan semata-mata. Menurut pendapat yang lain lagi, pendidikan seperti itu harus dapat ditolerir. Jika perlu diberi dorongan, karena oleh prakarsa dari pihak orang Bumiputera diberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan akan sekolah, sedang pemerintah sendiri tidak mampu melaksanakannya dengan memuaskan.

Menurut B.J.O. Schrieke, selama perluasan sekolah negeri tidak dapat berjalan seimbang dengan kenaikan keinginan belajar, maka selama itu pula akan disediakan kesempatan bersekolah oleh pihak swasta, baik pun atas dasar kedermawanan maupun atas dasar pertimbangan mencari penghasilan. Maka pada hematnya sekolah liar tidak akan dengan sendirinya menghilang oleh saingan sekolah negeri yang lebih baik, dan yang biasanya juga lebih murah bagi orang tua. Ia juga berkeberatan untuk menuntut syarat-syarat kurikulum, kemampuan tenaga pengajar, bangunan sekolah, dsb., agar dapat sederajat dengan sekolah negeri atau sekolah swasta bersubsidi. Jika dipakai penyelesaian dengan cara ini, boleh dikatakan semua sekolah liar akan lenyap, karena tidak akan mampu memikul biaya untuk perbaikan perlengkapan, personalia, dan materiil. Cara ini akan sama efeknya dengan mengeluarkan larangan terhadap sekolah swasta tidak bersubsidi. Larangan ini akan memberikan hak moral kepada orang-orang yang tertolong oleh sekolah liar, untuk menuntut tempat di sekolah negeri. Tuntutan itu barang tentu tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah, teristimewa dalam masa penghematan seperti pada waktu itu.

Lain dari pada itu larangan tersebut akan membawa efek yang berlawanan dengan tujuan Pemerintah, karena menurut B.J.O. Schrieke penutupan sekolah-sekolah kurang bermutu tersebut akan berakibat, bahwa siswa sekolah tersebut bukannya mendapat pendidikan yang lebih baik, tetapi sama sekali tidak mendapat pendidikan. Maka tindakan yang disarankannya kepada Pemerintah ialah mencegah ekseseks sekolah liar sebagai sekolah perusahaan untuk memperoleh keuntungan materiil. Pemerintah tidak dapat menuntut, bahwa sekolah swasta tidak bersubsidi semua tenaga pengajarnya mampu secara keseluruhan, taraf pengajarannya sama dengan sekolah negeri, bangunan sekolahnya memenuhi segala persyaratan, dsb. Yang dapat dan harus dicegah oleh Pemerintah ialah kebutuhan-keburukannya yang keterlaluan. Ia berpendapat bahwa saran yang berkali-kali diberikan oleh Dewan Hindia mengandung pikiran yang sama, yaitu bahwa tujuan utama peraturan legal mengenai sekolah liar untuk membatasi adanya

pendidikan yang kurang bermutu dan tidak sembarang orang, baik pun yang pandai maupun yang pandir boleh menjadi guru. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu ditarik kembali Ordonansi 1923 (Lembaran Negara nomor 136). Sebagai gantinya yang baru, disamping diadakan pengawasan politik oleh pangreh praja, dilibatkan pula Inspeksi Pendidikan ke dalam pengawasan. Dengan cara demikian akan dapat diadakan peraturan modern untuk melaksanakan pengawasan terhadap sekolah swasta oleh orang Bumiputera kepada orang Bumiputera, dan disarankan supaya peraturan tahun 1880 mengenai pendidikan swasta oleh orang Eropa kepada orang Bumiputera (Lembaran Negara Hindia-Belanda 1880 nomor 201) diterapkan dalam ordonansi baru, sehingga dengan demikian pengawasan terhadap sekolah swasta untuk orang Bumiputera diatur secara keseluruhan.

Menurut Ordonansi 1923 orang bukan Eropa yang mau memberi pengajaran, cukup memberitahukan kepada kepala pemerintahan daerah untuk dapat diketahui adanya sekolah-sekolah swasta dengan corak pendidikan yang diberikan. Kepala Pemerintahan Daerah berwenang melarang guru swasta mengajar dalam waktu yang lamanya ditentukan atau tidak ditentukan berdasarkan pertimbangan ketertiban umum. Peraturan tersebut menurut B.J.O. Schrieke harus dirubah dalam dua hal. Perubahan pertama ialah peraturan dalam ordonansi mengenai pendidikan oleh orang Eropa kepada orang Bumiputera (Lembaran Negara 1880 nomor 201) diterapkan untuk pendidikan oleh orang Bumiputera kepada orang Bumiputera, dan bahwa menurut ordonansi tersebut harus ada ijin mengajar. Perubahan kedua ialah sebagai perbaikan bahwa pemberian ijin itu tidak hanya ditentukan menurut pendapat pegawai pangreh praja, tetapi pertimbangan Inspektur Pendidikan bersangkutan juga ikut menentukan. Keputusan terakhir untuk memberikan ijin ada pada pihak kepala pemerintahan daerah. Tetapi untuk menjamin bahwa saran dari Inspektur Pendidikan itu akan diindahkan, direncanakan peraturan - bahwa Kepala Pemerintahan Daerah tidak akan memberikan ijin - jika Inspektur tidak menyetujuinya. Tetapi kepala pemerintahan Daerah berwenang penuh untuk menolak orang yang dari segi

teknis pengajaran disetujui oleh Inspektur tetapi berdasarkan pertimbangan politik tidak dapat diterima.

Dalam tahun 1925 dipertimbangkan untuk memperluas ketetapan dalam Ordonansi 1923, sehingga lahirlah ordonansi dalam Lembaran Negara 1925 nomor 260. B.J.O. Schrieke tidak mengetahui apakah pada waktu itu telah dipertimbangkan untuk mengadakan sistim pemberian ijin yang dianjurkan oleh Menteri Daerah Jajahan (Welter) pada waktu itu dan juga disetujui oleh Pejabat Jaksa Agung. Tetapi J.F.W. van der Meulen, pejabat yang mendahului B.J.O. Schrieke, sangat berkeberatan, karena terhadap guru-guru yang oleh pemerintah diberi ijin mengajar harus diadakan sanksi. Hal itu oleh yang bersangkutan akan disalah gunakan sebagai alat propaganda. Di samping itu Pemerintah Daerah akan bertambah pekerjaannya, karena harus meneliti kelakuan dan kemampuan orang-orang yang meminta ijin mengajar. Pendapat J.F.W. van der Meulen itu disetujui oleh Dewan Hindia dan pemerintah ikut mendukung. B.J.O. Schrieke memahami keberatan utama terhadap sistim pemberian ijin itu, tetapi tidak setuju untuk dibesar-besarkan, dan hal itu dapat diatur. Dalam rencana sistim yang diusulkannya pemilikan surat ijin mengajar merupakan syarat mutlak. Tanpa ijin, orang dilarang berdiri di muka kelas untuk mengajar. Tetapi ijin tersebut tidak boleh diberikan dengan keterangan kecakapan, misalnya dapat diberikan surat oleh Inspektur Pendidikan kepada orang yang mau mengajar tetapi tidak memiliki ijazah guru. Ijin yang ada dalam gagasan B.J.O. Schrieke sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah. Ijin itu hanya merupakan pernyataan bahwa Kepala Pemerintahan Daerah tidak berkeberatan terhadap orang bersangkutan yang mau mengajar. Perumusan ijin itu harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesan sebagai diploma apa pun.

Maka oleh B.J.O. Schrieke sistim perijinan mengajar yang sudah ada sejak tahun 1880 untuk orang Eropa diusulkan agar berlaku juga untuk orang Bumiputera. Masalah yang harus dipecahkan ialah kriteria sebagai dasar pemberian nasehat oleh Inspektur Pendidikan.

Menurut pendapatnya, diploma guru tidak boleh dituntut sebagai syarat, tetapi orang yang meminta ijin harus memiliki pengetahuan minimum yang diajarkan di sekolah. Pengetahuan sekolah minimum itu tidak boleh dituntut terlalu tinggi, karena dengan tuntutan persyaratan terlalu tinggi akan banyak sekolah liar yang "gulung tikar", dan hal itu menurut B.J.O. Schrieke, baik pun dari segi pendidikan maupun dari segi politik tidak bijaksana. Karena itu direncanakan ketetapan bahwa orang yang mengajar dalam bahasa Belanda atau dengan bahasa Belanda sebagai pengantar harus mempunyai ijazah akhir sekolah negeri atau sekolah swasta bersubsidi pendidikan rendah Barat.*) Sedangkan orang yang mengajar dengan bahasa Pribumi harus telah tamat belajar di sekolah kelas dua negeri atau bersubsidi. Tetapi ditegaskan, bahwa meskipun sudah dipenuhi syarat minimum sama sekali tidak berarti bahwa permohonan ijin harus diluluskan. Oleh Inspektur Pendidikan dalam sarannya harus dipertimbangkan, bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk mengajar dan juga harus dipertimbangkan keadaan persediaan tenaga guru yang lebih baik di tempat. Ia bermaksud, setelah ordonansi diberlakukan, akan mengedarkan surat kepada para Inspektur, bahwa dalam nasehat mereka harus ditinjau faktor-faktor sosial dan menguji kemampuan individuil dari pemohon ijin kepada keadaan penyediaan tenaga guru di daerah yang bersangkutan. Mengenai hal ini tidak perlu ada keseragaman.

Demikianlah menurut B.J.O. Schrieke, tidak diharuskan memiliki suatu ijazah guru. Gagasan yang dianjurkan oleh Dewan Pendidikan dalam tahun 1924 untuk menuntut dari orang yang mau mengajar dalam bahasa Belanda, paling sedikitnya apa yang disebut diploma Depok (Depoksche Diploma), yaitu ijazah yang paling rendah untuk wewenang mengajar dalam bahasa Belanda dianggap menemui keberatan, karena jumlah pemilik ijazah tersebut sangat kecil. Lagi pula dari laporan

*) Ijazah akhir sekolah swasta tidak bersubsidi akan diakui jika ada pengakuan sederajat dengan sekolah negeri terhadap sekolah tersebut.

para Inspektur ternyata bahwa di sekolah liar seringkali diajarkan bahasa Belanda oleh orang-orang yang telah belajar beberapa tahun di "Kweekschool" (sekolah guru), tetapi tidak berhasil mencapai ijazah akhir. Tidaklah sepatutnya untuk menghargai mereka ini lebih rendah dari pada para pemilik diploma Depok yang sangat sederhana itu.

Ijin yang diberikan oleh Kepala Pemerintahan Daerah dengan dipenuhi syarat-syarat minimum masih belum merupakan jaminan bahwa sekolah liar telah memenuhi tuntutan minimum yang pantas. Pengawasan pemerintah tidak hanya dikenakan kepada para guru secara perorangan, tetapi juga diperluas kepada seluruh sekolah. Dua kepincangan yang sering terdapat harus diberantas, yaitu mengajar dalam ruangan yang sama sekali tidak memadai dan memberi gambaran tidak benar mengenai taraf pendidikan serta pemberian ijazah yang nilainya tidak sepadan dengan kenyataan. Mengenai kepincangan kedua dikemukakan bahwa terutama di sekolah liar yang mengajarkan bahasa Belanda, diberikan gambaran palsu mengenai mutu pengajarannya. Banyak sekolah liar dihiasi dengan penggunaan nama HIS, meskipun taraf pendidikannya dalam bahasa Belanda biasanya berada jauh di bawah sekolah negeri. Maka untuk selanjutnya nama HIS hanya boleh dipakai oleh sekolah yang dapat dianggap sederajat dengan HIS negeri dan pelanggaran harus dihukum dengan penutupan. Peraturannya juga akan efektif dalam kasus-kasus pengelabui mata publik oleh sekolah liar. Misalnya pernah terjadi di Betawi, bahwa seseorang mengusahakan sejumlah besar sekolah dengan nama "Neutrale HIS met Engelsch" (HIS Netral dengan bahasa Inggris) dan mengeluarkan ijazah yang sama dengan sekolah negeri, karena berhasil memperoleh lembaran formulir blanko yang dipakai di sekolah negeri di kantor pos dengan membayar menurut harga meterainya. Penyalahgunaan tersebut untuk sementara dicegah oleh B.J.O. Schrieke dengan permintaan kepada para Kepala Kantor Pos untuk menyerahkan lembaran blanko diploma tersebut hanya kepada orang-orang yang telah diberi otorisasi oleh Inspeksi Pendidikan.

sebaliknya mereka tidak dikenakan syarat "tidak mengganggu ketertiban dan ketenteraman". Tidak lagi beralasan untuk mempertahankan peraturan tahun 1880 ini.

Teks konsep ordonansi dengan disertai rancangan surat pengantar dan memori penjelasan disampaikan kepada Gubernur Jdneral. Penyampaian dilakukan melalui Mr. J.J. Schrieke karena dianggap perlu dalam hubungan dengan pencantuman sanksi hukuman dalam peraturan baru yang direncanakan. Catatan yang bersifat yuridis formil diberikan untuk diperhatikan. Oleh H. Mow, Penasehat Urusan Cina, diuraikan dalam nota untuk Dewan Hindia keberatan prinsipiil terhadap rancangan ordonansi. Ia berkeberatan terhadap setiap pengawasan atas sekolah swasta Cina, karena pengawasan ini akan berarti mempunyai maksud untuk memperbaiki mutu pendidikannya, sedangkan sekolah tersebut mengandung unsur-unsur anti Barat, sehingga didapati kesan bahwa Pemerintah mau mengadakan perbaikan pada suatu lembaga yang diijinkan, tetapi sebenarnya tidak dapat dianjurkan. Dewan Hindia-Belanda menyetujui rancangan ordonansi (dalam sarannya tanggal 5 Agustus 1932 nomor X) dan sependapat dengan Direktur Pendidikan dan Agama, bahwa pemberian ijin tidak berarti bahwa pemerintah memberikan suatu pengakuan tertentu, karena pemberian ijin tersebut mempunyai "sifat negatif belaka" dan tidak mengandung "penghargaan yang positif". Rancangan itu diajukan kepada Dewan Rakyat pada tanggal 13 Agustus 1932 dan oleh Dewan, setelah diadakan berbagai amandemen, diterima dengan 32 lawan 13 suara pada tanggal 9 September 1932.

104. Direktur Pendidikan dan Agama (B.J.O. Schrieke) kepada Gubernur Jenderal (De Jonge) tanggal 13 September 1932

Dalam surat tertanggal 13 September 1932 dibahas kelanjutan penerimaan rancangan ordonansi oleh Dewan Rakyat. Pertama-tama dimintakan perhatian mengenai dua persoalan yang menurut B.J.O. Schrieke bersifat sangat prinsipiil dalam amandemen-amandemen yang

telah diadakan.

Persoalan pertama mengenai perumusan dalam paragraf 2 tentang "sekolah-sekolah". Sebagian besar anggota Dewan sangat berkeberatan terhadap rancangan pemerintah, bahwa dilarang mendirikan atau mengelola sekolah swasta tanpa pengakuan Kepala Pemerintahan Daerah. Dikhawatirkan ketentuan dalam peraturan tersebut akan terlalu mudah digunakan oleh pangreh praja sebagai alat untuk merintang prakarsa swasta di bidang pendidikan. Karena itu dianggap cukup dan lebih baik untuk mengadakan sistim represif terhadap sekolah swasta. Hanya sekolah-sekolah swasta yang menggunakan sebutan seperti sekolah negeri dan dengan demikian mempersamakan diri sederajat dengan sekolah negeri, diwajibkan lebih dahulu memperoleh izin dari Direktur Pendidikan dan Agama.

Amendemen diajukan oleh Ratulangi cs. dan Wiranatakusumah cs. Setelah diperbincangkan dengan saksama diperoleh keyakinan bahwa dengan diterimanya sistim yang dibela dalam perembukan di Dewan Rakyat, ternyata membawakan perbaikan. Oleh Dewan disetujui sistim preventif terhadap guru-guru secara perseorangan dan juga dapat diterima terhadap sekolah swasta yang mempersamakan diri dengan sekolah negeri berdasarkan pemakaian nama yang sama. Hanya sedikit yang berkeberatan terhadap sekolah swasta lainnya yang tidak menganggap sederajat dengan sekolah negeri, untuk menggunakan peraturan represif dalam arti, bahwa pendiriannya hanya harus diberitahukan kepada Pemerintah. Penggantian pengakuan oleh kepala Pemerintahan Daerah dengan pemberitahuan kepadanya mempunyai kebaikan, bahwa pangreh praja daerah akan diperingan pekerjaannya, di samping itu dapat dihindarkan penggunaan "pengakuan" tersebut sebagai propaganda reklame (iklan) oleh sekolah-sekolah swasta secara tidak patut. Maka tanpa pemungutan suara per kepala disetujui oleh Dewan untuk mengadakan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam paragraf 2 dari rancangan ordonansi.

Persoalan kedua ialah mengenai peraturan naik banding terhadap keputusan kepala pemerintahan Daerah. Dalam rancangan peraturan

itu tidak dimuat pertimbangan, bahwa sentralisasi pengawasan oleh Pusat kurang kena berhubung dengan diadakannya penyerahan urusan pendidikan rendah kepada Propinsi, Dewan Kabupaten, dsb. Tetapi dengan mengalah kepada desakan yang kuat dari Dewan akhirnya diterimalah usul amendemen Ratulangi, bahwa terhadap semua keputusan kepala pemerintahan Daerah terbuka kesempatan dalam waktu sebulan untuk naik banding. Tetapi Ratulangi cs. menambahkan klausul kepada amendemen sebagai berikut: "Pelaksanaan keputusan kepala pemerintahan Daerah yang terhadapnya diajukan naik banding oleh yang bersangkutan, ditangguhkan sampai pemerintah Pusat mengambil keputusan". Dalam perembuan mengenai usul amendemen ini, B.J.O. Schrieke mengemukakan bahwa pemerintah sangat berkeberatan karena penangguhan tersebut akan menimbulkan hambatan serius bagi pemerintahan eksekutif apabila seorang kepala pemerintahan telah memerintahkan penutupan sekolah, sedangkan pelaksanaan perintah itu ditunda sampai ada keputusan dari pemerintah Pusat. Tetapi Dewan Rakyat menyetujui amendemen dengan 26 suara lawan 23 suara. Walaupun ada amendemen tersebut, dinasehatkan oleh B.J.O. Schrieke untuk menetapkan ordonansi yang dirancang dengan amendemen dan tambahan yang dibuat oleh Dewan Rakyat. Jika di kemudian hari amendemen tersebut dalam praktek akan menimbulkan kesulitan, pemerintah masih dapat mengajukan rancangan perubahan kepada Dewan Rakyat.

Pemerintah diharapkan, jika menyetujui pendirian B.J.O. Schrieke seperti diuraikan di atas, untuk selekasnya memberlakukan ordonansi tersebut dan diusulkan 15 September 1932 sebagai tanggal mulai berlakunya.

105. Kuasa Pemerintah Untuk Urusan Umum pada Dewan Rakyat (H.J. Kiewiet de Jonge) kepada Gubernur Jenderal (De Jonge), 26 Oktober 1932

Apa yang disebut "Ordonansi Pengawasan Terhadap Pendidikan Swasta" (*Toezicht-ordonantie Particulier Onderwijs*), yang didalamnya dimuat amendemen-amendemen Dewan Rakyat mulai mempunyai kekuatan berlaku pada tanggal 1 Oktober 1932. Terhadapnya timbul gerakan

yang menentang. Oleh Sekretaris Umum Pemerintah (Negara), atas nama Gubernur Jenderal De Jonge ditugaskan kepada H.J. Kiewiet de Jonge, yang diberi kuasa sebagai kuasa pemerintah untuk Urusan Umum di Dewan Rakyat, agar berkomunikasi dengan Pemimpin Taman Siswa, Ki Hajar Dewantoro, dengan tujuan mengatasi kesalahan paham-an yang telah timbul. Dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal di-sampaikan laporan hasil pertukaran pikiran dalam pertemuan dengan Ki Hajar Dewantoro (surat tanggal 26 Oktober 1932).

Perintah untuk tugas tersebut di atas diterimanya pada tanggal 12 Oktober 1932. Tetapi ia baru berhasil mengadakan pertukaran pikiran dengan Ki Hajar Dewantoro di rumahnya di Yogyakarta pada tanggal 19 Oktober. Untuk pertemuan pertama selama kira-kira tiga jam dan pada tanggal 21 Oktober untuk yang kedua selama kira-kira dua jam. Sebelumnya ia telah mendapat informasi di Semarang dari A. van Dijck, Inspektur Pendidikan Bumiputera untuk Jawa Tengah, bahwa menurut pendapat Inspektur tersebut sekolah nasionalistis berkembang dengan subur dimana relatif ada kekurangan sekolah negeri. Terutama sebagai akibat sistim subsidi yang berlaku untuk daerah swatantra, khususnya di Yogyakarta, sekolah nasionalistis tersebut mendapat murid seperti sekolah Missi dan Zending, sedang kenyataan ini harus dipandang lebih banyak sebagai akibat kebutuhan akan pendidikan daripada simpati tertentu orang tua. Di Yogyakarta diperoleh informasi dari Residen mengenai aksi Taman Siswa yang memprakarsai gerakan perlawanan pasif terhadap "ordonansi sekolah liar". Dari majalah Pusara Taman Siswa edisi September dan Oktober, dikumpulkan tulisan yang berhubungan dengan gerakan perlawanan pasif. Terjemahannya oleh Balai Pustaka dilampirkan pada laporannya itu. (Ada empat artikel sebagai lampiran II s/d V).

Dari informasi yang diperoleh dari perseorangan untuk orientasi dalam situasi sebelum mengadakan pertemuan dengan Ki Hajar Dewantoro ditarik kesimpulan bahwa pemimpin-pemimpin rakyat terkemuka seperti Thamrin, Soekarno, Soetomo, mungkin juga Sartono, dll.

telah menyatakan persetujuan secara tertulis atau dengan perantara-an orang-orang kepercayaannya mengenai seruan mengadakan aksi gerakan perlawanan pasif dan jika perlu melanjutkannya. Dalam rapat Pengurus Besar Budi Utomo pada tanggal 15 Oktober dan dalam rapat perkumpulan-perkumpulan yang lain dikeluarkan pernyataan yang senada. Lain dari pada itu menurut H.J. Kiewiet de Jonge pernyataan-pernyataan yang dibuat Ki Hajar Dewantoro sudah menjangkau sangat jauh, terutama seperti yang dinuat dalam Lampiran IV dan V. Dalam Lampiran IV dinuat terjemahan tulisan yang berjudul "Penarikan Segera Ordonansi", di dalamnya dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro antara lain:

- Kelahiran ordonansi dapat dianggap kekalahan pergerakan politik, pager kita telah dirubuhkan dan musuh telah memasuki halaman dengan senjata tajam serta dengan sesuka hati dapat memusnahkan dan membunuh kita.
- Sedangkan sangat perlu, bahwa pemerintah diperingatkan dari pihak rakyat pada tanggal 1 Oktober itu supaya pada saat itu juga dasar hukum dan kekuatan berlakunya ordonansi dinyatakan gugur.
- Telegram saya kepada Gubernur Jenderal harus dianggap sebagai tanda bahaya, sebagai "peringatan", sebagai "ultimatum", dan bahkan sebagai "kata perpisahan kepada masyarakat Hindia Belanda". Pengiriman telegram itu saya anggap perlu sebagai tindakan keksatriaan terhadap lawan. Saya tidak minta-minta, saya tidak mengeluh, tetapi saya memberitahukan: "Saya menolak dasar hukum keberadaan ordonansi".

Di dalam Lampiran V diuraikan "garis-garis perlawanan pasif". Seandainya perlawanan seperti itu dilancarkan, maka gerakan ini tidak hanya akan melibatkan kira-kira 170 sekolah dan kira-kira 1000 orang guru Taman Siswa, tetapi pada akhir tulisan itu diserukan kepada semua pemimpin rakyat: "Berilah Dukungan". Jadi gerakan perlawanan pasif Taman Siswa akan sebagian besar berjalan bersama-sama dengan pergerakan nasional.

Demikian menurut H.J. Kiewiet de Jonge.

Dalam suasana yang demikian itu dipertanyakan oleh wakil pemerintah itu, apakah pengiriman telegram kepada Gubernur Jenderal (Lampiran I) dan pernyataan-pernyataan serta pengumuman-pengumuman Pemimpin Taman Siswa itu dalam Pusara Taman Siswa tidak lain dari pada tindakan spontan ataukah tindakan tersebut disambut dengan hangat oleh para pemimpin rakyat dan perkumpulan-perkumpulan untuk dijadikan landasan mengadakan aksi bersama, sehingga persatuan dalam pergerakan nasional dipulihkan atau setidaknya diperkuat. Jika sifatnya spontan, maka kesalahan pemahaman masih dapat diatasi walaupun masalah ordonansi sudah dengan panas mendapat perhatian umum, sehingga sukar melenyapkan kesalahan tanggapan. Tetapi apabila tindakan tersebut merupakan satu bagian dalam pergerakan nasional, maka rupanya penjelasan yang berpijak pada pendirian pemerintah akan hanya sedikit gunanya.

Kesan yang diperoleh dari pertemuan-pertemuan yang diadakan ada yang menunjukkan aspek yang pertama dan ada juga yang mengandung aspek yang kedua. Mengenai kegawatan suasana dikemukakan pendapat bahwa di kalangan Budi Utomo di Yogyakarta, setelah segala publikasi yang diadakan tidak ada lagi jalan untuk mundur bagi Ki Hajar Dewantoro, dan harus diteruskan. Peristiwa ini merupakan kasus yang analog dengan kasus Pangeran Suriadiningrat.^{*)} Maka diambilnya pendirian bahwa dalam pertukaran pikiran yang akan diadakan, akan dijelaskan dengan sekuat kemampuan maksud Pemerintah lebih jauh, tetapi jika terbukti bahwa tetap akan diambil keputusan untuk melancarkan aksi, maka harus diambil pendirian yang sangat tegas. Jika dari pihak kaum nasionalis mungkin dikehendaki perlawanan terhadap ordonansi, bagi pemerintah tidak ada alasan untuk menghindarinya dengan kompromis.

*) Pangeran Aria Suriadiningrat, saudara tiri Sultan Yogyakarta telah berhubungan dengan Partai Indonesia (Partindo) yang didirikan oleh Sartono, setelah dalam tahun 1931 Sukarno divonis oleh Pengadilan Negeri Bandung, dan kemudian PNI dibubarkan. Pangeran itu dalam tahun 1932 berkali-kali mendapat peringatan Pemerintah, tetapi tidak dihiraukannya.

Dari pembicaraan dalam pertemuan dua kali, dibuat laporan serba lengkap. Diakui, bahwa dalam laporan tersebut diungkapkan hanya esensinya saja dari pertukaran pikiran. Lain dari pada itu sifatnya juga sepihak karena isinya belum tentu dapat disetujui oleh Ki Hajar Dewantoro. Juga karena dalam laporan itu tidak dapat diungkapkan sengan sebagaimana mestinya suasana yang meliputi pembicaraan, maka mudah saja timbul tanggapan yang salah. Di bawah ini disajikan hal-hal yang dianggap penting untuk diketahui.

Pada pertemuan pertama dibuat perjanjian bahwa H.J. Kiewiet de Jonge pada hari Rabu malam pukul 8 akan datang di rumah Ki Hajar Dewantoro. Pada pukul 6 ia ditilpon, bahwa akan diadakan latihan tari Jawa yang setiap minggu diadakan di tempat Ki Hajar Dewantoro di bawah bimbingan Pangeran Tedjokusumo, dan ia dipersilahkan untuk menyaksikannya apabila ada minat. Selain sangat tertarik, ia beranggapan bahwa dengan memenuhi undangan tersebut akan tercipta suasana yang baik untuk mengadakan pembicaraan pendahuluan.

Berdasarkan anggapan kulturil-nasional, Taman Siswa memberi nilai formil yang tinggi kepada tari Jawa, teristimewa sebagai imbalan terhadap dansa-dansi Barat yang dipandang dalam beberapa hal kurang cocok untuk para muda Jawa. Pada kira-kira pukul 8 malam setelah latihan selesai para tamu sudah pergi dan hanya tinggal H.J. Kiewiet de Jonge dengan Ki Hajar Dewantoro. Utusan pemerintah kolonial itu memperhatikan serambi muka (pendopo) yang digunakan untuk tempat latihan tari dan sehari-harinya dipakai untuk ruang sekolah. Di ruang itu kemudian diatur dan disiapkan meja-meja kecil setinggi kira-kira 40 cm berjejer-jejer untuk pengajaran keesokan harinya. Para siswa duduk di muka meja di atas tikar. Sambil memperhatikan itu semua sang tamu memberanikan diri berkata kepada tuan rumah bahwa cara para siswa duduk itu ialah khas menurut adat Jawa, sederhana, disesuaikan dengan lingkungan, dan menurut pendapatnya serambi muka dengan di sekelilingnya bayangan pohon-pohon besar merupakan tempat belajar-mengajar yang sejuk dan menyenangkan. Seraya bersenyum Ki Hajar Dewantoro menjawab bahwa meja-meja kecil dan ruang sekolah itu dahulu di

sekitar tahun 1925 telah dikecam oleh P.J. Stroeve, Inspektur Pendidikan Rendah Barat, dan katanya para siswa meskipun anak Jawa, tidak boleh duduk di bawah, ruang kelas kurang besar, dan tidak boleh bersambung dengan ruang tinggal. Hal yang disebut belakangan itu bagi Ki Hajar Dewantoro justru merupakan suatu prinsip, karena ada pengaruhnya yang baik. Celaan Inspektur itu tidak dihiraukannya, karena Taman Siswa tidak minta subsidi dan salah satu azas pendidikannya ialah tidak mendidik anak-anak dalam lingkungan yang lebih bagus daripada lingkungan rumah sendiri. Tujuannya juga untuk sedapat-dapatnya mempersatukan sekolah dengan rumah, antara pendidikan dengan masyarakat. Sekolah Barat mencabut banyak siswa dari akar mereka, mengasingkan mereka dari tradisi sendiri, tetapi mereka tidak juga menjadi orang Barat. Dalam beberapa hal kenyataan itu tidak dapat dihindari, tetapi Taman Siswa berusaha mencegahnya sedapat-dapatnya. Banyak petunjuk dari Inspeksi dipatuhi, tetapi yang bertentangan dengan prinsip Taman Siswa ditolak.

Dalam menanggapi pendirian Taman Siswa tersebut di atas, utusan pemerintah kolonial itu berkata: "Itulah hak istimewanya, karena tidak menerima subsidi". Dijawab oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa hak istimewa itu hilang dengan adanya ordonansi baru. Dan apabila ada seorang Inspektur seperti P.J. Stroeve tidak setuju dengan semuanya itu, maka teguran seperti itu bukan lagi merupakan kritik di bidang teknis pendidikan, melainkan suatu kecaman yang menyerang jantung pergerakan pendidikan Taman Siswa. Inilah yang menjadi salah satu sebab dari perlawanan gigih terhadap ordonansi baru itu.

Pertukaran pikiran terjadi mengenai ordonansi tersebut. Utusan pemerintah kolonial itu berusaha meyakinkan Pemimpin Taman Siswa, bahwa sistim izin mengajar bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para pengajar di sekolah swasta, dan tidak untuk membatasi kebebasan. Pada hematnya bagi Taman Siswa tidak diperlukan penetapan syarat untuk guru-gurunya yang berwewenang, karena organisasi Taman Siswa sendiri sudah merupakan jaminan untuk adanya syarat

tersebut. Tetapi jaminan tersebut dituntut terutama dari sekolah swasta yang dikelola berdasarkan mengejar keuntungan belaka, dan seringkali guru-gurunya kurang mampu. Tetapi Ki Hajar Dewantoro tetap berpendirian, bahwa ordonansi baru itu memberikan kekuasaan kepada pangreh praja untuk bertindak menurut sesuka hati terhadap sekolah swasta.

Pertukaran pikiran dilanjutkan pada hari kedua. Pada hari itu Ki Hajar Dewantoro menerima tamunya seperti biasanya dalam busana nasional, yaitu berjas-tutup dengan kerah tinggi, terbuat dari bahan lurik. Pada hari itu sang tamu paginya dengan diantar oleh Ir. R.M.Pandji Surahman Tjokroadisurio, pemimpin Balai Perco-baan Batik di Yogyakarta, telah berkunjung ke salah satu pertenunan dan melihat di situ cara menenun kain lurik, antara lain yang berwarna hijau tua dengan jalur-jalur kecil benang merah dan putih, yaitu warna-warna Taman Siswa.

Pada hari itu Ki Hajar Dewantoro menerima tamunya tanpa mengenakan kain Taman Siswa, sehingga menimbulkan pertanyaan pada tamunya, apa sebab tuan rumah tidak berdandan dalam busana Taman Siswa. Sekali-sekali dianggap perlu juga untuk berpakaian lain dengan maksud mendobrak kungkungan ortodoksi yang mengekang orang untuk berpikir dalam lingkaran kecil atau dalam kesadaran kelompok kecil. Sebagai seorang nasionalis yang baik, ia berpakaian dalam dandanan nasionalis. Tetapi kadang-kadang perlu juga mengenakan pakaian Eropa. Hal itu dilakukannya untuk mematahkan dogmatisme pada para siswa dan para pengikutnya. Pada mereka timbul kebingungan, tetapi ada baiknya juga karena kebingungan itu justru memaksa untuk berpikir. Pada suatu kali, waktu Sartono mengadakan ceramah tentang swadeshi, yaitu menggunakan barang-barang hasil buatan negeri sendiri. Setiap orang tentunya hadir dalam busana Jawa, dan ketika diketahuinya hal itu Ki Hajar Dewantoro cepat-cepat berganti pakaian Eropa. Hari berikutnya ia mengajar di salah satu kelas tertinggi sekolah pendidikan guru, dan ada siswa yang bertanya dengan sedikit malu-malu, apa sebab ia telah berbuat demikian. Para muda menduga, bahwa ia mau berdemonstrasi memihak kepada PNI terhadap P.I. atau

Partindo, partai Sartono. *) Dijelaskannya, bahwa ia sangat menghargai swadeshi, dan ia sendiri mendukungnya, tetapi dengan berbuisana cara Barat ia bermaksud menyadarkan orang-orang, bahwa pada akhirnya bukanlah busana yang dipakai untuk menentukan, melainkan kemurnian jiwanya.

Bertanyalah sang tamu, apakah Ki Hajar Dewantoro mau menyingkirkan sektarisme sebanyak mungkin dari Taman Siswa. Demikianlah sebenarnya, jawabnya. De meja bacaan Taman Siswa juga terdapat "De Zaaier", **) dan sebuah majalah Katolik. Para siswa, terutama yang lebih tua, boleh saja berkenalan dengan segala macam pengetahuan. Taman Siswa berusaha menyediakan landasan nasional-kulturil agar supaya diperoleh cukup kekuatan untuk menanggulangi pengaruh pengetahuan serba banyak itu. Sekolah di negeri Barat memberikan pengetahuan serba-banyak tersebut, tetapi tanpa kekuatan untuk menghasilkan sintesa. Kepada para muda diberikan kemampuan untuk belajar segala pengetahuan, tetapi tidak diberikan landasan kebudayaan sendiri sebagai titik pusat. Maka mereka itu menjadi berkeping-keping sehingga mereka itu bukan Bumiputera dan juga bukan Barat. Generasi muda ini pada umumnya menderita frustrasi. Karena jiwa mereka terbelah mereka itu tidak mempunyai kekuatan batin, kehilangan kepercayaan pada diri-sendiri, dan membawakan bahaya besar bagi bangsa sendiri dan bagi pemerintah. Landasan yang kuat itu tidak dapat dibentuk hanya dengan pendidikan nasional melulu, tetapi harus ditopang oleh moral yang kuat.

Kemudian pembicaraan diarahkan oleh sang tamu kepada ordonansi. Katanya, bahwa justru ordonansi tersebut sasarannya ialah

*) PNI (Pendidikan Nasional Indonesia) didirikan Sutan Syahrir dan memihak Moh. Hatta. PNI baru berorientasi lebih sosialis dan tidak menyetujui swadeshi, teristimewa yang dipropagandakan sebagai kerajinan tangan, tetapi menganjurkan industrialisasi, karena dalam industrialisasi terbentuk proletariat yang berpendidikan modern.

**) Majalah ini (Penyebar Benih) ialah majalah Kristen Protestan dan diedarkan sebagai majalah penyiar ajaran agama Kristen oleh Gereja-Gereja pembaharuan (Gereformeerde Kerken).

sekolah liar tanpa moral itu. Tetapi Ki Hajar Dewantoro tetap menganggap sistim ijin mengajar itu sebagai kekangan dan dengan menyesal ia menyatakan tidak menaruh kepercayaan, terutama karena penggunaan kekuasaan oleh pangreh praja sesuka hatinya, seperti yang pernah dialami rekannya Ki Tjokrodirdjo di Semarang.

Dalam laporan yang disampaikan kepada Gubernur Jenderal dise-
salkan oleh H.J. Kiewiet de Jonge sikap pangreh praja pada umumnya dan beberapa aparat pemerintah yang kurang berkomunikasi dengan kelompok kaum terpelajar Bumiputera yang setiap tahun jumlahnya makin besar. Akibat sikap tersebut menyedihkan. Pada umumnya, pangreh praja itu hidup sebagai orang asing berdampingan dengan dan kadang-kadang bertentangan dengan yang diperintah. Dengan demikian tidak terjadi adanya saling pengertian, tetapi saling melukai perasaan. Dari pertukaran pikiran di Yogyakarta itu ternyata dengan jelas hubungan antara kecurigaan dengan perlawanan pasif. "Image" atau citra mengenai perlawanan pasif itu tidak bisa dihilangkan lagi. Perwujudan atau realisasi perlawanan pasif tersebut dipengaruhi oleh kekuatan kecurigaan. Berhadapan dengan Ki Hajar Dewantoro adalah menghadapi pemimpin yang berjiwa luhur dan mungkin kecurigaan pribadinya dapat dilumakkan.

Kemungkinan pada suatu waktu ia berhadapan dengan pemimpin lain yang kurang berterus terang atau yang kejengkelan para pengikutnya ternyata terlalu kuat, sehingga terjadilah perlawanan pasif itu. Lain daripada itu dimintakan perhatian terhadap perasaan halus orang Jawa mengenai formalitas dan prosedur serta nuansa dalam keduanya. Pengingkaran terhadapnya menimbulkan kesalah pahaman atau perbedaan pendapat yang berjauhan. Sebagai penutup dikemukakan untuk mempertimbangkan saran dari E. Gobec, Penasehat Urusan Bumiputera, untuk mengadakan perubahan dalam konsep surat edaran. Lain dari pada itu diusulkan untuk menyisipkan dua pokok lagi, supaya maksud pemerintah menjadi lebih jelas lagi. Kedua sisipan itu menjelaskan bahwa tujuan ordonansi yang berkaitan dengan sistim ijin mengajar juga dapat dicapai dengan menambahkan kepada

sistim yang dahulu (yaitu sistim pemberitahuan) unsur baru (yaitu pemberian atau penolakan ijin dan pengakuan kepada tenaga pengajar) dan hanya atas dasar efektivitas lebih diutamakan sistim pemberian ijin. Hal tersebut adalah menurut sisipan pertama. Menurut sisipan kedua perlu memperhatikan tingkah laku politik pemohon atau pemegang ijin untuk membedakan nasionalisme kebudayaan (cultureel nasionalisme) daripada nasionalisme politik (politiek nasionalisme). Tindakan dalam hal ini harus berhati-hati. Dalam penilaian terhadap bangunan sekolah dan perlengkapannya serta alat-alat pelajarannya hendaknya dipertimbangkan bahwa sekolah Bumiputera tidak harus meniru pola Barat, asal bangunan dan perlengkapannya cukup kuat dan higienis (memenuhi syarat kesehatan).

Juga diusulkan untuk menyampaikan kepada Ki Hajar Dewantoro konsep surat edaran yang berisi peraturan pelaksanaan ordonansi. Diharapkan bahwa wibawa Ki Hajar Dewantoro dalam Konperensi Para Pemimpin Taman Siswa yang akan diadakan mempunyai pengaruh cukup besar, juga kepada para pemimpin rakyat yang bersimpati, sehingga membatalkan maksud untuk melancarkan aksi perlawanan. Mengenai hal ini tidak ada kepastian.

Salinan laporan H.J. Kiewiet de Jonge tersebut di atas juga dikirimkan kepada Direktorat Pendidikan dan Agama, dan kepada Penasehat Urusan Bumiputera.

106. Sekretaris Pemerintah (Negara) I kepada Kepala-Kepala Pemerintahan Daerah, tanggal 24 Nopember 1932

Penjelasan mengenai penerapan Ordonansi Pengawasan Terhadap Sekolah Swasta (Lembaran Negara 1932 nomor 494) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1932 dikemukakan dalam surat tanggal 24 Nopember 1932. Menurut ordonansi 3 Nopember 1880 (Lembaran Negara nomor 201) dan ordonansi 28 Maret 1923 (Lembaran Negara nomor 136) mengenai sekolah swasta tidak bersubsidi untuk pengajaran oleh orang bukan Eropa kepada orang bukan Eropa diberi kebebasan, asal sudah memberitahukan kepada Kepala Pemerintahan Daerah. Tetapi

penyalahgunaan kebebasan dan keburukan yang timbul dari padanya memaksa Pemerintah membuat peraturan pencegahannya. Sebagai dianggap paling efektif ialah permintaan izin mengajar yang menurut ordonansi-ordonansi terdahulu hanya diwajibkan kepada orang Eropa yang mengajar kepada orang bukan Eropa, tetapi menurut ordonansi yang baru, diwajibkan kepada setiap orang yang mau memberi pengajaran (pasal 1 Ordonansi baru). Pendirian sekolah swasta tidak bersubsidi bebas dan cukup dengan pemberitahuan saja.

Tujuan ordonansi baru ialah memberantas penyalahgunaan kebebasan mendirikan sekolah tersebut dan keburukan dari padanya, tetapi tidak dimaksudkan untuk menghalangi prakarsa swasta dalam kebebasan perkembangannya. Pengawasan di bidang politik yang terimplikasi di dalam tujuan pada hakekatnya tidak berubah, tetapi penyalahgunaan dan keburukan yang harus diberantas. Coraknya berbeda-beda sebagai akibat pengajaran yang diberikan oleh guru-guru yang sama sekali tidak berkemampuan, tempat mengajar yang membahayakan kesehatan atau keselamatan murid, dan memberikan harapan yang bertentangan dengan kenyataan menurut keadaan taraf pengajaran dan hasil yang dicapai. Karena itu dalam pemberian izin hanya diadakan penolakan berdasarkan pertimbangan, apabila yang bersangkutan dikhawatirkan akan menimbulkan "gangguan kepada tata tertib dan ketenteraman umum" (pasal 4, ayat (1) sub. a). Karena itu untuk pemberian izin diperlukan sebagai syarat, nasehat positif dari Inspektur Pendidikan yang bersangkutan. (Pasal 3, ayat (1); Pasal 4, ayat (1) sub. b). Sebagai kriterium untuk dasar pertimbangan dalam ordonansi dan tidak ditetapkan syarat-syarat tertentu untuk wewenang mengajar yang diminta ialah "tanda bukti kelakuan susila yang baik" (Pasal 4, ayat (1) sub. c 1e), dan syarat-syarat minimum mengenai tingkat kecerdasan si pemohon izin. (Pasal 4, ayat (1) sub. c 3c; ayat (2) dan (3). Jadi dengan demikian izin-izin yang diberikan sama sekali tidak mempunyai kekuatan sebagai diploma atau ijazah, dan sewaktu-waktu dapat dicabut. Pemberian izin itu juga sama sekali tidak berarti

bahwa kepala pemerintahan Daerah menilai yang bersangkutan sebagai guru yang cakap, tetapi hanya diberi ijin mengajar karena tidak ditemukan alasan untuk menolak permohonannya. Pemberian ijin itu harus diartikan sebagai pemberitahuan belaka, bahwa kepala pemerintahan Daerah tidak menaruh keberatan kepada pemohon untuk mengajar. Bentuk surat pemberian ijin itu juga tidak boleh mempunyai ciri sebagai diploma.

Dalam surat edaran tersebut ditegaskan untuk diperhatikan, bahwa orang yang telah memenuhi syarat minimum kecerdasan menurut ketentuan ordonansi belum berhak untuk memperoleh ijin. Dari Inspektur Pendidikan harus ada saran yang mendukung (Pasal 4, ayat (1) sub. b). Jadi sudah jelas bahwa kepada orang dengan pendidikan lebih tinggi daripada syarat-syarat minimum tersebut, misalnya tamatan Sekolah Pendidikan Guru Taman Siswa dan Muhammadiyah, dapat diberikan ijin. Lebih-lebih lagi kepada orang yang memiliki surat keterangan menurut pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Umum Subsidi Kepada Sekolah Rendah Bumiputera Swasta. (Lembaran Negara 1924 nomor 68 jo. Lembaran Negara 1931 nomor 493). Pemberian ijin dapat ditolak atau dicabut tidak hanya untuk kepentingan tata-tertib umum, tetapi juga untuk kepentingan pendidikan (Pasal 6 dan 8). Berdasarkan pertimbangan yang sama sekolah juga bisa ditutup (pasal 14). Karena tujuan ordonansi menolak permohonan guru yang tidak cakap dan juga guru yang berbahaya bagi tata tertib umum, maka tidak mengganggu kebebasan sekolah swasta dalam urusan kurikulum, azas-azas dan metode dalam pendidikan, sepanjang tidak mengandung pertentangan dengan ketertiban umum. Juga diminatkan perhatian bahwa bagi orang yang hanya memberikan pengajaran agama (termasuk ke dalamnya persiapan untuk pengajaran agama, misalnya membaca dan menulis aksara Arab), dan juga memberi pengajaran agama di samping mata pelajaran yang lain di sekolah, juga diperlukan ijin.

Tujuan kedua ordonansi untuk memberantas keburukan-keburukan, berupa memberi pengajaran dalam ruang kelas yang membahayakan kesehatan murid. Tetapi harus diperhatikan bahwa tidak boleh

digunakan norma dan ukuran yang ditetapkan untuk sekolah negeri atau swasta berbantuan. Sebelum kepala pemerintahan Daerah mengambil tindakan untuk menutup sekolah berdasarkan Pasal 13 dan 14, bahwa bangunan sekolah membahayakan atau tidak cukup berakomodasi untuk menampung jumlah murid, maka harus memberikan kesempatan kepada pengelola sekolah untuk mengadakan perbaikan. Terhadap penipuan dan pemberian harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan diadakan peraturan untuk mencegahnya, bahwa penggunaan nama sekolah yang seluruhnya atau sebagian sederajat atau mempunyai persamaan dengan sekolah negeri dan bersubsidi harus ada ijin dari Direktur Pendidikan dan Agama. Dengan sendirinya ijin tersebut diberikan jika sekolah dinyatakan setaraf.

Akhirnya dijelaskan pendirian Pemerintah terhadap masalah mengenai keharusan atau tidak berlakunya ordonansi di daerah-daerah Swapraja. Harapan Gubernur Jenderal ialah, bahwa di daerah-daerah Swapraja sedapat-dapatnya dibuat dan dikembangkan peraturan-peraturan yang sama, tetapi harus dihindari tindakan-tindakan yang melampaui atau melebihi ordonansi.

107. Catatan (notulen) Sidang Istimewa Dewan Hindia dengan diketuai oleh Gubernur Jenderal (De Jonge), tanggal 23 Desember 1932

Hadir: Gubernur Jenderal De Jonge, C.W. Bodenhausen wakil Ketua (Vice-President) Dewan Hindia, P.A.A. Kusumoyudo, Prof.J.van Kan, W.Ch. Hardeman, G.R. Erdbrink, anggota-anggota Dewan Hindia, P.J. Gerke Sekretaris Umum (Algemeen Secretaris). Sidang dibantu oleh Pejabat Sekretaris, Mr. W.G. Peekema.

Sidang dibuka jam 9 dan dibahas tindak lanjut Pemerintah dalam hubungan diberlakukannya Ordonansi Sekolah Liar untuk menghadapi situasi yang timbul dari perlawanan keras dari Taman Siswa. Pertukaran pikiran yang diadakan oleh H.J. Kiewiet de Jonge, tidak mencapai tujuannya. Demikian juga konsep surat edaran pemerintah, yang dikirimkan kepada Ki Hajar Dewantoro. Selisih pendapat terjadi antara Direktur Pendidikan dan Agama dengan Gubernur Jenderal

mengenai peraturan pelaksanaan seperti tercantum dalam surat edaran tersebut. B.J.O. Schrieke tidak bersedia mengadakan perubahan, tetapi Gubernur Jenderal menganggap perlawanan yang timbul sangat gawat, sehingga dalam prinsip ia cenderung untuk mengadakan penyesuaian dengan keberatan yang timbul, asal tidak menyimpang dari tujuan yang sebenarnya dari Ordonansi, yaitu menghindarkan keburukan-keburukan dalam pendidikan. Tujuan itu harus dipegang teguh tetapi menurut Gubernur Jenderal masih harus diperbincangkan bagaimana cara menjamin tercapainya. Ia setuju dengan B.J.O. Schrieke, bahwa pemerintah tidak perlu bereaksi terhadap aksi yang menentang dalam bentuk pengiriman telegram, pengambilan mosi dalam rapat, dsb., tetapi jika keberatan-keberatan itu disampaikan melalui jalan legal tidak akan a priori diambil sikap menolak oleh Pemerintah.

Dari anggota Dewan Rakyat, Wiranatakusuma, pernah disampaikan pertanyaan tertulis oleh Pemerintah pada tanggal 20 Desember 1932 dalam hubungan dengan gerakan menentang "Ordonansi Sekolah Liar", apakah pemerintah bersedia meninjau kembali peraturan-peraturan di dalamnya seperti telah disarankannya pada waktu perembuan dalam Dewan Rakyat untuk menggantikan syarat-syarat pemberian ijin dengan mengharuskan penyampaian pemberitahuan, dan selanjutnya diadakan tindakan represif oleh Pemerintah. Masalah ini telah dibicarakan dengan Pejabat Jaksa Agung, Mr. Vonk, yang melihat perspektif dengan muram. Ia ingin bagaimanapun juga mencegah perlawanan pasif, jika perlu dengan prakarsa pemerintah melalui pembentukan Panitia atau Komisi Penangguhan Pelaksanaan Ordonansi. Menurut Gubernur Jenderal pembentukan Komisi itu dapat diterima sebagai usul alternatif, jika dikehendaki oleh Dewan Rakyat. Menurut Gubernur Jenderal, mula-mula ordonansi itu direncanakan sebagai urusan pendidikan belaka, bukan sebagai perkara politik, tetapi kemudian menurut pendapatnya terkandung senjata politik di dalamnya apabila hal yang dimaksudkan oleh para perancangnya dianggap tidak perlu dan tidak diinginkannya. Menurut pertimbangan yang diperoleh dari Kejaksaan Agung dan Residen Sumatera Barat Van Heuven dianggap dari

sudut politik, bahwa sistim represif yang lama sudah cukup dan bahkan lebih mudah dilaksanakan.

Yang dipermasalahkan dalam sidang Dewan Hindia itu ialah, apakah Pemerintah akan mengambil tindakan atas prakarsa sendiri atau menunggu usul inisiatif Dewan Rakyat yang oleh Pemerintah harus dipertimbangkan, apakah akan menjurus ke arah kemungkinan mundur atau membentuk suatu Komisi. Menurut pendapat Bodenhausen sebaiknya Pemerintah mengambil sikap menunggu dan memberi kesempatan kepada usul inisiatif dalam Dewan Rakyat. Pandangannya itu dikemukakan sebagai pendapat pribadinya dan jawaban kepada anggota Dewan Rakyat Muhammad Husni Thamrin yang pada pagi hari sebelum rapat dalam Sidang Istimewa Dewan Hindia minta bicara dengannya. Baru setelah itu tibalah waktunya bagi Pemerintah untuk mempertimbangkan apa yang harus terjadi dengan Ordonansi Sekolah Liar. Sebelum ini dianggap belum waktunya untuk mengambil keputusan. Pemerintah harus menghindari setiap pengaruh dari luar, supaya bersikap lebih bebas terhadap usul inisiatif Dewan Rakyat. Terhadap pertanyaan Wiranatakusuma dianggap cukup memberikan jawaban yang singkat saja, sedangkan keputusan terakhir mengenai usul inisiatif tidak tergantung dari jawaban itu. Dalam perembuan dalam Dewan Rakyat pemerintah tidak perlu ikut campur, hanya wakil pemerintah untuk urusan pendidikan harus hadir jika diminta untuk memberikan informasi.

Dalam sidang istimewa Dewan Hindia orang sependapat bahwa tidak perlu bereaksi terhadap agitasi, melainkan hanya terhadap usul legal melalui Dewan Rakyat, tetapi pemerintah tidak perlu turut campur dalam perembuan mengenai usul inisiatif. Gubernur Jenderal merasa lega, bahwa pada umumnya pendapatnya dibenarkan untuk tidak a-priori menolak setiap perubahan dalam ordonansi yang baru itu. Konsep jawaban kepada Wiranatakusumah disusun, setelah oleh Gubernur Jenderal diminta pertimbangan dari wakil ketua Dewan Hindia, Direktur Pendidikan dan Agama, wakil pemerintah untuk urusan umum, dan pejabat Jaksa Agung, tetapi setelah dibicarakan dalam sidang jawabannya yang dikirimkan pada tanggal 24 Desember 1932 menjadi sebagai

berikut:

1). Apa yang diinginkan oleh penanya dalam hubungan perlawanan hebat terhadap "Ordonansi Sekolah Liar" bagi pemerintah menimbulkan keberatan untuk meninjau kembali peraturan yang telah dikeluarkan, dan pemerintah juga berkeberatan untuk mengadakan perubahan yang dimaksud oleh penanya, karena semuanya itu telah dibicarakan dalam Dewan Rakyat.

2). Meskipun Pemerintah menganggap jawaban ini sudah cukup, ingin juga ditambahkan untuk menghindari salah tanggapan terhadap pendirian pemerintah, bahwa padanya sama sekali tidak ada maksud politik dengan ordonansi tersebut, dan hanya ingin menciptakan jaminan untuk memberantas keburukan-keburukan yang tidak boleh dibiarkan di bidang pendidikan. Dari tujuan tersebut pemerintah tidak akan menyimpang walaupun timbul keberatan yang dalam pemberantasan keburukan tersebut sukar untuk dihindari. Di samping itu timbul pertanyaan apakah jalan yang akan ditempuh ordonansi untuk mencapai tujuan akan ternyata praktis untuk dapat digunakan, tetapi hal ini bagi pemerintah bukan persoalan yang prinsip.

108. Menteri Daerah Jajahan (De Graaff) kepada Gubernur Jenderal (De Jonge), tanggal 16 Januari 1933

Supaya oposisi terhadap ordonansi ditangani dengan semangat menyesuaikan diri. Dari berita-berita yang sampai kepadanya ternyata bahwa "Ordonansi Sekolah Liar" yang telah diberlakukan pada tahun yang telah lewat menimbulkan aksi perlawanan yang hebat dari pihak masyarakat Bumiputera. Masalah yang diatur dalam ordonansi itu sebagai akibat pengajuan usul inisiatif Wiranatakusumah cs. pada tanggal 11 Januari 1933 telah dibicarakan lagi dalam Dewan Rakyat. Dalam hubungan ini Menteri minta perhatian Gubernur Jenderal mengenai beberapa hal. Pertama dianggapnya perlu untuk diperhatikan bahwa aksi perlawanan tersebut, yang juga di negeri Belanda sangat menarik perhatian, tidak dapat dipungkiri lagi telah

mencapai proporsi politik yang lebih luas daripada yang dapat diimbangi oleh kepentingan di bidang pendidikan. Menurut Menteri, pemilihan waktu untuk mengeluarkan ordonansi yang tujuannya dapat disetujui olehnya, tidak tepat. Tidaklah mengherankan baginya bahwa peraturan tersebut ditentang dengan keras karena diberlakukan dalam waktu pemerintah sendiri terpaksa menghentikan seluruhnya atau sebagian dari perluasan pendidikan yang pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah, bahkan mengurangi pembiayaannya. Dalam keadaan demikian para guru dan pemilik "sekolah liar" yang jumlahnya naik sebagai akibat pengangguran yang sedang merajalela, merasa dihalangi dalam kebebasan bergerak dan terancam sumber penghidupannya oleh ordonansi, dan mereka itu ikut dengan para propagandis yang jumlahnya sama untuk menentang ordonansi. Di samping itu digunakan kesempatan untuk melancarkan gerakan massal menentang pemerintah. Akhirnya perlu dicatat, bahwa peraturan dalam ordonansi tersebut dalam beberapa hal menjangkau lebih jauh daripada yang dapat dibela dalam keadaan pemerintah yang sedang harus banyak mengurangi biaya pendidikan. Menurut Menteri, harus disesalkan bahwa ordonansi dikeluarkan dengan kebijaksanaan yang tidak luwes dan hati-hati. Dikuatirkannya bahwa akan timbul akibat-akibat yang pada waktu itu tidak dikehendaki.

Untuk menghadapi oposisi, oleh Menteri disarankan untuk mengambil sikap yang mendekati oposisi tanpa dihindari kekuatiran akan kehilangan wibawa dan prestise. Cara sebaik-baiknya untuk ini ialah dengan menempatkan masalahnya dalam proporsi yang lebih luas. Kepada Dewan Rakyat seyogianya diberitahukan bahwa pemerintah dalam keberatan praktis yang timbul, melihat alasan untuk meninjau kembali permasalahannya. Untuk mencapai penyelesaian harus sama sekali dibuat peraturan baru atas dasar lebih luas dan sedapat-dapatnya dengan menghindarkan keberatan-keberatan yang riil. Sekolah swasta tidak bersubsidi dapat dibagi ke dalam dua golongan. Salah satu dari padanya memberi pendidikan sangat sederhana dan karena itu harus dikenakan pengawasan secara sumir sekali. Sebenarnya pengawasan terhadap sekolah dari kategori ini bersifat politik-polisionil

menurut ordonansi dalam Lembaran Negara 1923 nomor 136 (jo. 1925 nomor 260) ditambah dengan beberapa ketetapan yang sifatnya seperti dimuat dalam pasal 12 dan 13 Ordonansi baru, yang bertujuan memberantas nama-nama sekolah yang menyesatkan dan pengawasan terhadap keadaan ruangan-ruangan kelas. Untuk mengadakan tindakan lebih jauh terhadap sekolah swasta dari golongan ini dianggap tidak perlu dan juga tidak bijaksana. Ke dalam golongan sekolah swasta inilah termasuk praktis sekolah liar yang ada pada waktu itu.

Kategori kedua mengenai sekolah swasta diadakan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan taktis, yaitu sekolah swasta yang harus seluruhnya dikenai pengawasan yang lebih keras seperti yang diuraikan dalam "Ordonansi Sekolah Liar" itu. Tetapi kepada ijazahnya, sepanjang yang memenuhi syarat, harus diberikan pengakuan efek sivil (effectus civilis), sehingga murid-muridnya dengan ijazah tersebut menurut keadaan tingkatan sekolahnya dapat diterima di kelas-kelas tertentu sekolah standar negeri, seperti sekolah "vervolg", sekolah peralihan, sekolah pertukangan atau pertanian dan juga kelas persiapan MULO.

Sudah selayaknya bahwa dalam praktek syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah swasta dari kategori kedua harus lebih tinggi daripada yang diuraikan sebagai syarat minimum dalam ordonansi. Barangkali dari sekolah liar yang ada hanya sedikit sekali, mungkin sama sekali tidak ada, yang dapat memenuhi syarat-syarat tersebut. Karena itu diharapkan bahwa jika akan diadakan peraturan seperti yang dimaksudkan oleh Menteri, sekolah-sekolah swasta tidak bersubsidi yang ada oleh para pengelolanya secara suka rela didaftarkan ke dalam kategori sekolah swasta pertama. Menteri menganggap bahwa dalam keadaan pemerintah dalam waktu yang lama masih harus membatasi pemberian subsidi dari keuangan negara, lambat laun akan muncul sekolah-sekolah swasta tidak bersubsidi yang dapat memenuhi syarat-syarat seperti digambarkan di atas.

Sebagai penjelasan atas anjurannya yang menunjukkan jalan yang harus ditempuh dalam menghadapi oposisi, dilampirkan oleh Menteri

bagian dari perencanaan peraturan yang mungkin berguna bagi Gubernur Jenderal. Diberitahukan juga, bahwa agar ada kesempatan bagi Gubernur Jenderal untuk mempertimbangkan saran Menteri itu, dikirimkan pada hari penulisan surat Menteri tersebut telegram di bawah nomor 12, yang memberitahukan bahwa sebelum menentukan sikap definitif dalam hubungan dengan Ordonansi Sekolah Liar agar menunggu sampai diterimanya surat yang dikirimkan per Pos pada tanggal 16 Januari 1933.*) Dipesankan oleh Menteri, bahwa untuk kepentingan politik dalam penyelesaian masalah tersebut dimintakan pertimbangan dari Menteri, jika perlu dikirimkan telegram.

*) Atas surat Menteri itu diberikan jawaban dengan surat tanggal 25 April 1933 nomor 264/15, Exh. (cap pos tanggal penerimaan) 12 Mei 1933 nomor 3. Isinya a.l.: Mengenai rancangan Menteri untuk menyelesaikan masalah Ordonansi Sekolah Liar dikemukakan pendapat, bahwa Gubernur Jenderal dan juga Dewan Hindia-Belanda menganggap tidak mungkin lagi untuk menangani masalah tersebut atas dasar yang ditunjukkan oleh Menteri, setelah apa yang sudah terjadi dan segala ulasan yang telah diberikan. Pemerintah dipersalahkan telah terlalu sering berubah pendapat: sekarang dibuat rancangan perubahan peraturan yang diharapkan akan dapat menenangkan keadaan dan memberikan cukup tumpuan kepada Pemerintah untuk mengadakan pembicaraan dengan Dewan Rakyat. Gubernur Jenderal menganggap cara penyelesaian demikian itu sudah cukup.

Usul inisiatif Wiranatakusuma telah disetujui oleh Dewan Rakyat dan juga oleh Pemerintah. (Lembaran Negara 1933 nomor 66). Ordonansi Sekolah Liar (Lembaran Negara 1932 nomor 533) untuk sementara tidak diberlakukan dan diganti dengan peraturan yang sejajar (analog) dengan peraturan yang dahulu telah ada (Lembaran Negara 1933 nomor 143).

Pada waktu usul inisiatif Wiranatakusuma dibahas, pemerintah mengajukan usul perubahan dalam Ordonansi Sekolah Liar (Lembaran Negara 1932 nomor 494), yaitu mengganti sistim ijin dengan sistim represi. Usul ini disetujui Dewan Rakyat dengan aklamasi, setelah diadakan amendemen mengenai tiga hal. Salah satu dari padanya ialah usul Wiryopranoto yang diterima oleh 27 suara lawan 21, dengan akibat bahwa Ordonansi hanya mengatur pendidikan kepada anak-anak dan tidak lagi pendidikan kepada orang dewasa. Rencana ordonansi ditetapkan, setelah diadakan amendemen oleh Dewan Rakyat (Lembaran Negara 1933 nomor 372) dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1934 (Lembaran Negara 1933 nomor 449).

PENGHEMATAN DI BIDANG PENDIDIKAN
DAN DEWAN RAKYAT

109. Dari Gubernur Jenderal (De Jonge) kepada Menteri Daerah Jajahan (De Graaff), tanggal 29 September 1932

Gubernur Jenderal De Jonge memaparkan tindakan-tindakan penghematan yang diambil dalam hubungan dengan kebijaksanaan di bidang pendidikan sebagai akibat krisis ekonomi. Dibahas kritik terhadap tindakan tersebut dalam Dewan Rakyat yang menolak Anggaran Biaya Pendidikan untuk tahun 1933. Penolakan terjadi pada tanggal 26 Agustus 1932 dengan 31 lawan 27 suara. Penolakan itu tidak datang dengan tiba-tiba. Sejak permulaan pembukaan sidang, yang dimulai dengan perembukan interpelasi Sutardjo mengenai apa yang disebut pembatasan MULO (MULO contingentering) ternyata dalam kalangan para anggota Dewan Rakyat terdapat pandangan dan keinginan yang menimbulkan dugaan bahwa kebanyakan dari para anggota mungkin tidak akan dapat menyetujui keharusan diadakan penghematan dengan segera. Pembatasan MULO terdiri atas berbagai peraturan untuk membatasi jumlah MULO. Menurut pemerintah pada MULO terdapat murid tidak sedikit jumlahnya yang dinilai tidak dapat mengikuti pelajaran sehingga dengan demikian biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan di sekolah itu dianggap terlalu tinggi yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Interpelasi Sutardjo tersebut melahirkan empat mosi, kesemuanya disetujui dan bertujuan untuk membatalkan peraturan pembatasan (Mosi-Sutardjo) atau memperlunak peraturan itu (Mosi-Suroso, -de Hoog - dan Dwidjosewoyo).

Menurut Gubernur Jenderal, meskipun perdebatan dan mosi-mosi yang dihasilkan dalam Dewan Rakyat memberikan alamat kurang menyenangkan, ia tidak melihat di dalamnya perselisihan pendapat begitu besar mengenai pokok-pokok persoalan tertentu dalam politik pendidikan yang ditempuh. Tetapi yang dilihatnya ialah perlawanan secara intuitif terhadap ancaman kepada kepentingan

yang dirasakan oleh kebanyakan orang, terutama orang Bumiputera, sangat berat. Kebanyakan anggota mengakui adanya keharusan untuk mengadakan penghematan pada umumnya, tetapi sebagian besar dari mereka itu segan untuk menarik konsekwensi penghematan itu ke dalam bidang pendidikan yang lebih khusus disediakan untuk penduduk Bumiputera.

Oleh sejumlah besar anggota ditolak setiap penghematan pada sekolah Bumiputera (Sekolah Desa dan Sekolah Kelas Dua). Juga banyak dari mereka menolak penghematan pada sekolah konkordan (sekolah yang sama sejenis dengan sekolah di negeri Belanda). Atas nama Fraksi Pegawai Pangrehpraja Bumiputera yang diajukan oleh Wiranatakusuma dalam pembicaraan termijn pertama harapan-harapan dikehendaki sebagai berikut: (a) melanjutkan perluasan sekolah desa dan sekolah kelas dua; (b) tidak mengurangi jumlah HIS; dan (c) melunakkan peraturan pembatasan MULO dengan menerima mosi-mosi Suroso dan Dwidjosewoyo. Jika harapan-harapan tersebut tidak dipenuhi, fraksinya akan memberikan suara menolak terhadap rancangan anggaran biaya. (Handelingen volksraad 1932-1933, hal.804 dst.). Sikap menolak yang jelas ada itu tetapi tidak tegas wujudnya, akhirnya berpusat pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Wiranatakusuma atas nama fraksinya dan atas nama fraksi beraliran bebas (*vrijzinnige fraksi*), kelompok Katholik, dan anggota-anggota De Dreu, Dwidjosewoyo, Notosutarso, serta Van Mook dalam pembicaraan termijn kedua. Pertanyaan-pertanyaan itu ialah sebagai berikut:

1. Bersediakah pemerintah untuk dengan secepatnya membentuk suatu panitia yang bersifat representatif seluas mungkin yang:
 - a) akan bertugas mempelajari seluruh sistim pendidikan dengan tujuan mengadakan pembaharuan yang dapat menjamin sistim pendidikan tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat Bumiputera dan berkembang di masa depan yang dekat dengan lebih memuaskan;

- b) berdasarkan tugasnya berkewajiban untuk juga mengadakan penilaian terhadap peraturan yang telah dibuat mengenai penghematan dengan disesuaikan kepada perubahan-perubahan yang perlu diadakan;
 - c) berkewajiban sebelum tanggal 15 Juni 1933 merumuskan usul-usul dan mengumumkannya dan harus menyediakan landasan bagi pembaharuan sistim pendidikan, yang harus diadakan oleh pemerintah serta diajukan kepada Dewan Rakyat.
2. Bersediakah pemerintah dalam waktu menunggu terlaksananya pembaharuan tersebut untuk meniadakan semua peraturan yang menyangkut pengadaan kebutuhan pendidikan yang menurut sifat, luas dan penempatan personalia, dan dalam hubungan ini bersediakah pula untuk mengadakan perubahan dalam anggaran biaya tahun 1933 dan mengadakan tambahan kepada anggaran belanja sepanjang yang di dalamnya telah diadakan perhitungan dengan peraturan penghematan tersebut?

Menurut Gubernur Jenderal sebagai pengungkapan keberatan yang tidak jelas wujudnya diinginkan sesuatu yang lain, tetapi tidak mengetahui ke mana arah yang harus ditempuh dan dari sebab itu diminta pembentukan suatu panitia yang jika saran ini diterima, tugasnya sebenarnya akan mengambil alih kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan. Uraian panjang lebar mengenai pertanyaan-pertanyaan Wiranatakusuma tersebut di atas dibuat oleh Prof. B.J.O. Schrieke dalam surat ke negeri Belanda tanggal 1 September 1932 nomor 282x/A Rahasia. Antara lain dijelaskan, bahwa dikehendaki pembentukan suatu panitia yang bertugas menyusun rencana pembaharuan sistim pendidikan dan sarannya akan diambil alih oleh Pemerintah. Sebelum diadakan pembaharuan hendaknya dihentikan semua penghematan di bidang pendidikan. Menurut B.J.O. Schrieke penghentian penghematan itulah yang sebenarnya diinginkan. Dalam jawaban yang disampaikan dalam termijn kedua kepada Dewan Rakyat, dikemukakan bahwa pemerintah tidak berkeberatan terhadap

pembentukan suatu panitia penelaah yang memberikan kemungkinan bekerja-sama untuk pemerintah.

Oleh Gubernur Jenderal dijelaskan dalam suratnya tersebut di atas bahwa pemerintah mengambil pendirian tetap terhadap saran pembaharuan sistim pendidikan yang tidak mungkin diadakan dalam masa krisis ekonomi yang sedang dialami, sedangkan belum diketahui bagaimana mengadakan stabilisasi pendapatan negara. Dipaparkannya dalam ikhtisar kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan. Sebelum ada krisis ekonomi dan diadakan penghematan secara luas, telah didapat kepastian bahwa dalam sistim pendidikan sepanjang tahun tahun yang telah dilewati tidak terdapat eksese-eksese memaksa untuk mengadakan pembaharuan secara hebat dalam penyediaan sekolah-sekolah. Hal ini teristimewa berlaku bagi sekolah-sekolah konkordand yang karena perluasan HIS yang tidak sistematis, juga karena perundang-undangan subsidi yang terlalu dermawan tetapi secara finansial sukar diawasi, dengan cepat keluar dari keseimbangan terhadap keuangan Hindia-Belanda dan terhadap kebutuhan masyarakat akan tenaga-tenaga yang (dapat) berbahasa Belanda. Maka karena pemerintah terpaksa oleh krisis ekonomi mengadakan secara sungguh-sungguh penghematan di bidang pendidikan, maka kesempatan ini digunakan untuk juga melaksanakan sanitasi di bidang pembiayaan. Kendatipun ada perlawanan bagaimanapun kerasnya penghematan harus diadakan. Demikian menurut Gubernur Jenderal De Jonge. Penghematan itu terbagi ke dalam beberapa kategori.

Kategori pertama penghematan meliputi penghapusan tunjangan, menutup kursus-kursus yang tidak berguna, menggabungkan dan menyatukan sekolah-sekolah dari tipe yang sama atau mempunyai persamaan tipe, menambah jumlah murid dalam setiap kelas dan memperpanjang jam pelajaran, dlsb. Ke dalam kategori ini juga termasuk penambahan guru-guru Bumiputera ke dalam personalia HIS dan perubahan program pelajarannya, sehingga dalam tiga tahun ajaran pertama bahasa Belanda dijadikan mata pelajaran dan tidak sebagai bahasa pengantar. Selanjutnya diadakan "perhitungan" subsidi dengan

sekolah swasta bersubsidi, yaitu menyetorkan kembali ke dalam kas negara kelebihan jumlah uang yang terdiri jumlah uang sekolah dengan subsidi yang diterima, dikurangi biaya eksploitasi normal.

Ke dalam kategori penghematan kedua termasuk perubahan, jika mungkin sekolah-sekolah kelas dua menjadi sekolah-sekolah desa dengan sekolah "vervolg" dan perubahan HIS menjadi sekolah kelas dua dengan satu sekolah peralihan. Ke dalam reorganisasi perangkat persekolahan ini termasuk pembentukan sekolah tipe baru sebagai percobaan dalam tahun ajaran 1932-1933, yaitu sekolah kelas dua dengan bahasa Belanda sebagai mata pelajaran. Ke dalam rasionalisasi perangkat pendidikan yang dimaksudkan ini juga termasuk penutupan sekolah-sekolah rendah Eropa yang dinilai kembang-kempis, susah untuk hidup terus tetapi enggan untuk mati, juga HIS, sekolah khusus dan "schakelschool" dalam kondisi seperti itu, demikian pula semua kelas persiapan (pada HIS).

Dengan tujuan memperbaiki taraf pendidikan seperti dimaksudkan dengan rasionalisasi di atas, ialah pembatasan MULO (MULO contingentering), yang menjadi bahan perdebatan hangat dalam Dewan Rakyat. Untuk mendekatkan keinginan di dalam Dewan Rakyat kepada penyelesaian masalah, dibentuk oleh B.J.O. Schrieke suatu panitia teknis yang bertugas merancang peraturan ujian masuk MULO, yang sedapat-dapatnya adil dan merata. Dengan tujuan yang sama diperkeras ketentuan-ketentuan mengenai murid-murid yang harus dikeluarkan dari AMS (sama dengan SMA kita sekarang) *) dan peningkatan syarat-syarat ujian masuknya. Peraturan ini diadakan juga dengan tujuan untuk menghindari sedapat-dapatnya pemborosan biaya pendidikan dan supaya pendidikan lanjutan sedapat mungkin hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar dapat memanfaatkannya.

Semua pihak harus terkena akibat krisis. Supaya pemerintah dapat dengan adil menyediakan sarana pendidikan untuk seluruh kepulauan Nusantara dengan merata, pemerintah berusaha menggunakan sistem dengan norma-norma yang sama untuk seluruh Hindia Belanda.

*) Agemene Middelbare School

Demikian menurut Gubernur Jenderal. Dalam hubungan ini a.l. ditetapkan pedoman baru untuk melaksanakan Peraturan Umum Subsidi Sekolah Bumiputera (Algemene Subsidieregeling Inlands Onderwijs, Lembaran Negara 1932 nomor 16), yang menentukan norma-norma untuk mendirikan dan mempertahankan sekolah swasta bersubsidi. Serentetan peraturan pelaksanaan yang baru mengenai subsidi juga ditetapkan untuk berbagai daerah di seluruh Nusantara dengan tujuan meniadakan sedapatnya perbedaan-perbedaan.

Kategori penghematan yang boleh dikatakan sama sekali berdiri sendiri ialah penghematan mengenai pendidikan guru. Di sini dianut prinsip pendidikan guru untuk keperluan sendiri, baikpun di bidang pendidikan Barat maupun di bidang pendidikan Bumiputera. Masalah ini setelah dibahas dalam Dewan Rakyat menimbulkan keberatan dari pihak golongan Katholik yang berkepentingan dalam sekolah pendidikan guru di Muntilan terhadap konsekwensi praktis dari peraturan baru tersebut (Lembaran Negara 1932 nomor 366, Subsidie Ordonantie Opleiding Inlandsche Leerkrachten / Ordonansi Subsidi Pendidikan Guru Bumiputera). Menurut peraturan yang lama (Lembaran Negara 1924 nomor 154) lulusan sekolah normal Muntilan mempunyai hak yang sama seperti lulusan sekolah normal negeri untuk dapat ditempatkan mengajar di sekolah negeri.

Keberatan Dewan Rakyat terhadap peraturan-peraturan penghematan menurut Gubernur Jenderal ditujukan kepada politik pemerintah di bidang pendidikan pada umumnya, seperti dinyatakan dalam pertanyaan pertanyaan yang dirumuskan oleh Wiranatakusuma dan C.C.van Helsdingen. Pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan oleh Van Helsdingen ialah sebagai berikut:

1. Apakah pemerintah bersedia melepaskan pendiriannya yang semula dan mengakui, bahwa pada saat ini dipandang urgent dan perlu untuk mengadakan tinjauan kembali secara insidentil seluruh sistim pendidikan yang bersifat umum?
2. Maukah pemerintah mengakui perlunya secara mendesak untuk mengadakan reorganisasi sistim pendidikan, supaya di masa depan yang dekat dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia

dan karena itu bersediakah pemerintah dengan segera secara intensif dan tangkas berbalik pikiran, agar secepatnya mengajukan usul-usul yang dirumuskan kepada Dewan Rakyat?

3. Bersediakah pemerintah dibantu oleh suatu panitia yang diangkat oleh pemerintah dan disusun sedemikian rupa dengan diperlengkapi dan dapat menggunakan prasarana dan data, sehingga dapat bekerja keras dengan sebaik-baiknya dan berhasil?

(Handelingen Volksraad / Kegiatan Dewan Rakyat 1932-1933, halaman 1495-1496).

Menurut keyakinan Gubernur Jenderal, pada pihak kelompok Bumiputera dalam Dewan Rakyat timbul perlawanan yang paling keras terhadap penghematan di bidang sekolah konkordan. Pemerintah tidak mau mundur dari pendiriannya, dan karena itu juga tidak mau melangkah lebih jauh daripada bersedia membentuk suatu panitia seperti yang telah dilaksanakan. Karena pemerintah berkeyakinan, bahwa dalam masa krisis dengan segala faktornya yang tidak pasti, tidak berguna dan tidak tepat untuk mendiskusikan sistim pendidikan dengan kemungkinan pembentukan panitia untuk mengadakan perubahan. Karena itu pemerintah menolak untuk bersedia berbalik pikiran seperti diminta oleh anggota-anggota C.S.P. (Christelijk Staatkundige Partij = Partai Kenegaraan Kristen) Van Helsdingen dan Notosutarso, sehingga dengan demikian pemerintah berani mengambil risiko penolakan mereka itu terhadap anggaran biaya. Gubernur Jenderal menyesalkan sikap Dewan Rakyat untuk menggunakan pemungutan suara sebagai senjata ampuh dan sebagai cara menyatakan rasa tidak senang terhadap penghematan di bidang pendidikan. Ia mempercayakan kepada pertimbangan Menteri Daerah Jajahan untuk mengambil alih rancangan anggaran biaya seperti yang telah disusun secara keseluruhan dan diajukan kepada Parlemen di negeri Belanda (Staaten Generaal) untuk ditetapkan. *)

*) Anggaran biaya pengajaran ini ditetapkan oleh Staten Generaal tanpa perubahan. Untuk memenuhi kesediaan kepada Dewan Rakyat

Pada bagian akhir suratnya Gubernur Jenderal mengemukakan pendapat pribadinya mengenai Direktur Pendidikan dan Agama B.J.O. Schrieke yang sikapnya di dalam dan di luar Dewan Rakyat serta tindakannya mendapat kecaman. Prof. Schrieke dianggap oleh kebanyakan anggota Dewan Rakyat sebagai biang keladi yang tidak saja menciptakan kesulitan-kesulitan, tetapi juga mempertajam kesulitan dengan sikapnya yang tidak mau mengalah dalam tawar-menawar. Tetapi Gubernur Jenderal membelanya terhadap Menteri. Ia sendiri dan katanya para penasehatnya yang terdekat, Dewan Hindia-Belanda dan Panitia Anggaran Biaya Kedua ^{**}) memberikan pengakuan dan penghargaan sepenuhnya kepadanya serta kepada rencana penghematan dalam Departemennya. Ia dinilai di antara orang-orang yang tidak banyak jumlahnya sebagai yang mampu mengurus Departemen Pendidikan dan Agama dalam keadaan krisis itu. Gubernur Jenderal masih memerlukan tenaganya.

dan dalam hubungan kehendak yang tegas dari Staten Generaal dibentuklah dengan Keputusan Pemerintah (G.B. = Gouvernements Besluit) tanggal 22 April 1933 nomor 10, suatu "Panitia Penasehat Pembaharuan Pendidikan" yang bertugas mengadakan penelitian mengenai kemungkinan-kemungkinan untuk pembaharuan sistem pendidikan, atau mengadakan pembagian biaya secara lain untuk memungkinkan penyediaan sarana pendidikan yang lebih baik. Sebagai ketuanya diangkat J. Zeylemaker.

Dalam laporan akhir, yang dibuat oleh panitia tersebut (Pebruari 1935), diberitahukan bahwa panitia tidak berhasil memecahkan masalah-masalah yang dihadapkan kepada panitia. Hal itu disebabkan sebagai akibat susunan panitia yang terbentuk, dan sebagian besar terdiri dari wakil-wakil partai politik atau kelompok politik dan untuk sebagian lagi sebagai akibat faktor-faktor lain, yang tidak membantu (Cf. Laporan Umum Tentang Pendidikan di Hindia-Belanda 1932-1933, I, hal. III dan IV; 1934-1935, I, hal. XI dan XII).

- ****) Dalam kasus-kasus yang jarang terjadi, apabila dipaksa oleh keadaan untuk mengadakan penghematan dan untuk itu ada alasannya, maka dibentuk suatu Panitia Anggaran Biaya. Panitia ini harus membahas rancangan anggaran biaya Hindia-Belanda yang telah disusun oleh Lembaga Umum Keuangan Negara (Algemene atau Generale Thesaurie). Di dalam panitia ini diangkat disamping anggota-anggota Dewan Hindia-Belanda dan para Direktur Departemen-departemen, juga satu atau lebih anggota Dewan Rakyat serta wakil-wakil swasta, misalnya dari pers, Direktur Javasche Bank. Pengangkatan panitia ad hoc seperti itu terjadi untuk kedua kalinya, untuk membahas anggaran biaya Hindia-Belanda untuk tahun 1933.

DESENTRALISASI PENDIDIKAN RAKYAT

110. Dari Menteri Daerah Jajahan (Colijn) kepada Gubernur Jenderal (De Jonge), tanggal 16 Oktober 1934

B.J.O. Schrieke sebagai Direktur Pendidikan dan Agama dengan surat pengantar tanggal 1 Agustus 1932 mengajukan rancangan baru, Ordonansi penyerahan sekolah desa di Jawa dan Madura kepada kabupaten dan kotapraja dengan memperhatikan, walaupun dalam batas tertentu, gagasan Menteri De Graaff.

Menteri Daerah Jajahan yang baru, Colijn, mengirimkan telegram tanggal 14 September 1933 nomor 167 untuk memberitahukan kepada Gubernur Jenderal De Jonge, bahwa usul penyerahan itu dianggapnya prematur, karena masih ada masalah yang perlu dipertimbangkan mengenai pembaharuan sistim pendidikan dan otonomi desa. Karena itu sangat diharapkannya bahwa rencana usul ordonansi tidak diajukan sebelum diminta pertimbangan dari Menteri.

Waktu diadakan pembahasan mengenai masalah pemberian pensiun kepada guru-guru desa, timbul lagi persoalan mengenai penyerahan sekolah desa kepada kabupaten dan kotapraja. Masalahnya diajukan kepada Menteri dengan surat Gubernur Jenderal tanggal 18 Juni 1934 nomor 441/13. Pandangan Menteri mengenai cara yang harus diikuti untuk mengurus masalah tersebut dengan beberapa persoalan yang bersangkutan diuraikan dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal tanggal 16 Oktober 1934 nomor 21/1004.

Dengan mempelajari surat-menyurat yang telah diadakan sebelum masa jabatannya mengenai maksud mengadakan penyerahan sekolah desa kepada kabupaten dan kotapraja, Menteri Colijn tidak memperoleh keyakinan apakah penyerahan yang dimaksudkan itu diperlukan atau menjadi suatu keharusan. Ia malahan sependapat dengan Menteri pendahulunya, De Graaff, yang membeberkan keberatan-keberatannya dalam surat tanggal 8 Agustus 1931 nomor 1/612. Colijn mengingatkan kepada pendirian dan perkembangan sekolah desa.

Pendirian sekolah desa yang dimulai dalam tahun 1907, dimaksudkan supaya massa yang luas dari penduduk mendapat pendidikan rendah sederhana. Untuk mendekati tujuan itu sekolah desa harus diadakan atas dasar seluas-luasnya dalam suasana masyarakat Bumiputera. Pengikatan kepada desa diperlukan dengan sangat. Kerja sama dengan masyarakat desa diharapkan dapat dirangsang dengan partisipasi desa dalam pendirian dan pemeliharaan sekolah desa itu, berdasarkan prinsip swadaya dan swasembada desa. Menteri tidak dapat menyetujui untuk mengubah dasar prinsipil dari sekolah desa itu. Ia tidak sependapat dengan kesimpulan B.J.O. Schrieke dll. bahwa usaha menarik perhatian masyarakat desa kepada sekolah desa untuk bekerja sama menemui kegagalan.

Keberatannya kepada usul Schrieke ialah bahwa karena terjadi kesalahan-kesalahan ia tidak mau melihat kepada prinsip, tetapi dengan tidak berusaha menyingkirkan rintangan-rintangan untuk mengadakan perbaikan, ia menjatuhkan seluruh sistim untuk diganti dengan yang baru yang nilainya belum diuji.

Menteri Colijn tidak sependapat bahwa usaha untuk membawa desa dalam kerja sama penyelenggaraan sekolah desa harus dianggap gagal sama sekali. Dalam nota Sekretaris Umum mengenai "penyerahan sekolah desa" dikutip dari memori penjelasan tentang rancangan Schrieke bahwa di bagian terbesar Jawa dan Madura sebagian besar dari penduduk menyadari kegunaan sekolah desa dan sekolah desa itu menjadi lebih populer, laju perkembangan murid yang masuk makin naik sehingga tidak perlu ada perintah halus untuk mendapatkan murid. Dalam nota tersebut ditambahkan bahwa percobaan itu sama sekali tidak gagal. Tetapi hasil yang tercapai juga tidak boleh terlalu dibesarkan. Perkembangan desa dengan sekolah desanya tidak selancar seperti diharapkan semula.

Dalam nota Sekretaris Umum itu dicoba mencari sebab-sebab dari pada kemacetan perkembangan tersebut di atas. Sebagai salah satu sebab dianggap bahwa cara kerja yang diikuti terlalu bercorak Barat dan terlalu berusaha mencapai kesempurnaan (perfeksi), sehingga

sekolah desa menjadi terasing dari desanya sendiri. Penyimpangan dari titik tolak bahwa "sekolah desa untuk Jawa dan Madura harus sebagai sekolah daerah (dorpsschool) di negeri Belanda pada jaman dahulu", terjadi ketika sekolah desa disamakan dengan tiga kelas terendah dari sekolah standar dan kemudian, terutama ketika Mr. Creutzberg menjadikan sekolah desa jadi "onderbouw" dari sekolah rendah. Menurut nota itu tidak mengherankan bahwa sekolah desa itu dengan demikian makin terasing dari penduduk desa. Inilah menurut Colijn yang terutama ikut menyebabkan kegagalan. Prinsip swadaya dan swasembada dalam pembiayaan tidak dipegang teguh, yaitu prinsip yang ditetapkan dalam tahun 1907. Lebih-lebih sejak tahun 1927 diadakan desakan untuk mempercepat perluasan sekolah dan menaikkan syarat terhadap bangunan sekolah dan inventaris, terjadi penyimpangan yang makin jauh dan makin banyak perkosaan terhadap prinsip semula untuk mempertahankan corak sederhana dari sekolah desa yang sesuai dengan kebutuhan desa. Tidak ada kesabaran untuk menunggu hasil pertumbuhan yang wajar. Gagasan bahwa sekolah desa itu sekolah rakyat untuk penduduk desa makin dilepaskan, sedangkan peningkatan kurikulum dan pelepasan kurikulum itu dari suasana desa mengakibatkan kenaikan biaya di bidang materiil dan personalia.

Usaha semula untuk memberikan tempat kepada sekolah desa di desa ialah antara lain dengan menyerahkan pengawasan terhadapnya kepada kepala desa dan pengadaan lapangan kerja oleh kepala desa, sehingga masyarakat desa ikut mempunyai bagian di dalamnya. Politik atau kebijaksanaan itu secara berangsur-angsur ditinggalkan. Maka dengan demikian terjadilah di sana sini, bahwa guru desa tidak tinggal di desa tempat sekolah, tetapi jauh dari desa itu. Jalan untuk kembali kepada gagasan semula mengenai penyelenggaraan sekolah desa akan tertutup sama sekali, jika seluruh desa itu dilepaskan dari desa dan diserahkan kepada kabupaten. Demikian kata Colijn. Sekolah desa harus dikembalikan kepada desa dengan membiarkan desa mempertahankan suasananya sendiri. Menurut garis ini

harus dimajukan dan diperkuat otonomi desa. Tetapi untuk menghindarkannya dari kebekuan dan kehancuran harus diberikan isi kepada otonomi desa itu, yaitu dengan mengembangkan sekolah desa. Karena itu penyerahan sekolah desa kepada kabupaten harus ditolak. Dalam hubungan dengan rancangan peraturan baru mengenai otonomi desa menjadi keharusan untuk menjauhkan Dewan Kabupaten dan pengaruhnya di luar desa. Itulah sebabnya, kata Colijn, sekolah desa tidak boleh diurus oleh pemerintahan kabupaten. Harus diusahakan dengan mengarahkan kepada pemeliharaan dan penguatan ikatan antara sekolah desa dengan desa.

Sementara itu menurut Menteri harus diperhitungkan kemungkinan bahwa beberapa desa tidak mampu menyediakan biaya untuk menyelenggarakan dan memelihara sekolah, maka dalam hal ini harus ada bantuan keuangan dari atas. Pertama-tama hal itu termasuk kewajiban kabupaten yang membawahi desa tersebut, dan jika kabupaten yang bersangkutan tidak sanggup maka propinsi yang harus memberi bantuan. Baru jika terpaksa, akhirnya pemerintah Pusat yang harus menyelesaikannya. Tetapi bantuan dari pemerintah Pusat itu tidak boleh diberikan secara langsung, tetapi dengan perantaraan kabupaten yang dengan ikut serta dalam pemerintahan memberikan perantaraannya.

Pemerintah Pusat juga harus sedapat-dapatnya tidak ikut bertindak dalam urusan daerah dan lokal. Untuk itu pertama-tama pengawasan teknis dari pusat harus dipindahkan kepada kesatuan-kesatuan otonomi yang lebih rendah. Colijn sependapat dengan De Graaff, yang dalam surat tanggal 8 Agustus 1931 nomor 1/62 menganggap perlu untuk mengadakan Kantor Inspeksi di pusat propinsi, yang memimpin dan mengatur pengawasan sehari-hari terhadap sekolah desa. Pengawasan itu dilakukan oleh petugas-petugas yang diangkat oleh propinsi sebagai pegawai dengan pangkat sederhana, dan diperbantukan kepada kabupaten. Dengan cara demikian, kata Colijn, baru dapat dikatakan ada desentralisasi dan dilakukan dengan semangat pembaharuan pemerintahan dengan mengadakan secara tepat pembagian

tugas antara berbagai instansi otonom. Ia tidak menolak bahwa jika pembagian tugas itu diadakan di bidang pendidikan akan menimbulkan keberatan yang terbatas pada sekolah desa. Karena itu dalam telegram tanggal 14 September 1933 nomor 167 ia menyatakan pandangannya bahwa masalah itu bersangkut-paut dengan pembaharuan sistim pendidikan.

Mengenai masalah memberi pensiun kepada guru desa dinyatakan bahwa masalah itu telah seluruhnya diselesaikan berdasarkan premise bahwa guru desa yang bersangkutan akan dijadikan pegawai kabupaten/kotapraja. Setelah kasus itu tidak ada kemungkinan lagi untuk memberi pensiun kepada guru desa. Menurut sistim yang telah dibeberkan di atas, secara prinsipil tidak boleh menjadikan guru desa sebagai pegawai pemerintah. Menurut pandangannya tidak perlu diadakan peraturan pensiun untuk mereka seperti juga tidak ada untuk pamong desa. Jika desa sendiri menyediakan dana untuk menjamin hari tua untuk para petugasnya, ia tidak berkeberatan.

IKHTISAR MENGENAI KEBIJAKSANAAN

PENDIDIKAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENDUDUK BUMIPUTERA

111. Dari Menteri Daerah Jajahan (Welter) kepada Gubernur Jenderal (Tjarda van Starkenborgh Stachouwer), tanggal 13 Desember 1937 nomor 8/1170

Bahwa dalam meneliti tindakan-tindakan yang diambil di bidang penyediaan pendidikan di Hindia-Belanda dalam sepuluh tahun terakhir perhatiannya terutama tertarik kepada perkembangan yang sangat pesat dari sistim pendidikan yang bercorak Barat. Dalam sistim ini dibangun dalam waktu yang singkat suatu aparatur pendidikan yang menurut konsepsinya dimaksudkan supaya tiap orang Bumiputera mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan Barat setinggi-tingginya.

Dalam waktu yang pendek telah dibangun oleh negeri Belanda di Hindia-Belanda suatu bangunan pendidikan yang mengesankan, kata Welter, terdiri dari HIS, "Schakelschool", MULO, AMS (yang sebagian yaitu bagian Sastra Timur Klasik, tidak pernah mencapai tingkatan perkembangan seperti bagian B), dan sekolah-sekolah tinggi. Anak desa yang sederhana dihubungkan oleh sistim sekolah yang sambung-menyambung dengan perguruan tinggi. Menteri Welter mengatakan bahwa oleh Menteri De Graaff dalam surat kepada Gubernur Jenderal De Jonge tanggal 8 Agustus 1931 nomor 1/162, digambarkan tugas yang dipikul oleh negeri Belanda. Katanya sangat jarang terjadi dalam sejarah dunia, pemerintah kolonial harus memenuhi tuntutan untuk mengantarkan berjuta-juta penduduknya yang berlainan ras dan hidup di bawah kekuasaannya, ke dunia pengetahuan Barat yang baru terbuka pintunya untuk hanya sekelompok kecil dari penduduk itu.

Pembentukan Komisi Pendidikan Bumiputera-Belanda dalam tahun 1927 yang masih ada di tengah-tengah periode konjungtur tinggi, menurut Menteri Welter merupakan suatu tanda pertama sebagai pendahuluan kesadaran. Terhadap konstruksi bangunan sistim persekolahan mulai diajukan keberatan-keberatan dari tiga sudut: (1) lama-kelamaan negeri Belanda tidak akan mampu mengirimkan tenaga guru yang diperlukan; (2) sistim pendidikan tersebut di bidang finansial akan terlalu melampaui kekuatan; dan (3) akhirnya diragukan kegunaan efektivitasnya di bidang sosial-ekonomis dapat dipertanggung jawabkan. Welter sependapat dengan pandangan De Graaff dan Colijn, bahwa perhatian pokok harus dipusatkan kepada pengembangan sekolah desa. Perluasan dengan terus-menerus sekolah desa dengan pemeliharaan pendalaman pendidikan dianggapnya sebagai usaha pokok yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk tahun-tahun berikutnya. Pengerahan dana dan daya terbesar harus dicurahkan kepada perluasan jumlah sekolah desa sebagai "onderbouw" umum dari sekolah rendah.

Welter mengingatkan bahwa pada masa jabatannya terdahulu sebagai Menteri Daerah Jajahan dalam suratnya tanggal 16 Januari 1926

nomor 21/72, telah memberikan perhatian khusus kepada sekolah desa dan perluasannya serta pendalaman pengajarannya (Vi.85). Ia sependapat dengan De Graaff dan Colijn, bahwa sebagian besar dari kekuatan yang disediakan harus digunakan untuk perluasan pendidikan bagi rakyat. Ia minta ikhtisar ringkas mengenai usaha-usaha yang telah dilaksanakan dalam politik atau kebijaksanaan pendidikan terhadap penduduk Bumiputera selama 10 tahun terakhir.

Ikhtisar itu dimaksudkan sebagai ringkasan gambaran historis mengenai kebijaksanaan yang dijalankan, hasil-hasil yang tercapai dari rencana yang dikerjakan, dan kemungkinan persiapan membuat peraturan atau penelitian yang sedang diadakan mengenai tindakan-tindakan yang akan diambil. Juga diharapkan tinjauan mengenai sekolah-sekolah negeri dan sekolah-sekolah swasta yang diprakarsai perkumpulan Zending dan Misi, serta secara khusus sekolah untuk remaja putri. Diharapkannya ikhtisar itu sudah diterima pada kira-kira akhir Januari 1938, sebelum diadakan perembuan mengenai anggaran biaya Hindia-Belanda yang akan datang. Pembahasan prinsipil mengenai pendidikan untuk Bumiputera dapat diadakan kemudian.

112. Direktur Pendidikan dan Agama (P.J.A. Idenburg) kepada Gubernur Jenderal (Tjarda van Starkenborgh Stachouwer), tanggal 28 Nopember 1938

P.J.A. Idenburg sebagai Direktur Pendidikan dan Agama tidak dengan segera memenuhi permintaan Menteri Welter. Hal itu diberitahukan kepada Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer dengan surat tanggal 4 Maret nomor 39/A. Rupanya ia mau menyusun sendiri ikhtisar yang diminta itu, tetapi karena kesibukan tidak dapat lebih cepat menyelesaikannya. Dengan surat kepada Gubernur Jenderal tanggal 28 Nopember 1938 nomor 298x/A Rahasia, disampaikan ikhtisar yang telah disusunnya. Ia tidak dapat menyajikan ikhtisar lengkap dengan keterangan cukup dan disertai dokumentasi

mengenai segala peristiwa di bidang pendidikan selama sepuluh tahun terakhir, dan ia berpendapat bahwa ikhtisar lengkap itu juga tidak diperlukan oleh Menteri.

Ikhtisar historis seperti yang diminta oleh Menteri Welter berdasarkan rangkaian tindakan berurutan secara kronologis dalam kebijaksanaan pendidikan, sukar disusun untuk mendapat gambaran mengenai perkembangan pandangan dalam kebijaksanaan pendidikan selama sepuluh tahun terakhir, demikian kata Idenburg. Penyusunan ringkasan seperti itu akan lebih mengaburkan daripada menjelaskan pandangan karena selama sepuluh tahun terakhir itu semua tindakan dan peraturan penting mengenai pendidikan diadakan untuk mencapai penyederhanaan dalam rangka penghematan, sehingga kebijaksanaan dalam pendidikan tersembunyi atau terselubung dalam politik penghematan, sebagai akibat krisis ekonomi sejak sekitar tahun 1930.

Prof.Dr. B.J.O.Schrieke terutama harus memusatkan perhatiannya kepada rekonstruksi sarana pendidikan dengan tujuan penghematan sebanyak-banyaknya. Penggantian Dr. A.D.A.de Kat Angeline yaitu pendahulu Dr. P.J.A.Idenburg, harus melaksanakan peraturan-peraturan yang diadakan pada masa Schrieke. Hal inilah yang memberi corak khas kepada jalan yang ditempuh perkembangan pengajaran.

Ikhtisar berikut ini disusun terutama terbatas pada bidang pendidikan untuk Bumiputera, karena Menteri Welter perhatiannya terutama khusus ditujukan kepada pendidikan untuk Bumiputera. Menurut Menteri, terjadi pergeseran penghargaan dengan jelas terhadap arti sekolah bercorak Barat untuk penduduk Bumiputera. Pendapat Menteri dibenarkan tetapi sebaiknya jangan mempertentangkan perkembangan selama sepuluh tahun yang terakhir itu dengan masa sebelumnya. Lebih baik dikatakan bahwa terjadi penjernihan pandangan sebagai akibat menjadi makin jelas konsekwensi sosial dari sistim pendidikan yang berlaku.

Pada tahun duapuluhan terjadi keresahan umum sebagai akibat dari sangat cepatnya laju kenaikan jumlah murid Bumiputera ke sekolah-sekolah corak Barat. Tidak hanya gejala itu menyebabkan biaya untuk

pendidikan menjadi cepat terlalu berat bagi keuangan Hindia-Belanda, tetapi juga berakibat makin nyata bahwa tamatan sekolah bercorak Barat itu tidak dapat memperoleh lapangan kerja yang sepadan. Komisi Pendidikan telah banyak menyumbang dengan rangkaian publikasinya untuk memperjelas pandangan mengenai keadaan. Sejak itu benar-benar dikatakan dapat lebih dimengerti keharusan mengadakan pembaharuan orientasi dalam kebijaksanaan pendidikan. Tetapi belum tentu hasil pekerjaan Komisi pendidikan itu dengan segera akan membawakan perubahan secara besar-besaran dalam kebijaksanaan pendidikan, apabila tidak terjadi krisis yang menimbulkan keharusan melaksanakan kebijaksanaan yang mesti (dan mungkin) dirubah.

Dalam tahun-tahun pertama krisis ada keharusan penghematan dan bersamaan dengan keharusan peninjauan kembali sistim pendidikan, sanering dalam anggaran biaya harus dilaksanakan di samping keharusan mengadakan perbaikan efek kegunaan ekonomis dan pedagogis dari sekolah-sekolah. Sebagai ilustrasi penyimpangan kebijaksanaan pendidikan dalam tahun-tahun 1925 sampai 1930 dari garis perkembangan keuangan diberikan sebagai berikut:

Tahun	Pendapatan negara (dalam gulden)	Pengeluaran Departemen <u>Pendidikan dan Agama</u>	Perkiraan <u>angg.biaya</u>
1925	530 000 000	35 600 000	34 000 000
1926	538 000 000	39 100 000	38 500 000
1927	518 000 000	43 300 000	41 400 000
1928	551 000 000	48 500 000	45 100 000
1929	524 000 000	52 500 000	46 100 000
1930	439 000 000	56 400 000	50 000 000

Ternyata di sini bahwa anggaran biaya pendidikan dilebihi oleh pengeluaran dalam jumlah yang makin naik. Untuk mengadakan perbaikan, oleh Prof.Dr. B.J.O.Schrieke pada waktu itu berfungsi sebagai Pejabat Direktur Pendidikan dan Agama diajukan rancangan reorganisasi pendidikan dalam tahun 1930, yang seperti diketahui telah ditolak.

Uraian ringkas di atas menggambarkan keadaan sebagai permulaan masa sepuluh tahun yang ingin ditinjau oleh Menteri Welter. Sebelum diuraikan kejadian-kejadian lebih lanjut sebagai akibat kebijaksanaan pendidikan tetapi bukan sebagai akibat politik penghematan, dalam masa sepuluh tahun itu diadakan tinjauan umum mengenai salah satu masalah inti yang aktuail dalam kebijaksanaan Pendidikan, yaitu masalah mengenai arti pendidikan corak Barat bagi penduduk Bumiputera. Ini perlu untuk dapat melihat pada latar belakang penyediaan penting di bidang pendidikan bagi penduduk Bumiputera.

Sistim pendidikan di Hindia-Belanda menurut kenyataan dasar-dasarnya diletakkan di masa Mr. K.F. Creutzberg memimpin Departemen Pendidikan dan Agama (1916-1922) dengan gagasan bahwa harus ada sekolah sederhana untuk penduduk Bumiputera, tetapi yang dapat dikembangkan dan disampingnya dibangun sistim pendidikan sampai ke puncak-puncak tertinggi pendidikan corak Barat untuk memberi kesempatan kepada orang Bumiputera dan Cina dari kedudukan sosial yang paling baik dan yang berbakat mendapat pendidikan Barat setinggi-tingginya. Sistim pendidikan itu harus memberikan kemungkinan kepada anak desa yang sederhana untuk dapat belajar sampai di perguruan tinggi. Gagasan itu pada hakekatnya tidak ditinggalkan, dan pada umumnya tidak diragukan sebagai prinsip dasar yang mengandung kemuliaan dan keadilan. Tetapi pendapat-pendapat berubah secara berangsur-angsur mengenai kepatutan dan ketidak-patutan dalam pelaksanaannya.

Ketika Mr. Creutzberg membeberkan sistimnya dalam Dewan Rakyat dalam tahun 1918, padanya itu sebenarnya ada pikiran bahwa pintu terbuka ke sekolah corak Barat dapat diatur untuk masyarakat Bumiputera, sehingga anak-anak yang terbaik dari masyarakat Bumiputera benar-benar dapat menggunakannya. Dalam sistim itu perluasan perkembangan HIS harus dibatasi dan diterapkan prinsip bahwa HIS dimaksudkan sebagai sekolah istimewa, dan bahasa Belanda harus diajarkan dengan hati-hati atau diajarkan kepada orang Bumiputera dengan

pembatasan, sebab jika tidak diadakan pembatasan, sekolah-sekolah corak Barat itu akan banjir murid yang akhirnya bahkan di perguruan tinggi tidak akan terbandung. Pada Creutzberg sudah ada kekhawatiran bahwa akan terjadi jumlah sekolah istimewa itu terlalu besar. Bagaimanapun juga kenyataan sejarah membuktikan bahwa pemerintah tidak berhasil membatasi sekolah tipe HIS itu hanya untuk anak elite Bumiputera saja. Meskipun penduduk Bumiputera pada umumnya harus berkorban mengeluarkan biaya sekolah yang relatif tinggi untuk menyekolahkan anak di HIS atau tipe sekolah seperti itu. Dorongan ke arah itu sedemikian rupa besarnya sehingga tidak dapat diadakan pembatasan dalam perluasan sekolah tipe HIS itu seperti yang dikehendaki menurut rencana semula dari sistim pendidikan.

Dalam tahun-tahun penghematan masa krisis ekonomi diadakan pembatasan ketat pada jumlah sekolah istimewa itu, tetapi adalah keliru untuk menganut anggapan bahwa dengan demikian laju perkembangan murid ke sekolah corak Barat itu terhentikan. Pemerintah dihadapkan kepada kenyataan, bahwa sekolah-sekolah swasta tidak bersubsidi tipe HIS berkembang dengan luar biasa sehingga jumlahnya jauh melebihi HIS negeri. Sekolah-sekolah swasta itu terkenal dengan sebutan "sekolah liar" dan biasanya uang sekolahnya lebih tinggi, serta mutunya rendah. Meskipun kemakmuran penduduk menurun, sekolah liar laku juga; sedangkan pernah dialami bahwa HIS negeri kekurangan murid, sehingga dalam tahun 1936 dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh untuk menutuup kira-kira 50 buah HIS dan HCS negeri.

Ada beberapa sebab yang mendorong orang Bumiputera memilih "sekolah liar", antara lain sebagai berikut. Menurut dugaan pertama-tama usaha para guru "sekolah liar" yang dengan rajin dan gigih mempengaruhi orang tua bakal murid untuk memasukkan anak ke sekolah mereka. Yang kedua, mungkin pembahasan mengenai "Ordonansi Sekolah Liar" dalam Dewan Rakyat berakibat timbulnya pendapat dalam masyarakat penduduk Bumiputera, bahwa "sekolah liar" adalah milik rakyat

dan ada di luar urusan pemerintah. Sentimen nasionalisme ikut memberi kesan kehormatan kepada kebanggaan atau kemuliaan "sekolah liar".

Data yang cermat dan tepat tidak dapat disediakan berapa besar jumlah seluruh sekolah liar itu, tetapi gejala perkembangannya yang pesat dapat membuktikan berapa besar dorongan kepada penduduk Bumiputera sendiri untuk memasuki sekolah-sekolah dengan pendidikan yang bercorak Barat. Menurut kalangan yang mengetahui, diduga jumlah murid sekolah liar itu sekitar 120.000 orang.

Sementara itu akibat yang merugikan dari relatif terlalu luasnya sekolah yang bercorak Barat pada suatu tingkat tertentu berkurang lagi, karena penduduk Bumiputera sendiri berangsur-angsur lebih menyadari pentingnya pendidikan bercorak Barat. Kira-kira 20 tahun sebelumnya tamatan HIS dapat diterima dengan segera bekerja di kantor-kantor pemerintah atau swasta dengan gaji 80 atau 90 gulden, sedangkan sekarang (tahun 1938) tamatan MULO dengan gembira mau menerima gaji 30 gulden. Ternyata di sini betapa merosotnya nilai ijazah di bidang materiil. Masyarakat penduduk Bumiputera tidak tinggal buta terhadap kenyataan itu. Mitos tentang dorongan pada orang Bumiputera untuk memasuki sekolah bercorak Barat, oleh anggapan bahwa sekolah itu membuka jalan ke posisi lebih makmur dan lebih berkuasa, telah ditinggalkan oleh sebagian besar penduduk Bumiputera. Memang benar masih ada penghargaan yang dilebih-lebihkan, tetapi Idenburg mendapat keterangan dari banyak percakapan dengan orang Bumiputera dari kalangan tertentu, terutama yang lebih terpelajar, bahwa dorongan untuk memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya itu bukan hanya oleh keinginan untuk mencapai kedudukan terhormat dan penghasilan besar. Tetapi lebih banyak terjadi bahwa dorongan itu tumbuh oleh pikiran atau cita-cita untuk memajukan dan mempertinggi kecerdasan bangsa "Indonesia" dengan keharusan memberikan pendidikan yang luas kepada sebanyak-banyaknya orang "Indonesia".

Pada kalangan orang Bumiputera juga mulai timbul kesadaran, bahwa untuk kebanyakan orang Bumiputera pendidikan yang lebih tinggi

tidak diartikan untuk mencapai posisi sosial yang lebih tinggi, tetapi supaya secepat-cepatnya dapat menggantikan orang Eropa dalam banyak jabatan. Pikiran ini teristimewa sangat kuat menurut Idenburg di kalangan orang dari pergerakan politik. Mereka ini lebih kurang dari pemerintah mempersoalkan overproduksi sekolah bercorak Barat. Overproduksi sekolah bercorak Barat dapat diterima oleh mereka untuk kepentingan urusan yang lebih besar dan masa-lah yang makin mendesak, yaitu nasionalisme.

Sementara itu orang Bumiputera dapat menyesuaikan dirinya kepada overproduksi tersebut. Tamatan MULO dan AMS mau menerima gaji yang rendah. Untuk sementara belum timbul masalah pengangguran dalam kalangan tamatan perguruan tinggi. Lain dari pada itu overproduksi tersebut belum berarti menumbuhkan suatu kelompok kaum proletar setengah intelektual, karena masyarakat masih dapat menyerap mereka.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sekolah-sekolah bercorak Barat dapat memenuhi fungsi sosialnya yang bukan saja memberi persiapan untuk jabatan-jabatan tertentu, tetapi juga terutama di kota-kota besar, berangsur-angsur berperanan sebagai sekolah rendah biasa yang memberikan kepada kelompok tertentu dalam masyarakat penduduk Bumiputera suatu kecerdasan tertentu, yang bertaraf lebih tinggi daripada yang dapat diberikan oleh sekolah kelas dua atau sekolah desa + "vervolgsschool". Nilai sosial sekolah bercorak Barat itu dan artinya bagi orang Bumiputera bukan saja ditentukan oleh relasi antara jumlah tamatannya dengan pasaran kerja dalam masyarakat. Dalam hal ini Idenburg mengemukakan dua hal pokok.

Pertama-tama oleh Dr. A.D.A.de Kat Angelino, pendahulu Dr. P.J.A.Idenburg sebagai Direktur Pendidikan dan Agama, pada waktu mewakili pemerintah dalam Dewan Rakyat untuk perembungan mengenai anggaran biaya untuk tahun 1937 menyatakan pendapat bahwa kelebihan tertentu dalam produksi orang terpelajar lebih tinggi menjadi keharusan untuk kemajuan intern dalam masyarakat penduduk Bumiputera sendiri. De Kat Angelino bertolak dari pemikiran bahwa jika hanya

dihasilkan orang terpelajar terbatas kepada jumlah yang diperlukan untuk mengisi kira-kira jumlah yang sama dengan jabatan-jabatan dalam masyarakat, maka dari dalam masyarakat penduduk Bumiputera itu sendiri akan dihilangkan kemungkinan untuk mengembangkan dirinya dan mengadakan diferensiasi. Adanya sejumlah orang muda dengan pendidikan lebih tinggi yang tidak dapat diberi fungsi sepadan menurut anggapan pada waktu itu, mendorong orang-orang muda itu untuk menciptakan bagi diri mereka sendiri kemungkinan lapangan kerja dengan bentuk-bentuk baru. Dengan demikian timbul ketegangan yang mengharuskan supaya di dalam masyarakat sendiri terjadi diferensiasi kerja baru. Dengan kata lain masyarakat harus dikembangkan dari dalam sendiri untuk dapat menciptakan kemungkinan mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi di kemudian hari. Kenyataan menunjukkan bahwa generasi muda dalam masyarakat penduduk Bumiputera sekitar tahun 1938 sedang melaksanakan kerja yang jauh berlainan dengan generasi Bumiputera dua puluh tahun sebelumnya.

Hal kedua ialah bahwa pengetahuan bahasa Belanda sebagai hakekat pengetahuan bagi kelompok-kelompok besar orang Bumiputera diberi nilai jauh dari pikiran bahwa bahasa Belanda itu merupakan syarat untuk memperoleh pekerjaan yang baik (sedapat mungkin di kantor pemerintahan). Ada daerah-daerah tertentu yang penduduknya ingin belajar bahasa Belanda karena hanya semata-mata untuk dapat menggunakan bahasa itu, seperti di Minahasa dan Ambon. Di daerah-daerah lain di luar Jawa dan Madura itu juga makin banyak tampak. Di kota-kota besar di Jawa juga demikian. Dari sebab itu HIS dan HCS yang dalam status "sekolah liar" juga laku.

Pemerintah harus dapat memenuhi keinginan seperti diuraikan di atas itu, tetapi pengembangan sekolah bercorak Barat harus disertai pembatasan, karena sekolah seperti tipe HIS itu sebenarnya terlalu mahal, bahkan di kota-kota besar juga mahal untuk dijadikan sekolah rendah yang lebih baik bagi penduduk Bumiputera. Untuk menghindari akses buruk dari sekolah bercorak Barat itu seyogianya di

dalam sekolah yang semata-mata bercorak Bumiputera harus diciptakan kemungkinan bagi anak Indonesia untuk dapat belajar bahasa Belanda seperlunya, demikian kata Idenburg. Harus dibedakan kelompok penduduk Bumiputera dengan kelompok Cina yang merasa perlu belajar bahasa Belanda. Bagi Cina pengetahuan bahasa Belanda tidak menimbulkan kecenderungan yang mendorong untuk terlepas dari lingkungan kerjanya sendiri, karena pengetahuan tersebut digunakan Cina dalam lingkungan hidupnya sebagai alat dalam kemungkinan memajukan dan memperluas usaha dagang, dsb. Tetapi pada orang Bumiputera tidak demikian. Mula-mula ada kecenderungan untuk terlepas dari lingkungan sendiri yang baru dapat dinetralkan apabila orang Bumiputera yang bersangkutan melalui cara-cara lain dapat diserap kembali ke dalam lingkungan masyarakat bangsanya sendiri. Dalam tahun-tahun terakhir itu diusahakan dalam lingkungan sekolah Bumiputera sendiri membuka kemungkinan untuk menampung dan membimbing keinginan belajar bahasa Belanda.

Hubungan penduduk Bumiputera dengan sekolah bercorak Barat menimbulkan terus-menerus masalah-masalah yang aktuil yang menentukan untuk sebagian besar kebijaksanaan pendidikan pemerintah kolonial Hindia-Belanda dengan aspek-aspek yang positif dan negatif. Bidang atau sektor terpenting dari kebijaksanaan tersebut ialah pendidikan untuk Bumiputera. Makin disadari bahwa kekuatan dalam masyarakat penduduk Bumiputera itu lebih dipertinggi dengan menyediakan sekolah yang sederhana, tetapi yang lebih efektif untuk mayoritas penduduk daripada sekolah bercorak Barat yang lebih tinggi (dan mahal) untuk kelompok kecil dari penduduk. Sekolah bercorak Barat yang lebih tinggi masih harus ada, tetapi sekali-kali tidak boleh mengabaikan sekolah untuk rakyat banyak.

Dalam periode penyederhanaan dan penghematan secara besar-besaran dari tahun 1931 sampai tahun 1935, sama sekali tidak dilaksanakan kebijaksanaan pendidikan yang positif terhadap penduduk Bumiputera. Memang sukar untuk melaksanakannya karena semua perhatian dicurahkan kepada aparatur pendidikan itu sendiri. Sebagai

keuntungan dari penghematan itu diperoleh aparaturnya untuk pendidikan Bumiputera yang dianggap relatif murah, sehingga terdapat kemungkinan mengadakan pengembangan yang lebih teratur dan diseimbangkan dengan laju kenaikan penduduk.

Salah satu tujuan kebijaksanaan pendidikan pemerintah Hindia-Belanda itu ialah mendirikan sekolah sederhana dan sebanyak-banyaknya bagi massa rakyat dari penduduk. Tujuannya terutama diarahkan kepada pemberantasan buta huruf. Masa krisis ekonomi telah banyak merintang perkembangan sekolah desa, bukan saja karena banyak sekolah desa yang ditutup, tetapi juga karena penduduk desa rupanya sangat sulit mendapat uang, sehingga menyekolahkan anak bagi kebanyakan orang merupakan suatu beban yang berat.

Beberapa angka di bawah ini menunjukkan perkembangan sekolah rakyat untuk penduduk Bumiputera dalam masa 1931-1936.

Tahun -----	Sekolah Desa	
	Jumlah sekolah -----	Jumlah murid -----
1931/1932	16.921	1.320.131
1932/1933	16.075	1.368.692
1933/1934	16.398	1.423.387
1934/1935	16.728	1.507.931
1935/1936	16.962	1.583.236

<u>"Vervolgschool" dan Sekolah Kelas Dua</u>				
Tahun -----	Jumlah "Vervolg school" -----	Jumlah sekolah Kl. Dua -----	Jumlah murid "Vervolg- school" -----	Jumlah murid Sekolah Kelas dua -----
1931/32	1.199	1.990	111.528	341.110
1932/33	1.246	1.757	115.411	316.568
1933/34	1.716	1.208	146.722	231.565
1934/35	2.354	362	185.332	78.950
1935/36	2.586	64	212.554	10.793

1931 - 1936

Tambahan jumlah Sekolah Desa	Tambahan jumlah Murid Sek. Desa	Tambahan jumlah "Vervolgschool"	Tambahan jumlah Mrd. "Vervolgsch"
-----	-----	-----	-----
+41	+263.105	+1.387	+101.026
Sekolah kelas Dua berkurang	Jumlah murid Kelas Dua Berkurang	Tambahan jumlah Sek. Desa + "Vervolgschool"	Tambahan jumlah Murid Sek. Desa + "Vervolgschool"
-----	-----	-----	-----
-1.926	-330.317	+1.428	+364.131

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa dalam masa 1931-1936, seluruh tambahan murid di sekolah rendah untuk penduduk Bumiputera hanya kira-kira 33.000 murid, yang praktis berarti pemberhentian sama sekali. Gejala ini bukan saja akibat penghematan, tetapi juga akibat penurunan kemakmuran penduduk. Dalam periode penghematan ini ada beberapa Bupati yang terlalu rajin melaksanakan penghematan, sehingga kurang memperhatikan kepentingan pendidikan untuk rakyatnya. Kemunduran suatu sekolah dipakai sebagai alasan untuk segera menutupnya. Oleh De Kat Angelino, kecenderungan seperti itu harus segera dihentikan.

Di daerah-daerah yang letaknya lebih terpencil dan berpenduduk sangat jarang seperti banyak terdapat di Indonesia bagian Timur, penghematan dan rasionalisasi terhadap sekolah untuk rakyat mempunyai konsekuensi sangat jauh. Di daerah-daerah itu patokan pengadaan sekolah rendah (minimum 25 orang murid dalam radius minimal 5 km). Tetapi banyak juga sekolah harus ditutup atau digabungkan. Tindakan demikian sebenarnya sangat merugikan kemajuan daerah, karena sekolah merupakan pusat kemajuan. Karena itu dalam tahun-tahun kemudian diadakan pengembangan secara sistematis dengan apa yang disebut "subsidi peradaban" untuk merehabilitasi fungsi sekolah di daerah-daerah primitif dan berpenduduk jarang, yaitu sekolah sebagai lembaga kebudayaan. Hal itu dimulai dalam tahun 1936 di pedalaman Guinea Baru (Irian) dan kemudian di seluruh Guinea Baru (Irian).

Pada tahun-tahun kemudian, pada umumnya setelah pemulihan kemakmuran banyak terjadi perbaikan di bidang pendidikan. Dalam tahun 1937 terjadi laju perkembangan murid dengan deras ke sekolah desa. Angka-angka yang lengkap tidak dapat disediakan oleh Departemen karena sejak 1 Januari 1937 penyelenggaraan sekolah untuk rakyat Bumiputera di Jawa dan Madura dilimpahkan kepada propinsi, kabupaten, dan kotapraja (Lembaran Negara 1936 nomor 585 jo. nomor 695). Pendirian dan pemeliharaan sekolah desa di luar kotapraja ditugaskan kepada desa. Pendidikan guru untuk sekolah desa dibebankan kepada kabupaten dan kotapraja, untuk "vervolgsschool" kepada propinsi, yang juga harus mengadakan pengawasan terhadap sekolah desa. Ordonansi pelimpahan sekolah di daerah di luar Jawa dan Madura mengatur penyerahan sebagian sekolah kepada kesatuan-kesatuan kelompok penduduk dan kotapraja (Lembaran Negara 1937 nomor 551). Juga di sini penyelenggaraan sekolah desa di luar kotapraja ditugaskan kepada kesatuan sosial seperti desa di Jawa. Menurut data pada Departemen Pendidikan dan Agama, kenaikan jumlah murid sekolah desa melebihi 90.000. Ternyata jumlah sekolah tidak diperhitungkan sehingga banyak terjadi kepincangan mengenai ruangan kelas dan rasio guru terhadap jumlah murid. Peraturan penyerahan dalam hal tertentu menjadi rintangan karena desa dan sebagainya tidak dengan segera siap untuk secara teratur dapat melaksanakan tugas. Penilaian yang riil tidak dapat diberikan mengenai kemampuan desa untuk mengurus sekolah, karena tidak tersedia cukup data. Hanya pada waktu itu diketahui bahwa di sejumlah kabupaten perkembangannya tidak selancar seperti diharapkan dari sudut politik pendidikan. Di dalam Dewan Rakyat telah dinyatakan oleh Pemerintah dalam hubungan dengan ordonansi pelimpahan, bahwa pemerintah tidak melepaskan tanggung jawabnya yang prinsipil tentang perkembangan sekolah untuk rakyat (Handelingen Volksraad hal.1800 dan hal.1880). Masalah ini ditegaskan karena pemerintah pusat masih tetap secara langsung mengurus sekolah swasta bersubsidi secara rasional, sebab sekolah bersubsidi itu tidak diserahkan kepada

kesatuan-kesatuan otonomi. Menurut rancangan anggaran biaya untuk tahun 1939 pemerintah bermaksud memenuhi kewajiban ini dengan baik. Juga bagian-bagian sekolah negeri untuk penduduk yang tidak dilimpahkan akan diperluas dengan pantas dalam tahun 1939. Dengan tambahan anggaran biaya untuk tahun 1938 diperhitungkan akan dikembangkan sejumlah 400 sekolah desa dan "vervolgschool", yang setengahnya untuk sekolah swasta bersubsidi.

Politik pendidikan diarahkan untuk secepat mungkin menghilangkan buta huruf. Tujuan ini akan tercapai secara berangsur-angsur melalui pergantian generasi dengan memperhitungkan kenaikan rata-rata jumlah anak usia sekolah yang dapat ditampung oleh kenaikan tiap tahun dan sarana pendidikan. Menurut perhitungan Komisi pendidikan kenaikan jumlah untuk kelompok umur 6-9 tahun rata-rata 67.460 (publikasi Komisi Pendidikan no. 7a, Tugas yang masih menanti di bidang pengajaran, hal.12). Dapat dikatakan bahwa jumlah kenaikan rata-rata tiap tahun itu adalah pesat sekali, sehingga di waktu yang akan datang kenaikan tahunan sebanyak 80.000 setiap tahun dapat diperkirakan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan dasar.

Dengan menentukan jumlah rata-rata murid setiap sekolah desa dengan 100, setiap tahun harus didirikan rata-rata 800 sekolah desa. Setiap tahun harus disediakan kira-kira 1.600 guru desa. Di samping itu harus diperhitungkan sekolah-sekolah kecil yang abnormal di daerah-daerah yang berpenduduk jarang di luar Jawa dan Madura. Faktor ini ada di luar tinjauan. Menurut anggaran biaya untuk tahun 1939 diperhitungkan pendirian 200 sekolah desa yang secara langsung masih dibiayai oleh pemerintah Pusat. Apabila kesatuan-kesatuan otonomi yang disertai sekolah desa dapat mengembangkan dengan skala yang sama, maka setiap tahun dapat dikembangkan kira-kira 500 sekolah desa dengan kira-kira 1.000 guru desa. Pendidikan guru desa pada waktu itu ditetapkan pada produksi kira-kira 1.700 setahun. Jumlah ini dianggap terlalu kecil, karena harus diperhitungkan pelepasan yang teratur serta juga penggantian-penggantian

kira-kira 30% guru yang tidak berwenang. Teristimewa di beberapa daerah di luar Jawa dan Madura ada sejumlah besar guru tanpa wewenang. Tetapi data tentang ini tidak lengkap.

Dalam perkiraan seperti diuraikan di atas masih harus diperhitungkan kenaikan laju ke sekolah desa sebagai hasil dorongan. Sebenarnya Idenburg memperkirakan kenaikan jumlah rata-rata tidak lebih dari 40.000 sampai 45.000 murid tiap tahun. Kenaikan yang besar dengan tiba-tiba dalam tahun 1937 yang rupanya masih akan berlanjut dalam tahun berikutnya, rupanya disebabkan terutama oleh faktor mengejar ketinggalan. Dalam laju murid pada tahun 1938 jumlah murid relatif cukup besar yang sebenarnya telah melewati usia sekolah dan seharusnya sudah sekolah beberapa tahun sebelumnya. Gejala ini boleh jadi akibat pengaruh krisis ekonomi yang telah dialami.

Mengenai pemberantasan buta huruf perlu dicatat di sini bahwa dalam tahun-tahun belakangan berkali-kali diadakan desakan melalui Dewan Rakyat supaya diadakan kursus untuk orang-orang dewasa. Menurut pengalaman yang tidak menggembarakan dengan kursus-kursus yang diadakan oleh Komite Pemberantasan Buta Huruf (Analfabetisme Bestrijdings-Comitee)*) saran itu kurang disetujui. Dari sudut pedagogis kursus-kursus semacam itu tidak banyak gunanya karena bahan yang diajarkan hanya sedikit saja yang melekat, sedangkan dari sudut politik ada keberatan, karena ditunggangi oleh partai politik. Dengan demikian masalah buta huruf itu belum terselesaikan. Perasaan tidak puas berkecamuk di kalangan Bumiputera yang mengancam pemerintah bahwa buta huruf di Hindia Belanda lebih menonjol dari pada di negeri-negeri Asia lain. Gejala ini makin berpe-
ranan penting dalam pergerakan politik oleh politisi Bumiputera dan

*) Komite ini didirikan pada tahun 1922 dan menyelenggarakan kursus-kursus buta huruf untuk orang dewasa. Departemen Pendidikan dan Agama memberi bantuan dengan cuma-cuma berupa tempat di sekolah desa dan sekolah kelas dua. Pemimpinnya, P.Post, menganggap usaha itu gagal dan dalam tahun 1924 dihentikan, setelah ternyata ditunggangi propaganda politik. (P.Post, "Pemberantasan Buta Huruf", Koloniale Studien, 1940, hal.51 dst.).

mempunyai arti penting karena disertai propaganda untuk mengirimkan pemuda Bumiputera ke sekolah-sekolah tinggi di luar negeri (terutama ke Jepang, dan untuk pendidikan Islam di Mesir dan India). Kecaman juga dilancarkan terhadap biaya sekolah untuk para orang tua Indonesia dengan mengadakan perbandingan keadaan di Jepang, Turki, Mesir, dll. Pada umumnya kapasitas sarana pendidikan di Hindia Belanda selalu mendapat kecaman dari kalangan pergerakan nasional bangsa Bumiputera, juga dari golongan yang moderat.

Dikemukakan dalam hubungan pemberantasan buta huruf itu percobaan yang diadakan oleh Inspeksi Pendidikan Bumiputera Propinsi Jawa Timur, diadakan dua kursus yang semata-mata bertujuan memberantas buta huruf. Dasar pikiran yang digunakan adalah tepat, bahwa sekolah desa tidak dapat difungsikan sebagai lembaga pendidikan dengan disampingnya sekaligus sebagai sarana pemberantasan buta huruf. Sebagai lembaga pendidikan sekolah yang hanya tiga tahun itu, istimewa di daerah yang sudah makin ramai terlibat dalam lalu lintas, sebenarnya tidak memadai. Di daerah-daerah lain di mana pemberantasan buta huruf harus digalakkan, harus diselenggarakan kursus-kursus buta huruf dengan cara lain dalam waktu lebih singkat, supaya penduduk memberi penghargaan yang semestinya kepada lembaga sekolah desa.

Setelah uraian mengenai sarana pendidikan untuk penduduk Bumi-putera di atas, Idenburg mengadakan tinjauan dari segi kwalitatif terhadap masalah itu. Masalah kwalitatif ini selama bertahun-tahun selalu menarik perhatian dalam pembahasan dengan tujuan yang berganti-ganti dan berbeda-beda. Sekolah desa tiga tahun sejak didirikan dimaksudkan sebagai sekolah untuk rakyat pedesaan. Karena keterbatasan yang besar dalam kemampuan keuangan penduduk dan pemerintah maka hanya dapat dibiayai sekolah yang sangat sederhana itu untuk rakyat. Dahulu sekolah standar atau sekolah kelas dua dianggap sebagai sekolah yang disediakan untuk penduduk Bumiputera yang lebih mampu dan terutama diadakan di pusat-pusat daerah berpenduduk banyak. Sekolah standar itu kemudian diganti dengan

sekolah desa + "vervolgschool". Pergantian sistim sekolah standar secara demikian itu terjadi pada masa krisis ekonomi dan dimulai oleh B.J.O. Schrieke dan dilanjutkan oleh A.D.A. de Kat Angelino. Penggantian sistim itu selesai seluruhnya, kecuali beberapa sekolah standar kotapraja. Sistim sekolah desa + "vervolgschool" itu dilihat dari sudut organisasi dan keuangan lebih menguntungkan, sehingga menurut Idenburg harus dipertahankan walaupun selalu dinyatakan keberatan dari pihak Dewan Rakyat. Terutama oleh para anggota Bumiputera dalam Dewan dikemukakan bahwa hasil sekolah desa mutunya ada di bawah tiga kelas yang pertama dari Sekolah Kelas Dua. Mutu sekolah rakyat seluruhnya untuk penduduk golongan Bumi Putera merosot oleh pergantian sistim ("Verhandelingen Volksraad", 1936-1937, halaman 428).

Tetapi menurut Idenburg, sistim sekolah desa + "vervolgschool" memungkinkan secara sederhana penyelenggaraan sekolah Bumiputera dengan disesuaikan kepada kebutuhan daerah. Misalnya dalam daerah yang masih terbelakang dapat disediakan dengan cukup 1 (satu) "vervolgschool" dengan rasio terhadap 10 sekolah desa. Di kota-kota besar pada umumnya terdapat 1 atau 2 sekolah desa, dan biasanya "vervolgschool" menjadi satu dengan salah satu sekolah desa, sehingga mendekati keadaan sekolah kelas dua dahulu.

Sistim ini menurut Idenburg mempunyai kelebihan atau keuntungan dalam luas pendidikan sesudah sekolah desa. Tipe "vervolgschool" yang normal dua tahun sesudah sekolah desa dapat diperpanjang menjadi "vervolgschool" tiga tahun untuk daerah yang berpenduduk lebih padat. Tambahan kelas satu tahun itu dapat diarahkan ke berbagai sasaran.

Mengenai pendidikan di sekolah desa (tiga tahun) harus diperhatikan bahwa supaya kepada sekolah itu dapat diberikan eksistensi yang riil di dalam masyarakat desa, maka pengajarannya tidak terbatas diarahkan kepada membaca, menulis dan berhitung saja. Telah dipikirkan beberapa cara untuk membuat sekolah itu lebih menarik bagi penduduk, supaya sekolah itu dianggap sebagai milik masyarakat

desa sendiri. Hal ini masih merupakan bagian dari kebijaksanaan dalam penyelenggaraan sekolah desa. Berbagai cara dijalankan misalnya dengan mengadakan kebun sekolah supaya melalui kerja di kebun selalu ada hubungan dengan suasana agraris, memasukkan kerajinan dalam kurikulum, pembinaan kesenian daerah, menyelenggarakan pesta tahunan dengan melibatkan partisipasi penduduk desa ke dalamnya, dll. Oleh de Kat Angelino dipertahankan prinsip bahwa untuk mengajar di sekolah desa dipergunakan bahasa daerah. Kesulitan untuk berpegang teguh kepada prinsip ini ialah bahwa apabila tiap daerah kecil menggunakan dialek atau bahasa daerah sendiri, sehingga tidak mungkin menyediakan buku pelajaran dalam tiap bahasa Daerah. Di Jawa dengan kelompok-kelompok besar bahasa daerah yaitu bahasa-bahasa Jawa, Sunda, dan Madura, prinsip itu sudah lama dan biasa diterapkan. Tetapi di daerah-daerah di luar Jawa dan Madura dengan menggunakan bahasa pengantar Melayu boleh dikatakan bahwa pengajaran diberikan dalam bahasa asing. Masalah bahasa yang menimbulkan kesulitan khusus di bidang pendidikan di sekolah ditemui di Guinea Baru (Irian). Di sini sering terdapat kelompok-kelompok penduduk berdampingan, bahkan kelompok-kelompok kecil (kadang-kadang hanya beberapa ratus orang atau beberapa puluh orang) dengan bahasa-bahasa yang sama sekali berbeda, sehingga sering tidak dapat diadakan pertukaran pikiran antara orang dari kelompok yang satu dengan orang dari kelompok yang lain. Mengajar dengan bahasa Melayu di Guinea Baru (Irian) juga menimbulkan kesulitan khusus karena struktur dan konstruksi bahasa Melayu sangat jauh berbeda dari bahasa-bahasa di Guinea Baru (Irian).

Di samping gagasan bahwa sekolah desa harus sedapat-dapatnya disesuaikan dengan lingkungan lokal penduduk, makin ditampilkan dengan kuat tuntutan supaya pendidikan mencapai kegunaan efek sosial-ekonomis. Pada hakekatnya sekolah desa tiga tahun dengan murid yang sangat muda memberikan kemungkinan yang sangat kecil untuk itu. Orang harus sudah puas jika kepandaian membaca, menulis, dan berhitung yang diajarkan masih dapat melekat, apabila mereka meninggalkan

sekolah. Bagaimanapun juga ada usaha untuk menyesuaikan isi buku-buku pelajaran, terutama buku bacaan dan berhitung kepada lingkungan sosial-ekonomis dari penduduk. Melalui buku-buku bacaan sederhana dibawakan juga pengertian sederhana mengenai higiene dan bahaya penyakit. Juga dicoba menerapkan di sekolah prinsip-prinsip ilmu kesehatan penduduk dari karya Dr. Hydrick. *)

Bagian penting dari sistim pendidikan untuk rakyat ialah pendidikan guru desa. Dalam tahun-tahun sesudah krisis terjadi banyak kemajuan dalam penyelenggaraan kursus guru desa dan berkembang dengan baik. Juga telah diusahakan terus-menerus untuk mencapai efektivitas intern tanpa menaikan biaya. Corak lokal dari pendidikannya juga mendapat perhatian. Pada umumnya menurut Idenburg pendidikan yang minim lamanya tiga tahun di sekolah desa itu dan tidak diragukan telah meningkatkan kemungkinan untuk kemajuan penduduk. Di tempat di mana sudah ada sekolah desa, konsulen pertanian dan kerajinan, dapat dengan lebih baik berhasil memberikan penerangan atau penyuluhan. Di daerah dengan banyak sekolah ada kemungkinan lebih baik atau kemungkinan menjadi lebih baik untuk memelihara pengetahuan yang sudah diajarkan. Di daerah demikian itu dengan cepat dirasakan kebutuhan akan adanya Kantor Pos Pembantu. Tetapi harus dijauhi untuk melebihi-lebihkan nilai dan mutu pendidikan di sekolah desa tersebut. Yang diajarkan juga sangat sedikit, dan kesempatan untuk memelihara pengetahuan yang diajarkan juga relatif sedikit. Untuk memperbesar kesempatan belajar dan memelihara pengetahuan, diadakan persetujuan oleh Idenburg dengan Balai Pustaka dan disediakan dalam rancangan anggaran biaya untuk tahun 1937 pos untuk menyelenggarakan perpustakaan sederhana dan pusat penyebaran bacaan pada sekolah desa, tetapi karena ada tuntutan penyederhanaan, pos tersebut dicoret.

Sekolah rendah untuk rakyat yang pendidikannya boleh dianggap sempurna ialah "vervolg-school". Mengenai segi kwantitatifnya

*) L. Hydrick, Intensive Rural Hygiene Work and Public Health Education of the Public Health Service of Netherlands India, Batavia, 1937

pada umumnya sama keadaannya dengan sekolah desa. Dalam aspek kwalitatifnya "vervolgschool" menyediakan kemungkinan untuk diferensiasi dengan pengarahannya kepada berbagai sasaran tujuan di bidang sosial ekonomis dan meletakkan dasar untuk beberapa pendidikan yang lain dalam seluruh lingkungan sekolah untuk Bumiputera. Nilai intrinsik pendidikan formil umum di sekolah desa plus "vervolgschool" (tiga tahun + dua tahun), jika dilihat dalam lingkungan kerjanya, tidak jauh ketinggalan dari HIS dan sekolah rendah Eropa. Program pelajarannya lebih terbatas terutama mengenai pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan pengetahuan alam; tetapi mengenai pelajaran berhitung dan bahasa daerah tidak jauh berbeda dari HIS. Sedangkan pendidikan yang dibulatkan ditambah dengan pelajaran seni suara, olahraga, menggambar, dan bahasa Melayu (yaitu pelajaran bahasa Melayu untuk daerah-daerah di luar daerah bahasa Melayu). Pada hakekatnya di "vervolgschool" ada kemungkinan yang lebih besar untuk mempertinggi kegunaan efektivitasnya di bidang ekonomis. Demikianlah di banyak tempat telah dibentuk kelas-kelas pertanian dengan organisasi yang baik.

Pembentukan kelas pertanian sudah mulai diadakan sejak tahun 1928. Pada kelas itu pelajaran membaca dan berhitung diarahkan kepada pekerjaan dalam perusahaan pertanian. Pada waktu itu (tahun 1928) sudah ada kira-kira 140 kelas semacam itu. Biasanya pada sekolah ada kebun sekolah yang cukup besar dan pendidikan diselenggarakan dengan kerja sama dan perhubungan yang erat dengan dinas penerangan dan penyuluhan Pertanian. Guru-guru untuk kelas pertanian mendapat tambahan pendidikan yang cukup baik di perusahaan percobaan Pancasan, dekat Bogor. (terutama disediakan untuk latihan praktek murid-murid Sekolah Pertanian Menengah, Bogor).

Dahulu ada juga kelas perdagangan kecil yang bertujuan memajukan kaum pedagang kecil yang sangat terbelakang di Jawa. Tetapi karena ternyata tidak mencapai tujuan, diganti dengan sekolah dagang kecil yang lamanya dua tahun. Guru-gurunya mendapat pendidikan khusus. Program pelajaran di sekolah dagang kecil tersebut disesuaikan

dengan kebutuhan daerah setempat. Setelah mengakhiri pendidikan, tamatannya tidak segera dilepaskan tetapi masih dapat berhubungan dengan Panitia Penyuluhan yang dibentuk secara khusus untuk memberikan bantuan dengan penyuluhan. Mula-mula didirikan enam sekolah dagang kecil di Jawa pada tahun 1937-1938. Riwayat singkat pembentukannya adalah sebagai berikut: Pada bulan Januari dibentuk suatu "panitia untuk memberikan saran mengenai reorganisasi pendidikan dagang kecil". Pada bulan Mei panitia menyampaikan laporannya mengenai perdagangan kecil di Jawa dan Madura, dan mengusulkan pendirian sekolah dagang sebagai kelanjutan "vervolgschool". Gurugurunya dididik di "kursus untuk mendidik guru Bumiputera dengan ijazah dagang kecil". Kursus itu diadakan pada tahun 1936 di Jakarta yang juga mendidik guru-guru dari daerah di luar Jawa dan Madura untuk sekolah dagang kecil yang akan didirikan. *)

Secara khusus juga dipikirkan untuk mengadakan sekolah rendah untuk kelompok pedagang kecil Cina yang akan terdiri dari "vervolgschool" dengan aspek sekolah dagang dan merupakan varian dari apa yang disebut Sekolah Melayu-Cina, yaitu sekolah desa tiga tahun + "vervolgschool" dua tahun untuk penduduk Cina yang miskin. Sekolah semacam ini sudah ada pada tahun 1927 di Malang, kemudian juga diadakan di Bangka. Sekolah tersebut tidak menarik perhatian penduduk Cina yang lebih suka memilih HCS, karena mereka jelas menghendaki pengetahuan bahasa Belanda untuk anak mereka. Karena HCS terlalu mahal untuk penduduk Cina miskin, juga dipikirkan dalam hubungannya dengan keinginan seperti di kalangan penduduk Indonesia yang makin meningkat kepada pengetahuan bahasa Belanda untuk mengadakan "vervolgschool" dengan mata pelajaran bahasa Belanda dengan disampingnya dimasukkan aspek sekolah dagang.

Tipe "vervolgschool" dengan mata pelajaran bahasa Belanda diadakan sebagai akibat krisis ekonomi. Dimulai dengan tahun ajaran 1932-1933 ada 11 atau 12 HIS di kota-kota kecil, yang diroboh

*) Laporan Umum Mengenai Pendidikan di Hindia Belanda 1937-1938, halaman 78.

menjadi sekolah standar dengan mata pelajaran bahasa Belanda di tiga kelas tertinggi, karena penduduknya tidak merasakan kebutuhan akan tipe sekolah bercorak Barat seperti HIS. Tetapi rupanya untuk menghapuskan sama sekali pengajaran bahasa Belanda tidak diambil tindakan yang lebih jauh. Dari tiga kelas yang tertinggi itu terjadi "vervolgschool" dengan bahasa Belanda. Sekolah ini dianggap sebagai degenerasi HIS atau HIS yang turun pangkatnya, sehingga mula-mula tidak populer. Tetapi sementara itu sekolah swasta bersubsidi tipe sekolah ini rupanya berhasil dalam percobaannya. "Vervolgschool" dengan bahasa Belanda rupanya akan makin berperanan penting dalam sistem sekolah untuk penduduk Bumiputera dan terutama mengarah sebagai sekolah untuk penduduk Cina miskin di kota-kota besar yang ingin belajar bahasa Belanda tetapi tidak diterima di HCS. Di daerah yang berpenduduk padat tipe sekolah ini dalam lingkungan sekolah Bumiputera dapat memberi kesempatan untuk belajar bahasa Belanda secara pasif dengan baik. Dengan tujuan seperti ini, dalam anggaran biaya tahun 1939 disediakan anggaran untuk kira-kira 10 tipe sekolah itu. Biayanya tidak terlalu mahal daripada "vervolgschool" biasa, sedangkan sebagian dari biaya dapat ditutup dengan pungutan uang sekolah yang lebih tinggi. Lain dari pada itu tipe sekolah ini mendapat fungsi baru yang sangat baik sebagai persiapan untuk MULO Bumiputera (Inheemse MULO).

Seperti telah dikemukakan, "vervolgschool" ialah sekolah rendah yang sebenarnya diperuntukkan bagi penduduk Bumiputera. Pemerintah juga sering mengemukakan pendapat itu di Dewan Rakyat dan diakuinya bahwa sekolah desa akhirnya tidak dapat dipertahankan terus, dan sekolah rakyat lima atau enam tahun dilihat dalam perspektif di kemudian hari sebagai tipe sekolah yang normal. Dalam tahun-tahun belakangan makin disadari dengan jelas bahwa perkembangan sekolah untuk penduduk Bumiputera yang terpikul biayanya harus terdiri dari peningkatan mutu sekolah rakyat itu sendiri. Dulu pikiran ditujukan kepada pengembangan melalui tipe sekolah bercorak Barat (HIS dan "Schakelschool"). Pikiran itu diubah

dengan memusatkan perhatian kepada sistim sekolah-sekolah rakyat itu. Pengembangannya yang lebih jauh ke segala jurusan telah dimungkinkan seperti diwujudkan dengan pengadaan sekolah dagang, sekolah pertanian, dsb. Diferensiasi juga dapat diadakan lebih lanjut ke jurusan pendidikan teknik dalam wujud sekolah pertukangan ("ambachts-leergang"). Dalam hubungan ini penting untuk diketengahkan bahwa pendidikan rakyat dalam bidang teknik telah dijabarkan ke jurusan-jurusan lain selain sekolah pertukangan ("Ambachts-leergang").

Pendirian sekolah pertukangan mulai diadakan dalam tahun 1932 sebagai bagian dari reorganisasi sekolah pertukangan dan teknik. Setelah reorganisasi ini pendidikan teknik terdiri dari: (a) sekolah pertukangan ("ambachts-leergang") sebagai kelanjutan dari sekolah standar dan terbuka untuk segala kelompok penduduk, lamanya dua tahun, dan ada kemungkinan untuk ditambah satu tahun untuk menjadi ahli pertukangan tertentu; (b) sekolah pertukangan ("ambachts school") sebagai kelanjutan dari sekolah rendah bercorak Barat (HIS, HCS, ELA, dsb.) lamanya tiga tahun, juga terbuka bagi semua kelompok penduduk dan bertujuan mendidik tenaga teknik untuk personalia di bidang pengawasan yang paling rendah; (c) Reorganisasi ini juga mengubah sekolah teknik empat tahun (di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung) menjadi sekolah teknik lima tahun, dan menerima murid dari semua tipe sekolah rendah bercorak Barat. Tujuannya mendidik ahli teknik untuk fungsi menengah rendah dan dikategorisasikan ke dalam "Sekolah Kejuruan Menengah".

Pendidikan pertukangan ("ambachtsleergang") menurut kenyataan ialah untuk menghasilkan "skilled labourer", yang terutama bernilai dalam lingkungan Barat seperti perusahaan-perusahaan dan industri. Dengan demikian pada hakekatnya tidak menunjang perkembangan keinginan rakyat. Dalam hubungan ini diadakan percobaan ke arah yang lain sama sekali. Sejumlah guru sekolah pertukangan diperbantukan kepada Departemen Urusan Ekonomi untuk bertugas di desa-desa sebagai juru penerangan dan penyuluhan untuk memberi dorongan kepada

kerajinan rakyat. Percobaan ini membawa hasil sangat memuaskan, kata Idenburg. Hubungan erat diadakan antara Departemen Ekonomi dengan Departemen Pendidikan dan Agama, dengan membentuk panitia kerja kecil interdepartemental.

Pengembangan yang paling penting dan yang prinsipil dalam sistim sekolah untuk rakyat Indonesia ialah MULO Bumiputera. Tipe sekolah ini untuk pertama kali diperkenalkan dalam rancangan anggaran biaya untuk tahun 1937 dan merupakan usaha pertama meningkatkan mutu pendidikan formal umum dalam lingkungan sekolah Bumiputera ke taraf yang lebih tinggi. Di Yogyakarta pada bulan Agustus 1937 didirikan MULO Bumiputera oleh Muhammadiyah dengan subsidi pemerintah. Untuk mengajarkan beberapa mata pelajaran digunakan bahasa pengantar Jawa seperti sejarah, ilmu bumi, dan ilmu alam, tetapi untuk mata pelajaran lain digunakan bahasa pengantar Melayu, seperti bahasa Inggris dan pengetahuan dagang. Perhatian yang besar diberikan kepada bahasa Belanda. MULO Bumiputera bersubsidi lain didirikan di Solo (1937), dan di Bandung (1938). Pemerintah mendirikan pula MULO Bumiputera semacam itu pada tahun 1938 di Palembang, Banjarmasin, dan pada tahun 1939 di Surabaya. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pendirian tipe sekolah ini. Untuk tujuan itu mula-mula dibangkitkan perhatian Muhammadiyah dengan organisasinya di bidang pendidikan, karena di kalangan anggota organisasi ini banyak pedagang Bumiputera dan juga justru di kalangan mereka ini pada umumnya orang lebih peka dan terbuka terhadap jasa-jasa pendidikan. Melalui kerja sama dengan Muhammadiyah disusun kurikulum yang paling mendekati program pelajaran MULO-A. Sebagai permulaan MULO Bumiputera direncanakan untuk memberikan pendidikan akhir dengan aspek dagang.

Di dalam Dewan Rakyat tipe sekolah baru disambut dengan gembira. Segera pula perhimpunan pendidikan Bumiputera yang besar-besaran minta subsidi untuk mendirikannya dan dari berbagai pihak di Dewan Rakyat disarankan untuk mendirikan MULO Bumiputera negeri di Jawa dan Madura, dan di daerah seberang. Tipe sekolah ini diadakan

untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik terarah kepada pengembangan perusahaan Bumiputera menjadi lebih besar. Disamping pendidikan diarahkan ke jurusan perdagangan dengan mencurahkan kepada mata pelajaran bahasa Belanda dan Inggris, juga diusahakan memelihara hubungan yang erat antara sekolah dengan masyarakat Bumiputera, dengan mengajarkan bahasa-bahasa daerah secara mendalam. Mengenai masa depan tipe sekolah ini belum dapat dikatakan apa-apa. Tetapi wajar jika di masa depan MULO-Bumiputera itu seperti MULO-Barat akan berkembang dengan diferensiasi ke dalam beberapa jurusan. Sekolah kejuruan yang lebih tinggi, yang sementara masih hanya ada dan dapat dicapai dalam lingkungan pendidikan Barat, harus dapat disambungkan ke dalam lingkungan pendidikan Bumiputera dengan MULO-Bumiputera sebagai "onderbouw"-nya. Dengan demikian rintangan besar dalam pendidikan bagi anak Bumiputera yang disebabkan oleh biaya tinggi sekolah bercorak Barat, akan dapat dihilangkan. Sementara itu kemungkinan-kemungkinan di bidang ini juga sangat erat berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi penduduknya. Di satu pihak pendidikan termasuk syarat-syarat untuk kemungkinan memajukan perekonomian secara luas, di pihak lain pengembangan sekolah sampai tingkat tertentu juga tergantung dari kecepatan kenaikan kemakmuran penduduk dan dalam hubungan dengan itu terjadinya diferensiasi kerja.

Mengenai perkembangan sekolah bercorak Barat untuk anak Bumiputera, Idenburg memberikan uraian sebagai berikut. Ketika HIS didirikan pada tahun 1914, sekolah itu benar-benar disediakan untuk penduduk tingkat atas atau sekolah itu merupakan sekolah status ("standenschool"), tetapi dalam perkembangannya tidak dapat mempertahankan sifatnya sebagai sekolah status. Pemerintah berusaha mempertahankan sifat itu dengan menetapkan kriteria status sosial dan uang sekolah yang lebih tinggi untuk dapat diterima di HIS. Tiap tahun pemerintah membela dengan berbagai argumentasi penetapan kriteria itu di Dewan Rakyat. Sifat sekolah status dari HIS itu tidak dapat dipertahankan karena perkembangan masyarakat itu sendiri.

Kebutuhan akan pendidikan Barat menjadi makin besar dengan makin besarnya bidang persentuhan Barat dengan Timur dalam masyarakat di Hindia-Belanda. Salah satu sebabnya ialah bahwa kelompok orang Bumiputera yang pandai berbahasa Belanda makin menjadi besar dan di dalam kelompok itu tumbuh generasi kedua yang bersekolah. Generasi pertama yang bersekolah di HIS pada umumnya berasal dari lingkungan dengan bahasa Bumiputera sebagai bahasa dalam keluarga, tetapi anak-anak mereka itu dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sebagian besar mengerti bahasa Belanda. Kelompok ini banyak memilih sekolah rendah Eropa dan mulailah posisi sosial HIS berubah. Dalam tahun-tahun terakhir pergeseran itu secara khusus menjadi makin besar sebagai akibat perubahan kurikulum HIS. Pada HIS lama dipakai sejak kelas satu bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, tetapi terakhir bahasa daerah ialah bahasa pengantar di dua kelas pertama, dan untuk sebagian di kelas tiga. Perubahan kurikulum itu disetujui oleh Prof. Dr. B.J.O. Schrieke, karena membawakan penghematan yang cukup besar pada masa krisis ekonomi itu. Dengan perubahan kurikulum itu dapat ditempatkan guru tamatan sekolah guru ("normaalschool") di kelas satu dan dua HIS. Gaji mereka lebih rendah dari tamatan "kweekschool" atau yang diatasnya. Penghematan itu juga membawakan proses pembumiputeraan sejauh-jauhnya di HIS, sehingga dapat dikurangi jumlah guru Belanda yang gajinya lebih besar dari pada guru Bumiputera. Pada sejumlah HIS sudah terjadi proses dengan sempurna dan di sejumlah sekolah yang lain hanya tinggal guru Belanda sebagai Kepala Sekolah. Melalui proses itu HIS makin didekatkan kepada masyarakat penduduk Bumiputera dan tidak hanya kehilangan sama sekali sifatnya sebagai sekolah status, tetapi juga bukan lagi sekolah istimewa. Menurut Idenburg, anak Bumiputera dari lingkungan keluarga yang di rumah berbahasa Belanda, sebenarnya tidak patut lagi bersekolah di HIS karena di kelas-kelas terendah HIS bahasa pengantarnya bukan lagi bahasa Belanda. Sebagai akibatnya anak itu tidak dapat ditolak di sekolah rendah Eropa. Dengan demikian di lapisan

tinggi penduduk Indonesia timbul pikiran bahwa sekolah rendah Eropa menjadi sekolah biasa bagi anak mereka, dan memang demikian keadaannya. Oleh A.D.A.de Kat Angelino telah ditunjukkan dengan jelas perubahan fungsi sosial HIS. (Handelingen Volksraad, 1936-1937, halaman 992 dst.). Sekolah Rendah Eropa digambarkannya sebagai sekolah biasa bagi semua anak yang karena orang tua mereka itu orang Eropa, dan mereka itu menurut kenyataan berbahasa Belanda di rumah dengan orang tua mereka. Di dalam masyarakat di Nusantara antara lingkungan Barat yang makin membesar dengan lingkungan Bumiputera ada kelompok yang berasal dari lingkungan yang benar-benar Bumiputera tetapi bergerak secara berangsur-angsur mendekati lingkungan Barat. Dan sekolah untuk kelompok ini ialah HIS (HCS dan "schakelschool"). Demikian menurut de Kat Angelino. Kriteria yang menunjukkan orang termasuk ke dalam kelompok tersebut ditentukan berdasarkan penghasilannya, yang sebagai akibat kelangkaan uang dalam masa krisis sangat rendah; misalnya untuk swasta kira-kira 50 gulden sebulan, dan untuk pegawai negeri kira-kira 35 gulden sebulan. Penurunan tingkat gaji pegawai negeri berakibat penekanan kriteria status untuk swasta lebih ke bawah. Akibat semuanya itu fungsi HIS dalam masyarakat sama sekali berubah. Tidak mungkin lagi untuk merobahnya kembali menjadi sekolah istimewa untuk lapisan atas penduduk Bumiputera karena akan tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Dalam struktur yang dibawa oleh perkembangan itu terbentuk dalam masyarakat kolonial suatu lapisan yang terdiri dari berbagai kelompok penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Belanda. Tetapi hal itu tidak berarti, bahwa sekolah rendah Eropa ialah sekolah yang harus disediakan untuk semua anak bukan Belanda dari kelompok-kelompok dalam lingkungan berbahasa Belanda. Generasi berbahasa Belanda akan cepat tumbuh dan mereka ini di kemudian hari tidak semuanya termasuk ekonomi kuat sehingga sulit membayangkan bahwa biaya di Sekolah Rendah Eropa akan terbayar oleh kebanyakan dari mereka itu. Karena itu perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan HIS dalam keadaannya dan dengan

kurikulum yang dahulu. Bertentangan dengan apa yang telah dikemukakan bahwa tidak mungkin lagi merubah HIS kembali menjadi sekolah istimewa, ia mempunyai gagasan bahwa jika bahasa Belanda dijadikan lagi bahasa pengantar mulai dari kelas-kelas terendah, dapat dipertahankan HIS dalam masyarakat penduduk Bumiputera sebagai sekolah istimewa. Menurut pendapatnya konstruksi HIS tidak seluruhnya rasional karena di samping ada "schakelschool" yang merupakan jembatan dari pendidikan dalam lingkungan yang benar-benar Bumiputera diarahkan menuju ke pendidikan yang bercorak atau berorientasi Barat. Bentuk "schakelschool" yang sudah ada dapat dipertahankan.

Di samping HIS ada HCS. Sekolah bercorak Barat ini tidak merugikan penduduk Bumiputera karena orang Cina pada umumnya tetap ada dalam lingkungannya sendiri untuk menerapkan hasil pendidikan Barat dalam perusahaan sendiri. Sebagai ilustrasi dikemukakan bahwa orang-orang Cina tamatan AMS misalnya, menganggap wajar untuk bekerja sebagai pelayan dalam toko-toko besar Cina. Tetapi HCS untuk penduduk Cina di kota-kota dianggapnya terlalu mahal. Dalam tinjauan mengenai "vervolg-school" telah disinggung mengenai Sekolah Rendah Cina dalam bentuk sekolah lengkap enam tahun dengan mata pelajaran bahasa Belanda dan dengan aspek perdagangan. Kesulitan untuk mendirikan sekolah rendah Cina yang lengkap enam tahun seperti yang dimaksudkan itu ialah, karena hanya sedikit guru Cina di bawah tingkatan tamatan HCK. Guru Cina dengan tingkatan tipe guru tamatan "normaalschool" juga tidak ada. Jika ada tidak mungkin pula menggaji mereka itu seperti guru tamatan "normaalschool" karena di bidang perdagangan mereka itu dengan mudah akan mendapat penghasilan yang lebih besar. Bahkan dari HCS sendiri banyak guru Cina yang keluar.

Menurut Idenburg, uraian yang baik mengenai perkembangan sekolah negeri untuk penduduk Cina dan analisa masalah-masalah yang timbul di dalamnya, terdapat dalam artikel Dr. R. van Diffelen, "Pendidikan Untuk Orang-orang Cina", Koloniale Studien, Desember 1936. (Lampiran A. tidak dimuat).

Di bawah ini diberikan ikhtisar jumlah murid Bumiputera di sekolah rendah (berorientasi) Barat, tahun 1931-1937.

<u>Tipe sekolah</u>	<u>1931/32</u>	<u>1932/33</u>	<u>1933/34</u>	<u>1934/35</u>	<u>1935/36</u>	<u>1936/37</u>	<u>1937/38</u>
Eropa negeri	3.529	3.640	3.670	3.734	3.659	3.735	3.896
Eropa swasta	918	1.062	1.124	1.066	1.038	1.076	1.106
HCS negeri	293	338	367	353	322	411	484
HCS swasta	813	862	908	998	1.089	1.226	1.450
HIS negeri	39.193	40.321	40.500	40.435	39.633	40.589	41.537
HIS swasta	21.703	21.666	21.439	20.570	20.462	22.398	23.865
Khusus negeri	3.071	3.398	3.579	3.329	3.571	3.889	3.944
Khusus swasta	225	184	232	262	310	353	401
"Schakel" neg.	4.089	3.831	3.553	2.959	3.020	3.083	3.207
"Schakel" swt.	1.212	1.237	1.439	1.600	1.640	2.199	2.166
JUMLAH	75.046	76.539	76.811	75.306	74.803	78.958	82.056

Ikhtisar jumlah murid Bumiputera di sekolah menengah dengan pendidikan yang berorientasi Barat sejak tahun 1931 ada dalam Lampiran B (tetapi tidak dimuat). Pendidikan berorientasi Barat untuk anak Bumiputera itu diselenggarakan di sekolah-sekolah yang terbuka untuk semua kelompok penduduk. Dengan sendirinya sekolah-sekolah ini tidak secara khusus diorientasikan kepada kelompok penduduk Bumiputera kecuali HIS, "Schakelschool", Sekolah Khusus, dan juga barangkali AMS-AI (Bagian Sastra Timur). Akibat krisis jelas sekali terlihat pengaruhnya teristimewa pada kelompok penduduk Bumiputera yang persentase para pelajarnya selama masa krisis sangat menurun. Sesudah krisis tampak kenaikan jumlah murid. Justru karena adanya krisis itu tidak mungkin menarik kesimpulan mengenai faktor pendorong kepada kelompok penduduk Bumiputera untuk menuntut pendidikan Barat lanjutan lebih tinggi, yang perkembangannya tidak langsung ada hubungannya dengan masyarakat dan sekolah untuk kelompok penduduk Bumiputera. Masalah ini tidak dibahas kecuali yang mengenai AMS-AI. Dalam kerangka sistim sekolah menengah

di Hindia Belanda diusahakan agar diadakan orientasi secara khusus kepada kelompok penduduk Bumiputera dengan membentuk AMS-AI itu. Dalam pembahasan masalah mengenai pendirian fakultas sastra dikehendakikan bahwa belum banyak berhasil menarik perhatian orang Bumiputera kepada tipe sekolah menengah khusus itu. AMS-AI itu dipandang sebagai sekolah khusus untuk murid yang tidak mampu mengikuti program pelajaran ilmu pasti dan ilmu alam di AMS-B. Orang Bumiputera belum tergugah pikirannya bahwa pada AMS-AI unsur-unsur kebudayaan Nusantara dapat diperdalam dan dikembangkan.

Pada umumnya dalam masyarakat, HBS dijadikan sekolah yang paling ideal dan sukar mengalahkannya dengan mendirikan hanya satu tipe sekolah AMS-AI. *) Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah terhadap pendidikan lanjutan lebih tinggi dalam tahun-tahun terakhir memberikan kesan sangat kuat sebagai kebijaksanaan penghematan. Meskipun demikian, di samping penghematan diusahakan mengadakan suatu diferensiasi untuk dapat mengarahkan pendidikan lanjutan yang lebih tinggi kepada masyarakat. Misalnya dalam kurikulum MULO diadakan perubahan secara besar-besaran. Setelah kelas dua diadakan diferensiasi ke dalam Bagian A yang merupakan pendidikan akhir, dan Bagian B sebagai persiapan untuk melanjutkan sekolah. Sejak tahun 1929/30 di semua MULO negeri diadakan diferensiasi itu (Laporan Pendidikan di Hindia Belanda 1939/40, I, halaman XXIX). Segera ternyata percobaan pembagian ke dalam Bagian A dan B itu tidak memuaskan. Bagian B menarik banyak murid yang sebenarnya tidak dapat mengikuti dengan baik program pelajaran, sehingga banyak murid yang dikeluarkan dan mutu pendidikannya merosot. MULO-B itu menarik lebih banyak murid dan lebih banyak perhatian karena dapat melanjutkan ke AMS-B, yang diplomasnya sederajat dengan HBS-5 tahun. Mulai dengan tahun ajaran 1937/1938

*) Pada tahun 1920 telah diadakan juga AMS-AII (Sastra Barat Klasik) di Bandung. Kemudian dalam masa krisis AMS-AI di Solo dan AMS-AII di Bandung kedua-duanya dipindahkan ke Yogyakarta.

dilaksanakan reorganisasi secara berangsur-angsur dan sesudah kelas satu diadakan tiga jurusan pada MULO:

- a) Bagian B, pada pokoknya sama dengan yang lama, yaitu dapat melanjutkan ke AMS-B dan sekolah menengah kejuruan yang memberikan posisi menonjol kepada program pelajaran eksakta seperti Sekolah Menengah Pertanian, Sekolah Kedokteran Hewan Hindia-Belanda, Sekolah Dokter Hindia-Belanda (NIAS), dsb.
- b) Bagian C, dapat melanjutkan ke AMS-A, Sekolah Pendidikan Guru (sederajat dengan Kweekschool Eropa), MOSVIA, dan Sekolah Menengah Dagang (MHS).
- c) Bagian A, sebagai pendidikan akhir dan hanya dapat meneruskan ke Sekolah Menengah Dagang di Jakarta, Sekolah Pendidikan Guru Kejuruan Wanita, dan Kursus-kursus dagang sore hari negeri. (Laporan Umum Pendidikan di Hindia Belanda, 1936-37 halaman 31 dst.).

Dalam kerangka diferensiasi dikembangkan dalam HBS Bagian A atau sastra-ekonomi, dimulai pada tahun 1934 di HBS negeri Betawi dan Surabaya kemudian diadakan di Medan pada tahun 1935, di Bandung pada tahun 1936, dan di Semarang pada tahun 1937. HBS di Betawi yang memakai nama Koning Willem III-School terdiri dari HBS dengan bagian B saja, sedangkan yang bernama Prins Hendrik-School (juga di Betawi) hanya mempunyai "bovenbouw" A saja. Di Betawi juga didirikan "Lyceum", dimulai pada tahun 1924 oleh Yayasan "Carpentier Alting" dan di Bandung pada tahun 1927 didirikan Lyceum Kristen (Lyceum ialah HBS 5 tahun, yang di "bovenbouw" mengadakan diferensiasi dalam HBS-B dan Bagian "Gymnasium"). Menurut angket kepada para orang tua murid HBS di Surabaya dan Malang juga diinginkan lembaga pendidikan Gymnasial, tetapi baru pada tahun 1935 HBS di Surabaya dan di Malang dijadikan Lyceum. Di Bandung pada tahun 1938 dibuka Gymnasium negeri. Sebagai percobaan pada tanggal 1 Agustus 1935 pada AMS di Jakarta digabungkan bagian Sekolah Menengah Dagang (lamanya dua tahun) yang dapat disambungkan

dari kelas tiga HBS dan MULO. Program pelajarannya lebih sederhana dari pada HBS-A, sedangkan pendidikannya lebih praktis dan diarahkan kepada posisi rendahan dalam perdagangan dan perusahaan. Percobaan itu ternyata berhasil. Pada tanggal 1 Agustus 1939 pada AMS yang didirikan dalam tahun 1938 di Surabaya, juga digabungkan Sekolah Menengah Dagang (Laporan Umum Pendidikan di Hindia-Belanda 1934-1935, I, halaman XVII, dan 1937-1938, I, halaman 34 dan 78).

Sebagai kelengkapan ikhtisar ditambahkan oleh Idenburg, ringkasan mengenai perkembangan sekolah untuk anak gadis (lampiran C). Makin diakui pentingnya sekolah untuk anak gadis sebagai bagian dalam pendidikan umum untuk rakyat. Pendidikan dalam keluarga dengan tatanan aspek-aspek spirituil dan materiil yang harmonis baru dapat dilaksanakan dengan sempurna jika disertai pengembangan kecerdasan dan kemampuan wanita. Kira-kira sepuluh tahun sebelumnya (1928) sekolah khusus untuk gadis sebagai persiapan untuk berbagai tugas dalam rumahtangga dan keluarga dianggap sebagai luks atau kemewahan. Hal itu antara lain terbukti dari pemberian subsidi yang tidak menguntungkan kepada sekolah khusus dengan tugas pendidikan seperti itu. Sekolah rumahtangga (atau sekolah kesejahteraan keluarga) swasta diberi subsidi dengan patokan paling tinggi 50% dari biaya eksploitasi bersih. Peraturan itu dalam rangka penghematan tidak dapat dirobah.

Dalam masyarakat penduduk Bumiputera makin tumbuh kesadaran bahwa kepada para remaja puteri perlu diberikan pendidikan yang baik sebagai persiapan untuk kehidupan dalam rumahtangga dan keluarga. Sejak tahun 1931 terlihat secara berangsur-angsur kenaikan persentase jumlah murid wanita Indonesia yang masuk sekolah desa khusus wanita dan campuran, "vervolgschool" gadis dan campuran dan Sekolah Kelas Dua Wanita. Persentase itu pada tahun 1930-1937 di sekolah desa 22.6 sampai 27.6; di "vervolgschool" 18.9 sampai 21.8; dan di Sekolah Kelas Dua 16.8 sampai 38.3. Jumlah murid yang tamat sekolah rendah Bumiputera menunjukkan gambaran yang mengembirakan seperti terlihat pada daftar berikut ini:

Tipe sekolah	Akhir thn. ajaran	Jumlah murid		Kenaikan dan tamatan	
		Laki-laki	Wanita	Laki-laki	Wanita
Sekolah Desa	1936/37	1.204.273	461.235	962.540 (79,9%)	366.850 (79,5%)
"Vervolgschool"	1936/37	178.662	50.048	153.374 (85,8%)	44.214 (88,3%)
Sek.Kl.II Sempurna	1936/37	5.617	3.474	4.948 (88 %)	2.982 (85,3%)
Jumlah	1936/37	1.388.552	514.777	1.120.862 (80,7%)	414.046 (80,4%)

Secara khusus perlu dikemukakan catatan mengenai "vervolgschool" gadis. Pada akhir tahun ajaran 1936/37 dan 1937/38 jumlah muridnya 25.328 dan 28.886, tersebar dalam 218 sekolah (183 negeri dan 35 swasta bersubsidi). Pada sekolah-sekolah ini di samping mata pelajaran umum diajarkan juga mata pelajaran ilmu kesehatan, pekerjaan tangan yang berguna dan indah, mengurus cucian, memasak, dan pekerjaan mengurus rumah tangga (di beberapa sekolah diajarkan membuat dan merenda).

Pada sekolah umum bercorak Barat juga terjadi kenaikan persentase jumlah murid wanita, baik pada Sekolah Rendah maupun pada MULO dan Sekolah Menengah dari seluruh jumlah murid Bumiputera. Pada tahun 1930-1937 persentase itu di sekolah rendah 31,5 sampai 37,2; di MULO 19,5 sampai 21,6; dan di sekolah menengah 14,7 sampai 25.

Dalam tahun-tahun krisis hebat (1934/35 dan 1935/36) terjadi penurunan persentase tetapi segera diikuti kenaikan. (Daftarnya tidak dimuat).

Perlu diperhatikan bahwa unsur wanita di sekolah rendah Bumiputera dalam perbandingan lebih sedikit daripada di sekolah rendah bercorak Barat. Di sekolah Bumiputera pada tahun ajaran 1936/37 = 27,6%, dan di sekolah rendah bercorak Barat dalam tahun ajaran 1937/38 = 37,4%.

Anak gadis Bumiputera yang telah cukup belajar di sekolah formil umum relatif hanya sedikit yang meneruskan ke sekolah kejuruan untuk gadis yang menurut tujuan pendidikannya dibagi dalam tiga macam yaitu sekolah pendidikan guru, sekolah pendidikan personalia medis (juru rawat,

bidan), dan Sekolah Kesejahteraan Keluarga (daftar data murid tidak dimuat). Sekolah-sekolah pendidikan guru dan personalia medis membekali anak gadis untuk bertugas dalam jabatan-jabatan tertentu. Sekolah Kesejahteraan Keluarga bertujuan lebih luas yaitu di samping pendidikan untuk pekerjaan khusus bagi wanita, juga pendidikan untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik. Teristimewa sekolah rendah kesejahteraan keluarga mengalami pertumbuhan terus-menerus. Dasar pendidikannya ialah sekolah rendah bercorak Barat sebagai landasan pendidikan praktis untuk mempersiapkan murid wanita dalam tugas rumahtangga dan keluarga. Biasanya kurikulum terdiri dari mata pelajaran kerumahtanggaan ditambah dengan kerajinan tangan yang berguna dan indah serta jahit-menjahit pakaian mode. Pemerintah menyelenggarakan empat sekolah dari tipe ini. Selanjutnya ada sepuluh sekolah swasta bersubsidi, diantaranya empat berasal dari sekolah guru taman kanak-kanak ("Fröbel kweek-school"). Pada masa krisis pemerintah menutup sekolah guru taman kanak-kanak, dan kemudian hanya swasta yang menyelenggarakannya. Murid-murid sekolah kesejahteraan keluarga bersubsidi yang berasal dari sekolah guru taman kanak-kanak diberi kesempatan untuk mencapai ijazah guru taman kanak-kanak melalui kelas-kelas lanjutan, tetapi untuk biaya penyelenggaraan kelas-kelas tersebut tidak disediakan subsidi. Kepada sekolah kesejahteraan keluarga netral di Den Pasar dan Singaraja (Bali) serta sekolah kesejahteraan keluarga di Sukabumi diberikan "subsidi in natura", yaitu subsidi berupa bantuan pemerintah yang terdiri dari tenaga guru dengan gaji dari pemerintah.

Di samping sekolah negeri dan bersubsidi terdapat juga banyak sekolah kesejahteraan keluarga swasta tanpa subsidi. Pada permulaan tahun ajaran 1937/38 sudah ada 40 buah, pada tahun ajaran 1937/38 jumlahnya naik menjadi 51 buah, tujuh kemudian delapan di antaranya dipersamakan dengan negeri dan setelah itu 12 dan selanjutnya 18 diberi "ijin nama" oleh Departemen. Dalam rancangan anggaran biaya untuk tahun 1939 diperhitungkan untuk memberikan

subsidi kepada enam sekolah karena tanpa diberi subsidi oleh pemerintah sekolah-sekolah itu tidak dapat mengatasi bidang keuangannya.

Di samping sekolah kesejahteraan keluarga tersebut di atas, yang dikunjungi oleh murid-murid Eropa, Cina, dan Bumiputera, dikembangkan pula sekolah tipe baru yang disediakan semata-mata untuk gadis Bumiputera. Pendiriannya diprakarsai oleh isteri Gubernur Jenderal yang dahulu, De Jonge, dan diberi nama "Sekolah Nonyanya De Jonge". Yang diterima sebagai murid ialah tamatan dari "Vervolgschool" untuk gadis dengan tujuan memberi pendidikan mata-pelajaran bahasa, berhitung, menulis, ilmu kesehatan, ilmu gizi, ilmu resep, pengetahuan barang ("warenkennis"), mengurus cucian, pekerjaan kerumahtanggaan, menjahit pakaian dalam, menjahit pakaian mode, pekerjaan tangan indah, menisik, dan menjerumat. Pada bulan Januari 1937 didirikan di Betawi "Sekolah Nonya De Jonge" dengan 25 murid, pada tahun ajaran 1937/38 jumlah murid menjadi 40. Pada tahun 1938 telah terdaftar tujuh sekolah dari tipe ini. Pemerintah bermaksud memberi subsidi kepada tiga dari padanya.

Sekolah Pendidikan Guru (Wanita) untuk Sekolah Kesejahteraan Keluarga hanya ada satu, yaitu di Betawi dengan diferensiasi untuk diploma A (mata pelajaran kerumahtanggaan) dan diploma B (jahit-menjahit pakaian mode dan pakaian dalam). Tetapi sekolah itu tidak mampu menyediakan tenaga guru dengan cukup untuk Sekolah Kesejahteraan Keluarga. Pada tanggal 1 Agustus 1936 dibuka Sekolah Guru semacam itu di Surabaya atas prakarsa perkumpulan "Sekolah Rumahtangga dan Industri Surabaya" (Soerabajasche Huishoud en Industrieschool) dan tidak diberi subsidi oleh pemerintah.

Kesempatan untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi masih sangat jarang dipergunakan oleh puteri Bumiputera, seperti ternyata dari ikhtisar kecil di bawah ini.

Jumlah seluruh mahasiswa Bumiputera yang terdaftar
selama tahun kuliah

<u>Th.kuliah</u>	<u>Laki-laki</u>	<u>Perempuan</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Keterangan</u>
1930/31	x	x	x	x = Data tidak lengkap
1931/32	x	x	x	
1932/33	320	14	386 *	* = jenis kelamin 52 orang tidak diketahui
1933/34	422	16	438	
1934/35	472	17	489	
1935/36	496	20	516	
1936/37**	269	15	284	**= Dari Sek.Tinggi Kedokteran dan Hukum
1937/38**	302	15	317	
1938/39**	286	18	304	

113. Menteri Daerah Jajahan (Welter) kepada Gubernur Jenderal (Tjarda van Starkenborgh Stachouwer), tanggal 12 April 1939. Huruf M.13/No.100, dari hati ke hati (vertrouwelijk)

Menteri memberitahukan bahwa ia sangat menghargai ikhtisar yang disusun oleh Dr. Idenburg. Ia merasa puas mendapat gambaran yang sangat menarik perhatian itu dan yang dapat dijadikan landasan untuk bertukar pikiran mengenai pokok-pokok masalah tentang kebijaksanaan yang harus diikuti pemerintah kolonial. Pada umumnya ia setuju dengan pendapat dan pemberitahuan Idenburg, tetapi ada beberapa catatan yang dibuatnya mengenai beberapa hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut.

Dari seluruh pembahasan Menteri Welter yang pokok-pokoknya disajikan di bawah ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa dikehendaki agar perhatian terbesar dicurahkan dan dana serta daya terutama dikerahkan kepada pengembangan sekolah untuk penduduk Bumiputera, teristimewa sekolah desa. Seperti dalam suratnya terdahulu ia berpendapat bahwa sekolah untuk remaja dari massa penduduk Bumiputera dianggapnya paling penting dalam tugas pendidikan dan

sebagai bagian langsung dan paling utama dari sekolah itu ialah sekolah desa. Karena itu pertama-tama dimintakan perhatian terhadap sekolah desa.

Ia membedakan pandangan mengenai perluasan kuantitatif dari sekolah desa dari pandangan mengenai pendalaman kualitatif pengajarannya. Ia merasa prihatin mengenai kemunduran yang terjadi dalam perkembangan kuantitatif seperti digambarkan dalam surat Idenburg. Sebelumnya ia mendapat kesan memuaskan dari keterangan keterangan yang diberikan pemerintah Hindia-Belanda kepada Dewan Rakyat, bahwa meskipun dalam masa krisis tidak dapat diadakan perluasan seperti pada masa sebelumnya, namun dalam tahun-tahun krisis itu tercapai suatu kemajuan juga, jika dibandingkan dengan kenaikan jumlah anak berusia sekolah. Keterangan itu menggembirakan Menteri, karena dengan demikian pemberantasan Buta Huruf maju terus. Penekanan ke bawah persentase buta huruf di Hindia-Belanda adalah usaha pemerintah yang tergolong paling penting, lebih-lebih mengingat makin bertambahnya perhatian dan kecaman dari dunia internasional terhadap politik kolonial Belanda, terutama dari pihak negara-negara "have-nots". Tetapi angka-angka yang disajikan oleh Idenburg menunjukkan bahwa dalam tahun-tahun krisis 1931-1936 praktis terjadi kemandegan sama sekali. Sejak masa itu pengelolaan sekolah desa di daerah yang luas diserahkan kepada kesatuan-kesatuan otonomi yang lebih rendah. Tujuan penyerahan itu di samping untuk memenuhi keharusan politik yang masuk akal bertujuan juga untuk mencapai pengurusan lebih baik dan lebih intensif. Penyerahan itu seperti ditegaskan oleh Idenburg tidak boleh diartikan bahwa pemerintah Pusat melepaskan diri dari tanggung jawab prinsipil mengenai perkembangan sekolah Bumiputera. Kepada Dewan Rakyat pemerintah menyatakan dalam beberapa kesempatan bahwa kemungkinan tambahan biaya dalam batas-batas yang dapat diterima sebagai konsekuensi tindakan tersebut akan disediakan.

Menteri merasa heran mendapat keterangan dari surat Idenburg, bahwa setelah dua tahun penyerahan tersebut di atas belum diperoleh

data cukup mengenai hasil yang telah dicapai oleh kesatuan-kesatuan otonomi itu dalam usaha pengembangan sekolah desa. Adanya ketidakpastian yang mengganggu masalah sangat penting itu menurut Menteri ternyata dari surat Idenburg sebagai Direktur Pendidikan dan Agama kepada Gubernur Jenderal tanggal 23 Januari 1939 nomor 22x/A Rahasia, yang menjelaskan politik sebagai dasar rencana kerja Departemen untuk tahun 1940. Penjelasan Idenburg tersebut ialah sebagai berikut. Dalam hubungannya dengan sekolah Bumiputera ia berpendirian bahwa di bidang itu dari segi sosial masih ada ketinggalan sangat besar yang secara langsung dan jelas merupakan kerugian sosial-ekonomis bagi penduduk Bumiputera. Usul-usulnya di bidang ini mencerminkan kemampuan sebenarnya untuk mengadakan perluasan. Ia cenderung untuk bertahan pada pendirian bahwa kemampuan pemerintah bahkan belum memenuhi kebutuhan yang dilihat dari sudut sosial sangat mendesak. Mengenai tipe-tipe sekolah yang lain ia berpegang pada prinsip bahwa untuk pendidikan yang langsung mempunyai arti penting untuk kemajuan masyarakat secara sosial dan ekonomis, tidak boleh disediakan biaya yang terlalu sedikit. Maka pengeluaran yang disediakan untuk sekolah teknik, pertukangan, kerajinan, perdagangan, dan pertanian dianggapnya sebagai keharusan untuk kepentingan langsung bagi masyarakat. Mengenai perguruan tinggi, sekolah menengah, dan sekolah rendah bercorak Barat serta MULO dikemukakannya, bahwa bukan karena faktor-faktor yang mendesak di bidang sosial dan ekonomi harus mencegah atau mengejar ketinggalan setiap tahun input berupa orang-orang muda dengan pendidikan semacam itu dalam masyarakat. Peraturan dan tindakan yang diusulkan dalam cabang-cabang pendidikan tersebut, diperhitungkan dalam hubungan dengan kepatutan, karena bermacam-macam faktor. Pertama-tama disebutkan faktor kenaikan jumlah yang wajar pada setiap sistem pendidikan yang wajar harus diperhatikan. Jika faktor ini diabaikan akan segera mengakibatkan penyimpangan-penyimpangan terhadap anggaran biaya. Di samping itu terus ditangani pemulihan keadaan yang ditinjau dari sudut kebijaksanaan pendidikan, pelaksanaan penghematan yang bergerak terlampaui jauh.

Oleh Menteri dalam surat itu dikutip keterangan Idenburg yang menunjukkan ketidak pastian dalam hubungan dengan perluasan sekolah desa. Bahwa hanya sangat sedikit yang diketahui mengenai apa yang sudah dikerjakan di daerah-daerah otonom mengenai perluasan sekolah desa dan diperoleh kesan umum bahwa di daerah-daerah karena dilaksanakannya perbandingan dalam bidang keuangan ketinggalan paling sedikit satu tahun. Menteri menyatakan keheranannya mengapa tidak dapat mengetahui apa yang terjadi mengenai perluasan sekolah desa di daerah-daerah sedangkan tersedia suatu korps aparatur pemerintahan. Ia mendapat kesan bahwa tidak ada kerja sama antara berbagai instansi pemerintah. Ia berpendapat bahwa penyerahan sebagian dari tugas pemerintah kepada kesatuan-kesatuan otonomi tidak boleh menyebabkan terlantarnya tugas itu. Perluasan sekolah desa merupakan urusan yang terlalu penting dan terlalu prinsipil, sehingga tidak boleh dibiarkan pengurusan pelaksanaannya oleh kesatuan-kesatuan otonomi kurang terawasi. Tugas terutama pimpinan pemerintah Pusat justeru untuk mengamati garis-garis besar, dan jika perlu mendorong serta meningkatkan perkembangan daerah-daerah yang didesentralisasikan. Ia merasa kecewa bahwa justeru di masa peralihan itu pemerintah Pusat kurang memberikan bimbingan. Ia minta penjelasan mengenai peristiwa ini dengan data seperlunya yang tidak hanya tentang perluasan sekolah desa, tetapi juga mengenai kebijaksanaan dalam pelaksanaan desentralisasi dalam arti yang luas.

Pemberantasan buta huruf menarik perhatian Menteri secara khusus. Dalam hubungan dengan masalah itu ia sangat memperhatikan pendapat mengenai pengadaan kursus-kursus khusus untuk memberantas buta huruf, seperti diberitahukan dalam surat Idenburg. Meskipun dapat dilihat segi-segi yang kurang baik dari kursus-kursus seperti itu, ia menganggap penyelenggaraan kursus-kursus buta huruf itu penting dari sudut tinjauan politik jika dengan cara demikian jumlah orang buta huruf dapat diturunkan (sekalipun hanya lebih banyak di atas kertas daripada menurut kenyataan yang sebenarnya).

Mengenai corak sekolah desa, Menteri Welter berpendapat bahwa pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sekolah itu akan sangat cocok dengan usaha supaya sedapat mungkin pendidikan diberikan oleh guru-guru dari daerah tempat sekolah desa itu sendiri. Diharapkannya untuk memperoleh keterangan mengenai kemajuan yang telah terwujud dari usaha itu. Dalam hubungan dengan cara-cara menyesuaikan sekolah dengan lingkungan setempat, ia sangat sependapat dengan keputusan yang diberitakan dalam harian-harian untuk menyesuaikan gaya bangunan sekolah-sekolah di Bali dengan kebudayaan Bali. Keputusan itu disetujuinya sebagai usaha yang baik untuk mendekatkan sekolah kepada penduduk. Diingatkannya kepada surat tanggal 13 Desember 1937 nomor 8/1170 bahwa Menteri Colijn telah membahas masalah itu dalam hubungan untuk lebih menyadarkan penduduk, bahwa sekolah desa itu milik penduduk, dan dari kesadaran itu akhirnya akan tumbuh otoaktivitas masyarakat desa untuk bekerja dan berusaha sendiri di bidang penyelenggaraan sekolah desa itu. Disebutkannya juga pendapat Colijn dalam suratnya tanggal 16 Oktober 1934 no.21/1004 mengenai hakekat corak sekolah desa itu. Sebagai contoh khusus mengenai kesadaran baru yang harus ditimbulkan terhadap hakekat corak sekolah desa itu disebut oleh Colijn sekolah-sekolah terbaik Taman Siswa. Hubungan guru dengan siswa di sekolah Taman Siswa berbeda dengan di sekolah negeri. Perlengkapan dan suasana di sekolah disesuaikan dengan tradisi masyarakat dalam lingkungan sekolah. Tetapi Menteri Welter tidak menganjurkan untuk meniru secara latah, ia hanya ingin menunjukkan arah yang harus ditempuh. Persoalan yang penting dalam hubungan yang nyata dengan usaha mempererat ikatan masyarakat desa dengan sekolah desa menurut Menteri ialah bagaimana menyajikan bahan pelajaran kepada murid. Persoalan dalam hubungan yang sama ialah mengenai bangunan sekolah. Yang paling dianjurkannya ialah bangunan kecil yang sederhana tetapi yang baik, dan disesuaikan gayanya dengan tradisi daerah lingkungannya. Bentuk bangunan menurut model seragam dianggapnya bertentangan dengan gagasan yang prinsipil tentang sekolah desa. Biaya pemeliharaan

bangunan yang sederhana itu hanya memerlukan dana yang kecil, sehingga beban keuangan untuk perluasan sekolah desa secara besar-besaran dapat banyak dikurangi. Penelitian lebih lanjut mengenai masalah sangat penting itu yang pada tahun 1934 oleh Colijn dengan tegas dikemukakan, menurut Welter tidak mencapai kemajuan karena perhatian lebih banyak dicurahkan kepada masalah-masalah pendidikan yang dianggap lebih mendesak. Tetapi waktunya telah tiba untuk menelaah masalah itu dengan lebih sungguh-sungguh. Persoalan yang paling penting dalam politik pendidikan dan pengajaran Hindia-Belanda di kemudian hari ialah persoalan mengembangkan sekolah desa dalam ikatan dengan lingkungannya di samping perluasannya secara ekstensif.

Perhatian istimewa juga diberikan kepada "vervolgsschool" dengan mata pelajaran bahasa Belanda, seperti dikemukakan oleh Idenburg dalam surat-suratnya. Menteri De Graaff dalam surat tanggal 8 Agustus 1931 nomor 1/62 juga menganjurkan pengadaan tipe sekolah seperti itu dengan dua macam tujuan, yaitu (a) untuk mengurangi laju murid masuk ke sekolah bercorak Barat yang tinggi biayanya, dan (b) untuk menghasilkan tenaga kerja rendahan yang mengerti bahasa Belanda, baik pun dalam dinas negeri maupun swasta. Ia gembira dapat mengetahui dari Idenburg bahwa tipe sekolah yang dimaksudkan telah mulai berperanan makin penting dalam sistim pendidikan untuk Bumiputera. Tipe "vervolgsschool" dengan mata pelajaran bahasa Belanda harus mendapat perhatian secara khusus, dan ia minta diberitahukan jumlah tipe sekolah yang sudah ada dan perencanaan jumlah yang akan dikembangkan.

Menteri Welter menganggap sangat penting adanya kelas-kelas khusus dan tipe sekolah lain, seperti kelas pertanian, kelas dagang kecil, dan kursus-kursus pertukangan serta MULO Bumiputera. Yang ingin diketahuinya ialah hasil percobaan mengenai penempatan guru-guru sekolah pertukangan yang dibebaskan dari sekolah pertukangan sebagai akibat reorganisasi dan penghematan di Pusat dan Daerah-daerah di mana ada kerajinan rakyat. Ia mau percaya kepada

keterangan Idenburg bahwa dengan percobaan itu dicapai sukses yang besar. Tetapi ia menginginkan data lebih eksak, walaupun bukan berupa angka-angka, tetapi berupa laporan dari petugas-petugas Inspeksi mengenai pekerjaan para juru penerang serta penyuluh, dan mengenai tanggapan penduduk terhadap kegiatan mereka itu.

Penyediaan sekolah untuk massa rakyat Bumiputera dianggap jauh lebih penting di bidang kebijaksanaan pendidikan rakyat. Walaupun demikian ia tidak mengecilkan arti sistim sekolah rendah bercorak Barat. Sementara itu tidak boleh dilupakan bahwa pendidikan bercorak Barat hanya baru dapat mencapai lapisan yang sangat terbatas dari penduduk Bumiputera. Bagaimanapun juga harus diperhitungkan bahwa pendidikan bercorak Barat itu berarti hanya untuk sebagian kecil dari penduduk. Kenyataan ini menetapkan pendidikan bercorak Barat itu sebagai pendidikan yang dikecualikan dan tidak boleh dikembangkan melampaui batas-batas tertentu. Pertama karena dana dan daya yang harus dikerahkan untuk perkembangannya akan menghambat keharusan pengembangan pendidikan untuk rakyat Bumiputera, kedua karena masyarakat Bumiputera sendiri belum siap untuk menerima penyediaan pendidikan yang terlalu luas dan efek dari padanya akan merusak masyarakat itu sendiri. Menteri Welter tidak sependapat dengan Idenburg yang mengingatkannya, bahwa HIS sebagai yang terpenting dalam kategori tipe sekolah bercorak Barat bagi penduduk Bumiputera telah kehilangan coraknya semula sebagai sekolah status (*standenschool*). Menteri menolak anggapan dasar Idenburg bahwa pergeseran terjadi oleh sebab-sebab wajar yang semestinya, sehingga corak keistimewaan HIS terkikis. Generasi kedua anak sekolah cepat tumbuh dalam lingkungan yang mula-mula menyediakan bibit untuk HIS, sebagian besar dibesarkan dalam lingkungan berbahasa Belanda. Mereka itu berbeda dengan generasi pertama, menggunakan bahasa daerah dalam keluarga. Sebab wajar yang semestinya itu mengakibatkan anak generasi kedua dimasukkan terutama ke sekolah rendah Eropa. Gejala ini dilihat Idenburg sebagai sebab perubahan posisi sosial HIS. Jika asumsi itu benar, maka angka-

angka yang diketengahkan Idenburg harus menunjukkan kenaikan yang tinggi dalam jumlah murid Bumiputera di sekolah-sekolah rendah Eropa. Tetapi kenyataannya tidak demikian.

Welter lebih cenderung kepada anggapan bahwa dalam mayoritas keluarga Bumiputera yang kedua orang tuanya menguasai bahasa Belanda, bahasa dalam keluarga dan terutama bahasa untuk mendidik anak-anak ialah tetap bahasanya sendiri atau bahasa Melayu. Hanya ada kekecualian yang sangat sedikit bahwa bahasa Belanda menjadi bahasa dalam keluarga. Dalam kasus yang sedikit itu dipilih sekolah rendah Eropa. Di dalam kenyataannya bahkan jauh lebih banyak keluarga Bumiputera yang hanya ayahnya saja mengalami pendidikan Barat. Dalam keluarga-keluarga seperti itu lebih banyak kemungkinan bahwa bahasa sendiri digunakan dalam pendidikan anak. Jika pandangan ini benar, maka harus dianggap sangat meragukan untuk menerima saran Idenburg supaya kembali pada perubahan kurikulum HIS yang telah bertahun-tahun dilaksanakan dan menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa bahasa pengantar di kelas-kelas terendah. Menteri mendukung pertimbangan pedagogis yang berkeberatan untuk memberi pendidikan kepada anak-anak kecil hanya dalam bahasa asing. Jika harus kembali pada keadaan demikian, maka harus ada sebab-sebab yang sangat penting. Justru kenyataan dalam HIS lama yang sejak permulaan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar membawa keharusan untuk membentuk kelas persiapan agar dapat diberikan sedikit dasar elementer bahasa Belanda kepada anak didik. Dikuatirkan bahwa gagasan Idenburg akhirnya akan menghidupkan kembali kelas persiapan yang tidak saja akan menimbulkan kesukaran baru di bidang keuangan, tetapi akan makin menjauhkan HIS dari lingkungan penduduk Bumiputera.

Menteri sudah mengetahui pula bahwa perubahan kurikulum HIS membawa penghematan yang tidak sedikit. Dalam surat Menteri De Graaff tanggal 8 Agustus 1931 nomor 1/612 yang sering disebut oleh Menteri Welter, terdapat argumentasi yang membela peniadaan bahasa Belanda dari "onderbouw" sekolah rendah bukan untuk orang Eropa

berdasarkan alasan pedagogis dan finansial. Menteri Welter dapat menyetujui prinsip-prinsip dasar argumentasi itu mengingat kenyataan bahwa penyediaan dana dan daya yang berlebihan untuk HIS dapat merugikan penyelenggaraan sekolah untuk seluruh penduduk.

Karena itu ia berkeberatan terhadap formasi HIS yang lama. Ia setuju untuk memelihara fungsi sosial HIS seperti yang digambarkan oleh Idenburg sebagai sekolah untuk kelompok penduduk Bumiputera yang bergerak di antara lingkungan ke-Timuran dengan lingkungan Barat. Dan ia tidak menaruh keberatan bahwa dari murid-murid yang berasal dari kelompok ini tidak boleh diharapkan dapat menguasai bahasa Belanda untuk segera dapat menerima pendidikan dengan pengantar bahasa itu.

Akhirnya Menteri membahas sedikit tentang "sekolah liar". Ia menganggap bahwa gejala yang diberi nama "sekolah liar" harus ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Selama belum tersedia cukup data informasi mengenai hakekat "sekolah liar" itu dianggapnya prematur untuk memberikan cap "sekolah liar yang berbahaya". Ia juga tidak dapat menerima seluruh pandangan seperti dikemukakan oleh Idenburg bahwa sekolah liar itu tumbuh dari masyarakat penduduk Bumiputera di luar urusan Pemerintah. Ia lebih suka menganut pendirian selama belum dapat dibuktikan keharusan untuk mengambil sikap sebaliknya, sebaiknya bersikap ramah terhadap perguruan yang benar-benar tumbuh dari masyarakat tanpa turut campur Pemerintah, dan berusaha melalui pengawasan dan bimbingan kepada sekolah liar agar dapat bekerja di bidang pembentukan tenaga-tenaga yang berguna bagi masyarakat. Dengan tidak menutup mata terhadap keburukan-keburukan sekolah liar, seperti antara lain guru-gurunya kebanyakan tidak berwewenang dan sebagainya, harus diakui bahwa kehadirannya dalam situasi perkembangan pendidikan pada waktu itu secara umum mempunyai suatu nilai yang berguna untuk pendidikan intelektual bagi penduduk Bumiputera. Bagaimana pun juga pemerintah tidak boleh mengabaikan suatu aliran yang mewujudkan suatu kekuatan dalam bentuk sekolah liar itu. Gambaran yang tepat mengenai keadaan yang sebenarnya

tidak dapat dilukiskan. Diketahui, bahwa di samping pengawasan yang negatif berdasarkan Ordonansi yang berlaku terhadap sekolah liar itu, ada sedikit turut campur tangan Pemerintah dalam bentuk yang sangat embrionil (seperti pengakuan hak penggunaan nama sekolah, tunjangan sekolah bagi anak kepada pegawai negeri, dengan konsekwensi diterimanya secara suka rela pengawasan pemerintah terhadap sejumlah sekolah swasta tidak bersubsidi). Adalah perlu untuk memikirkan bagaimana caranya memberi bimbingan yang lebih efektif kepada sekolah liar, kata Menteri. Ia mengingatkan kepada surat Menteri De Graaff tanggal 16 Januari 1933 nomor S/2 Rahasia, yang berusaha memberikan garis-garis besar sebagai pegangan sementara mengenai persoalan itu. Menurut surat Gubernur Jenderal De Jonge tanggal 25 April 1933 nomor 266, gagasan Menteri De Graaff itu tidak dapat dilaksanakan karena tersusul dengan peristiwa-peristiwa pada waktu itu. Tetapi, kata Menteri Welter, ada gunanya untuk diperhatikan lagi. Dimintakan juga perhatian kepada dasar pemikiran bahwa peningkatan jumlah sekolah swasta tidak bersubsidi tanpa dibatasi dan dengan memelihara wataknya yang bebas, maka akan terjadi kekuatan yang ikut bekerja dalam pengembangan masyarakat penduduk Bumiputera, sehingga perluasan secara besar-besaran sekolah swasta tersebut membawakan keuntungan yang sangat berarti. Diharapkan, bahwa dalam penelitian yang akan diadakan mengenai keadaan "sekolah liar" supaya arah dasar pemikiran itu dipertimbangkan.

PENDIDIKAN TINGGI - FAKULTAS SASTRA

114. Dari Menteri Daerah Jajahan (Welter) kepada Gubernur Jenderal (Tjarda van Starkenborgh Stachouwer), tanggal 12 Maret 1938

Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer menyampaikan kepada Menteri Daerah Jajahan Welter laporan nomor 111 dengan Pos Laut rahasia (geheim mailrapport) tahun 1938. Di dalamnya ada salinan surat Direktorat Pendidikan dan Agama P.J.A. Idenburg, tanggal 27 Januari 1928 nomor 15x/A Rahasia. Oleh P.J.A. Idenburg dalam suratnya itu diusulkan untuk menugaskan organisasi dan persiapan pendirian fakultas sastra kepada I.J. Brugmans, Sekretaris Departemen Pendidikan dan Agama. Juga dimintakan perhatian kepada laporan yang disusun oleh "Panitia untuk mempelajari perkembangan perguruan tinggi di Hindia Belanda dalam masa yang akan datang". Panitia ini diketuai oleh J.W. Meyer Ranneft dan dibentuk pada tahun 1930 oleh "Bataviaasch Genootschap" dan Dewan Ilmu Pengetahuan Alam. Dalam laporan itu yang dipublikasikan pada tahun 1933, direkomendasikan dengan sangat pendirian fakultas sastra. Masalah ini selama tahun-tahun krisis (ekonomi) tidak pernah diajukan lagi dalam Dewan Rakyat. Selanjutnya diingatkan oleh Idenburg bahwa dalam pembicaraan rencana anggaran biaya pendidikan untuk tahun 1938 diadakan pertukaran pikiran secara terperinci mengenai masalah tersebut (Handelingen Volksraad 1937-1938, hal. 750 dst.)

Dalam hubungan dengan tindakan persiapan pendirian fakultas sastra itu Menteri memberitahukan kepada Gubernur Jenderal, bahwa Menteri De Graaff dengan telegram tanggal 27 Maret 1930 nomor 68 memberitahukan pendapatnya sebagai jawaban terhadap telegram Gubernur Jenderal De Graeff, tanggal 6 Maret 1930 nomor 66. Seperti telah diketahui, Menteri De Graaff menganggap tidak perlu tergesa-gesa mendirikan fakultas sastra itu, dan segi sosialnya belum cukup mendapat sorotan. Ia juga meragukan, apakah dapat dipertanggung jawabkan mengadakan pengeluaran baru untuk tujuan itu dalam

keadaan keuangan negara yang pada waktu itu diduga akan memburuk. Juga diberitahukan lagi bahwa ia hanya akan memberikan persetujuannya jika benar-benar dapat dipastikan bahwa biaya yang disediakan tidak akan mengganggu pembiayaan untuk keperluan lain-lain yang dianggap lebih perlu dilihat semata-mata dari sudut kebijaksanaan praktis pemerintah.

Menurut Menteri Welter, rupanya pada waktu itu Gubernur Jenderal De Graeff berpendapat bahwa syarat yang dikemukakan Menteri De Graaff dapat dipenuhi. Tetapi karena keuangan negara mengalami kemunduran yang sangat, maksud membuka fakultas sastra pada tahun 1931 tidak dapat dilaksanakan. Tetapi pos anggaran biaya yang disediakan untuk keperluan itu dalam anggaran untuk tahun-tahun berikutnya dipertahankan sebagai pos memori. Dengan demikian keputusan yang telah diambil dalam tahun 1931 pada prinsipnya masih berlaku dan dipertahankan. Pelaksanaannya secara formil dimungkinkan apabila dana yang diperlukan dapat disediakan. Namun demikian oleh Menteri Welter dipersoalkan apakah benar-benar ada harapan yang dapat dipertimbangkan bahwa dalam waktu dekat keadaan keuangan tidak lagi akan merupakan hambatan terhadap pendirian fakultas yang dimaksudkan. Selain itu dipertanyakan juga kepatutan dan keharusan untuk melaksanakan pendirian itu. Menurut Menteri, beralasan untuk mempersoalkan hal itu, karena sejak tahun 1930 telah diadakan banyak perubahan dalam struktur persekolahan dan berkembang gagasan-gagasan baru mengenai arah dan dengan cara bagaimana mengembangkan lebih lanjut dari pada pendidikan. Dikemukakan bahwa telah menjadi jelas tekanan diletakkan pada pendidikan untuk penduduk Bumiputera yang terutama masih terdiri dari massa rakyat yang buta huruf. Pemberantasan buta huruf, penyediaan kesempatan untuk belajar bagi lapisan bawah dari penduduk, dan masih banyak lagi bagian-bagian primer tugas pemerintah, memerlukan banyak sekali uang, waktu, dan kerja. Kesemuanya itu masih dalam keadaan yang belum memuaskan karena keterbatasan keuangan negara, sehingga timbul pertanyaan apakah dalam keadaan seperti itu dengan aspek

keuangan negara yang belum cukup untuk membiayai itu semua, dapat diluluskan untuk menyediakan dana guna perluasan perguruan tinggi. Menurut Menteri dalam kondisi yang demikian belum ada urgensi untuk pendirian fakultas sastra.

Gubernur Jenderal diminta dengan sangat supaya jangan dulu mengambil keputusan terhadap usul dalam surat Direktur Pendidikan dan Agama mengenai organisasi dan persiapan pendirian fakultas sastra. Lebih dahulu dimintakan penjelasan Direktur untuk jika perlu diadakan pertukaran pikiran mengenai pandangannya dalam masalah itu dan khususnya mengenai taraf kecerdasan masyarakat Bumi-putera ditinjau dari dua segi, yaitu apakah fakultas sastra ditinjau dari sudut sosial-ilmiah dan sosial-ekonomis akan mendapat dukungan penuh dan akan mendapat dasar yang cukup berakar pada masyarakat.

115. Dari Direktur Pendidikan dan Agama (P.J.A. Idenburg) kepada Gubernur Jenderal (Tjarda van Starkenborgh Stachouwer), tanggal 24 September 1938

Pada tanggal 17 Agustus 1938 oleh Muh. Husni Thamrin, Suroso, dan Wiryopranoto diajukan mosi yang menyatakan harapan, bahwa selambat-lambatnya fakultas sastra sudah didirikan pada tahun 1940. Mosi itu tanpa melalui perdebatan diterima dengan 29 suara lawan 17 suara. Peristiwa ini terjadi pada waktu pembicaraan anggaran biaya di Dewan Rakyat. Dengan surat kepada Gubernur Jenderal tanggal 24 September 1938 nomor 27326/A diingatkan kepada mosi yang disetujui oleh Dewan Rakyat itu, dan bahwa Pemerintah menyanggupi untuk segera mengadakan persiapan pendirian fakultas sastra tanpa terikat oleh waktu yang ditentukan untuk pendiriannya. Pernyataan kesanggupan itu dibuat dalam hubungan dengan amendemen yang diberitahukan oleh Muh. Husni Thamrin untuk kepentingan pendirian fakultas sastra tersebut.

Dalam hubungan dengan hal di atas diingatkan oleh P.J.A. Idenburg dalam surat kedua tanggal 24 September 1938 nomor 27327/A

usul yang dimuat dalam suratnya tanggal 26 Maret 1938 nomor 60x/A Rahasia, supaya ditugaskan kepada Sekretaris Departemen, I.J. Bruggmans, untuk mengadakan penelitian persiapan pendirian fakultas sastra dan untuk keperluan itu pergi ke negeri Belanda. Dikemukakan bahwa dengan dibawanya masalah fakultas sastra itu dalam pembicaraan di Dewan Rakyat proses perkembangannya dipercepat mencapai stadium yang akut sehingga dianggap perlu untuk segera ditangani. Maksud yang semula mengenai masalah tersebut akan dibawa dalam pembicaraan di Dewan Rakyat pada tahun 1939 mengenai rancangan anggaran biaya untuk tahun berikutnya. Karena desakan dalam Dewan Rakyat maka pemerintah menganggap lebih baik untuk tidak menunda-nunda persiapan pendirian fakultas sastra dengan disertai perbuatan yang nyata.

Dalam hubungan dengan itu P.J.A. Idenburg tidak boleh lebih lama mengabaikan surat Menteri Daerah Jajahan tanggal 12 Maret 1938. Meskipun pemerintah tidak mau terikat pada waktu untuk pendirian fakultas sastra itu yaitu dalam tahun 1940, dapat dipastikan bahwa pelaksanaannya tidak dapat dihalang-halangi lagi kecuali oleh alasan-alasan yang mendesak. Ia tidak bermaksud memancing-mancing supaya Gubernur Jenderal mengambil keputusan "ya" atau "tidak" mengenai pendirian fakultas sastra itu pada tahun 1940. Dengan demikian ada cukup kesempatan untuk memenuhi keinginan Menteri Daerah Jajahan.

Mengenai segi sosial-ilmiah dan segi sosial-ekonomi dari masalah tersebut dikemukakan, bahwa ia menggaris bawahi pendapat Menteri mengenai kebijaksanaan pendidikan pada waktu itu lebih mengutamakan pengembangan sekolah untuk sebagian besar massa rakyat. Hal itu dengan jelas dicerminkan dalam penyediaan biaya pendidikan untuk sekolah desa, sekolah "vervolg", sekolah dagang kecil, dan untuk pendidikan pertanian di kelas tertinggi sekolah "vervolg". Penyediaan biaya itu disesuaikan dengan apa yang dapat dicapai secara maksimal dengan tenaga pengajar yang ada. Besarnya masih berada di bawah sebelum krisis, sebab yang terutama bukanlah karena tidak

tersedianya dana mengingat sekolah untuk rakyat itu murah, tetapi kekurangan guru. Dalam hubungan ini dinaikkan jumlah kursus untuk mendidik guru desa, sehingga dalam beberapa tahun akan dihasilkan setiap tahunnya 800 sampai 1000 orang guru. Tetapi kurang tepat untuk melaksanakan politik pendidikan yang terlalu terarah kepada pendidikan untuk massa sebagian besar dari penduduk. Tidak boleh diabaikan adanya kenyataan bahwa sebagai akibat perkembangan pendidikan selama kira-kira tiga puluh tahun terbentuk secara berangsur-angsur suatu lapisan atas dalam masyarakat, yang membutuhkan tingkatan tertinggi pendidikannya. Untuk memberikan ilustrasi mengenai kenyataan tersebut diberikan ikhtisar tentang jumlah tamatan sekolah menengah, dan yang berkepentingan untuk melanjutkan belajar di sekolah tinggi.

Jumlah tamatan sekolah menengah (negeri dan bersubsidi)

Th.	HBS 5 th	AMS	Lyceum	Jumlah	Eropa	Bumi- putera	Timur Asing
1933	298	288	34	620	328	186	106
1934	340	336	48	724	371	212	141
1935	349	301	52	702	374	204	124
1936	386	336	61	783	390	261	132
1937*	280	359	169	808	398	287	143

Jumlah calon mahasiswa pada pendaftaran pertama

Tahun	HBS 5 th	AMS	Lyceum	Jumlah	Eropa	Bumi- putera	Timur Asing
1932/33	38	104	68	210	56	103	51
1933/34	48	112	96	256	73	121	62
1934/35	49	99	118	266	79	112	75
1935/36	49	67	115	231	65	103	63
1936/37	44	97	112	253	74	120	59

* Kepada HBS di Surabaya dan Malang ditambahkan bagian gymnasium dan namanya menjadi Lyceum. Karena itu dalam tahun 1937 tamatan HBS menurun, sedangkan untuk Lyceum naik.

Dikatakannya bahwa angka-angka di atas itu tidak dapat digunakan untuk argumentasi mengenai perluasan perguruan tinggi dengan sebuah fakultas, tetapi hanya untuk memberikan gambaran mengenai faktor kenyataan dalam perkembangan sekolah menengah dan perguruan tinggi dalam kondisi sosial-ekonomi yang relatif kurang menguntungkan pada waktu itu. Sekolah-sekolah menengah, apalagi perguruan tinggi, hanya ada di kota-kota besar. Dalam kondisi yang kurang menguntungkan itu orang tua harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk dapat menyekolahkan anak di kota besar. Angka-angka tersebut menyatakan, bahwa masyarakat meminta pendidikan dan perguruan tinggi dan menengah, meskipun harus mengeluarkan biaya tidak sedikit.

Disadari oleh Idenburg bahwa permintaan masyarakat akan sekolah bukan satu-satunya norma yang harus dijadikan pedoman politik pendidikan, tetapi pasaran kerja harus juga diperhatikan. Namun keinginan masyarakat kepada suatu macam sekolah tertentu tidak boleh diabaikan. Akibat dari politik penghematan Pemerintah dengan mengurangi jumlah beberapa tipe sekolah, ialah makin berkembangnya apa yang disebut "sekolah liar", teristimewa sekolah liar dengan pengajaran bahasa Belanda. Dalam hubungan ini Idenburg menunjuk kepada gejala yang lebih gawat, yaitu propaganda dari pihak kaum nasionalis untuk memasuki sekolah tinggi di negeri-negeri Asia lain, teristimewa di Jepang. Dari pihak Islam perhatian ditujukan kepada Al-Azhar di Mesir. Dr. Sutomo sering mengingatkan pemuda intelektual Bumiputera kepada perguruan tinggi di Turki. Dengan terang-terangan propaganda kaum nasionalis itu menyatakan bahwa untuk anak Bumiputera sendiri kurang diberikan kesempatan untuk belajar di sekolah tinggi. Proses yang sedang berjalan itu tidak dapat dianggap sepi oleh Pemerintah, tetapi Pemerintah harus sedapat-dapatnya memberikan tanggapan yang positif. Demikian menurut Idenburg.

Karena perkembangan sistim pendidikan sudah mulai mencapai puncaknya, maka seyogianya perkembangan itu tidak di-rem terlalu keras dan terlalu dibuat-buat, karena jika terus-menerus dihambat,

sistim yang sudah baik itu akan menjadi lemah oleh prakarsa yang kurang bermutu dari pihak swasta. Di samping politik pendidikan yang dengan intensif diarahkan kepada pendidikan sebagian besar massa rakyat dari penduduk Bumiputera, Pemerintah harus juga memperhatikan bagian puncak sistim pendidikan. Menurut Idenburg, dengan perluasan perguruan tinggi dimaksudkan bukan perluasan secara ekstensif, tetapi mengadakan diferensiasi ke dalam yang sehat, supaya dapat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan baru yang timbul dalam masyarakat dan juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan sosial dan spirituil yang pasti akan menampakkan dirinya di kemudian hari.

Masalah pendirian fakultas sastra tidak boleh diartikan, pertama-tama memperluas kesempatan belajar atau untuk mendorong memasuki perguruan tinggi, tetapi terutama untuk mengadakan diferensiasi dalam perguruan tinggi. Motivasi mengadakan diferensiasi dalam perguruan tinggi di Hindia Belanda dapat diarahkan kepada tujuan yang bersegi dua. Diferensiasi dapat ditujukan untuk memperluas kemungkinan belajar supaya banyak fungsi sosial dapat diisi oleh para akademisi yang dididik di Indonesia sendiri. Diferensiasi dengan tujuan yang demikian misalnya membuka jurusan-jurusan atau bagian-bagian lain pada Sekolah Tinggi Teknik, mendirikan Sekolah Tinggi Pertanian, dsb.

Diferensiasi dapat juga diadakan lebih ke dalam, artinya diarahkan kepada isi spirituil dari sistim pendidikan. Dengan mendirikan fakultas sastra dimaksudkan mengadakan diferensiasi dalam sistim pendidikan untuk kepentingan bagian atas masyarakat Bumiputera di kemudian hari. Pendirian fakultas ini bukan terutama untuk mendidik kategori tenaga kerja baru yang dibutuhkan masyarakat, bukan semata-mata menghasilkan kaum literator (sarjana sastra) untuk jabatan-jabatan yang harus diisi dengan para literator, karena pada waktu itu kebutuhan dalam masyarakat di Hindia-Belanda akan sarjana sastra yang lengkap belum begitu besar. Tetapi menurut Idenburg, titik berat fakultas sastra terletak di dalam fungsi sosial keseluruhan sistim pendidikan.

Nilai suatu fakultas sastra ditentukan oleh pandangan terhadap arti pendidikan kerohanian atau spirituil dari lapisan puncak masyarakat yang merupakan sumber potensi kepemimpinan atau sumber orang-orang yang akan memegang fungsi pimpinan di kemudian hari. Sudah sewajarnya bahwa perhatian khusus ditujukan kepada unsur penduduk Bumiputera. Dengan selalu memperhatikan bahwa pendidikan harus diorientasikan ke masa depan, maka dengan sendirinya justru arti pendidikan dalam masyarakat yang sedang berkembang, merupakan faktor paling penting. Dengan memperhatikan betapa besar pengaruh kaum muda intelektual Bumiputera, yang walaupun masih sangat muda, banyak di antara mereka ini memegang peranan pimpinan dalam berbagai perhimpunan politik dan semi-politik. Maka diperoleh kesan mengenai keharusan memberikan perhatian khusus kepada formasi yang seimbang dalam masyarakat Bumiputera dalam waktu yang akan datang.

Menurut Idenburg pada umumnya sistim pendidikan dalam bagian atasnya sangat diarahkan kepada satu segi. Sebagai contoh ia menunjuk kepada satu faktor yang sangat menonjol dalam pendidikan di sekolah menengah yang mempunyai konsekwensi pengaruh terhadap perguruan tinggi. Yang dimaksudkannya ialah posisi menonjol HBS-5 th (dan AMS-B). Secara kasar penghargaan tertinggi diberikan kepada HBS 5 tahun (AMS-B). Dari sebagian besar tamatan HIS dan HCS yang melanjutkan ke MJLO, pilihan dijatuhkan kepada bagian B, karena MJLO-B dapat melanjutkan ke AMS dan HBS. Faktor ini mengingat sifat yang khas dari pendidikan HBS tidak dapat menghindarkan adanya kesan khusus dalam pembentukan jiwa kaum intelektual muda.

Pada HBS diadakan diferensiasi Bagian B (Ilmu Pasti dan Alam) dan A (Sastra dan Ekonomi), kemudian diadakan Lyceum (gabungan HBS dan Gymnasium). HBS-A pada umumnya disediakan untuk murid wanita yang tidak dapat mengikuti program ilmu pasti pada HBS-B, sedangkan Lyceum hanya dikunjungi anak Belanda, yang orang tuanya hanya untuk sementara berada di Hindia-Belanda. HBS-B adalah sekolah bagi pemuda Bumiputera untuk melanjutkan ke akademi. Kemudian dicoba untuk memberikan kepada masyarakat Bumiputera pendidikan sastra-budaya

di sekolah menengah seperti pada Gymnasium di Eropa, dalam bentuk AMS-AI di Yogyakarta. Tetapi rupanya percobaan ini tidak berhasil merubah citra masyarakat di bidang pendidikan. AMS-A ini juga menjadi sekolah untuk menampung murid-murid yang tidak mampu mengikuti program ilmu pasti. Perkembangan demikian dalam sistim pendidikan sangat disesalkan oleh Idenburg. Faktor yang juga tidak menguntungkan perkembangan AMS-A ialah karena dari situ hanya dapat melanjutkan untuk studi hukum, karena di sini tidak banyak pilihan ke sekolah tinggi.

Maksud semula untuk mendirikan fakultas sastra ialah justru untuk menyambungkan dengan baik segi sastra-budaya dari sekolah menengah. Oleh krisis ekonomi maksud ini terhenti, tetapi perkembangannya tidak boleh hanya sampai di situ saja. Untuk menyediakan unsur-unsur yang memelihara keseimbangan dalam perkembangan kejiwaan masyarakat Bumiputera, pendidikan calon-calon pemimpinnya tidak dibiarkan terbatas pada pendidikan spesifik HBS, yang terlepas dari kekurangan segi teknis pendidikan, namun terarah ke satu segi perkembangan jiwa. Jika dibiarkan terus dalam keadaan demikian, dikhawatirkan bahwa kaum intelektual Bumiputera dalam jumlah yang makin besar makin terasing dari lingkungan asal mereka tanpa kemampuan untuk menghidupkan dan mengangkat kekayaan isi kerohanian kebudayaan bangsa mereka pada taraf yang lebih tinggi dan dalam bentuk yang khas. Dan tepatlah jika dikatakan orang bahwa sekolah di sini tidak membangun watak, melainkan berangsur-angsur keluar dari sendi-sendinya.

Pendirian fakultas sastra tidak akan menimbulkan bahaya over produksi. Pemuda Bumiputera yang menginginkan pendidikan akademis hanya mempunyai pilihan sangat terbatas. Ia terpaksa memilih studi teknik, hukum, atau kedokteran. Juga bagi mereka yang bakat dan minatnya lebih terarah ke bidang sosial-budaya, tidak ada pilihan yang lain. Pendirian fakultas sastra tidak berarti akan menambah jumlah mahasiswa di Hindia Belanda.

Program studi dalam fakultas sastra yang akan didirikan itu, belum dapat dipastikan bentuk dan isinya. Namun demikian nilai khusus dari fakultas itu dapat dijabarkan dari kemungkinan-kemungkinan yang tersedia untuk mengadakan diferensiasi dan pendalaman pada perguruan tinggi di Hindia Belanda. Disebutkan misalnya jurusan filsafat dan teori pengetahuan, jurusan-jurusan khusus yang dapat diarahkan ke berbagai cabang, antara lain agama-agama, seperti Protestan, Katholik, dan berbagai aspek dalam Islam, jurusan sejarah dengan berbagai bagiannya, yang semestinya harus ada dalam suatu sistim perguruan tinggi. Melalui fakultas sastra sistim perguruan tinggi mendapat tambahan isi dari jurusan ilmu-ilmu kerohanian, tidak itu saja, tetapi juga membuka kemungkinan yang unik kepada sistim perguruan tinggi dalam lingkungan kerja kekayaan kerohanian kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sebagai tambahan keuntungan yang sangat penting ialah terbukanya kemungkinan bagi pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih positif kepada Islam. Dalam Dewan Rakyat sikap pemerintah kepada masyarakat Islam makin lebih diperhatikan. Dalam pembicaraan mengenai rancangan anggaran biaya untuk tahun 1939 ditanyakan sikap pemerintah terhadap prakarsa swasta untuk mendirikan sekolah tinggi Islam di Surakarta. Dijawab oleh Idenburg bahwa pemerintah akan mengikuti dengan penuh perhatian. Dalam kesempatan itu Wiwoho menyindir, bahwa pemerintah kurang memberikan perhatian kepada Islam seperti terbukti dari kebijaksanaan pendidikannya. Idenburg berpendapat bahwa melalui fakultas sastra, pemerintah secara tidak langsung dapat menyatakannya perhatiannya kepada cita-cita dan pikiran dalam dunia Islam.

Satu faktor lagi dikemukakan mengenai peranan fakultas sastra. Tidak dapat diragukan bahwa fakultas sastra nanti menjadi pusat penelitian dan studi bahasa-bahasa di negeri ini. Kebutuhan akan pusat seperti itu telah lama dirasakan. Pernah ada gagasan untuk menambahkan institut bahasa kepada Bataviaasch

Genootschap. *) Penelitian bahasa-bahasa tidak hanya menarik perhatian dari sudut ilmiah, tetapi juga faktor-faktor sosial mempunyai peranan penting misalnya arti bahasa untuk pendidikan. Sejak beberapa tahun diusahakan supaya pendidikan kepada penduduk Bumiputera diberikan dalam bahasa (daerah) penduduk.

Bahasa Melayu pada saat ini, dalam perkembangannya sedang dipersoalkan dalam mempersatukan negeri ini. Balai Pustaka dengan kelincahan yang patut dipuji, berusaha membentuk semacam bahasa Melayu kebudayaan, yang harus berakar dalam struktur dasar bahasa aslinya, tetapi juga disesuaikan kepada kebutuhan zaman baru. Dan selain itu mempunyai kemungkinan berkembang untuk menjadi bahasa baru. Balai Pustaka pernah mendapat kritik dari beberapa sarjana ahli bahasa, misalnya dalam artikel S.J. Esser, "Het Maleis als Cultuurtaal" (Bahasa Melayu sebagai bahasa kebudayaan), dalam "De Opwekker", 1935, hal.393-399, diadakan kritik terhadap bahasa Melayu "Panji Pustaka". Kritik itu ditanggapi oleh Voorhoeve, kemudian ada replik dari Esser. Di samping sebagai organisasi yang baik untuk studi ilmiah bahasa-bahasa dan pengabdian kepada ilmu, fakultas sastra dapat secara wajar dijadikan pusat sentralisasi kegiatan di bidang sosial. Kerja sama yang erat harus diadakan dengan "Bataviaasch Genootschap" yang kegiatannya akan sangat dibantu oleh adanya fakultas sastra.

Mengenai program studinya dikemukakan bahwa bagan yang direncanakan oleh Prof.B.J.O. Schrieke digunakan sebagai pengarahannya pikiran mengenai penyelenggaraan fakultas sastra. Cara lain masih dimungkinkan, misalnya pertama-tama tidak akan dimulai dengan pendidikan lengkap untuk filologi dalam jurusan sastra Timur, tetapi

*) Pada tahun 1778 didirikan "Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen", mula-mula dengan tugas sangat luas, kemudian terbatas untuk memajukan pengetahuan tentang kepurbakalaan, sejarah, bahasa, dan ethnologi Indonesia. Perpustakaanannya sangat besar dan bersama-sama dengan koleksi purbakala serta etnografi ditempatkan di Museum (pusat) Jakarta sekarang.

dapat dimulai dengan pendidikan untuk jabatan tinggi dalam masyarakat yang pada umumnya memerlukan pengetahuan mendalam tentang ilmu bumi dan ethnologi Indonesia. Tekanannya tidak diletakkan semata-mata misalnya pada aspek yuridis atau aspek kebahasaan, tetapi di samping itu juga ditonjolkan aspek bahasa-bahasa dan kebudayaan Nusantara.

Akhirnya dikemukakan bahwa tidak dapat ditunggu lebih lama lagi untuk mengangkat sekolah-sekolah tinggi di Hindia Belanda menjadi universitas, yang ditinjau dari sudut politik internasional mempunyai arti penting. Menurut Idenburg pada kalangan Bumi-putera dan Cina peranakan dirasakan sebagai suatu kekurangan dalam politik pendidikan bahwa di Hindia Belanda belum ada universitas, sedangkan di mana-mana di Asia sudah ada. Dalam suratnya tanggal 27 Januari 1938 nomor 15x/A. Rahasia sudah dipaparkan pandangannya bahwa perkembangan pendidikan di negeri ini akhirnya akan menuju a.l. kepada universitas yang khas Hindia-Belanda (Indonesia) yang akan diselenggarakan dan dibina oleh tenaga-tenaga yang ada di negeri ini. Dinyatakannya pula bahwa dalam universitas itu fakultas sastra dan filsafat harus ada.

Dengan pemaparan argumentasi di atas dinyatakan sebagai sangat penting dan sudah selayaknya supaya selekas-lekasnya didirikan fakultas sastra. Karena itu diusulkan supaya diambil keputusan oleh Gubernur Jenderal untuk menugaskan kepada Dr. I.J. Brugmans, seperti dikemukakan dalam surat rahasia tanggal 27 Januari 1938 nomor 15x/A. Tugasnya ialah untuk menghubungi berbagai instansi dan para ahli di negeri ini dan negeri Belanda sebagai penelitian persiapan pendirian fakultas sastra itu.

116. Dari Gubernur Jenderal (Tjarda van Starkenborgh Stachouwer) kepada Menteri Daerah Jajahan (Welter), tanggal 5 Desember 1938

Dengan suratnya tanggal 5 Desember 1938 nomor 278/2 Rahasia, Gubernur Jenderal menyampaikan kepada Menteri apa yang telah dipaparkan oleh P.J.A. Idenburg sebagai argumentasi persiapan pendirian

fakultas sastra. Dijelaskan juga bahwa janji pemerintah dalam Dewan Rakyat dibuat setelah diadakan pembicaraan dengannya secara cepat-cepat dengan kurang memperhatikan isi sebenarnya dari surat Menteri tanggal 12 Maret 1938. Tetapi dianggapnya bahwa pernyataan kesanggupan pemerintah adalah cara yang tepat untuk menghindari amendemen yang menyulitkan. Sejak semula tatkala ia diperkenalkan dengan masalah fakultas sastra, ia sudah mendukung kepatutan untuk mendirikan fakultas sastra tersebut. Sebagai penjelasan mengenai pendiriannya ia menganggap cukup dengan menunjuk kepada argumentasi Idenburg dan nasehat Dewan Hindia-Belanda tanggal 10 November 1938 nomor XI.

Dalam nasehat Dewan Hindia-Belanda itu diberikan perhatian khusus kepada nama yang akan diberikan kepada fakultas dalam hubungannya dengan susunan dan organisasi penyelenggaraannya dengan konsekwensi mengenai status serta fungsinya dalam masyarakat. Dewan lebih suka memilih nama "Fakultas Sastra dan Filsafat" daripada "Fakultas Sastra Timur". Nama itu dapat menghindari penyempitan yang tidak dikehendaki dalam tujuan. Fakultas sastra dan filsafat secara khusus mempunyai misi kebudayaan pada umumnya, makin banyak variasinya makin baik dapat melaksanakan kerja kebudayaannya. Dalam suatu kawasan pertemuan antara peradaban Timur dengan peradaban Barat kiranya akan menunjukkan pandangan yang kurang tepat jika dalam perguruan tingginya hanya akan diberikan tempat kepada ilmu kebudayaan yang spesifik Barat saja dan ilmu-ilmu dari Barat yang hanya terdiri dari hukum, kedokteran, dan teknik saja. Dengan tidak adanya jurusan-jurusan dalam studi kebudayaan dan kerohanian Barat akan terjadi gambaran yang timpang dan tidak lengkap mengenai usaha ilmiah Barat dengan hasil-hasilnya. Tetapi di dalamnya tekanan harus diletakkan pada sastra, sejarah, dan kebudayaan Timur, karena tugas fakultas yang akan didirikan adalah terutama untuk mendidik orang Timur dan menempatkannya di negeri Timur, di tengah-tengah kekayaan materi studi yang belum dijamah dan yang oleh lembaga-lembaga ilmiah di negeri lain belum atau

baru sedikit saja menarik perhatian akan nilainya.

Jika dalam fakultas yang pada waktu didirikan itu hanya didirikan diferensiasi yang sederhana, seyogianya segera digunakan terutama orientasi dalam kebudayaan Timur sebagai prinsip, tetapi tidak mengabaikan kebudayaan Barat.

Dengan pemaparan penjelasan tersebut di atas Gubernur Jenderal berharap supaya Menteri mengizinkan diadakan penelitian persiapan seperti yang sudah akan dimulai.

117. Dari Menteri Daerah Jajahan (Welter) kepada Gubernur Jenderal (Tjarda van Starkenborgh Stachouwer), tanggal 28 Des. 1938

Dengan surat tanggal 28 Desember 1938 nomor 13/1282 Menteri menyetujui penelitian persiapan pendirian fakultas sastra. Ditetujuinya juga sasaran mengenai lapangan kerja para alumni dan penampungannya dalam lapangan kerja di Indonesia, seperti disarankan dalam saran Dewan Hindia-Belanda.

Dewan Hindia-Belanda itu antara lain menyarankan sebagai berikut.

Jika perakitan fakultas sastra tidak terlalu terbatas hanya pada pendidikan untuk filologi dan linguistik Timur saja, tetapi juga untuk etnologi, sosiologi, dan sejarah dengan orientasi Indosentris, maka fakultas sastra ini akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Bumiputera. Tamatan fakultas ini juga dan terutama akan dimanfaatkan dalam lingkungan kehidupan orang Bumiputera dan lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa sendiri di dalamnya.

Oleh Muhammadiyah misalnya diselenggarakan sekolah menengah seperti AMS dan sekolah pendidikan guru, yang di dalamnya juga diajarkan pengetahuan-pengetahuan umum, antara lain sejarah. Oleh perkumpulan itu juga diadakan percobaan dengan persetujuan pemerintah dan diberi subsidi menyelenggarakan Inheemse MULO (MULO Bumiputera, yaitu MULO dengan bahasa pengantar bahasa daerah). Jika percobaan itu berhasil, akan diperluas dengan menyelenggarakan AMS Bumiputera.

Dari sudut sosial-politik dan sosial-budaya sangatlah penting menyediakan guru-gurunya bagi sekolah-sekolah semacam itu dan guru-guru harus dapat dididik di universitas yang ada di Hindia-Belanda dan untuk itu harus ada fakultas sastra.

Dalam saran Dewan Hindia-Belanda itu juga dimintakan perhatian bahwa dalam dinas-dinas di negeri ini masih harus disediakan tempat untuk para literator tamatan universitas Leiden.

Dengan sudah adanya persetujuan Menteri maka dengan keputusan Pemerintah tanggal 4 Maret 1939 nomor 35 pemerintah memberikan perintah kepada Dr. I.J.Brugmans untuk mengadakan penelitian mengenai cara penyelenggaraan fakultas sastra yang akan didirikan di Betawi dan juga mengenai penampungan para alumninya dalam masyarakat.*)

Maksud pemerintah sudah mendirikan fakultas tersebut dalam tahun 1941, tetapi pendudukan negeri Belanda oleh Jerman mempercepat pendiriannya pada tanggal 1 Oktober 1940 dengan Ordonansi Pendirian Fakultas Sastra dan Filsafat (Lembaran Negara 1940 no.531).**)

Ada 4 jurusan yaitu ilmu-ilmu sosial, bahasa dan sastra Indonesia, sejarah, dan ilmu bangsa-bangsa.***)

*) Cf. Dr. I.J.Brugmans, "Rapport inzake de Faculteit der Letteren in Djawa", 1940, hal.355 dst. Dalam laporan ini juga dimuat pengalaman-pengalaman perjalanan studi ke Philippina dan India.

**) Ordonansi dibela oleh Husein Jayadiningrat sebagai Pj. Direktur P & A, dan mendapat persetujuan dengan aklamasi dalam D.R. (Volksraad 1940-1941, Handelingen hal.973 dst. dan hal.1011 dst.).

***) Pemerintah bermaksud mengajukan dalam sidang D.R. permulaan tahun 1941 ordonansi perguruan tinggi baru, dengan maksud membentuk universitas dan mendirikan fakultas pertanian untuk mendidik insinyur pertanian, dan kehutanan, dokter hewan, serta sarjana biologi. Karena persiapan memakan waktu yang terlalu lama, maka fakultas pertanian didirikan pada tanggal 1 September 1941 dengan ordonansi tersendiri (Lembaran Negara 1941 nomor 490), sedangkan Universitas Indonesia (De Universiteit van Indonesië) baru dapat berdiri dalam tahun 1947 (Lembaran Negara nomor 47).

DASAR-DASAR

KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN

118. Dari Direktur Pendidikan dan Agama (Dr. P.J.A. Idenburg) kepada Gubernur Jenderal (Tjarda van Starkenborgh Stachouwer), tanggal 27 Pebruari 1940 nomor 46/xA Rahasia

Idenburg menyatakan dalam ikhtisar masalah pendidikan yang aktual bahwa sistem pendidikan di Hindia-Belanda dalam fungsi sosialnya tidak dapat disamakan dengan di negeri Barat yang sudah berkembang seperti negeri Belanda misalnya. Di negeri Belanda Sistem pendidikan dapat dikatakan sebagai satu bagian yang wajar dari masyarakat dan tumbuh serta berkembang terus dengan masyarakatnya. Di Hindia-Belanda masyarakatnya menunjukkan gambaran yang berbeda sama sekali dan pemerintah menjalankan fungsi sosial yang lain sama sekali. Pergaulan hidup dalam masyarakat masih jauh dari satu organisme yang tumbuh dengan hubungan-hubungan intern yang wajar sebagaimana mestinya. Perbedaan-perbedaan rasial, ekonomis, dan kulturil dapat diatur di bawah pemerintahan Belanda supaya tidak bentrok, tetapi tidak terjadi perpaduan yang semestinya wajar. Pemerintah di negeri ini tidak timbul dari masyarakat itu sendiri, tetapi terbentuk sebagai akibat masuknya pengaruh-pengaruh asing dan mengembangkan unsur-unsur heterogen dalam masyarakat menjadi masyarakat pluralis yang disusun secara organis.

Dalam taraf perkembangan seperti di atas itu juga sistem pendidikan di Hindia Belanda dalam tinjauan secara umum merupakan unsur asing dan belum merupakan satu bagian wajar yang semestinya dari masyarakat. Sistem pendidikan itu merupakan suatu alat terutama di tangan penguasa untuk menumbuhkan secara penuh suatu pergaulan hidup khas di negeri ini dengan cap yang diberikan oleh penguasa. Aspek ini perlu selalu diperhatikan untuk menyadari bahwa pendidikan sebagai sistem dan organisasi kerja harus diuji kegunaannya terhadap tujuan-tujuan umum yang ingin dicapai oleh

pemerintah dalam politik kolonialnya. Di negeri dengan sistim pendidikan yang sama sekali merupakan satu bagian dari masyarakat dan mempunyai fungsi sosial wajar secara sempurna menurut semestinya, masyarakatnya menentukan sendiri bentuk pendidikan itu secara kuantitatif dan kualitatif dan mengenai intensitas serta kedalamannya. Pemerintahnya tidak bertugas memberi pimpinan, tetapi mengatur konsekwensi-konsekwensi sosial, mencegah eksese-eksese dan sistim pendidikan tidak dijadikan alat dalam politik untuk mencapai tujuan politik itu sendiri. (Di sini dikecualikan negara-negara totaliter, di mana segalanya harus diabdikan kepada negara sebagai tujuan tertinggi dan dijadikan alat politik).

Perbedaan aspek dalam sistim pendidikan di negeri ini dengan di negeri Belanda menentukan sikap pemerintah di Hindia-Belanda terhadap masalah ini. Di negeri Belanda pemerintah dapat menyerahkan masalah pendidikan kepada kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Tetapi di sini pemerintah tidak dapat dengan begitu saja menganut pendirian bahwa pendidikan akan dengan sendirinya mengikuti turun-naiknya kemampuan masyarakat di bidang spirituil dan materiil. Sebagai contoh praktis dikemukakan bahwa di negeri Belanda intensitas penyediaan pendidikan dapat menyesuaikan diri sama sekali kepada keadaan keuangan dalam negara dan masyarakat. Tetapi di sini menurut Idenburg cara yang demikian tidak sewajarnya untuk dapat diikuti dengan begitu saja, karena penambahan atau pengurangan macam-macam sekolah harus mengikuti garis-garis politik kolonial. Menurut pendapatnya sudah bertahun-tahun lamanya kurang secara prinsipil diperhatikan pengarahannya kebijaksanaan pendidikan ke masa depan. Yang dimaksudkannya bukan isi pendidikan untuk berbagai keperluan kelompok sosial dan rasial, tetapi bagaimana cara mengatur penyediaan sekolah-sekolah untuk pendidikan itu, dan cara mengutamakan bagian-bagian yang mana dalam sistim pendidikan pada masa tertentu dalam hubungan umum dengan tujuan pemerintah.

Dalam masa sebelum tahun 1930 kebijaksanaan umum dalam pendidikan dipengaruhi oleh perasaan bahwa di negeri yang masih miskin akan pendidikan, menurut kenyataannya tidak tersedia sekolah dengan cukup. Untuk keperluan mayoritas penduduk dihadapi masalah bagaimana mendorong anak-anak masuk sekolah yang paling sederhana. Caranya mendorong itu seringkali sukar dapat dibedakan dari pada perintah halus. Masalah mengenai macam pendidikan yang lebih tinggi di samping sekolah bercorak Barat, juga dimaksudkan sekolah standar, lain lagi persoalannya. Di sini timbul kesulitan bagaimana memenuhi permintaan yang makin banyak akan tipe sekolah untuk pendidikan tersebut. Dalam waktu relatif cepat didirikan banyak sekolah standar, HIS, dan HCS, MULO, dll. Perluasan sekolah bercorak Barat hanya praktis terbatas oleh kesulitan mendatangkan tenaga guru dari negeri Belanda. Pada waktu itu pemerintah diper-salahkan tidak mempunyai kebijaksanaan. Komisi Pendidikan Bumiputera Belanda pada akhir masa itu menunjukkan dengan jelas bahwa kebijaksanaan pendidikan yang demikian tidak dapat dilanjutkan. Tetapi Idenburg berpendapat bahwa setiap pemerintah pada waktu itu terhadap pendidikan terutama ditentukan untuk sebagian besar oleh kenaikan kemakmuran sebelum terjadi krisis dan untuk sebagian lagi oleh kesadaran mendalam dari masyarakat yang sangat membutuhkan sekolah yang dirasakan masih sangat kekurangan.

Masa krisis mengakhiri politik pendidikan seperti tersebut di atas itu. Situasi dan kondisi keuangan mempengaruhi politik umum pemerintah sehingga kebijaksanaannya di bidang pendidikan untuk selama beberapa tahun tersembunyi di bawah penghematan dan penyederhanaan secara besar-besaran. Apa yang dianggap sebagai suatu kemewahan yang tidak berguna dihilangkan dari perangkat pendidikan. Pembangunan intern perangkat ini diuji dengan norma efektivitas dan kesederhanaan. Dengan demikian biaya intrinsik untuk pendidikan turun dengan banyak sekali. Tetapi dikhawatirkannya bahwa dalam masa krisis itu telah berkurang kesadaran mengenai sasaran-sasaran dari tujuan yang semestinya dikejar oleh pemerintah. Idenburg

mengemukakan motivasi yang mendesak untuk lebih memperhatikan lagi tujuan politik pendidikan.

Pertama-tama disebutkan faktor berupa posisi negeri Belanda sebagai kekuasaan kolonial dalam dunia modern. Negara kecil ini dengan daerah jajahan yang kaya tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan daerah jajahannya dengan kekuatan senjata terhadap serangan dari luar, sedangkan negara-negara besar dengan kelebihan penduduknya secara jelas menggejala untuk dengan sekuat tenaga berusaha memperluas lingkungan pengaruh dan daerah kekuasaannya. Untuk mempertahankan jajahan maka secara moril pemerintah berkewajiban dalam politik kolonialnya berusaha untuk dengan tangkas dan gesit memajukan secara besar-besaran daerah jajahan dalam berbagai aspek. Karena angkatan bersenjata kekuatannya kecil, maka harus dicarikan dukungan dalam usaha yang sadar akan tujuan adil serta nyata untuk memberikan kedudukan terhormat kepada negeri dan penduduknya di bagian dunia ini. Menurut Idenburg politik kolonial yang dijalankan tidak boleh seenaknya didasarkan kepada pendapat sendiri sebagai norma. Pikiran ini digaris bawahi oleh Menteri Welter.

Pada hemat Idenburg pendidikan ialah justru salah satu bidang yang menunjukkan paling nyata tujuan intern politik kolonial. Untuk orang luar anggaran biaya pendidikan dijadikan kriterium terutama mengenai kebijaksanaan umum pemerintahan kolonial. Dalam hal ini terdapat kelemahan pada pemerintahan Hindia-Belanda. Dibandingkan dengan negeri-negeri tetangga sekitarnya terdapat ketinggalan yang memalukan di bidang pemberantasan buta huruf.*)

*) Data mengenai buta huruf dari tahun 1931 sampai 1939 di beberapa negeri di Asia Selatan dan Asia Tenggara ialah sebagai berikut: Di India menurut sensus penduduk tahun 1931 dari penduduk di atas umur 10 tahun yang buta huruf 90,9%. Federasi Malaya menurut sensus penduduk tahun 1931 dari penduduk di atas umur 15 tahun 72,2% dan di Singapura 63,5%. Di Pilipina dalam tahun 1939 dari penduduk di atas umur 10 tahun 51,1% dan di Muang Thai dalam tahun 1937 ada 68,8%. Di Hindia-Belanda menurut sensus penduduk tahun 1930 dari seluruh penduduknya hanya 6,44% yang dapat membaca dan menulis.

Dalam kemampuan penyelenggaraan di bidang sekolah lanjutan Hindia-Belanda juga tidak dapat digolongkan ke dalam barisan depan. Laporan Dr.Mr. W.A.Muller mengenai hasil penelitian masalah pendidikan di Asia Tenggara membenarkan pernyataan Idenburg yang mengutarakan keterbelakangan Hindia-Belanda di lapangan penyediaan sekolah-sekolah jika dibandingkan dengan negeri-negeri Asia Tenggara. Oleh Muller, pegawai tinggi yang diperbantukan kepada Direktorat Pendidikan dan Agama, dilaksanakan tugas untuk mengadakan penelitian mengenai masalah tersebut melalui pengamatan di tempat. Dalam perbincangan mengenai anggaran pendidikan untuk tahun 1940 pemerintah mengumumkan bahwa laporan Muller telah selesai dan akan disampaikan kepada Dewan Rakyat. Tetapi laporan itu dipublikasikan dengan persetujuan pemerintah oleh penulisnya secara pribadi: Dr.Mr. W.A.Muller, "Onderwijs en Opvoeding in Zuid-Oost Azie", Batavia C., 1941 (Pengajaran dan Pendidikan di Asia Tenggara, Betawi Pusat, 1941). Publikasi ini dikirimkan kepada Dewan Rakyat dan seringkali disebut sebagai laporan Muller.

Mengenai pendidikan, penyebaran dan hasil pengajaran melalui sekolah di negeri-negeri yang dikunjungi oleh Muller, diberitakan antara lain sebagai berikut.

a). Philipina. Dalam perbandingan dengan jumlah penduduk kesempatan belajar tersedia dengan baik. Menurut sensus penduduk terakhir pada bulan Januari 1939 jumlah penduduk 16 juta, sedangkan jumlah seluruh murid sekolah rendah dalam tahun ajaran 1938-1939 lebih dari 1.600.000 (yaitu lebih dari 1.400.000 di sekolah desa dan lebih dari 250.000 di sekolah lanjutannya). Hal ini berarti, bahwa perbandingan jumlah anak sekolah dengan penduduk masih lebih baik dari pada 1 : 10. Jika hanya diperhitungkan jumlah murid dari tiga kelas yang terendah, yang kira-kira 1.200.000, maka perbandingannya 1 : 13.

b). Indo China. Seluruh jumlah anak sekolahnya kurang dari 700.000 yang jika dibandingkan dengan 23 juta jiwa penduduknya tidak dapat mencerminkan suatu hasil yang baik. Teristimewa anak gadis yang

bersekolah jumlahnya masih terbilang menyedihkan. Murid wanita hanya ada 15%. Tetapi jika dipertimbangkan bahwa penyediaan sekolah di negeri ini relatif masih belum lama dimulai, maka hasilnya yang telah dicapai dapat dikatakan memberi harapan. Sekolah rakyat dalam bentuk sekolah desa dan sekolah interkomunal jumlahnya berkembang dengan cepat. Kenaikan jumlah sekolah dalam tahun-tahun terakhir kira-kira 10% per tahun.

c). Muang Thai. Sebagai hasil kewajiban belajar yang dengan sekulat tenaga dipertahankan lebih dari 70% dari anak di antara umur 7 dengan 14 tahun bersekolah atau tamat belajar. Dalam tahun 1919 penduduk Muang Thai berjumlah sekitar 9 juta jiwa dan jumlah murid seluruhnya di berbagai sekolah hanya 160.000 orang, sehingga pada waktu itu murid sekolah tidak lebih dari 1,6% dari seluruh penduduk. Sepuluh tahun kemudian jumlah penduduknya 11,5 juta jiwa dan jumlah murid sekolah naik hingga 610.000 orang, 5,3% dari jumlah penduduk. Menurut hasil sementara sensus dalam tahun 1937 jumlah penduduknya 14.400.000 jiwa, sedangkan pada permulaan tahun ajaran 1936-1937 jumlah murid sekolah 1.230.000 orang (dari padanya 1.150.000 orang murid sekolah rendah). Dari angka-angka itu ternyata yang bersekolah sudah 9% dari penduduk.

d). Federasi Negeri-Negeri Malaya dan "Straits Settlements". Kewajiban di Singapura ada kewajiban belajar untuk anak laki-laki Melayu dalam umur antara 7 dengan 14 tahun yang tempat tinggalnya ada dalam jarak kurang dari 2 mil dari suatu sekolah di Malaya atau kurang dari 1½ mil di "Straits Settlements". Dari pihak orang tua tidak terdapat banyak keberatan terhadap pelaksanaan undang-undang wajib belajar. Kesukaran yang lebih banyak ialah menyediakan sekolah dalam jumlah yang cukup. Meskipun di Singapura tidak ada kewajiban belajar, sekolah di Singapura penuh dan padat dan beberapa bangunan sekolah terpaksa digunakan dua kali, yaitu untuk satu sekolah pada waktu jam-jam pagi dan untuk satu sekolah lagi pada waktu jam-jam petang. Untuk anak wanita tidak ada kewajiban belajar dan jumlahnya masih dapat dianggap jauh daripada cukup.

Kewajiban belajar untuk penduduk Cina tidak pernah dipersoalkan. Pada umumnya jumlah murid Cina sangat memuaskan. Menurut perkiraan Departemen Pendidikan di Singapura persentase yang dapat membaca dan menulis dari penduduk orang Melayu ada kira-kira 40% pria dan 10% wanita. Persentase ini dari penduduk Cina sedikit lebih tinggi dan dari penduduk India sedikit lebih rendah. Persentase tertinggi ialah dari penduduk Eropa-Indo, yaitu kira-kira 75%. Dalam kelompok penduduk yang terakhir ini persentase anak dalam umur antara 5 dengan 19 tahun yang bersekolah hampir 90%. Untuk anak Melayu laki-laki persentase ini hampir 50% dan dapat dinilai sebagai sangat tinggi, karena bagian terbesar dari mereka hanya belajar di sekolah Melayu, sehingga pada umumnya berhenti bersekolah pada umur di bawah umur 14 tahun.

Menurut Idenburg penghargaan kepada Belanda di bidang kebijaksanaan kolonialnya sangat menurun di luar negeri. Tingkatan mutu sekolah di Hindia-Belanda dalam berbagai aspek dapat bertahan terhadap kritik, tetapi justru hal itu merupakan salah satu faktor yang di luar negeri berkesan jauh lebih kurang dari pada besarnya perangkat pendidikan itu sendiri. Di Amerika hampir tidak ada kata-kata yang dengan ramah dilontarkan terhadap politik kolonial Belanda. Pengunjung-pengunjung dari Amerika, Jepang, Philipina, Muang Thai, dan Malaya yang datang dalam bulan-bulan belakangan, menyatakan penghargaan dan pujian terhadap kerapihan dan kebersihan sekolah-sekolah Hindia-Belanda serta kemantapan organisasi pendidikannya, tetapi mereka itu tidak menyembunyikan pendapat bahwa perangkat pendidikan dalam berbagai aspek tidak lengkap atau jumlah sekolahnya sangat kecil. Menteri Welter membenarkan pernyataan Idenburg bahwa Hindia-Belanda dalam politik pendidikannya harus memperhatikan faktor penilaian internasional terhadap politik kolonial umum di Hindia-Belanda.

Juga alasan-alasan intern murni menghendaki untuk terutama dalam tahun-tahun berikutnya perluasan ruang gerak yang dijadikan ancer-ancer untuk mengarahkan kebijaksanaan pendidikan. Bahkan

menurut Idenburg tanpa perluasan yang berarti sudah terasa dalam anggaran pendidikan tegangan yang makin besar, yang dengan cara bagaimanapun harus dihilangkan. Hal itu adalah akibat dari sebagian sifat organisasi sistim pendidikan dan sebagian lagi karena peraturan tindakan-tindakan penghematan dalam masa krisis yang baru lalu. Penyederhanaan sistim pendidikan sejak krisis sampai tahun 1937 relatif bersifat sementara.

Sifat sementara itu ialah pertama ditunjukkan oleh kenyataan yang dapat dikatakan menguntungkan bahwa laju masuk sekolah pada umumnya mulai kendor. Dengan demikian dimungkinkan untuk mengurangi kesempatan masuk sekolah tanpa dirasakan dengan segera akibatnya berupa penolakan dalam penerimaan murid baru. Pada waktu itu banyak sekolah pendidikan guru ditutup. Penutupan itu dapat dilakukan seiring dengan pembentukan kelas-kelas yang lebih besar, penyederhanaan formasi tenaga guru, dan pengurangan secara relatif laju penerimaan murid, sehingga dengan segera tersedia cadangan tenaga guru dalam jumlah tertentu. Sekolah-sekolah desa, standar (atau Kelas Dua), HIS, dan MULO, ditutup atau digabungkan. Tindakan ini oleh sebab yang sama tidak menyebabkan penjatahan dalam pendidikan dengan nyata.

Kejadian seperti di atas tentu tidak boleh dipandang sebagai hanya gejala sementara yang pada waktunya akan diikuti oleh masa dengan laju masuk sekolah yang lebih normal, tetapi bahkan dapat dikatakan sebagai suatu penangguhan masuk sekolah. Sebab laju kenaikan penduduk tidak berhenti. Jika jumlah laju masuk sekolah menurun, hal itu hanya berarti bahwa dalam penyediaan sekolah secara umum tidak saja terhenti, tetapi benar-benar mengalami kemunduran. Hal itu dibuktikan oleh laju masuk sekolah dalam tahun 1937 dan berikutnya. Dalam bulan Agustus 1937 laju masuk sekolah desa di Jawa malahan melebihi kenaikan jumlah secara normal dalam kelompok umur 6 tahun. Menurut Laporan Umum mengenai pendidikan di Hindia-Belanda (Het Algemene Verslag van het Onderwijs in Nederlands-Indië) pada tahun ajaran 1936-1937 terjadi kenaikan

jumlah murid sekolah negeri dan swasta dengan 82.831 (jilid I, 1937 halaman 52) dan pada tahun ajaran 1937-1938 dengan 62.174 (jilid I, halaman 21). Dalam pembahasan anggaran biaya pendidikan untuk tahun 1940 disampaikan kepada Dewan Rakyat ikhtisar angka-angka mengenai remaja berumur 6 tahun dan jumlah murid kelas satu semua tipe sekolah rendah (sekolah desa, sekolah Kelas Dua lengkap, sekolah rendah Eropa, HIS, sekolah khusus, dan HCS).

Kelebihan kenaikan laju masuk sekolah desa dalam bulan Agustus 1937 dari kenaikan jumlah normal dalam kelompok umur 6 tahun disebabkan oleh kenyataan bahwa sejumlah anak yang lebih tua yang karena alasan ekonomis tidak mampu bersekolah, tetapi kemudian oleh perbaikan kemakmuran dimungkinkan masuk sekolah. Pada tipe-tipe sekolah yang lain sejak tahun 1937 dapat juga disaksikan kenaikan laju masuk sekolah dengan persentase yang lebih besar daripada normal.

Tahun ajaran	Remaja Bumiputera usia enam tahun	Jumlah murid Bumiputera di kls.satu semua sek.rendah ne- geri & bersub.	Persentase lajur 3 dari lajur 2	Lajur 2 dikurangi ruang 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1930/31	1.635.166	714.830	43,72	920.336
1931/32	1.659.693	738.749	44,51	920.944
1932/33	1.684.588	700.405	41,58	984.183
1933/34	1.709.857	695.590	40,68	1.014.267
1934/35	1.735.505	687.550	39,62	1.047.955
1935/36	1.761.538	706.841	40,13	1.054.697
1936/37	1.787.961	747.924	41,83	1.040.037
1937/38	1.814.780	777.232	42,83	1.037.548

Kenaikan tersebut di atas tidak sama besarnya pada semua tipe sekolah, tetapi keberhentian dalam laju jumlah masuk sekolah rupanya telah dilewati sama sekali di semua jalur pendidikan. Dengan pasti pemerintah dihadapkan kepada masalah bagaimana menanggulangi

tuntutan yang besar akan pendidikan yang makin lama makin mende-
sak.

Masih ada faktor kedua kesementaraan dalam peraturan tindakan-tindakan yang menyebabkan dalam krisis tercapai penghematan sangat besar dalam budjet pendidikan. Sebagai peninggalan tahun-tahun sebelumnya tersedia kelebihan jumlah ruangan sekolah. Juga ada cadangan sejumlah tenaga guru seperti telah disebutkan di muka. Persediaan kelebihan jumlah ruangan sekolah dan cadangan tenaga guru itu di satu pihak diperkecil dengan penutupan sekolah dan pemberhentian guru tua untuk pensiun, tetapi di lain pihak diperbesar oleh penambahan jumlah murid dalam satu kelas dan penyempitan serta penurunan formasi tenaga guru. Kelebihan itu jelas akan habis sama sekali dalam beberapa tahun karena kenaikan jumlah penduduk yang normal sehingga harus dihadapi tuntutan untuk menambah lagi ruang sekolah dan tenaga guru.

Beberapa peraturan tindakan yang diadakan dalam waktu krisis juga sejak semula sudah dipastikan bahwa peraturan itu hanya dapat dipertahankan untuk beberapa tahun saja jika paling sedikit tidak menyebabkan kemerosotan tingkatan pendidikan. Lain dari pada itu diadakan juga peraturan tindakan di bidang personalia, seperti penempatan kembali guru yang diberhentikan dengan uang tunggu yang sejak semula dinyatakan sebagai tamal sulam sementara untuk menutupi kekurangan anggaran.

Pada tahun-tahun belakangan banyak dari peraturan tersebut di atas perlu ditiadakan dan kemudian harus juga ditambah dengan perlengkapan materiil dan personalia dalam perangkat pendidikan. Terutama tidak boleh ada anggapan bahwa masa krisis hanya meniadakan apa yang tidak diperlukan, tetapi juga meniadakan apa yang untuk sementara tidak diperlukan dan kemudian harus dimasukkan lagi ke dalam perangkat pendidikan. Dari tenaga kerja personalia dan ketahanan materiil yang ada dituntut terlalu banyak sehingga menjadi keharusan untuk mengadakan perbaikan. Masih ada satu segi lagi yang menonjolkan dengan lebih jelas kesementaraan dari penghematan,

yaitu kenaikan otomatis gaji para guru. Sedangkan imbalan penghematan ialah pengurangan sangat kecil pada mata anggaran gaji dengan pemberhentian setelah memenuhi masa kerja dalam jabatan, yaitu melepas guru-guru yang sekiranya tenaganya tidak diperlukan dan sudah masak untuk pensiun. Karena itu korps tenaga guru yang tinggal secara keseluruhan relatif berusia muda, sehingga secara otomatis menyebabkan kenaikan besar untuk gaji setiap tahun.

Dengan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa oleh penghematan yang dilaksanakan terlalu berlebihan terjadi ketegangan yang makin besar dalam anggaran pendidikan dan tidak dapat dihindarkan sehingga malahan menjurus kepada kenaikan pengeluaran tanpa menambah perangkat pendidikan yang dapat dipertahankan pada niveau sama dalam perbandingan dengan kenaikan jumlah penduduk.

Pada tahun-tahun belakangan anggaran pendidikan telah naik kira-kira 10 juta gulden yang dari padanya kira-kira 3 juta gulden termasuk peninjauan gaji. Ke dalam anggaran itu termasuk subsidi untuk penyelenggaraan sekolah yang diserahkan kepada kesatuan-kesatuan otonomi lokal. Di bawah ini dikutip dari Laporan Umum mengenai pendidikan di Hindia-Belanda 1938-1939, ikhtisar pengeluaran keperluan pendidikan untuk perbandingan. (Pengeluaran bruto, jadi tanpa dikurangi dengan uang sekolah dsb.).

=Jumlah absolut dalam ribuan gulden=

Tahun	Pengeluaran terperinci menurut macam-macam tipe sekolah							
	Sek.utk.pendidikan umum				Pendid. Pergu- Kejuru- ruan		Pengeluaran terperinci bukan mnt. jenis sekolah	Jumlah seluruh- nya
	Pendi- dikan Bumi- putera	Pendid. Rendah Barat	MULO dan Me- nengah	JUMLAH	an	Tinggi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1931	20.351,9	18.045,9	8.830,3	47.228,1	8.811,4	1.057,6	4.089,1	61.186,2
32	20.369,6	15.490,1	8.049,6	43.909,3	7.889,4	993,6	2.831,6	55.623,9
33	19.027,9	14.191,9	7.158,1	40.377,9	6.689,0	968,9	2.161,4	50.197,2
34	14.440,5	11.976,7	5.845,7	32.262,9	4.666,1	810,6	1.727,6	39.467,2
35	11.493,4	9.667,6	4.656,7	25.817,7	4.008,6	724,2	1.882,7	32.373,2
36	10.714,7	9.360,0	4.719,2	24.793,9	3.488,6	718,4	1.716,0	32.829,1
37	12.008,3	9.624,7	4.888,9	26.513,9	3.533,2	739,1	2.042,9	32.829,1
	<u>4.113,0*</u>			<u>18.626,6</u>	<u>3.059,1</u>			<u>24.467,7</u>
38	4.235,3*	11.401,4	6.352,4	21.989,1	3.785,1	865,3	2.882,2	29.521,7
39	3.574,6	12.435,0	7.152,6	23.162,2	4.505,0	986,6	4.008,5	32.662,3
1940	4.027,2	12.281,1	7.484,1	23.792,4	4.826,1	998,5	4.223,9	33.850,9

* Bilangan yang digaris bawahi menyatakan pengeluaran pemerintah Pusat yang sebenarnya tanpa terhitung ke dalamnya subsidi untuk sekolah yang penyelenggaraannya diserahkan kepada kesatuan-kesatuan otonomi lokal.

* Sebagai akibat penyerahan pada 1 Januari 1937 kepada kesatuan otonomi lokal di Jawa dan Madura penyelenggaraan sekolah desa, "vervolg" dan pertukangan, maka jumlah pengeluaran pemerintah Pusat menurun sekali.

Walaupun pada tahun-tahun belakangan ada kemaikan dalam anggaran pendidikan, penyediaan dalam perangkat persekolahan tahun-tahun itu masih juga dalam banyak segi penting ada di bawah tuntutan syarat-syarat minimum dari kebijaksanaan dalam perluasan pendidikan yang memadai. Hal ini dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Dengan syarat-syarat minimum dimaksudkan pertama-tama pemberantasan buta huruf. Menurut data terakhir ternyata bahwa semua sekolah negeri dan bersubsidi secara

keseluruhan, jadi tidak hanya sekolah Bumiputera saja yang sebenarnya menerima anak berumur 6 tahun sebagai murid kelas 1. Dari kira kira 24% anak dalam kelompok umur tertentu dapat dianggap telah belajar selama 3 tahun di sekolah rendah. Mereka dianggap tidak lagi buta huruf, tetapi anggapan ini tidak benar. Penelitian dengan pengambilan secara random di sana-sini menunjukkan bahwa masa tiga tahun belajar di sekolah desa itu ternyata terlalu pendek. Setelah beberapa tahun anak-anak itu menjadi buta huruf kembali. Teristimewa di pedesaan di mana dorongan dan kesempatan untuk membaca dan lebih-lebih untuk menulis sangat kurang.

Menurut Idenburg jika diadakan penelitian secara keseluruhan dengan serius mengenai kepandaian dari hasil belajar yang melekat, ia khawatir bahwa hasilnya akan sangat mencemaskan. Dalam hubungan dengan ini disebutkan pendapat Gubernur Jawa Timur Ch. van der Plas, yang selalu menunjukkan perhatian khusus kepada pendidikan untuk Bumiputera. Menurut kesan Van der Plas, kepandaian membaca di desa lebih mundur daripada maju. Di desa di Jawa dahulu ada orang-orang walaupun sedikit, yang dapat membaca buku Jawa Kuna. Buku ini berangsur-angsur lenyap dengan kelompok pembacanya tanpa diganti oleh pembaca yang lain. Di bawah pimpinannya pemerintah di Jawa Timur dengan bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Agama mengadakan pemberantasan buta huruf di kalangan orang dewasa dan menyelenggarakan perpustakaan di desa secara besar-besaran.

Menurut Idenburg melenyapnya buku Jawa Kuna di desa dengan kelompok pembacanya benar-benar merupakan suatu gejala pemiskinan kebudayaan rakyat yang sama sekali kurang mendapat kompensasi dari hasil pendidikan di sekolah. Pelekatan hasil pendidikan di sekolah desa merupakan masalah dengan corak sendiri. Masalah ini tidak dibahas lebih jauh dalam hubungan dengan buta huruf, tetapi di sana-sini diulangi pendapat, bahwa terlalu optimistis untuk beranggapan bahwa generasi dari kelompok umur tertentu 24% tidak buta huruf, jika kapasitas perangkat pendidikan dapat dipertahankan dalam hubungan dengan kenaikan jumlah penduduk pada waktu itu. Dikatakan,

bahwa Hindia-Belanda ada dalam keadaan perkecualian yang memalukan di bidang pemberantasan buta huruf di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Dalam penanggulangan buta huruf India, Birma, Malaya, teristimewa Muang Thai, dan Philippina, jauh lebih maju.

Menurut keyakinan Idenburg kekurangan yang sangat besar dalam penyediaan sekolah rendah untuk massa rakyat yang luas dari penduduk merupakan penghambat tidak saja terhadap setiap kemajuan sosial dan ekonomi, tetapi juga mempunyai pengaruh yang mengganggu kebijaksanaan pendidikan dalam tingkatan-tingkatan pendidikan lebih tinggi. Dalam situasi dan kondisi penduduk yang sebagian besar masih buta huruf tidak mungkin dilaksanakan kebijaksanaan untuk mendorong kegiatan di bidang ekonomi dan sosial. Kebutuhan hidup tetap rendah, pertukaran barang dan perhubungan lalu-lintas yang penting artinya untuk kemakmuran rakyat tetap sedikit, sehingga dengan demikian tetap terbatas kemungkinan terjadinya diferensiasi kerja dan pada umumnya kurang diciptakan kesempatan untuk perluasan lapangan kerja bagi orang yang terdidik dengan lebih baik. Hal itu menimbulkan keprihatinan yang mempertanyakan apa dan mau diapakan tamatan MULO, AMS, HBS, sekolah teknik, dan pertukangan.

Dengan perbaikan yang makin meningkat dari posisi ekspor Hindia Belanda - tetapi perbaikan yang meragukan - tidak dapat disangsikan perluasan kesempatan kerja. Tidak diragukan juga adanya daya serap masyarakat yang begitu besar, sehingga dapat diduga, bahwa tidak akan terjadi pengangguran secara besar-besaran. Selanjutnya dapat dibenarkan bahwa di mana-mana di dunia terdapat ketidak seimbangan antara jumlah orang yang berpendidikan lebih baik dengan kebutuhan masyarakat akan tenaga kerja yang demikian. Seterusnya orang dapat bersitegang bahwa di negeri seperti ini sekali pun dengan adanya sekolah rendah yang tersebar dengan rapat, masih diperlukan masa bertahun-tahun untuk dapat menaikkan tingkatan kemakmuran yang sangat rendah itu dan dalam waktu panjang masih akan ada gejala bahwa menurut kriterium Barat tidak akan

tercapai keseimbangan yang pantas antara biaya untuk pendidikan lebih tinggi dengan penghasilan yang dapat diperoleh oleh orang berpendidikan lebih tinggi dalam masyarakat itu.

Kesemuanya itu tidak berarti bahwa selama sebagian besar dari penduduk masih buta huruf maka rasionalisasi sosial dari tingkatan tingkatan pendidikan lebih tinggi akan merupakan masalah yang makin tidak terpecahkan. Masalahnya mempunyai banyak aspek yang di sini tidak dibicarakan lebih lanjut, tetapi dikemukakan bahwa pemerintah tanpa mengadakan peraturan tindakan yang tidak dapat diterima dari sudut politik tidak dapat mengendalikan kenaikan jumlah sekolah di atas tingkatan sekolah desa dan "vervolg". Seperti telah dikemukakan laju masuk sekolah "schakel", HIS, MULO, AMS, dsb. terus-menerus naik. Dalam hal ini situasinya berlainan sama sekali dengan tahun-tahun krisis yang ketika itu secara kebetulan laju kenaikan jumlah murid di sekolah-sekolah tersebut karena penurunan kemakmuran sedikit atau banyak terhambat atau bahkan di sana-sini merosot. Pada waktu itu tidak perlu diadakan tindakan yang dari sudut kebijaksanaan dibenci untuk membatasi tipe sekolah. Tindakan pembatasan itu pernah dipertimbangkan secara serius sebelum terwujud keberhentian laju kenaikan jumlah murid tersebut, tetapi karena alasan politik tidak berani diambil keputusan.

Sesudah tahun-tahun krisis itu menurut Idenburg keadaan akan menjadi lebih tidak baik jika pemerintah tidak mau untuk setiap tahun menyediakan pengeluaran lebih banyak guna memenuhi tuntutan itu. Kebanyakan sekolah sudah sangat penuh, formasi tenaga guru sudah diciutkan, diturunkan jauh di bawah tingkatan kesederhanaan, sehingga tidak tersedia cadangan di dalamnya. Sebagai contoh menonjol dikemukakan untuk tahun ajaran yang sedang berjalan perluasan MULO memerlukan sekitar 70 tenaga guru dan juga akan diperlukan untuk tahun ajaran berikutnya tambahan paling sedikit 60 tenaga guru baru hanya untuk dapat menampung kenaikan jumlah murid. Apa yang dikemukakan untuk MULO berlaku untuk HBS, sekolah teknik, dan sekolah pertukangan, meskipun tidak sama besarnya.

Mengenai AMS sebagai kelanjutan MULO dapat diduga sama gejalanya. Sementara itu ternyata bahwa sekolah dagang menengah yang relatif belum lama diadakan menyedot makin banyak murid.

Semua lembaga untuk sekolah lanjutan itu relatif mahal karena diselenggarakan dengan tenaga guru Eropa yang harus diimpor dan dari sebab itu perluasannya dibebani anggaran pendidikan yang terasa beratnya. Juga laju masuk ke sekolah rendah seperti HIS dan sekolah "schakel" sangat besar. Tetapi pengeluaran untuk sekolah-sekolah tipe ini relatif jauh lebih rendah dari pada untuk sekolah rendah Eropa dan sekolah-sekolah lanjutan tersebut karena terutama menggunakan tenaga guru Bumiputera. Namun perluasan sekolah-sekolah tipe yang diadakan dalam dua tahun belakangan tidak dapat dianggap sebagai benar-benar untuk memenuhi permintaan akan pendidikan. Perluasan berupa pendirian sekolah-sekolah baru hanya relatif sedikit. Misalnya untuk MULO hanya didirikan satu sekolah baru dan di samping itu ada empat MULO yang sudah sangat penuh dengan murid. Pada umumnya dapat ditampung banjir murid dengan membuat kelas sama sekali penuh dan menambah bangunan untuk ruang sekolah. Apabila mau memperhatikan permintaan akan pendidikan macam ini maka di berbagai tempat masih harus dibuka dan diisi banyak sekolah dari berbagai tipe. Sebagai kenyataan misalnya di Betawi banyak calon murid harus ditolak karena kekurangan ruangan belajar. Sebenarnya sudah diadakan semacam pembatasan menurut sistim penjatahan (atau sistim kontingen). Oleh Idenburg dikhawatirkan bahwa cara penjatahan dengan diam-diam itu akan menjadi terang-terangan karena sangat banyak murid yang berhak akan harus makin banyak ditolak dengan alasan kekurangan ruangan.

Mengenai sekolah lanjutan yang lebih mahal itu ada permasalahan bagi pemerintah bahwa di satu pihak harus bersikap skeptis terhadap pendidikan pada tingkatan lebih tinggi untuk para remaja yang terlalu besar jumlahnya, karena masyarakat tidak membutuhkan, meskipun malahan disediakan kelebihan jumlah ruangan yang agak besar. Di pihak lain dihadapi keinginan yang makin besar

kepada pendidikan jenis itu yang dapat dipenuhi hanya untuk sebagian dan terus makin berkurang. Cara penyelesaian yang paling mudah ialah dengan menyediakan sekolah-sekolah menurut kebutuhan obyektif masyarakat, tetapi cara ini tidak dilaksanakan dengan konsekwen. Bahwa sebagian besar penduduk menginginkan pendidikan jenis itu merupakan kenyataan yang dipandang dari segi politik harus benar-benar diperhatikan.

Berulang-ulang dikemukakan bahwa pertama-tama kelemahan pandangan pemerintah dalam politik pendidikan ialah bahwa dalam tugas primernya menyediakan sekolah rendah untuk massa rakyat yang luas tertinggal terlalu jauh. Pada tempatnya pemerintah dapat dikecam karena tidak berusaha dengan sekuat tenaga untuk secepatnya menghilangkan buta huruf supaya dengan demikian menciptakan kondisi untuk perkembangan kemakmuran yang lebih tinggi dari pada yang dialami oleh penduduk. Jika pemerintah berdasarkan ketinggalan itu juga membela pembatasan sekolah untuk pendidikan lanjutan lebih tinggi, maka pemerintah melaksanakan politik pendidikan sangat negatif, yang oleh masyarakat penduduk Bumiputera tidak saja dikecam, tetapi juga bahkan akan dirasakan sebagai pengingkaran yang menghina terhadap kepentingannya tertinggi.

Persoalan kedua yang dikemukakan dalam hubungannya dengan di atas ialah kenyataan bahwa karena rendahnya tingkatan pendidikan di sekolah rendah Bumiputera yang sebenarnya pemerintah terangsang untuk mencari tipe sekolah lebih baik bagi penduduk Bumiputera, terutama bagi orang-orang di kota. Menurut penilaian banyak ahli penggantian tipe sekolah standar (atau sekolah kelas dua sebagai sekolah rendah Bumiputera lengkap) dengan sekolah desa plus sekolah "vervolg" menyebabkan sangat membesarnya laju masuk ke sekolah rendah corak Barat. Sekolah desa dianggap terutama oleh bagian penduduk Bumiputera di kota yang hidup pada tingkatan sama sekali bukan kuli, sebagai sekolah untuk rakyat "jembel". Dahulu kelompok orang tersebut memasukkan anak mereka ke sekolah standar, tetapi mereka tidak sampai hati untuk menyekolahkan anaknya di

sekolah desa dan dari sebab itu mencarikan tempat di HIS. Karena HIS negeri dan bersubsidi malahan tidak dapat menampung seluruh keinginan orang yang dikatakan berhak menuntut, mudah dimengerti bahwa dalam kondisi demikian HIS swasta tidak bersubsidi mempunyai fungsi penting.

Pada umumnya dengan adanya pengurusan sekolah Barat swasta tidak bersubsidi dibuktikan bahwa pemerintah dapat saja mengadakan peraturan bagaimana seharusnya kira-kira membuat pembagian sekolah dalam masyarakat. Tetapi pengadaan peraturan sama sekali lain dari pada penerimaan oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam masyarakat. Karena itu wajar sekali bahwa kaum politik yang berpengaruh dalam masyarakat penduduk Bumiputera sama sekali tidak sependapat dengan pemerintah yang mengkhawatirkan terlalu besarnya jumlah orang berpendidikan lebih tinggi. Di dalam kalangan ini orang sangat keranjingan dengan keinginan supaya diadakan sebanyak mungkin sekolah di negeri ini dan sangat mendambakan proses penyadaran spirituil-intelektuil secepat-cepatnya dari penduduk. Karena itu sebagian dari kaum terpelajarnya rela untuk tidak mendapat pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya, setidak-tidaknya untuk sementara.

Kelemahan dalam penolakan pemerintah terhadap perluasan dari apa yang disebut jenis-jenis sekolah yang lebih mahal ditunjukkan oleh kenyataan bahwa di negeri-negeri yang lebih merdeka seperti Philipina dan Muang Thai, di bidang ini jauh lebih maju, pada hakekatnya pemerintah tidak dirugikan oleh lapisan yang lebih luas dari orang-orang yang berpendidikan lebih baik. Dalam masyarakat kolonial justru merupakan gejala khas bahwa segala pekerjaan oleh tenaga kerja Barat relatif sangat mahal. Apabila urusan pemerintah dapat diselenggarakan pada tingkat penggajian orang Timur kapasitasnya naik.

Beberapa pendapat di atas diuraikan secara singkat oleh Idenburg dimaksudkan untuk membuktikan bahwa pembatasan sekolah untuk pendidikan lebih lanjut dengan sistim kontingen (penjatahan)

berdasarkan argumentasi "kebutuhan masyarakat" dari sudut politik sulit dilaksanakan. Terhadap pendidikan penduduk Bumiputera lebih peka dari pada di bidang lain. Peraturan tindakan pemerintah di bidang pendidikan lebih dari pada di bidang-bidang lain dijadikan ukuran terhadap politik kolonial. Dalam pandangan penduduk Bumiputera pendidikan merupakan barometer dalam politik kolonial. Menurut keyakinannya peraturan kontingen merupakan peraturan "termahal" untuk dipakai dalam pembatasan pengeluaran untuk pendidikan.

Tetapi bagi Idenburg masalahnya tidak dibiarkan tetap sedikit atau banyak begitu saja. Meskipun ia sendiri dalam politik pendidikan untuk tahun-tahun pertama ingin mengutamakan perluasan sekolah-sekolah yang benar-benar Bumiputera, supaya dengan demikian mengadakan permulaan dalam pemberantasan buta huruf. Namun ia berkeyakinan bahwa untuk kemudian hari mengenai sekolah-sekolah lanjutan tidak dapat dilaksanakan politik dengan mengadakan tambal sulam sedapat-dapatnya saja. Untuk sekolah lanjutan harus diadakan penambahan pengeluaran sangat besar. Untuk memberikan gambaran mengenai perbandingan biaya untuk tiap murid dari berbagai tipe sekolah disajikan beberapa angka yang diambil dari tahun 1937.

Bagan Umum

Bentuk dasar sekolah dengan bahasa pengantar Belanda		Sekolah dengan bahasa pengantar Bumiputera	
	Biaya rata2 tiap murid setahun (gulden)		Biaya rata2 tiap murid setahun (gulden)
<u>SEK.PENDIDIKAN UMUM</u>			
- Sekolah Rendah:			
1. Sekolah Eropa	f. 90,--	1. Sekolah Desa	f. 5,--
2. HIS	f. 45,--	2. Sekolah "vervolg"	f. 14,50
3. Sekolah Khusus	-	3. Sekolah "vervolg"	
4. "Schakel"	-	dg.m.p.bhs.Belanda	f. 20,--
5. HAS (seperti HIS, untuk Arab)	-	4. Sekolah "vervolg"	
6. HCS (untuk Cina)	f. 60,--	untuk gadis	f. 17,--
- Sekolah Menengah:			
1. Tkt.Pertama MULO	f. 213,--	MULO Bumiputera	f. 65,--
2. Tkt.Atas utk.persi- apan Perg.Tinggi:			
a. HBS 5th.	f. 174,--		
b. AMS	f. 260,--		
<u>SEK.PENDIDIKAN KEJURUAN</u>			
- Sekolah Ketrampilan untuk anak laki2:			
1. Sekolah Ambacht (pertukangan)	f. 202,--	Sekolah Latihan Pertu- kangan (Ambachts leergang)	f.169,--
2. Sek.Latihan Pertu- kangan utk.yang berbahasa Belanda	f. 169,--		
3. Sekolah Teknik 5-th.	f. 345,--		
- Sekolah Ketrampilan untuk anak gadis:			
Sek.Kesej.Keluarga	f. 58,--		
- Sekolah Dagang:			
1. Sek.Dagang Menengah Pertama	-	Sekolah Dagang Kecil	f. 23,-- (f. 24,--)
2. Sek.Dagang Menengah Atas (dua tahun)	f. 175,--		
<u>PERGURUAN TINGGI</u>			
1. Sek.Tinggi Teknik	f.1.100,--		
2. Sek.Tinggi Hukum	f. 260,--		
3. Sek.Tinggi Kedokteranf.	575,--		

Gambaran di atas sejauh itu masih terlalu baik, karena pada tahun 1937 biaya untuk sekolah lanjutan Barat tidak ditambah dengan biaya untuk mengimpor tenaga guru dari negeri Belanda. Untuk tahun-tahun berikutnya biaya itu ada dan biaya rata-rata tiap murid di sekolah-sekolah corak Barat akan naik banyak. Berdasarkan angka-angka itu dapat dibuat perkiraan, bahwa pemerintah bahkan dengan politik pengendalian perluasan sekolah akan menghadapi konsekuensi keuangan yang berat dan dalam waktu dekat akan tiba saatnya, bahwa pemerintah tidak akan berdaya untuk mengadakan sedikit perluasan yang berarti. Posisi sulit itu seperti menghadapkan kepada jalan buntu akan memaksa untuk mencari jalan keluar bagaimana caranya pemerintah mampu berdasarkan azas-azas politik kolonial melaksanakan kebijaksanaan di bidang pendidikan.

Penyelenggaraan sekolah yang benar-benar Bumiputera dengan perlengkapannya dan tingkatan biaya rata-rata seperti pada waktu itu ada dalam kemampuan teoritis anggaran. Bahkan perluasan dengan cepat sekolah desa dan "vervolg" dianggap mungkin, apabila mengabdikan kepada kenaikan kecil yang normal setiap tahun dari dana yang diperlukan dan berpegang kepada ketentuan bahwa penyebaran sekolah Bumiputera merupakan urusan pemerintah yang utama. Kesukaran terdapat terutama dalam pembiayaan sekolah rendah corak Barat dan lanjutan. Jika dalam masalah ini pemerintah tidak mau beralih kepada sistem penjabatan yang keras dalam waktu dekat, maka harus dicari cara untuk banyak menurunkan biaya. Tetapi tidak mungkin menurunkan biaya dengan menciutkan formasi yang ada, bahkan dalam hal ini sebaliknya untuk kepentingan pendidikan harus diadakan perluasan.

Dengan wajar dapat dinyatakan sampai sejauh mana partisipasi masyarakat kepada perluasan sekolah dapat didorong. Walaupun daya dukung penduduk pada umumnya rendah, teristimewa kelompok penduduk bukan Eropa, sehingga secara a priori ada kecenderungan untuk beranggapan bahwa sukar dapat diharapkan ikut sertanya penduduk dengan dana sendiri dalam perluasan sekolah secara agak besar-besaran. Namun masalah ini perlu ditinjau lebih jauh. Adalah suatu kenyataan

bahwa di daerah-daerah jajahan Inggris prakarsa swasta untuk berpartisipasi dalam penyediaan sekolah jauh lebih besar dari pada di Hindia-Belanda. Dari negeri-negeri tetangga di Asia Tenggara diperoleh kesan umum bahwa perkembangan sekolahnya untuk massa rakyat yang luas dari penduduk tidak sedikit disebabkan oleh partisipasi yang besar dari prakarsa swasta. Justru di daerah jajahan Inggris partisipasi itu dimungkinkan karena tidak adanya sistim pendidikan yang sebenarnya seperti di Hindia-Belanda. Seperti diketahui di Inggris sendiri jika dibandingkan dengan negeri Belanda sebenarnya tidak ada sistim pendidikan. Hindia-Belanda menurut Idenburg mempunyai sistim tertutup rapat secara rasionil melebihi negeri Belanda. Adanya sistim seperti itu merupakan rintangan terhadap perkembangan prakarsa swasta karena sekolah yang tidak memenuhi kriteria sekolah negeri tidak mampu mengeluarkan ijazah setaraf dengan negeri, bernilai rendah dalam masyarakat. Sistim pengajian juga sama sekali didasarkan kepada pemilikan ijazah resmi atau negeri yang sebenarnya hanya dapat dimiliki melalui sistim pendidikan resmi. Persoalan penting yang harus dihadapi ialah apakah Hindia-Belanda masih akan harus meneruskan sistim tertutup itu atau apakah ketertutupan itu harus dikurangi bahkan didobrak. Persoalan ini sekalipun dalam bentuk agak lain, berkali-kali muncul di Dewan Rakyat waktu dibicarakan sikap pemerintah terhadap apa yang disebut "Sekolah Liar". Dalam hubungan dengan ini diingatkan kepada pidato Thamrin dalam sidang utama terakhir pada waktu pembincangan anggaran biaya pendidikan. Isi singkatnya ialah: "Pemerintah tidak mampu memberikan sekolah rendah dengan layak kepada massa rakyat dari penduduk. Untuk itu tidak akan pernah mampu karena alasan keuangan, maka dari sebab itu janganlah bersikap menolak terhadap prakarsa swasta, tetapi berusaha menyokongnya dan membimbingnya dengan sebaik-baiknya".

Dengan memperhatikan secara kritis keadaan yang sebenarnya, dapat diketahui bahwa sesungguhnya prakarsa swasta masih sangat sedikit memberi bantuan kepada pemecahan masalah bagaimana caranya

menyediakan pendidikan yang layak kepada massa rakyat dari penduduk. Pertimbangan yang disinggung Thamrin, tidak boleh cepat-cepat dikesampingkan. Menurut kenyataannya persoalan itu secara prinsipial adalah penting. Apakah berhubung dengan penyediaan sekolah rendah dengan layak bagi penduduk tidak dapat memanfaatkan secara lebih baik prakarsa swasta yang ada dan mungkin masih akan ada lagi.

Memang dalam beberapa hal dapat dipastikan bahwa sekolah swasta tidak bersubsidi cenderung untuk merusak sistim pendidikan negeri, meskipun karena hanya eksistensinya terutama dimungkinkan oleh kenyataan bahwa untuk anak-anak yang belajar di sekolah swasta itu sebenarnya disediakan tipe sekolah dengan tingkatan pendidikan yang lebih rendah. Dengan demikian HIS swasta tidak bersubsidi itu menyedot sejumlah besar anak, yang menurut sistim pemerintah sebenarnya harus masuk sekolah desa + "vervolg". Juga dengan demikian MULO dan HBS-3 tahun swasta diisi dengan murid yang tidak lulus ujian masuk MULO dan HBS negeri dan bersubsidi. Juga ada sekolah-sekolah swasta yang tidak mengetahui sistim persekolahan negeri.

Dengan bersikap terlalu lunak terhadap sekolah swasta, yaitu mengenai perluasannya secara besar-besaran, ada ancaman bahaya tertentu terhadap keutuhan sistim negeri. Jadi persoalannya apakah ketertutupan sistim negeri masih terus dipertahankan dengan cara seperti yang sudah dijalankan. Juga berdasarkan motivasi lain daripada yang disebut oleh Thamrin cara yang relatif kaku memelihara sistim negeri itu ditentang. Dari pihak Taman Siswa dilontarkan keberatan, bahwa sistim pendidikan negeri terlalu banyak diarahkan kepada perkembangan intelektual para remaja dan terlalu kurang memperhatikan segi spirituil yang oleh Taman Siswa diinginkan untuk diarahkan kepada kesadaran nasional dan kebudayaan nasional. Juga dari pihak Misi dan Zending berkali-kali diajukan keberatan berdasarkan alasan pedagogis dan sosial atau dengan maksud menyatakan bahwa terlalu sedikit kebebasan untuk mengarahkan kepada pelayanan keinginan dan kebutuhan penduduk setempat. Menurut Idenburg

memang benar juga ada kesan bahwa pendidikan di Hindia-Belanda akan dapat diperkaya dengan memberikan kelapangan kepada berbagai bentuk pendidikan yang tidak secara langsung berkaitan dengan sistim resmi. Dalam hal ini ia sendiri juga menyetujui dengan alasan untuk kepentingan pendidikan rakyat harus ada keluwesan lebih besar.

Tetapi ia berpendapat bahwa tidak tepatlah untuk mengingkari kebiasaan sistim tertutup untuk memperluas kesempatan belajar dalam waktu cepat. Ia menyatakan keyakinannya bahwa sistim yang sudah sekali digunakan mempunyai banyak kebaikan. Diartikan sebagai petualangan membabi-buta jika dalam prinsip akan meniru cara yang relatif tanpa sistim seperti di daerah-daerah jajahan Inggris. Dari seorang ahli seperti Pastur A.J.A. van Kalken, dahulu pemimpin Biro Pusat Misi yang telah lama mengadakan perjalanan untuk studi ke India, diperoleh keterangan bahwa sekolah rendah untuk massa rakyat di situ meskipun sudah ditingkatkan di atas sekolah 4 tahun, pada umumnya masih akan dapat banyak belajar dari kebaikan dalam kualitas dan organisasi sekolah sederhana di Hindia-Belanda. Di pihak lain Idenburg tidak merasa khawatir menghadapi keluwesan prakarsa swasta, asal saja pemerintah mempunyai sarana untuk mempengaruhinya secara tertentu. Ordonansi pengawasan merupakan sarana negatif dan menurut keadaannya satu-satunya sarana resmi untuk berpengaruh secara positif ialah memberikan bantuan 100% kepada pengurusan sekolah swasta. Tetapi pada hematnya hal itu dalam prinsip tidak tepat. Untuk memberikan kelapangan kepada prakarsa swasta dan bersamaan agar sekolah swasta tidak bersubsidi dapat berfungsi, maka harus sedapat-dapatnya mempertahankan apa yang bernilai dan membiarkan lenyap atau memperbaiki yang kurang bernilai.

Tidak lama setelah menerima jabatan sebagai Direktur Departemen Pendidikan dan Agama ia menyatakan pendapatnya kepada Gubernur Jenderal, bahwa perlu memperbantuan guru-guru kepada sekolah swasta tidak bersubsidi sekadar sebagai kompensasi dari ketidak mampuan

pemerintah untuk memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah yang memenuhi syarat. Dalam tahun-tahun belakangan sudah sering diberikan subsidi kepada sekolah-sekolah swasta yang baik tetapi terancam kehancuran. Teristimewa subsidi ini diberikan kepada sekolah ketrampilan untuk anak gadis yang masih kurang sekali perhatian dari pemerintah dan ada prakarsa swasta yang subur. Pada hematnya bidang ini sangat penting artinya untuk perkembangan pendidikan di Indonesia.

Akan tetapi dengan cara pemberian subsidi seperti tersebut di atas tidak ditemukan penyelesaian yang tuntas mengenai masalah keuangan. Kemampuan penduduk di bidang keuangan pada umumnya sangat lemah dan selain itu terbagi tidak merata. Prakarsa swasta yang timbul dalam masyarakat sendiri baru akan berperanan penting dalam kondisi perkembangan sosial-ekonomi yang sudah lebih maju. Jika benar-benar mau dicarikan jalan untuk keluar dari kemacetan yang sedang menghadang politik pendidikan dengan "kemahalan" yang relatif dari berbagai tipe sekolah, maka perhatian terutama harus ditujukan kepada sebab-sebab "kemahalan" itu. Sebab-sebab ini tidak terdapat pada penyebaran sekolah dengan luas, juga tidak dalam formasi personalia yang terlalu besar atau kepada perlengkapan yang terlalu mewah berupa bangunan sekolah dan alat-alat material yang lain. Sebab sesungguhnya dari "kemahalan" terdapat pada kenyataan bahwa berbagai tipe sekolah diselenggarakan dengan menggunakan tenaga guru mahal berupa tenaga kerja impor, yang memerlukan banyak biaya dan selanjutnya digaji menurut tingkatan yang jauh lebih tinggi dari pada tingkatan kemakmuran rata-rata orang tua murid. Inilah kelemahan dalam penyediaan sekolah di Hindia-Belanda. Selama masih tetap demikian keadaannya tidak akan pernah terpecahkan secara prinsipil masalah perbenturan antara tuntutan politik pendidikan dengan kemampuan di bidang keuangan. Dengan menaikkan uang sekolah tidak akan tercapai pula penyelesaiannya. Hal ini hanya semata-mata akan terdiri dari penaikan uang sekolah untuk kategori terendah karena keadaannya sudah sedemikian

rupa, bahwa apabila sekolah diisi dengan murid yang membayar uang sekolah tertinggi maka praktis setiap tipe sekolah akan dapat membiayai diri sendiri dengan mudah. Dalam selisih biaya tiap murid di HBS dengan biaya tiap murid di MULO, AMS, dan Sekolah Teknik, sudah tercermin perbedaan dalam pungutan uang sekolah. Pemecahan masalah harus benar-benar dicari dalam penurunan biaya untuk tenaga guru dan penurunan yang tidak sedikit.

Ketidak serasian sosial berupa guru mahal untuk murid miskin yang termasuk gejala khas dalam masyarakat kolonial dalam transisi tercermin dengan jelas pada MULO. Sekolah tipe ini mempunyai posisi sentral dalam sistim pendidikan Hindia-Belanda. Lamanya belajar tiga atau empat tahun. Selain memberikan pendidikan akhir juga berfungsi memberi pendidikan umum sebagai pendahuluan untuk berbagai sekolah kejuruan yang lebih tinggi dan selanjutnya dapat melanjutkan ke AMS, yang pada gilirannya memberi pendidikan persiapan ke perguruan tinggi. MULO ialah sekolah yang khas untuk remaja Bumiputera dan diorientasikan kepada masyarakat di Hindia-Belanda bahkan tidak mempunyai konkordansi dengan MULO di negeri Belanda. Meskipun demikian personalia tenaga pengajarnya praktis terdiri dari guru-guru berijazah guru kepala (ijazah hoofdacte) yang didatangkan dari negeri Belanda. Dengan adanya personalia tenaga guru berpengalaman itu dapat dijelaskan bahwa tingkatan pendidikan masih dapat dipertahankan dengan relatif baik, meskipun diadakan pengurangan formasi secara ketat dan penambahan jumlah murid dalam kelas. Tetapi adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa biaya untuk tiap guru tidak sebanding dengan tingkatan ekonomis dan lingkungan sosial, yang menjadi asal rata-rata murid MULO. Tidak dapat dibayangkan apakah negeri ini, meskipun di kemudian hari dan juga dalam keadaan kemakmuran sudah maju dapat memberi penghidupan kepada tenaga kerja orang Bumiputera sendiri menurut standar hidup orang Belanda impor, yang standar hidupnya juga lebih tinggi dari pada rata-rata orang Belanda dalam fungsi sama di negeri Belanda.

Keharusan untuk masa depan menunjukkan supaya ada "sekolah Bumiputera dengan guru-guru dari Hindia-Belanda" sebagai satu-satunya bentuk sekolah yang terbiayai dan sekolah untuk pendidikan lanjutan. Masalahnya ialah bilamana perkembangan seperti itu harus dipersiapkan secara sadar. Menteri Welter sependapat dengan Idenburg yang menurut keyakinannya saat untuk itu sudah dekat. Kemampuan perangkat pendidikan yang tidak cukup untuk menampung banjir murid dalam tahun-tahun berikutnya, kondisi keuangan yang tidak mencukupi untuk menyelenggarakan dan memelihara perangkat pendidikan yang memuaskan, juga dalam masa yang akan datang, mengharuskan pemerintah untuk membuat persiapan bagi ganti haluan, yang tidak dapat ditangguhkan lebih lama lagi dalam politik pendidikan.

Dengan sadar Idenburg menyinggung persoalan penting dalam seluruh urusan pemerintahan. Sangat banyak instansi pemerintah dapat dikatakan relatif mahal karena dikerjakan dengan personalia Eropa yang diimpor, pegawai yang gajinya sedikit banyak didasarkan pada standar hidup ambtenar Eropa. Dengan perasaan kurang enak ia memberanikan diri membuat gambaran sketsa hari depan di bidang politik umum. Walaupun tidak lengkap dirumuskan beberapa pikiran yang hidup dalam dirinya dan pada orang-orang lain untuk menjelaskan pendapatnya mengenai persiapan untuk mengadakan suatu perubahan arah dalam politik pendidikan yang pada prinsip harus dapat diterima dan jika mungkin cepat-cepat ditangani dengan tindakan nyata.

Untuk menguraikan pikirannya dikemukakan sebagai ancang-ancang adanya keinginan secara konstan dan berkali-kali menjadi aktual di kalangan politik orang Indonesia (dan juga orang yang lain), kepada konstelasi politik merdeka. Ia tidak mau menyebutkan perumusan-perumusan keinginan konkrit (seperti petisi Sutardjo, aksi GAPI untuk parlemen Indonesia, Mosi Wiwoho cs., dll.), tetapi hanya mengemukakan kenyataan psikologis mengenai adanya keinginan seperti itu dan kemungkinannya untuk bertambah kuat. Terhadap keinginan ini pemerintah hanya dapat menyatakan keyakinan bahwa Indonesia belum matang untuk memperoleh struktur negara merdeka, tetapi

berusaha mengarahkan politik kepada penciptaan dan peningkatan kondisi untuk proses pematangannya.

Pernyataan tersebut di atas hanya mempunyai kebenaran relatif. Kebenarannya ialah sejauh yang berlaku untuk tujuan Hindia-Belanda dan Belanda, dan di sini harus ditambahkan pengakuan seperti kenyataan menurut tiap-tiap anggaran bahwa dana pada pemerintah tidak ada untuk dengan sekuat tenaga dalam waktu cepat menjalankan politik penggiatan untuk mencapai tujuan itu. Pemerintah berusaha di bidang perekonomian rakyat, pendidikan, kesehatan rakyat, dan perhubungan lalu-lintas, tetapi berkali-kali terbentur kepada ketidak-mampuan keuangan untuk pengeluaran lebih besar atau untuk melepaskan pendapatan tertentu yang menaikkan biaya produksi. Semua hutang pemerintah, pembayaran pensiun, pertahanan, dan pemeliharaan keamanan dalam negeri saja sudah begitu besarnya, sehingga tidak mungkin menjalankan politik penggiatan yang intensif. Untuk itu tidak tersedia sama sekali tenaga dan dana. Dan malahan dalam situasi yang demikian itu pemerintah ada dalam posisi dengan jumlah hutang yang makin besar.

Itu semua akan mengkhawatirkan jika Hindia-Belanda hanya sendirian dan tidak ada cara-cara lain yang dapat dipikirkan untuk memperbaiki posisi dari dalam. Di satu pihak Hindia-Belanda ikut terlibat dalam situasi umum dunia dan dengan banyak negara lain serta kawasan lain pada suatu tingkatan tertentu akan harus menyerahkan pemecahan situasi dengan konsekwensi keuangan kepada masa depan di bawah kondisi yang belum diketahui. Di pihak lain tidak dapat dipungkiri bahwa politik pencerdasan yang hakiki untuk Hindia-Belanda akan mengarah kepada baikpun peningkatan kemakmuran rakyat maupun penurunan pengeluaran pemerintah dengan mengikut sertakan tenaga kerja di negeri ini yang makin banyak dan untuk mereka ini penghidupan menurut tingkatan daerah Pasifik tidak harus berarti bencana penurunan tingkatan hidup.

Di dalam kemungkinan masa depan itu terkandung suatu tenggang atau kelonggaran keamanan yang harus dipergunakan dan menurut

keyakinan Idenburg yang kuat tidak boleh berlama-lama lagi menunda-nunda persiapannya. Sebab ada bahaya yang tidak boleh diabaikan, bahwa penggunaan kemungkinan di masa depan akan makin sulit. Sebab jika makin banyak tenaga kerja Bumiputera setingkat dengan tenaga kerja impor dari Eropa, maka makin sukar menetapkan tingkatan gaji menurut kondisi Hindia-Belanda untuk kelompok pertama.

Dari sudut konstelasi politik dianggap lebih menguntungkan dari pada merugikan untuk dengan hati-hati mengadakan persiapan perubahan orientasi. Karena di satu pihak masih dengan teguh dapat dinyatakan bahwa Hindia-Belanda belum matang untuk struktur negara merdeka, tetapi di pihak lain pengarah politik kepada "Indonesianisasi" dengan konsekwensi penurunan gaji merupakan janji yang paling baik untuk proses pematangan yang cepat. Harga yang harus dibayar penduduk di negeri ini untuk kecepatan perkembangan ke arah kemerdekaan ialah sangat logis dan dibenarkan oleh pengalaman di negeri lain, sehingga dalam waktu tidak terlalu lama akan dapat diterima oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan, asal saja dengan hati-hati secara terus-menerus diberikan perhatian kepadanya.

Menurut pendapatnya adalah perlu untuk mengambil keputusan secara prinsipial supaya diadakan kerja ke arah itu, bahwa karena itu politik yang diarahkan secara demikian akan diwujudkan dalam peraturan tindakan untuk mempersiapkan dengan perbuatan nyata proses "Indonesianisasi" dengan cepat. Dalam hal ini pendidikan justru merupakan persoalan yang teristimewa pentingnya. Pertama-tama karena oleh pendidikan akan harus dibentuk tenaga-tenaga yang pada waktunya harus dimasukkan ke dalam formasi peng-"Indonesianisasian". Kedua, untuk perkembangan masyarakat ke masa depan adalah sangat penting bahwa pendidikan rakyat dipercayakan kepada guru-guru Bumiputera yang terdidik dengan sangat baik. Apabila berhasil membangun suatu korps guru Bumiputera yang benar-benar baik, maka dengan demikian dibuatkan dalam masyarakat suatu unsur yang secara sentral sangat penting sebagai standar untuk perkembangan dalam masa akan datang.

Wawasan ini pertama-tama menjurus kepada usaha untuk sebanyak-banyaknya menunjang pendidikan tenaga kerja masa depan di Hindia-Belanda sendiri dan apabila tidak mungkin menyediakan beasiswa untuk mendidik lebih banyak anak Bumiputera di negeri Belanda. Selanjutnya guru-guru yang kemudian akan menggantikan untuk sebagian guru-guru Eropa telah mendapat pendidikan dengan sebaik-baiknya. Idenburg mengatakan sebagian, karena dalam prinsip ia menganggap perlu bahwa di tiap sekolah tipe Barat ada seorang guru Eropa impor yang cakap untuk memelihara standar yang tinggi bagi bahasa Belanda dalam arti seluas-luasnya. Dikemukakannya bahwa kemungkinan tidak tertutup untuk membentuk semacam teras tenaga guru Bumiputera. Hasil sementara pendidikan guru kepala Bumiputera (*Indische hoofdacte*) corak baru yang didasarkan kepada azas-azas yang lebih modern dari pendidikan guru kepala Eropa (*Eropese hoofdacte*) memberikan harapan yang baik. Para penasehat ahli secara unanimitas berpendapat bahwa dengan demikian ditempuh jalan yang tepat dan bahwa perluasan pendidikan itu dengan tujuan membentuk tenaga guru yang baik untuk MULO tidak termasuk ilusi yang sia-sia atau sukar diwujudkan.

Pada umumnya masih banyak pekerjaan yang harus ditanggulangi untuk pendidikan di atas sekolah rendah dalam arti mengorientasikan sekolah tanpa menurunkan tingkatan intrinsiknya kepada kebutuhan Indonesia dengan lebih banyak dan mengadakan modernisasi. Azas konkordansi dengan negeri Belanda harus diteliti kembali dengan saksama. Gagasan untuk mempunyai sistem persekolahan Bumiputera yang baik yang diorientasikan kepada kondisi Indonesia harus berangsur-angsur makin banyak diwujudkan.

Semua itu tadi adalah gagasan secara umum yang diuraikan dengan panjang lebar tetapi dengan maksud memancing pengambilan keputusan mengenai prinsip, yaitu keputusan mengenai pemecahan persoalan apakah dengan berusaha sebaik-baiknya dalam tahun-tahun yang akan datang, atau mengikuti saja keadaan keuangan yang berkali-kali berubah dan tampaknya tidak terlalu menggembirakan, atau apakah dengan sadar akan bekerja ke arah penurunan biaya umum untuk pengelolaan (*overhead-*

kosten) dengan sebanyak mungkin melibatkan tenaga kerja Bumiputera yang digaji pada tingkatan lebih rendah. Jika diambil keputusan terakhir itu, maka dalam bidang pendidikan adalah pada tempatnya untuk mempersiapkan pelaksanaan politik seperti itu.

Sementara itu persiapan politik pendidikan yang diarahkan memerlukan penangan dengan hati-hati dan dengan keahlian. Jangan diharapkan bahwa Departemen Pendidikan dan Agama dapat menyusun suatu rencana kerja dengan semangat yang terarah ke situ dan dengan segera dapat dilaksanakan. Paling banyak hanya dapat menunjukkan beberapa garis umum. Pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah diadakan penelitian secara baik dan dengan keahlian terhadap masalah-masalah praktis yang terdapat di setiap tipe (jenis) sekolah dan dalam hubungannya antara satu sama lain. Jika Gubernur Jenderal setuju maka Idenburg bermaksud untuk mempersiapkan peninjauan kembali organisasi pendidikan sesuai dengan jiwa gagasan yang telah dipaparkan di atas dan minta diberi kuasa untuk membebaskan beberapa orang yang cakap untuk menyusun bagan kerja sementara serta menjabarkannya sejauh mungkin sebagai landasan bertolak ke arah penanggulangan masalah-masalah konkrit yang timbul.

Dalam uraian di atas ditunjukkan bagaimana politik pendidikan Hindia-Belanda terjat ke dalam impase atau kesulitan jalan buntu yang sukar ditembus dan tindakan apa dapat diadakan di bidang pendidikan sendiri supaya pada akhirnya dapat menurunkan biaya intrinsik. Tidak perlu dijelaskan bahwa politik seperti itu baru dapat diharapkan hasilnya di kemudian hari tetapi pada tahun-tahun berikutnya yang dekat hanya baru dapat mengandalkan kepada tindakan-tindakan persiapan dan perluasan sekolah yang beralasan sesuai dengan dasar-dasar yang ada. Di samping itu dengan sendirinya muncul pertanyaan apakah pada umumnya biaya untuk pendidikan dengan memperhatikan tujuan politik kolonial umum tidak terlalu rendah jika dibandingkan dengan pengeluaran lain-lain. Berapa persen dari pengeluaran digunakan di bidang pendidikan tidak dapat diberitahukan karena terutama data yang tepat mengenai pengeluaran untuk sekolah

Bumiputera yang tidak lagi dimuat dalam anggaran pendidikan. Tetapi menurut kenyataan sejak tahun 1925 pengeluaran untuk pendidikan kira-kira 7% naik pada tahun 1931 hingga 8,4% dan tahun 1934 menurut perkiraan hingga 12,8% tetapi setelah dilaksanakan penghematan untuk tahun 1936 turun menjadi 9,3% dari pengeluaran biasa, termasuk beban untuk bunga dan pembayaran pensiun. *)

Menurut Idenburg persentase tersebut di atas tidak boleh dianggap terlalu besar mengingat bahwa Hindia-Belanda di bidang pendidikan masih banyak ketinggalannya. Diketahui olehnya bahwa di Philipina 23% dari pengeluaran negara digunakan untuk pendidikan dan di Muang Thai kira-kira 17%. (Vi. Mr. Muller, Onderwijs en Opvoeding in Zuid-Oost Azie, Batavia-C, 1941, halaman 52 dan 98). Secara relatif Hindia-Belanda benar-benar tidak memboroskan pengeluaran untuk pendidikan rakyat. Menurut pendapat Idenburg adalah untuk politik pendidikan yang aktif apabila bertitik tolak dari prinsip bahwa persentase yang jauh lebih tinggi dari seluruh pengeluaran Gubernemen Hindia-Belanda disediakan untuk tujuan pendidikan dan digunakan sebagai pegangan dalam politik pendidikan untuk tahun tahun berikutnya.

Prinsip itu disinggunginya karena disadari bahwa pengeluaran istimewa yang diperlukan untuk pertahanan membuat sulit sekali untuk a priori memutuskan kenaikan secara perbandingan pengeluaran untuk pendidikan. Seperti telah dikemukakan ada bahayanya bahwa kondisi keuangan akan menyebabkan politik pendidikan sedikit banyak bergantung kepada aspek finansial seperti berkali-kali terjadi untuk tahun-tahun tertentu. Sebenarnya setiap tahun harus ditetapkan

*) Ikhtisar pengeluaran untuk bidang pendidikan pada tahun-tahun tiga puluhan dalam perbandingan dengan jumlah seluruh pengeluaran pemerintah tidak pernah dipublikasikan. Penyusunan ikhtisar seperti itu sangat dipersulit oleh penyerahan sebagian besar dari tugas pemerintah Pusat di bidang pendidikan kepada kesatuan-kesatuan otonomi Lokal dan Daerah, dan selanjutnya oleh perubahan-perubahan teknis dalam penyusunan anggaran belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Otonom.

lagi untuk menentukan politik kolonial. Idenburg mencoba menjelaskan bahwa prinsip yang demikian tidak tepat, karena dengan cara demikian tidak pernah ada kebijaksanaan yang sebenarnya di bidang pendidikan. Dengan rendah hati ia berpendapat bahwa politik pendidikan merupakan faktor sangat esensiil dalam politik kolonial umum yang tidak mungkin ada tanpa yang pertama.

Mengenai penambahan relatif pengeluaran untuk pendidikan ia tidak mau memberi saran atau rekomendasi tertentu, karena seperti telah dikemukakannya yang penting baginya ialah mengenai prinsip. Saran konkrit hanya baru dapat diberikan jika berdasarkan keputusan mengenai prinsip itu disusun suatu rencana kerja umum untuk misalnya jangka waktu 10 tahun. Dalam hubungan erat dengan ini disinggung persoalan prinsipil lain yang sebenarnya termasuk dalam bidang politik kolonial umum. Berbeda dengan negeri-negeri Barat modern yang sudah berkembang maju, Hindia-Belanda ada dalam stadium baru sebagian sedang berkembang di bidang sosial-ekonomi. Di sini masih terdapat persediaan laten berupa potensi di bidang produksi hasil bumi, tenaga kerja, kemungkinan industri, dan perdagangan dalam dan luar negeri yang belum diaktifkan dan tanpa persiapan tidak dapat diaktifkan. Di sini dapat dikatakan masih ada lapangan ekonomi yang relatif belum digarap. Seperti telah dikemukakan di atas situasi keuangan Hindia-Belanda pada umumnya jika berpegang kepada sistim keuangan yang ada hanya membuka kemungkinan tersedia sedikit sekali uang untuk penggarapan secara aktif potensi-potensi itu dan eksploatasinya akan memakan waktu puluhan tahun. Hal ini berarti bahwa satu-satunya cara pemecahan yang benar-benar untuk meningkatkan penghasilan dengan menaikkan kemakmuran dan perhubungan lalu-lintas ada di luar jangkauan keterbatasan keuangan.

Hal di atas menimbulkan pertanyaan apakah dalam prinsip ditempuh jalan tepat jika pengeluaran yang pada hakekatnya digunakan untuk memperkuat kemampuan produksi pada umumnya dan dalam perhubungan antara satu dengan lainnya yang di dalam politik keuangan disamakan dengan pengeluaran untuk hal-hal yang hanya mengenai kebutuhan

dan kepentingan masa kini. Dengan yang terakhir ini dimaksudkan misalnya penyediaan sekolah untuk kelompok sosial, seperti menurut kenyataannya sudah terlibat dalam perhubungan sosial modern. Kemudian pemeliharaan keamanan dan tata-tertib, peradilan, dan pada umumnya segala hal yang ditujukan untuk memelihara kelestarian tertib kenegaraan dan sosial.

Pengeluaran yang bertujuan kepada masyarakat dalam masa depan seperti mengaktifkan perekonomian rakyat, meningkatkan kesehatan rakyat, dan ketahanan rakyat, peningkatan kesempatan kerja dan kemampuan kerja, pembentukan kecerdasan intelektual sebagai dasar kenaikan perhubungan, dll., sifatnya berbeda sama sekali dari pada pengeluaran yang digunakan untuk keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam usaha biasa pengeluaran yang khusus ditujukan kepada peningkatan kemungkinan produksi dan ratio laba (rentabilitas) dianggap sebagai pengeluaran modal. Menurut manajemen keuangan negara yang berlaku juga pengeluaran seperti untuk meningkatkan kemakmuran rakyat umum pada masa depan termasuk ke dalam pengeluaran biasa.

Idenburg mempertanyakan apakah semua itu dalam prinsip tepat sama sekali. Ia dapat membayangkan bahwa dalam pembatasan tertentu dan terlepas dari aspek anggaran belanja tiap tahun, akan disetujui adanya keleluasaan atau kelapangan untuk pengeluaran yang tidak dapat dihindarkan untuk tujuan pengembangan potensi-potensi ekonomi Hindia-Belanda dengan cepat. Persoalan ini disinggunginya karena menurut keyakinan pada penggarisan arah politik pendidikan dengan benar-benar harus dipertenggangkan arti pengeluaran untuk jenis-jenis sekolah tertentu dengan pengeluaran lain yang biasa.

Pembahasan di atas dirangkumkan dalam beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- I. Dianggap mendesak supaya melanjutkan dengan giat perluasan sekolah Bumiputera untuk pemberantasan buta huruf. Dalam kerangka tujuan itu diajukan kepada Gubernur Jenderal usul tersendiri.

- II. Direkomendasikan peningkatan partisipasi masyarakat sendiri dalam usaha menyediakan sekolah dengan mengadakan beberapa peraturan untuk memungkinkan pemberian bantuan yang berlainan dari subsidi integral kepada sekolah-sekolah swasta yang memenuhi kriteria tertentu. Mengenai masalah ini juga akan diajukan usul kepada Gubernur Jenderal dalam waktu dekat.
- III. Pada hakekatnya perlu diambil keputusan dalam persoalan apakah peninjauan kembali sistim pendidikan dengan tujuan mengadakan "Indonesianisasi" lebih jauh dan menyesuaikan sekolah kepada masyarakat di Hindia-Belanda, segera harus dipersiapkan dengan tindakan nyata.
- IV. Sedapat mungkin pada hakekatnya diambil keputusan bahwa pengeluaran untuk pendidikan dalam tahun-tahun berikut menurut umum relatif akan dinaikkan persentasenya dengan juga memperhitungkan kenyataan bahwa sebagian dari sekolah-sekolah benar benar diperlukan untuk memungkinkan peningkatan kemakmuran rakyat. *)

*) Dengan surat Sekretaris Pemerintah I, tanggal 8 April 1940 nomor 692/A dimintakan saran mengenai sub III kepada Direktur Departemen Keuangan. Saran ini dan dokumen yang lain mengenai penyelesaian surat tersebut tidak ditemukan.

PERLUASAN

SEKOLAH BUMIPUTERA - RENCANA PENEROBOSAN (DOORBREKINGS-PLAN)

119. Dari Direktorat Pendidikan dan Agama (Dr. P.J.A. Idenburg) kepada Gubernur Jenderal (Tjarda van Starkenborgh Stachouwer), tanggal 8 Maret 1940

Direktorat Pendidikan dan Agama mengusulkan perluasan sekolah Bumiputera secara besar-besaran dalam rangka rencana empat tahun dimulai dari tahun 1942. Pemberantasan buta huruf seyogianya tidak hanya diserahkan kepada kesatuan-kesatuan otonomi lokal saja, tetapi pemerintah Pusat harus pula memberikan lebih banyak bantuan keuangan. Dalam surat kepada Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer tanggal 8 Maret 1940 nomor 55x/A Rahasia, usul tersebut dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut:

Penyerahan penyelenggaraan sekolah Bumiputera kepada kesatuan otonomi lokal di Jawa dan Madura pada tahun 1937 menyebabkan pemerintah Pusat tidak lagi secara langsung berurusan dengan perkembangan kuantitatif pada bagian ini di bidang pendidikan. Yang penting ialah, bahwa penyerahan itu terjadi pada waktu tindakan penghematan dalam tahun-tahun krisis telah berpengaruh sepenuhnya kepada tingkatan pembiayaan sekolah desa dan sekolah "vervolg". Terdapat keadaan kesederhanaan yang sukar dibedakan dari kemiskinan. Pada penentuan hubungan keuangan antara pemerintah Pusat dengan Kabupaten dan Kotapraja di Jawa ada juga suatu kelebihan yang pada waktu terjadi kenaikan pendapatan memberikan kelonggaran untuk mengadakan suatu perluasan, tetapi dalam praktek ternyata bahwa terutama sejak krisis kenaikan biaya material dan personalia menghabiskan kelebihan itu dan selanjutnya di kabupaten-kabupaten yang justru lebih miskin dan kekurangan sekolah pada hakikatnya tidak ada kelonggaran untuk mengadakan perluasan yang memadai.

Penyelenggaraan sekolah Bumiputera di luar Jawa dan Madura dan urusan sekolah bersubsidi mula-mula masih ditangani oleh pemerintah Pusat, tetapi setelah pembentukan kesatuan-kesatuan kelompok lokal^{*)} dan pelaksanaan sistim anggaran belanja untuk daerah (regionale begrotingen),^{**)} maka Departemen Pendidikan dan Agama tidak lagi secara langsung turut campur dalam urusan sekolah Bumiputera di daerah-daerah. Hanya sekolah bersubsidi masih menjadi urusan pemerintah Pusat. Perluasan sekolah rendah Bumiputera yang merupakan alat ampuh dalam pemberantasan buta huruf oleh peraturan tersebut telah dilepaskan dari kendali politik pendidikan Pusat dan diserahkan sama sekali kepada pendapat badan-badan otonomi dan penguasa di daerah-daerah serta kepada kemampuan keuangan daerah-daerah itu sendiri. Menurut pengalaman di Jawa dan Madura dengan cara seperti itu tidak dapat dilaksanakan politik pendidikan yang benar-benar aktif. Daftar berikut memberikan ikhtisar perluasan sekolah Bumiputera dalam tahun-tahun yang lewat.

<u>Propinsi Jawa Barat</u>	<u>1937</u>	<u>1938</u>	<u>1939</u>	<u>Jumlah</u>
Sekolah Desa	-	14	27	41
Sekolah "Vervolg" campuran	-	7	2	9
Sekolah "Vervolg" gadis	-	3	3	6
Kursus Guru Desa	13	14	15	42
<u>Propinsi Jawa Tengah</u>				
Sekolah Desa	-	-	80	80
Sekolah "Vervolg" campuran	-	1	10	11
Sekolah "Vervolg" gadis	-	-	2	2
Kursus Guru Desa	1	13	25	39
<u>Propinsi Jawa Timur</u>				
Sekolah Desa	-	38	32	70
Sekolah "Vervolg" campuran	-	3	11	14
Sekolah "Vervolg" gadis	-	7	2	9
Kursus Guru Desa	4	10	18	32

*) Pada tahun 1938 terbentuk kesatuan kelompok Minangkabau dan Banjar, dan pada tahun 1941 kelompok Palembang.

**) Diadakan pada tahun 1938 di daerah-daerah yang belum dikenakan desentralisasi pemerintahan. Sistim ini sebagai persiapan pembentukan kesatuan-kesatuan kelompok lokal.

Perluasan yang digambarkan di atas sama sekali tidak mencukupi perangkat pendidikan Bumiputera supaya kapasitas tetap pada tingkatan yang relatif, karena selisih antara kenaikan penduduk dengan tambahan ruangan sekolah yang tersedia makin menjadi buruk. Gejala yang sangat merugikan terutama terdapat di daerah-daerah yang miskin, yang justru secara khusus membutuhkan perluasan sekolah untuk perkembangan perekonomiannya di kemudian hari. Daerah-daerah tersebut sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk menciptakan kondisi bagi perkembangan itu dan penyerahan urusan sekolah justru menentukan kemiskinan untuk daerah-daerah tersebut.

Penyebaran secara luas sekolah Bumiputera merupakan salah satu sarana terutama dan paling menentukan untuk memberantas buta huruf. Pada pembincangan anggaran belanja pendidikan untuk tahun 1940 disampaikan kepada Dewan Rakyat ikhtisar produksi melek huruf di kalangan orang Bumiputera sebagai berikut, berdasarkan ilustrasi angka-angka anak berumur 8 tahun dan jumlah murid kelas tiga sekolah rendah (sekolah desa, sekolah Kelas Dua lengkap, sekolah rendah Eropa, HIS, sekolah khusus dan HCS).

Tahun ajaran	Anak Bumi-putera berumur 8 th.	Juml.murid Bumi-putera di kl.III sek.rendah negri dan bersubsidi	Lajur 3 dalam % thd. lajur 2	Lajur 2 dikurangi lajur 3
1930/31	1.545.867	353.374	22,86	1.192.493
1931/32	1.569.055	386.116	24,61	1.182.939
1932/33	1.592.591	397.787	24,98	1.194.804
1933/34	1.616.480	405.521	25,09	1.210.959
1934/35	1.640.727	394.650	24,05	1.246.077
1935/36	1.665.338	397.416	23,86	1.267.922
1936/37	1.690.318	412.731	24,42	1.277.587
1937/38	1.715.673	425.003	24,77	1.290.670

Gubernur Jenderal diingatkan kepada pidatonya dalam pembukaan sidang utama Dewan Rakyat yang baru lewat, bahwa pemerintah tidak

mengingkari tanggung jawab mengenai perkembangan sekolah Bumiputera yang memadai dan dengan demikian menguatkan janji yang telah diberikan pada waktu penyerahan tugas dan kemudian diulangi, bahwa pemerintah dalam hal ini tidak akan menyuruh pihak lain untuk bertanggung jawab. Dalam pidato pembukaan itu antara lain dikatakan bahwa pemerintah akan tetap berusaha mengadakan perluasan sekolah Bumiputera sebanyak-banyaknya, karena pendidikan di sekolah untuk massa rakyat dari penduduk Bumiputera merupakan salah satu persoalan terpenting dalam politik pendidikan. Pemerintah mempertimbangkan dengan saksama persoalan keuangan mengenai kemampuan daerah untuk melaksanakan tugas yang diserahkan itu dan mengadakan perbaikan apabila ternyata daerah tidak mampu.

Diingatkan pula kepada pengajuan mosi oleh Thamrin, Wiryopranoto, dll. dengan maksud bahwa dalam sidang pada permulaan tahun masih akan diajukan rencana-rencana untuk perluasan sekolah Bumiputera yang cepat. Mosi itu ditarik kembali setelah pemerintah menjelaskan bahwa perluasan sekolah Bumiputera secara besar-besaran termasuk kehendak pemerintah sendiri dan selanjutnya menyatakan, bahwa pemerintah tidak dapat mengikatkan diri kepada suatu detik waktu sebagai permulaannya, karena diperlukan persiapan yang sebaik-baiknya. Di sini mosi yang dimaksudkan ialah mosi yang diajukan oleh Wiryopranoto, Iskandardinata, dan Lapien.

Oleh Idenburg dinyatakan bahwa tidak mungkin untuk mengajukan konsep yang dijabarkan secara lengkap terperinci untuk mengadakan perluasan dengan tindakan yang nyata. Untuk itu diperlukan penelitian yang mendalam mengenai kondisi keuangan dan sosial di tiap daerah masing-masing dan di samping itu harus diadakan pembicaraan dengan para Gubernur yang bersangkutan secara saksama. Harapannya untuk sebelum tersusun anggaran belanja induk tahun 1941 sudah dapat diajukan rencana kerja yang terperinci tidak terpenuhi. Sementara itu tidak ada halangan untuk sebelum anggaran tahun 1941 tersusun sudah mempersiapkan apa yang perlu untuk menyusun konsep perluasan secara global. Sebab perluasan sejumlah sekolah desa dan

sekolah "vervolg" baru benar-benar dapat dilaksanakan jika sudah ada sejumlah guru yang cukup. Hal itu berarti bahwa untuk sekolah desa baru dapat dimulai dua tahun sesudah pendidikan guru desa mulai diadakan dan perlengkapan pendidikan bagi sekolah baru sudah ada. Untuk sekolah "vervolg" sebagian dari guru yang diperlukan ialah sesudah dua tahun, tetapi untuk sebagian besar baru dapat ditampilkan di sekolah setelah empat tahun.

Pada umumnya dapat dikemukakan kira-kira besarnya jumlah sekolah desa baru yang harus dibuka pada tahun 1942 dan 1943 tanpa ditetapkan mengenai penyebarannya dan jumlah sekolah "vervolg" yang baru akan harus dapat didirikan pada tahun 1945. Pendidikan guru sekolah desa dapat dimulai pada tahun 1940, tetapi untuk sekolah "vervolg" di sekolah (guru) normal belum dapat dimulai sebelum tahun 1941, karena ruang sekolah yang tersedia untuk itu terlalu sedikit dan harus didirikan sekolah-sekolah normal baru. Sifat perluasan dengan sendirinya terpaksa bergantung kepada kecepatan yang dikehendaki untuk pemberantasan buta huruf melalui sekolah Bumiputera. Untuk itu dapat dibuatkan konsep umum tanpa dengan segera memutuskan pelaksanaannya yang nyata secara terperinci.

Sebagai pegangan diusulkan untuk bertitik tolak dengan bagan 1.000 buah sekolah desa setiap tahun. Secara global diperkirakan setelah 10 tahun sekitar 70% anak dari kelompok umur 6 tahun dapat masuk sekolah dan jika dapat dikurangi putus sekolah anak di kelas dua dan tiga, maka kira-kira 50% dari anak kelompok umur tertentu telah mendapat pendidikan sekolah selama tiga tahun, yaitu masa sekolah yang sedikit atau banyak secara resmi ditentukan sebagai basis untuk kelestarian melek huruf. Anggapan ini tidak cocok dengan kenyataan, tetapi fiksi ini dapat digunakan untuk bagan kerja umum, karena bagaimana-pun orang yang telah bersekolah melewati tiga kelas dapat ditentukan sudah dapat membaca dan menulis dengan memadai, dan selanjutnya lingkungan sosial menentukan sejauh mana dapat memelihara kepandaianya secara individu. Masalah ini

meskipun sangat penting artinya secara sosial dan pedagogis, belum waktunya untuk ditanggulangi dalam fase pertama pemberantasan buta huruf melalui sekolah. Perluasan sekolah desa berkaitan dengan fase pertama itu dan dari sebab itu fiksi tersebut dapat diterapkan.

Jika selanjutnya diperhitungkan bahwa $\frac{3}{4}$ hingga $\frac{4}{5}$ dari perluasan itu diadakan untuk Jawa dan Madura, terutama dalam tahun-tahun pertama Jawa dan Madura akan mendapat bagian terbesar, maka perluasan seperti yang diusulkan akan merubah perbandingan sekolah desa terhadap jumlah penduduk dari kira-kira 1 : 3.300 menjadi 1 : 2.500. Angka-angka perbandingan ini sangat global, bahkan sampai tingkatan tertentu hampir teoritis karena hanya memperhitungkan perkiraan rata-rata jumlah murid di sekolah yang pada tahun-tahun berjalan mungkin akan mengalami perubahan. Sementara itu angka-angka perbandingan itu dapat digunakan dalam bagan umum.

Untuk selanjutnya dapat menjelaskan pentingnya perluasan dalam kerangka politik pendidikan yang dianut perlu diketahui norma-norma dari peraturan umum subsidi (ASR = Algemene Subsidie Regeling) untuk sekolah rendah Bumiputera. Seperti telah ditetapkan dalam masa penghematan ditentukan perbandingan 1 sekolah untuk 1.500 jiwa sebagai dasar untuk pemberian subsidi dan dapat dianggap tepat untuk penyediaan sekolah menurut apa adanya. Maka melalui rencana perluasan sekolah dalam 10 tahun akan ditempuh setengah perjalanan dari perbandingan rata-rata yang ada di Jawa ke perbandingan yang "normal".

Tidaklah cukup hanya mengandalkan kepada perluasan sekolah desa saja. Dengan menyediakan sekolah desa 3 tahun, maka hanya dapat memberikan hal yang minimum saja kepada remaja. Tipe sekolah ini hanya dapat diterima dalam kerangka fase pertama pemberantasan buta huruf, tetapi secara edukatif sangat kecil artinya. Pernyataan ini tidak mengimplikasikan untuk memperkecil nilai pedagogis sekolah desa jika menghargai kegunaan dalam lingkungan di mana sama sekali tidak ada sekolah. Menurut pengalaman meskipun hasilnya kecil

secara murni edukatif namun mempunyai arti sosial yang penting. Tetapi sekolah desa baru benar-benar dapat disebut sekolah, apabila dapat membuka pintu untuk memasuki sekolah rendah yang lebih sempurna. Untuk itu harus juga secara relatif disediakan kesempatan. Jadi di samping perluasan sekolah desa harus diadakan penyebaran sekolah "vervolg" secara lebih luas. Untuk sementara diperkirakan perbandingan jumlah sekolah "vervolg" terhadap sekolah desa sebagai 1 : 4 dengan memperhatikan kenyataan bahwa baru dapat dimulai sesudah tiga tahun diadakan perluasan sekolah desa. Perbandingan 1 : 4 diambil sebagai rendah (norma tahun-tahun belakangan 3:10) tetapi dapat dipakai. Sekolah "vervolg" dalam hubungan dengan sekolah desa harus dilihat jumlah dan penyebarannya dalam kaitan dengan perkembangan kebutuhan dalam suatu daerah.

Dalam beberapa daerah di luar Jawa dan Madura perbandingan sekolah desa terhadap sekolah "vervolg" sebagai 20:1, di Jawa di sana sini 10:1, dan di kota-kota besar $1\frac{1}{2}$:1. Beda perbandingan ada hubungannya dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah atau tempat. Selanjutnya di daerah-daerah tertentu tidak segera diadakan sekolah "vervolg" karena harus dimulai dengan kelas empat sesudah sekolah desa yang mempunyai tiga tahun ajaran. Tetapi di tempat-tempat yang lebih besar dapat terjadi pembentukan sekolah "vervolg" tiga tahun. Semua kemungkinan itu dapat digarap dalam bagan perbandingan 1:4.

Perhitungan pembiayaan pelaksanaan rencana diajukan dalam lampiran tersendiri. Perhitungannya dibuat mengenai pembiayaan sampai dengan tahun 1949). Disarankan, bahwa teristimewa pada tahun-tahun pertama perlu diadakan perluasan yang berarti. Sebabnya ialah sesudah penghematan pada tahun-tahun krisis tidak ada perluasan yang berarti di daerah-daerah di mana pada tahun 1937 diserahkan urusan penyelenggaraan sekolah. Ketinggalan sangat terasa sehingga dalam keadaan yang demikian itu ribuan calon murid sekolah desa harus ditolak. Ketinggalan itu harus dikejar. Juga perlu untuk mengakhiri keadaan bahwa lebih dari 80 atau 90 murid ditampung dalam satu kelas.

Karena pada tahun-tahun yang pertama terasa keadaan darurat, maka wajar atas dasar perluasan menurut bagan yang diusulkan pengejaran ketinggalan dimulai dengan rencana empat tahun. Pembiayaan harus dipikulkan kepada pemerintah Pusat, terutama di Jawa, karena kecuali beberapa Kotapraja, kesatuan-kesatuan otonomi lokal tidak mempunyai cukup dana untuk dapat melaksanakan dengan sedikit memadai. Tanpa penerobosan sementara mengenai aspek di bidang "hubungan keuangan" rencana itu akan sukar dilaksanakan. Untuk segera menepatkan dana yang diperlukan ke dalam hubungan keuangan tidak mungkin, kata Idenburg. *)

Apabila diakui bahwa sekolah Bumiputera belum cukup tersebar secara normal seperti ternyata adanya buta huruf yang tersebar sangat luas dan kemampuan sangat negatif menampung calon murid yang ingin sekolah, dan jika berpendirian bahwa politik kolonial yang tepat menuntut supaya mayoritas penduduk mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan rendah yang sederhana, maka harus diambil keputusan bahwa perluasan sekolah Bumiputera supaya tersebar secara "normal" harus ditanggulangi di luar rengrengan (bestek) hubungan keuangan seperti yang sudah diatur. Dalam pemikiran ini termasuk pula pemikiran bahwa subsidi pemerintah Pusat untuk tujuan ini harus bersifat sementara dan jika dianggap telah tercapai kapasitas persekolahan yang normal, subsidi itu harus dileburkan ke dalam hubungan keuangan. Dapat juga dipikirkan untuk meleburkannya secara bertahap. Mengenai penyebaran sekolah yang dianggap normal penetapannya belum dapat dikemukakan. Tetapi menurut peraturan umum subsidi, 1 sekolah untuk 1.500 jiwa penduduk. Keadaan masih jauh belum sampai di situ sehingga agaknya prematur untuk

*) Dimulai dengan 1 Januari 1938 diadakan peraturan baru mengenai hubungan perimbangan keuangan dengan kesatuan-kesatuan otonomi di daerah, menggantikan sistim pemberian subsidi dalam jumlah tetap. Menurut peraturan baru itu kesatuan otonomi harus mencari pendapatan dari pungutan pajak dan bagian pendapatan dari sumber-sumber penghasilan Gubernemen (negara), yang ditetapkan persentasenya untuk tiap kesatuan.

membuat ketetapan.

Diusulkan untuk mengatur pemberian subsidi berdasarkan rencana kerja yang disusun tiap tahun untuk tiap kesatuan otonomi dan daerah masing-masing di bawah pimpinan langsung Gubernur. Untuk itu akan diadakan pembicaraan dengan para Gubernur oleh Departemen Pendidikan dan Agama. Rencana kerja itu seyogianya disusun setiap tahun, karena pertama-tama harus ada peluang untuk memenuhi kebutuhan khusus ruangan yang sementara itu timbul, dan selanjutnya setiap daerah dan kesatuan otonomi masing-masing harus dapat diperhatikan aspek keuangannya yang bisa berbeda-beda karena pengaruh gejala-gejala konjungtur tertentu. Sebab sebagai suatu faktor penting pemberian suatu subsidi khusus tidak boleh menjuruskan kesatuan otonomi dan daerah untuk tidak ikut dengan dana sendiri dalam penyediaan dan penyebaran sekolah. Seiring dengan pemberian subsidi harus diadakan pengawasan yang saksama terhadap anggaran belanja Daerah. Dengan sendirinya harus ikut diperhitungkan bahwa di kesatuan otonomi dan daerah, orang akan terlalu mudah untuk mengandalakan perluasan dan penyebaran sekolah lebih lanjut kepada subsidi dari Pusat dan dengan cara demikian menggunakan dana untuk tujuan lain dari pada yang diinginkan. Hal ini tidak tepat, karena jika dibiarkan akan melemahkan keyakinan kepada kewajiban untuk dengan kekuatan sendiri ikut mengambil bagian dalam urusan penting pemerintah. Dalam hubungan ini disarankan bahwa seluruh jumlah dana yang disediakan dalam anggaran belanja pemerintah Pusat dianggap sebagai maksimum, dalam arti bahwa kredit yang tersedia tidak perlu digunakan seluruhnya apabila kesatuan lokal dan daerah dengan dana sendiri mempunyai kemampuan secara memadai. Mengenai pengaturan pemberian subsidi kepada daerah-daerah apakah diperlukan dasar hukumnya, penyelesaian diserahkan kepada Komisaris Pemerintah untuk Pembaharuan Pemerintahan, C.J.H.R. de Waal, karena Idenburg merasa tidak kompeten dalam urusan itu. Dalam hubungan dengan ini disarankan bahwa subsidi pemerintah Pusat untuk penyelenggaraan sekolah Bumiputera disetorkan ke dalam dana khusus yang dibentuk untuk keperluan

itu. Dana ini akan mempunyai keuntungan bahwa pengeluaran yang tidak diperlukan (dipergunakan) dapat dicadangkan untuk tahun berikutnya dan dengan demikian mungkin dapat mengurangi anggaran biaya pemerintah Pusat untuk tahun berikutnya. Sebagai orang yang tidak ahli ia merasa tahu bahwa berkaitan dengan pembentukan dana ada keberatan khusus dalam kebijaksanaan keuangan. Sedangkan perkiraan anggaran lebih rendah untuk tahun berikutnya dalam hubungan dengan masuknya pengurangan oleh daerah-daerah otonomi, tanpa pembentukan dana pun dapat diadakan dengan metode kerja rencana tahunan.

Yang dijadikan patokan ialah subsidi khusus tiap tahun yang dalam anggaran biaya pendidikan diproyeksikan sebagai suatu jumlah global, di mana ditentukan seluruh perluasan sekolah Bumiputera yang dikehendaki. Setelah diadakan pembicaraan dengan para Gubernur, maka diserahkan kepada Gubernur masing-masing penetapan formil jumlah subsidi untuk setiap kesatuan otonomi. Jika diambil keputusan dalam prinsip menurut gagasan yang telah dikemukakan itu dapat dimulai dengan memasukkan mata anggaran global untuk tujuan itu ke dalam anggaran tambahan. Kemudian dapat ditentukan peraturan yang diperlukan untuk membagikan dana tersebut kepada berbagai kesatuan otonomi dan daerah-daerah. Untuk itu masih tersedia cukup waktu.

Sementara itu dapat dilanjutkan mengumpulkan data lokal dan mengadakan pembicaraan dengan para Gubernur mengenai bagaimana melaksanakan pembagian perluasan sekolah desa untuk tahun pertama (1942). Disarankan supaya pada tahun itu dimulai dengan kira-kira 200 sekolah desa untuk daerah di luar Jawa dan Madura, dan kira-kira 800 buah untuk Jawa dan Madura, karena di Jawa dan Madura lebih banyak ketinggalan yang harus dikejar. Di daerah seberang sejak tahun 1937 telah mendapat lebih banyak perluasan. Selanjutnya pertama-tama yang dianggap paling baik ialah bahwa pembagian subsidi diusahakan untuk menghilangkan perbedaan terlalu besar dalam penyediaan sekolah. Jadi untuk selanjutnya terutama harus

ditekankan kepada perluasan pada tempat-tempat yang penyebaran sekolahnya paling sedikit. Di samping itu sudah tentu harus diperhatikan laju masuk yang nyata di sekolah yang ada. Harus selekas mungkin diakhiri keadaan bahwa untuk sekolah desa harus ditolak anak-anak karena alasan sederhana, "tidak ada tempat". Selanjutnya harus diusahakan untuk sedapat-dapatnya memperbaiki keadaan sekolah yang di luar kapasitasnya dibebani terlalu banyak murid untuk tiap kelas.

Jika pemikiran seperti diuraikan di atas disetujui oleh Gubernur Jenderal, dimintakannya supaya ia dikuasakan untuk dalam anggaran tambahan tahun 1940 dan anggaran induk tahun 1941 memasukkan jumlah yang tertera dalam daftar usulan terlampir. Selain itu dimintakan persetujuan untuk mengadakan pembicaraan dengan para Gubernur guna menyusun rencana kerja sementara. Untuk memberikan gambaran mengenai persiapan yang diadakan untuk rencana seperti yang diusulkan, ditambahkan lampiran berupa nota dari P. Koeze, Penasehat untuk Pendidikan Bumiputera yang di dalamnya mengolah banyak data penting mengenai kabupaten-kabupaten di Jawa.

Sebagai rangkuman diajukan kepada Gubernur Jenderal usul-usul sebagai berikut:

- I. Supaya pada prinsipnya disetujui untuk selama paling sedikit 4 tahun dimulai dengan tahun 1942, mendirikan 1.000 sekolah desa tiap tahun, dan mulai dengan tahun 1945 mendirikan 250 sekolah "vervolg".
- II. Supaya diberi kuasa untuk pada anggaran tambahan 1940 dan anggaran induk 1941 memperhitungkan dalam hubungan dengan perluasan sekolah tersebut biaya untuk penyelenggaraan pendidikan guru desa dan guru sekolah "vervolg" (normalis).*)

*) Usul anggaran tambahan tahun 1940 tidak diselesaikan dalam perbincangan dengan Dewan Rakyat. Dalam Anggaran Hindia-Belanda usul anggaran untuk "penyelenggaraan sekolah di daerah-daerah yang pemerintahannya di-desentralisasi dan diperbaharui" ditetapkan sebagai subsidi kepada daerah otonom untuk mendirikan sekolah "normal" 3 buah, agar dapat didirikan 200 sekolah "vervolg", dan untuk mendirikan 40 kursus guru desa supaya dapat

- III. Supaya ditetapkan bahwa dalam peraturan perluasan sekolah tersebut akan diberikan subsidi khusus yang bersifat sementara kepada kesatuan-kesatuan otonomi lokal dan daerah.
- IV. Kepada Komisaris Pemerintah untuk Pembaharuan Pemerintahan dimintakan nasehat mengenai persoalan bagaimana mengatur penyimpangan dalam kebijaksanaan keuangan.
- V. Supaya dikuasakan untuk mengadakan pembicaraan persiapan dengan para Gubernur di propinsi dan Daerah (luar Jawa dan Madura) sesuai dengan tujuan seperti telah dikemukakan dalam uraian di atas.

Penjelasan mengenai daftar usulan dibuat sangat sederhana supaya untuk Dewan Rakyat dapat dibatasi kepada apa yang dapat diputuskan. Pada daftar usulan untuk Anggaran Hindia-Belanda (Indische Begroting) diberi penjelasan sebagai berikut: "Ternyata bahwa daerah-daerah otonom tidak mampu dengan dana yang ditetapkan dalam peraturan mengenai hubungan keuangan, untuk membiayai perluasan sekolah Bumiputera. Diusulkan mengadakan peraturan pemberian subsidi untuk mendirikan 50 kursus untuk pendidikan guru desa, agar

didirikan 800 sekolah desa baru pada tahun 1943. Di sini dibuat catatan bahwa "bukan dalam satu tahun, tetapi dalam beberapa tahun berturut-turut didirikan 800 sekolah desa dan 200 sekolah 'vervolg' setiap tahun". Jumlah ini menurut pemerintah kira-kira sudah maksimum daripada yang dapat diwujudkan dalam tiap tahun, jika ditinjau dari segi organisatoris dan teknis pendidikan dan harus mempertimbangkan bahwa di berbagai daerah di Hindia-Belanda keinginan untuk menyekolahkan anak masih laten. Di samping itu ditambahkan bahwa oleh daerah otonom yang keuangannya kuat dapat dilanjutkan untuk dengan dana sendiri mengadakan perluasan sekolah. Menurut laporan yang diberikan kepada Dewan Rakyat dalam tahun ajaran 1940-1941 seluruhnya didirikan 272 sekolah desa dan 75 sekolah "vervolg". Dalam perbincangan Anggaran Hindia-Belanda, pemerintah menjanjikan jika ternyata mungkin mendirikan lebih dari 40 kursus tanpa membahayakan tingkatan pendidikan di sekolah desa, akan dipertimbangkan untuk

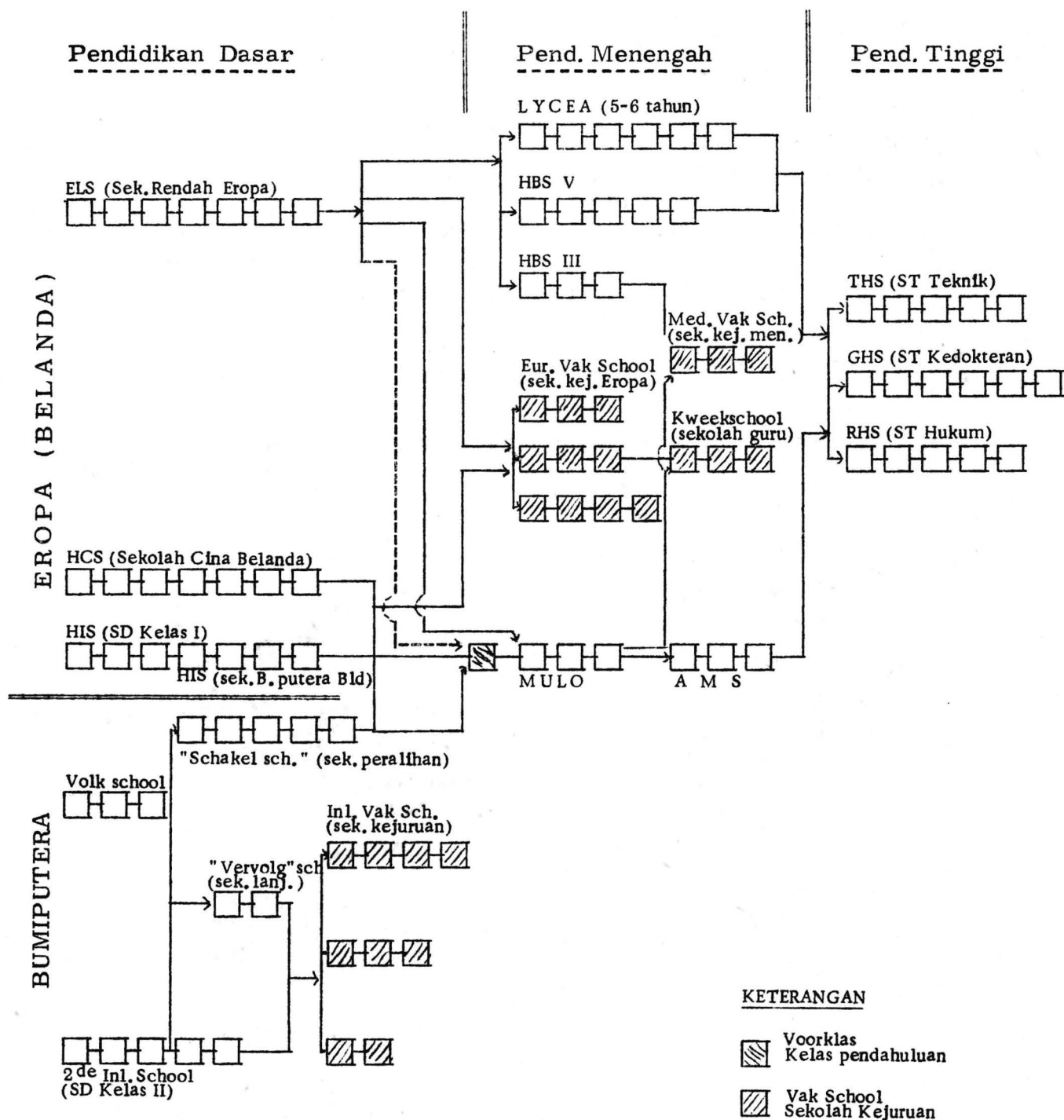
memungkinkan pendirian 1.000 sekolah desa pada tahun 1943 dan pemberian subsidi untuk mendirikan 5 sekolah 'normal' agar memungkinkan pendirian 250 sekolah 'vervolg' dalam tahun 1945".**)

minta persetujuan Dewan Rakyat, supaya diberikan kredit baru pada anggaran tambahan. Dengan anggaran tambahan 1941 masih disediakan 10 kursus guru desa. Dalam kerangka rencana "penerobosan" selanjutnya pada permulaan tahun ajaran 1941-1942 sudah dapat dibuka 32 sekolah "vervolg" di daerah-daerah yang pemerintahannya di-desentralisasi dan diperbaharui, ketika ternyata untuk itu tersedia cukup guru kaum normalis atau tamatan sekolah normal.

****)** Rencana penerobosan perluasan sekolah ini tidak sempat dilaksanakan, karena kedahuluan oleh pendudukan Balatentara Jepang (-penyadur-).

Lampiran I

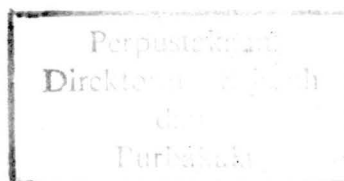
SISTIM PERSEKOLAHAN JAMAN HINDIA-BELANDA



Lampiran II

DAFTAR MENTERI URUSAN DAERAH JAJAHAN 1900-1940

J.T. Cremer	27- 7-1897 sampai 1- 8-1901
Jhr. Mr. T.A.J.van Asch van Wijck	1- 8-1901 sampai 9- 9-1902
J.W. Bergansius, a.i.	10- 9-1902 sampai 25- 9-1902
A.W.F. Idenburg	25- 9-1902 sampai 16- 8-1905
Mr. D.Fock	17- 8-1905 sampai 11- 2-1908
Mr. Th.Heemskerk, a.i.	12- 2-1908 sampai 20- 5-1908
A.W.F. Idenburg	20- 5-1908 sampai 16- 8-1909
J.H. de Waal Malefijt ;	16- 8-1909 sampai 29- 8-1913
Mr. Th.B.Pleijte	29- 8-1913 sampai 9- 9-1918
A.W.F. Idenburg	9- 9-1918 sampai 13-11-1919
N. de Graaff	13-11-1919 sampai 4- 8-1925
H. Colijn, a.i.	4- 8-1925 sampai 26- 9-1925
Ch. J.I.M. Welter	26- 9-1925 sampai 8- 3-1926
Dr. J.C. Koningsberger	8- 3-1926 sampai 10- 8-1929
S. de Graaff	10- 8-1929 sampai 26- 5-1933
Dr. H.Colijn	26- 5-1933 sampai 24- 6-1937
Ch. J.I.M. Welter	24- 6-1937 sampai 25- 7-1939
C. van den Bussche	25- 7-1939 sampai 10- 8-1939
Ch. J.I.M. Welter	10- 8-1939 sampai 20-11-1941



DAFTAR GUBERNUR JENDERAL HINDIA-BELANDA

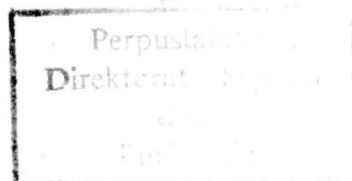
1900-1940

W. Rooseboom	3-10-1899	sampai	1-10-1904
J.B. van Heutz	1-10-1904	sampai	18-12-1909
A.W.F. Idenburg	18-12-1909	sampai	21- 3-1916
Mr. J.P.graaf van Limburg Stirum	21- 3-1916	sampai	24- 3-1921
Mr. D.Fock	24- 3-1921	sampai	7- 9-1926
Jhr. Mr. A.C.D.de Graeff	7- 9-1926	sampai	12- 9-1931
Jhr. Mr. B.C.de Jonge	12- 9-1931	sampai	17- 9-1936
Jhr. Mr. A.W.L.Tjarda van Starkenborgh Stachouwer	17- 9-1936	sampai	8- 3-1942

DAFTAR KETUA DEWAN HINDIA BELANDA

1900-1940

Mr. Th. H.de Meester	diangkat	27- 5-1898
P.M.L. de Bruyn Prince	diangkat	24- 9-1904
Jhr. O.van der Wijck	diangkat	29- 9-1905
D.F.W. van Rees	diangkat	24- 4-1908
J.B. van der Houven van Ooort	diangkat	3- 9-1914
Jhr. Mr. A.C.D.de Graeff	diangkat	2- 1-1917
H.N.A. Swart	diangkat	2- 9-1918
Dr. E.Moresco	diangkat	25- 2-1922
W. Frijling	diangkat	9-11-1923
Mr. K.F.Creutzberg	diangkat	3-11-1924
Ch. J.I.M. Welter	diangkat	10-10-1929
C.W. Bodenhausen	diangkat	4- 3-1931
Dr. J.W. Meyer Ranneft	diangkat	26- 4-1933
C. van den Bussche	diangkat	23- 6-1936
Mr. H.J. Spit	diangkat	21-11-1938

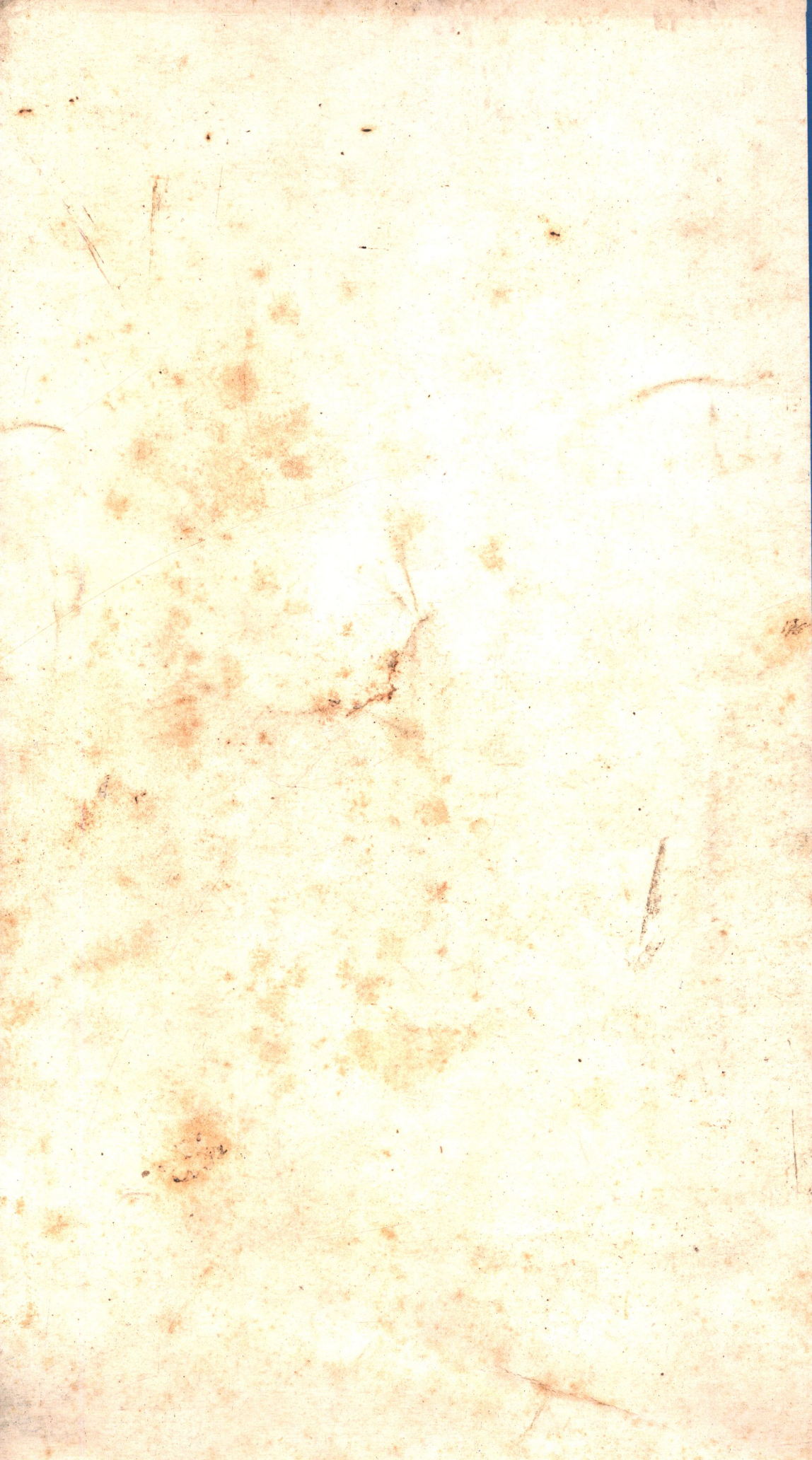


Lampiran III

DAFTAR DIREKTUR PENDIDIKAN, AGAMA, (DAN KERAJINAN)

1900-1940

Mr. J.H. Abendanon	4- 3-1900	sampai	4-3-1905
A.J.G.A. Wiemans, (Pj) Secr.dept. O.E. en N.	4- 3-1905	sampai	15- 8-1905
Mr. J.G. Pott	15- 8-1905	sampai	3- 5-1908
Mr. dr. M.S. Koster	3- 5-1908	sampai	3- 1-1912
Dr. G.A.J. Hazeu	3- 1-1912	sampai	3-12-1914
Dr. E. Moresco (Pj)	3-12-1914	sampai	18-12-1916
Mr. K.F. Creutzberg	18-12-1916	sampai	6- 3-1922
J.F.W. van der Meulen, onderdir. (Pj)	6- 3-1922	sampai	19- 7-1923
Mr. K.F. Creutzberg	19- 7-1923	sampai	-11 1923
P. de Man (Pj)	-11-1923	sampai	2- 2-1924
J.F.W. van der Meulen	2- 2-1924	sampai	2-12-1925
P. de Man, onderdir. (Pj)	2-12-1925	sampai	24- 3-1926
J. Hardeman	24- 3-1926	sampai	6- 5-1929
Dr. B.J.O. Schrieke	6- 5-1929	sampai	16- 5-1934
Dr. A.D.A. de Kat Angelino	16- 5-1934	sampai	31- 5-1937
Dr. P.J.A. Idenburg	31- 5-1937	sampai	15- 5-1940
Prof.Dr. Pangeran A. Hoesein Djaja- diningrat (Pjs)	15- 5-1940	sampai	28- 5-1941



Perp
Je